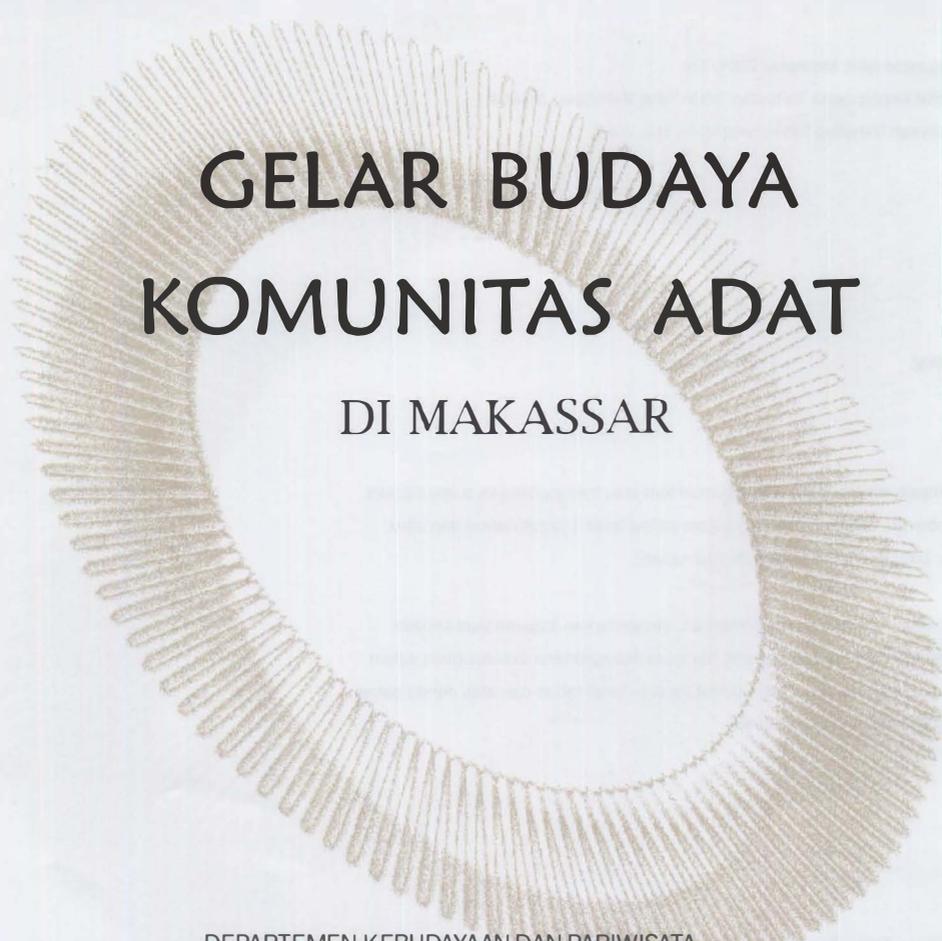


# GELAR BUDAYA KOMUNITAS ADAT



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA  
DIREKTORAT JENJERAN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM  
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
2007



**GELAR BUDAYA  
KOMUNITAS ADAT  
DI MAKASSAR**

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM  
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
2007

Gelar Budaya Komunitas Adat, Makassar 2007/Tim  
Penyusun Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Jakarta:  
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2007.

ix + 131 hlm. 21 cm

ISBN 978-979-16071-8-6

1. Gelar Budaya Prosiding I. Tim Penyusun

Pasal 44

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan ijin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
Kompleks Depdiknas Gedung E Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10110  
Telp. +62 21 5725547 Fax. + 62 21 5725045

# GELAR BUDAYA KOMUNITAS ADAT

DI MAKASSAR

*Penanggung Jawab*  
Drs. Sulistyo Tirtokusumo, MM.

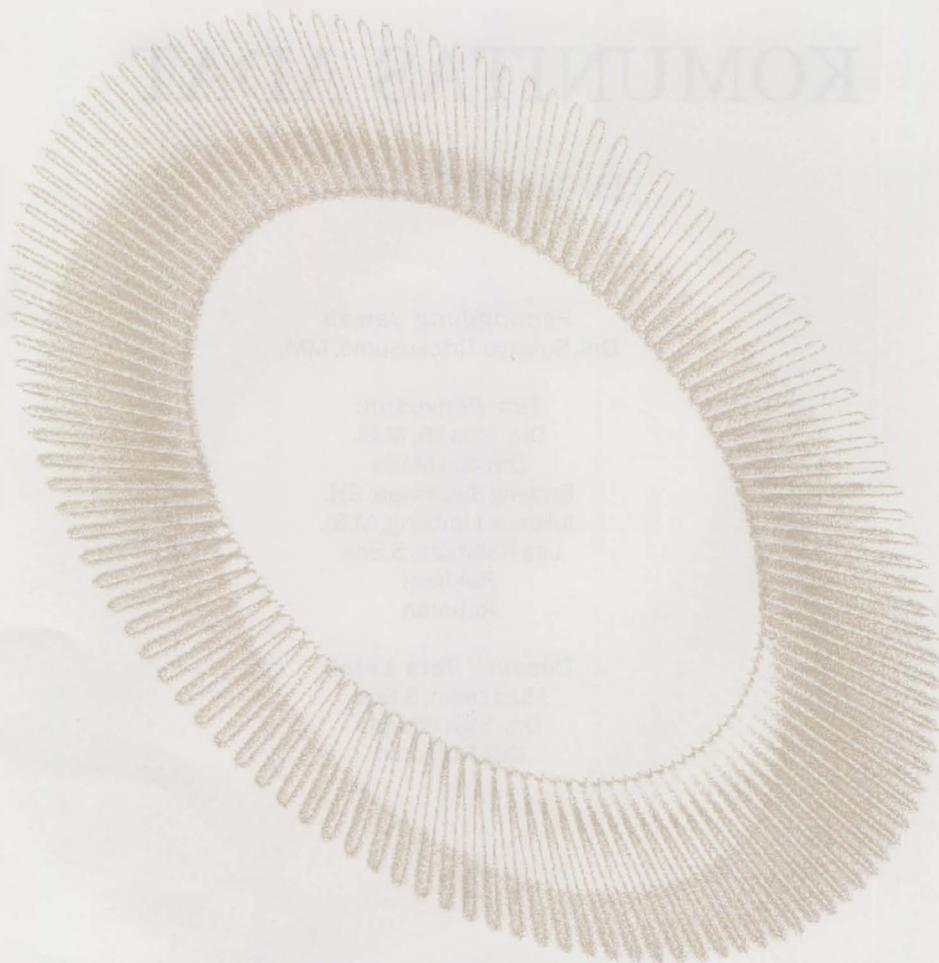
*Tim Penyusun:*  
Dra. Istiasih, M.Si.  
Dra. Siti Maria  
Endang Susilowati, SH.  
Julianus Limbeng, M.Si.  
Lita Rahmiati, S.Sos.  
Rokheni  
Rahman

*Desain - Tata Letak*  
Muchtadin, S.Sos.  
Drs. Sigit Widodo  
Drs. Purnomo

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM  
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA  
2007

# GELAR BUDAYA

## KOMUNITAS



## ... PENGANTAR ...



*D*irektorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pada tanggal 24 s.d 26 Juli 2007 bertempat di Monumen Mandala, Makassar, telah menyelenggarakan Gelar Budaya Komunitas Adat yang diikuti peserta dari unsur: Tokoh Adat, Tokoh Agama, Budayawan, Ilmuwan, Lembaga Adat, Organisasi Penghayat dan Instansi terkait.

Kegiatan-kegiatan dalam Gelar Budaya Komunitas Adat meliputi, Pawai Budaya, Pergelaran Seni, Pameran dan Bazar, Dialog Budaya dan Pemutaran Film tentang kebudayaan dengan tujuan untuk memperkenalkan keragaman budaya komunitas adat.

Dalam usaha penyebarluasan informasi kepada masyarakat maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menyusun dan menerbitkannya dalam bentuk Buku Gelar Budaya Komunitas Adat.

Melalui penerbitan dan penyebaran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang Komunitas Adat dengan segala keragaman budayanya.

Jakarta, September 2007  
Ketua Penyelenggara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Istiasih'.

Istiasih



## ... Sekapur Sirih ...



Sudah sepantasnyalah kita bersyukur, karena kita telah diberikan kekayaan budaya khususnya komunitas adat yang memiliki sistem nilai yang tak ternilai harganya untuk dapat dipelajari, diteliti, dikaji, bahkan dapat direfleksikan dalam sistem nilai budaya bangsa atau bahkan jika memungkinkan dapat diterapkan sebagai sumber nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kekayaan ini merupakan kekayaan yang patut kita pelihara bersama.

Di era globalisasi yang menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang sarat dengan perubahan yang berlangsung secara cepat, keberadaan komunitas adat dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus dipertahankan dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Gelar Budaya Komunitas Adat yang diselenggarakan pada tanggal 24 - 26 Juli 2007 di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkenalkan komunitas adat ke masyarakat luas agar komunitas adat tersebut dapat lebih mantap dan eksis berperan sebagai pelestari kebudayaan lokal. Disamping itu, juga dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan komunitas adat dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal yang ada pada komunitas adat tersebut, serta mendukung pengembangan obyek wisata budaya di Indonesia.

Kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat telah terselenggara, dan salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah mewujudkan hasil-hasil kegiatan tersebut dalam bentuk buku. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita.

Jakarta, September 2007.

Direktus Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Drs. Sulistyono Tirtokusumo, MM.

# DAFTAR ISI

PENGANTAR

SEKAPUR SIRIH

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

GELAR BUDAYA KOMUNITAS ADAT

PEMBUKAAN

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

PELAKSANAAN

PAWAI BUDAYA

PAMERAN

PERGELARAN SENI

DIALOG BUDAYA

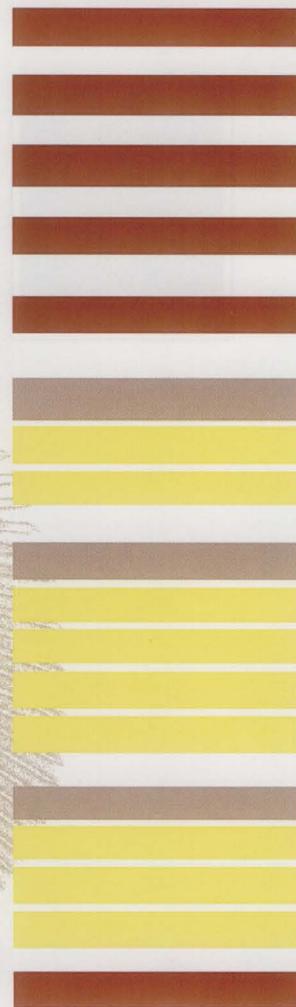
HASIL

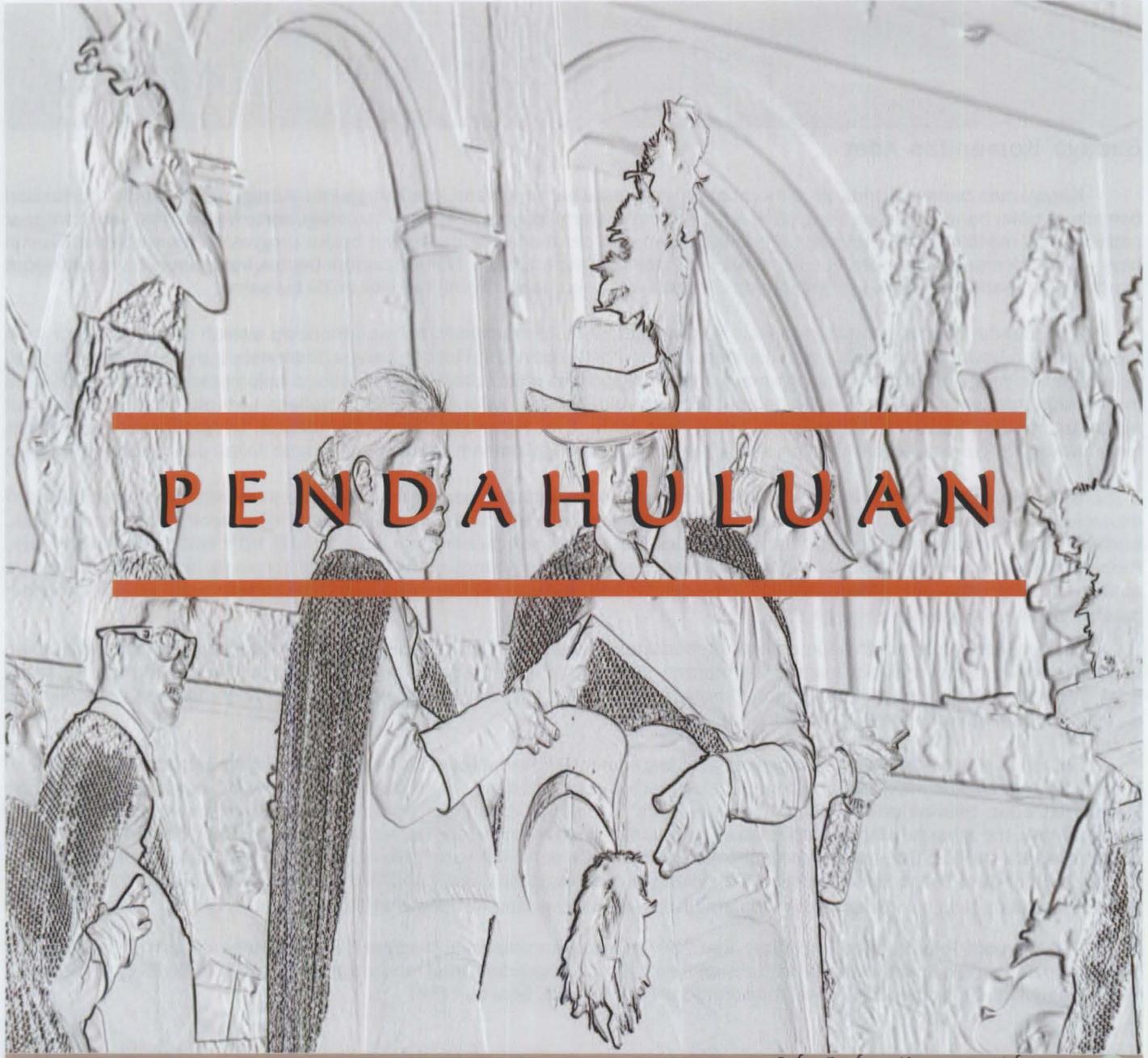
RUMUSAN DIALOG

PESAN-KESAN

KLIPING

PENUTUP





# PENDAHULUAN

# Pendahuluan

## Budaya Komunitas Adat

Keragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu hal yang patut kita banggakan. Keragaman ini dapat dilihat dari banyaknya suku bangsa, ras, bahasa, seni, adat-istiadat, sistem kepercayaan dan atau religi, serta sistem nilai yang terdapat pada masing-masing budaya tersebut. Perkembangan dan perubahan budaya yang begitu progressif, menyebabkan susah bagi kita untuk menemukan keragaman tersebut, khususnya di perkotaan. Namun bentuk-bentuk keragaman ini masih dapat kita temukan pada kelompok komunitas adat, karena ada sejumlah ciri yang mereka miliki bersama.

Para pendiri negara-bangsa Indonesia sudah sejak semula menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman yang dimilikinya. Keberagaman yang dimaksud bisa dilihat dari realitas berbagai kelompok komunitas adat atau masyarakat adat yang dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun penganut ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman ini membentuk adaptasi suatu komunitas terhadap lingkungan atau ekosistemnya, sehingga memiliki berbagai macam kearifan lingkungan (lokal) dan mode produksinya

Komunitas adat atau sering juga disebut dengan masyarakat adat merupakan kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, serta turun-temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teritori tersendiri. Dan komunitas adat sendiri sangat beragam, baik tempat, adat istiadat dan budayanya. Keragaman budaya tersebut satu sisi dapat diartikan sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, namun disatu sisi juga apabila kita tidak dapat memelihara daya hidupnya dengan baik, maka ia akan menjadi tantangan bahkan bisa menjadi hambatan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Namun jika pemahaman sepihak akan kebudayaan sebuah komunitas adat karena ketidaktahuan masyarakat akan kebudayaannya, dapat menjadi malapetaka karena persepsi yang berbeda. Disamping itu juga jika kebudayaan tersebut tidak dapat terpelihara dengan baik, maka keragaman kebudayaan yang kita banggakan itu akan punah dan tidak dikenali lagi, dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Sebagai unsur budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, seyogianya kebudayaan komunitas adat diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kegiatan itu dapat menjadi acuan kerja dalam upaya melestarikan kebudayaan komunitas adat, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap komunitas adat, menumbuhkembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan pemahaman keberagaman budaya Indonesia. Dalam rangka itulah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film yang pelaksana teknisnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermaksud menyelenggarakan kegiatan GELAR BUDAYA KOMUNITAS ADAT Tahun 2007, dengan tema "Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Rangka Pembangunan Kebudayaan Bangsa".

Pelaksanaan Gelar Budaya Komunitas Adat 2007 merupakan salah satu program Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang didasarkan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2007 No.0615.0/040-01.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2007 Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film



## Tujuan

Gelar Budaya Komunitas Adat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkenalkan ke masyarakat luas agar komunitas adat tersebut dapat lebih mantap, eksis berperan sebagai pelestari kebudayaan lokal. Disamping itu, juga dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan komunitas adat serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal yang ada pada komunitas adat tersebut, serta mendukung pengembangan obyek wisata budaya di Indonesia.

Ada beberapa hal yang terkait dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Pertama, adanya rekomendasi dari dialog untuk ditindaklanjuti; kedua, masukan dari kesan dan pesan dari pengunjung yang hadir dalam kegiatan pameran dan pertunjukan seni; dan ketiga pengenalan lebih mendalam bagi masyarakat dengan adanya pawai budaya.

Disamping itu juga diharapkan akan tersusunnya bahan kebijakan pelestarian komunitas adat sebagai tindak lanjut/realisasi adanya masukan yang tertuang dalam

## Materi

Kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat di Makassar tahun 2007 dilaksanakan dengan lima agenda acara, yaitu pawai budaya, pertunjukan seni, pameran, dialog budaya dan pemutaran film dokumenter tentang kebudayaan. Kegiatan pawai budaya diikuti oleh komunitas adat dari berbagai provinsi dan dilepas oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, yang berangkat dari Mandala dan berakhir di Benteng Rotterdam.

Demikian juga dengan pertunjukan seni diadakan selama dua malam di *open stage* Tugu Mandala. Kesenian yang dipertunjukkan dari berbagai provinsi di Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Dalam kegiatan ini juga diadakan pameran dan bazaar yang diikuti oleh komunitas adat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UPTD Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kota Makassar, serta organisasi Penghayat. Pameran yang dipamerkan adalah produk dan benda-benda yang terkait dengan komunitas adat, hasil kerajinan, foto-foto, serta potensi budaya dari masing-masing peserta.



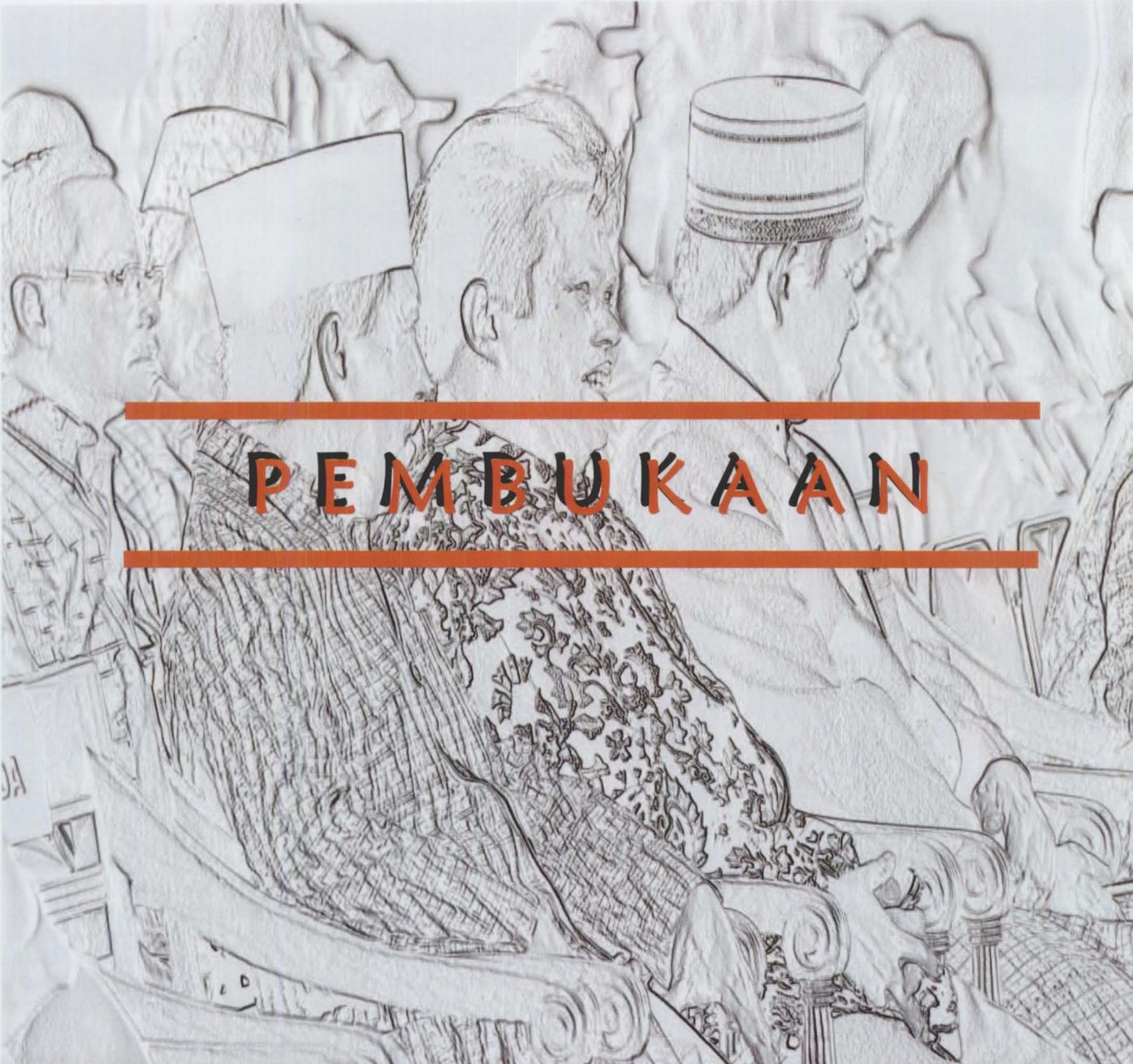


Selain itu, dalam kegiatan Dialog Budaya, topik yang diangkat adalah kebijakan pemerintah tentang keberadaan komunitas adat, pelestarian nilai budaya komunitas adat, pelestarian alam dan lingkungan, eksistensi kepercayaan komunitas adat dan pemberdayaan komunitas adat, lembaga adat dan hak ulayat. Peserta dialog terdiri dari 30 provinsi.

Keragaman budaya sebenarnya sangat dinamis, tidak ada budaya yang statis, tidak mengalami perkembangan dan perubahan. Meskipun terus mengalami perubahan, namun masih ada unsur-unsur inti yang relatif tidak berubah atau sedikit berubah karena merupakan core dari kebudayaan tersebut terutama pada unsur sistem nilainya. Salah satu kesatuan sosial yang cenderung masih tetap mempertahankan core culture adalah komunitas adat yang keberadaannya tersebar di berbagai tempat. Mereka masih 'patuh' pada sistem nilai budaya warisan nenek moyangnya, dengan memperlakukannya sebagai pedoman dalam berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Sekarang sering dikatakan bahwa keberagaman, kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan budaya adalah aset bangsa. Bukan karena dapat dijual sebagai obyek wisata, tapi lebih karena menyimpan khazanah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, yakni pengetahuan tradisional dan kearifan lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi penurunan daya dukung lingkungan masa sekarang. Namun demikian keragaman yang membanggakan itu kalau tidak dijaga dan tidak diperkenalkan kepada masyarakat luas, maka dapat memunculkan definisi atau pemahaman sepihak, sehingga keberadaan komunitas adat dapat dianggap sebagai 'keterbelakangan' atau 'ketertinggalan'. Padahal jika ditinjau dari relativisme kebudayaan dan kelestarian budaya, komunitas adat merupakan salah satu pelaku aktif pelestari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang jika diapresiasi dan diserap dengan baik dapat menjadi sumber inspirasi bagi inovasi pelestarian kebudayaan secara luas.





**PEMBUKAAN**

# Pembukaan

● Pelemparan Bola Raga Oleh Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film



Gelar Budaya Komunitas Adat yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Juli 2007 di Makassar diikuti oleh peserta dari 30 provinsi. Kegiatan ini meliputi Pawai Budaya, Pameran, Pergelaran Seni, Dialog Budaya dan Pemutaran Film yang menunjukkan keragaman budaya Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembukaan pada pukul 15.00 WITA di pelataran depan Monumen Mandala oleh Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dr. Mukhlis PaEni dan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Drs. H. Saleh Rajab, M.Si, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ditandai pelemparan bola raga. Pembukaan dihadiri oleh seluruh peserta, tamu undangan, pelajar dan masyarakat Makassar.





Dari Kiri ke Kanan:

Dirjen NBSF, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepala Dinas Budpar Sulsel, dan Direktur Kesenian sedang mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara pembukaan Gelar Budaya Komunitas Adat 2007 di Makassar.

## Gubernur Sulawesi Selatan

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

*Selamat Sore dan Salam Sejahtera untuk kita semua*

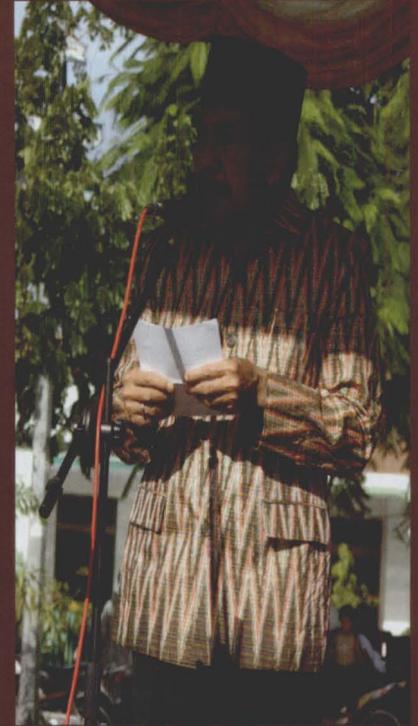
*Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Inayahnya jualah, kita semua memperoleh kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyaksikan acara Gelar Budaya Komunitas Adat tahun 2007 yang akan dimeriahkan dengan Pawai Budaya Pameran, Pergelaran Seni dan Dialog Budaya, yang sebentar lagi kita sama-sama saksikan di Monumen Mandala sebagai tempat pelaksanaan Gelar Budaya Komunitas Adat.*

*Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta terutama yang datang dari luar Sulawesi Selatan serta ucapan terima kasih karena dipilihnya Sulawesi Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Gelar Budaya Komunitas Adat, semoga suasana Sulawesi Selatan dapat menjadikan Kegiatan Gelar Budaya ini berkesan dan dapat berjalan lancar serta sukses seperti yang diharapkan.*

*Hadirin yang saya hormati .....*

*Kebudayaan suatu bangsa adalah jati diri bangsa itu, tinggi rendahnya budaya bangsa akan dapat menentukan tinggi rendahnya martabat bangsa itu dihadapan bangsa-bangsa lain. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budaya masing-masing dan mempunyai budaya yang beraneka ragam, menunjukkan wajah budaya masyarakat yang majemuk, demikian pula adanya suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan. Namun karena adanya benang merah antara rumpun yang ada, maka kemajemukan tersebut berubah menjadi mozaik yang indah, ibarat pelangi yang memiliki keajaiban dan keunikan aneka warna.*

*Kebudayaan Sulawesi Selatan diwarnai oleh tiga suku bangsa yaitu : suku Bugis, Makassar dan Tator yang memiliki keanekaragaman sosial budaya, komunitas adat, bahasa, adat istiadat dan kearifan lokal. Keanekaragaman sosial budaya tersebut akan menjadi modal bangsa yang besar dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dapat ditata dan dikelola secara baik dan benar.*



Drs. H. Saleh Rajab, M.Si,  
(Asisten I Sekda)  
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan

“

*...Komunitas adat yang tersebar di pelosok daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur keanekaragaman sosial budaya Indonesia sekaligus merupakan wujud dari sistem nilai budaya, memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis...*

Dalam setiap komunitas adat, betapapun sederhananya komunitas adat tersebut senantiasa memiliki sejumlah nilai budaya, antara nilai budaya yang satu dengan nilai budaya yang lain memiliki kaitan yang erat sehingga membentuk suatu sistem nilai, sistem nilai itu selanjutnya menjadi pedoman dan konsep-konsep ideal dalam kebudayaan dan menjadi pedoman yang kuat terhadap arah kehidupan bermasyarakat.

Komunitas adat yang tersebar di pelosok daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur keanekaragaman sosial budaya Indonesia sekaligus merupakan wujud dari sistem nilai budaya, memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis.

Kebudayaan dari waktu ke waktu mengalami pergeseran nilai-nilai yang melahirkan gagasan baru, oleh karena itu perkembangan kebudayaan perlu diarahkan agar tetap berakar pada jati diri dan karakteristik lokal, sementara hasil-hasil kebudayaan masa lampau tetap terpelihara dan lestari yang mengandung nilai-nilai luhur yang tinggi.

Hadirin yang saya hormati .....

Komunitas adat yang berasal dari berbagai etnis yang tersebar di kepulauan Nusantara yang memiliki keanekaragaman budaya menunjukkan identitas lokal yang berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas adat lainnya, namun hanya satu tujuan yaitu : memelihara dan menjaga nilai-nilai budaya luhur. Nilai-nilai budaya luhur tersebut kini merupakan potensi yang telah lama terpendam oleh arus perkembangan modernisasi, penerapan nilai-nilai budaya pada komunitas adat dalam menjawab tantangan yang telah dicoba sejak dahulu meskipun dengan pemahaman sederhana, namun selalu ampuh untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemerintah menyadari bahwa keberadaan komunitas adat memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memandang sebagai mitra dalam menggerakkan pembangunan terutama pembangunan di bidang kebudayaan. Kebudayaan jangan hanya diartikan sebagai suatu bentuk peninggalan masa lampau yang direduksi ke dalam seni budaya dan tradisi-tradisi lokal, karena pembangunan kebudayaan lebih dimaksudkan sebagai pembangunan karakter dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadirin yang saya hormati .....

Pemerintah Sulawesi Selatan bertekad untuk meningkatkan pembangunan menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mempertahankan kelangsungan hidup komunitas adat untuk lebih aktual dan menjadikan salah satu unsur pelaku pembangunan yang potensial dan handal bagi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menaruh harapan dan mengajak seluruh pemangku adat, budayawan, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat agar Gelar Budaya Komunitas Adat ini berhasil membuahkan suatu kesepakatan untuk kita bersama-sama melestarikan, mengembangkan serta memberdayakan komunitas adat, sebagai potensi pembangunan daerah, khususnya di bidang pembangunan kebudayaan pariwisata serta menjadikan salah satu destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

Hadirin yang saya hormati .....

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara Gelar Budaya Komunitas Adat, Semoga Sukses, dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati setiap niat suci dan langkah baik kita.

Terima kasih,

Wassalam,

H.M. Amin Syam



Dr. Mukhlis PaEni  
Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film

“

...Kita semua mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa termasuk didalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam aspek kehidupan komunitas adat tersebut dalam upaya memajukan kebudayaan untuk menuju kemajuan adab, masyarakat demokratis dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia...

## Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

*Yang saya hormati,*

- Saudara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- Para Pejabat Instansi Terkait
- Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
- Para Bupati dan Saudara Walikota Makassar
- Tokoh Masyarakat
- Seluruh peserta dan hadirin semua

*Assalamu Alaikum Wr Wb  
Salam Sejahtera*

*Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta Gelar Budaya Komunitas Adat, yang didalamnya akan di isi dengan berbagai kegiatan seperti : Dialog, Pameran, Pergelaran Seni dan Pawai Budaya.*

*Gelar tahun ini merupakan Gelar Budaya Komunitas Adat yang ketiga kalinya setelah yang pertama di Yogyakarta dan kedua di Bali.*

*Para hadirin yang kami hormati,*

*Satu kenyataan bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki keanekaragaman budaya yang tumbuh sebagai usaha budi rakyat Indonesia dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan peradaban dunia. Salah satu unsur kebudayaan bangsa yang masih hidup dan berkembang dapat dijumpai dalam komunitas adat yang ada di setiap etnis dan suku bangsa di Indonesia.*

*Komunitas adat dengan segala aspek kehidupannya seperti sistem sosial, sistem kepemimpinan, sistem keyakinan, sistem mata pencaharian dan lain-lain adalah merupakan wujud budaya, sehingga menjadi bagian dari kebudayaan bangsa yang perlu dilakukan pembinaan dan upaya pelestariannya yang mengandungi pengertian melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.*

Para hadirin yang kami muliakan

Didalam setiap budaya kita, yaitu budaya Indonesia yang bhineka ini, didalamnya terdapat apa yang sering disebut dengan istilah *local wisdom* atau kearifan budaya setempat/lokal. Berbagai kearifan yang terdapat di dalam setiap budaya itu, selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan dengan sesama hidup kita, bukan hanya sesama manusia tetapi juga dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk lain serta alam.

Kearifan ini dirangkum dalam berbagai cara dalam bentuk upacara, ritual dan perilaku harian. Walaupun cara merangkum kearifan tersebut berlainan, namun isinya sama yaitu *bersimbiose mutualistis* dengan lingkungan dan sesama hidupnya. Wadah-wadah penyalur kearifan itu salah satunya ada pada komunitas adat yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

Dalam kerangka "Negara Kesatuan Republik Indonesia", diharapkan komunitas adat dapat menyebarkan berbagai kearifan dimaksud kepada para masyarakat pendukungnya dan lingkungannya untuk dapat hidup penuh kearifan.

Kearifan-kearifan lokal itu pada dasarnya merupakan nilai-nilai budaya yang menjadi penanda jati diri bangsa. Oleh karena itu, beban tugas yang amat berat yang diletakkan pada Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah bagaimana menjaga dan memperkokoh jati diri bangsa dalam situasi seperti saat ini.

Hadirin yang kami hormati

Berada di tengah-tengah gelombang globalisasi dan dalam kondisi kritis ini, tidak berarti komunitas adat tersebut dibiarkan bergeser, tetapi justru perlu diaktualisasi dalam rangka memperkokoh pertahanan budaya bangsa.

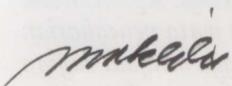
Oleh karena itu melalui gelar budaya komunitas adat ini, baik melalui dialog, pameran, pawai budaya dan pertunjukan seni kami mengajak seluruh hadirin untuk mau menerima berbagai masukan dengan sikap kritis dan memberikan interpretasi dan modifikasi terhadap nilai-nilai budaya yang telah lama di miliki dengan nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Para hadirin yang kami hormati

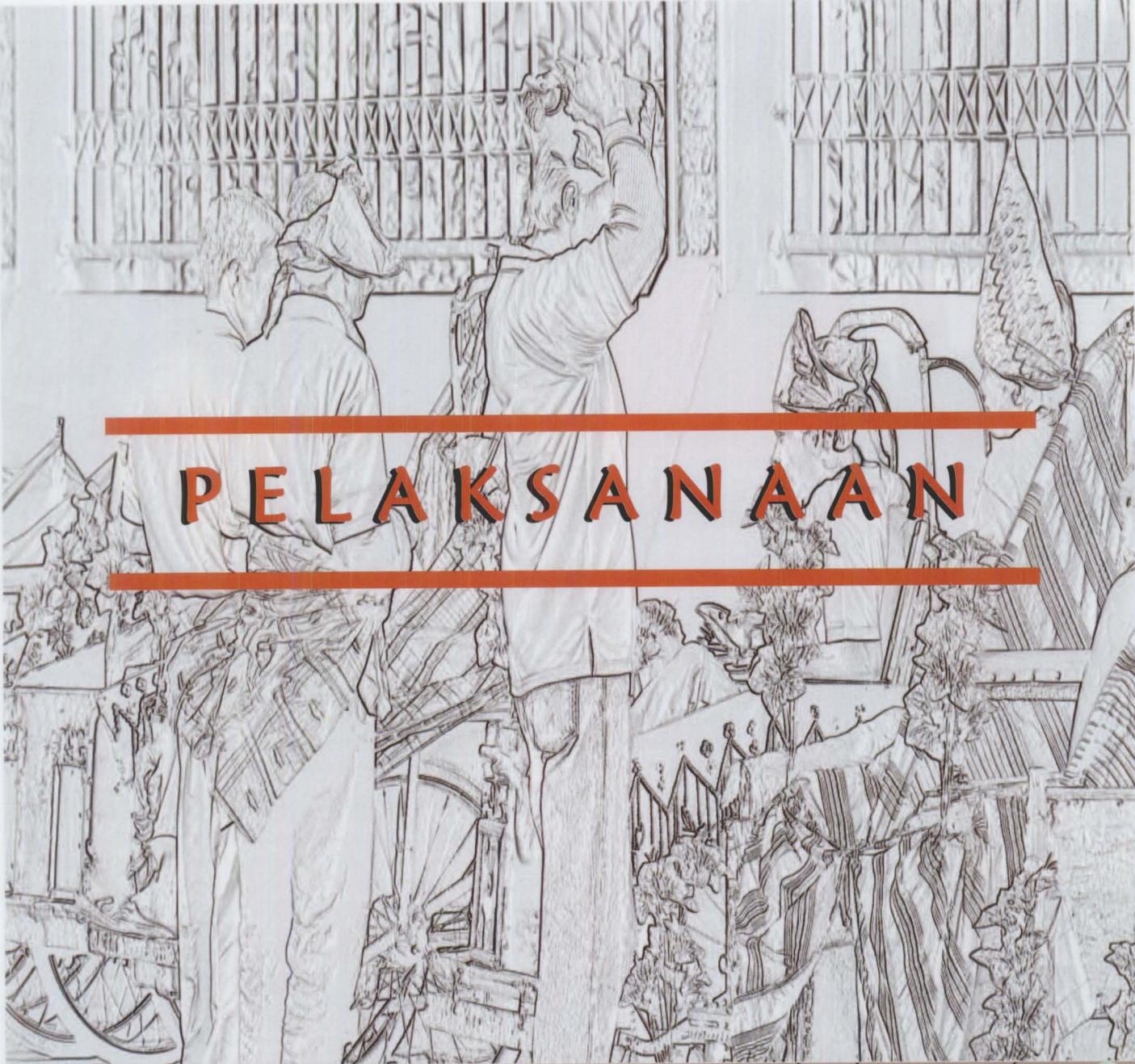
Kita semua mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa termasuk didalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam aspek kehidupan komunitas adat tersebut dalam upaya memajukan kebudayaan untuk menuju kemajuan adab, masyarakat demokratis dan persatuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Demikian melalui Gelar Budaya Komunitas Adat ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terutama seluruh peserta dan dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Nilai budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

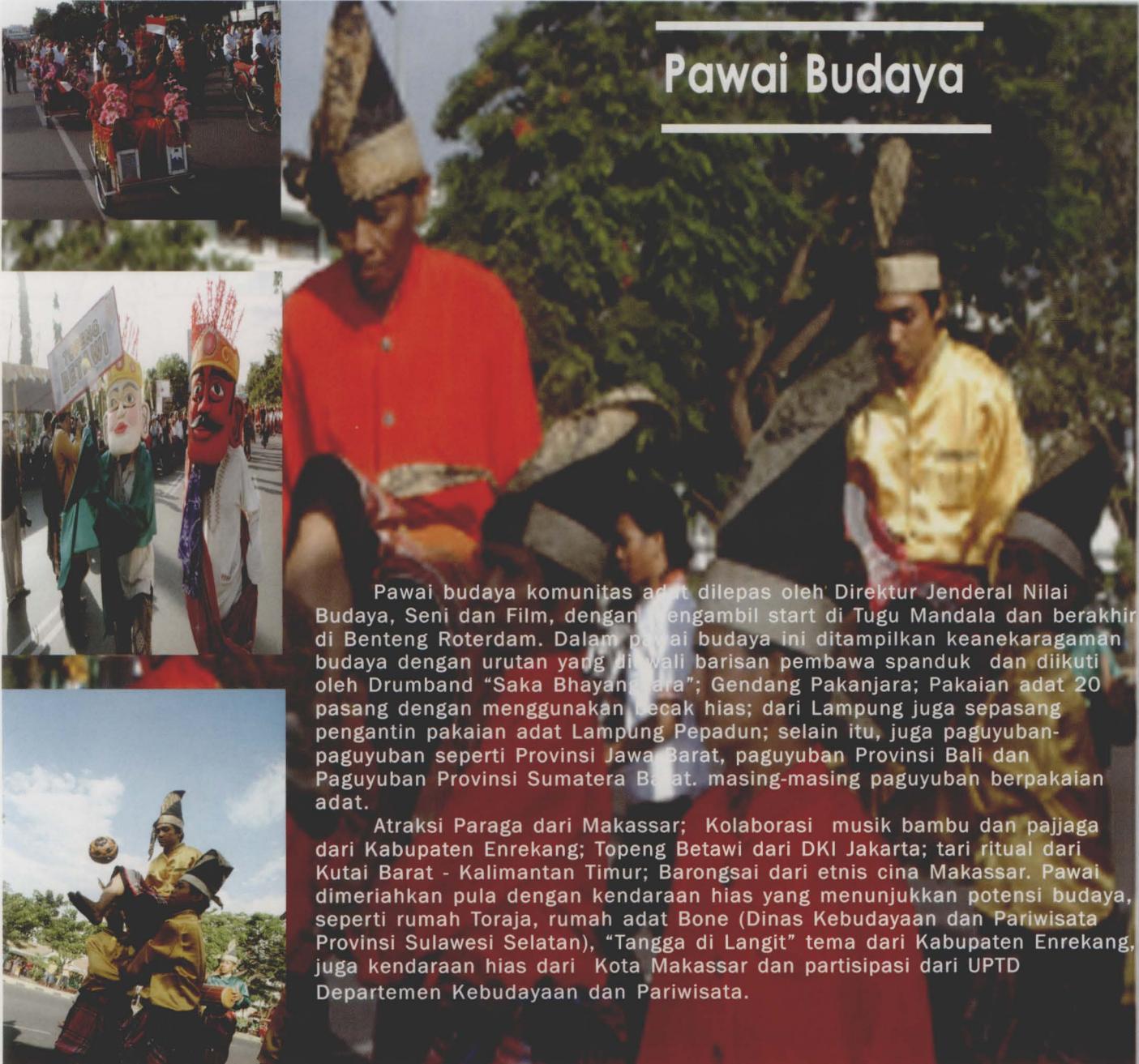
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera



Dr. Mukhlis Pa'eni



# PELAKSANAAN



## Pawai Budaya

Pawai budaya komunitas adat dilepas oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, dengan mengambil start di Tugu Mandala dan berakhir di Benteng Rotterdam. Dalam pawai budaya ini ditampilkan keanekaragaman budaya dengan urutan yang diawali barisan pembawa spanduk dan diikuti oleh Drumband "Saka Bhayangkara"; Gendang Pakanjara; Pakaian adat 20 pasang dengan menggunakan pecak hias; dari Lampung juga sepasang pengantin pakaian adat Lampung Pepadun; selain itu, juga paguyuban-paguyuban seperti Provinsi Jawa Barat, paguyuban Provinsi Bali dan Paguyuban Provinsi Sumatera Barat. masing-masing paguyuban berpakaian adat.

Atraksi Paraga dari Makassar; Kolaborasi musik bambu dan pajjaga dari Kabupaten Enrekang; Topeng Betawi dari DKI Jakarta; tari ritual dari Kutai Barat - Kalimantan Timur; Barongsai dari etnis cina Makassar. Pawai dimeriahkan pula dengan kendaraan hias yang menunjukkan potensi budaya, seperti rumah Toraja, rumah adat Bone (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan), "Tangga di Langit" tema dari Kabupaten Enrekang, juga kendaraan hias dari Kota Makassar dan partisipasi dari UPTD Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.



---

Masing-masing peserta pawai budaya  
menunjukkan kekhasannya sebagai wujud  
kekayaan budaya Indonesia

---



## Pameran

Mini Hall tempat diselenggarakannya pameran yang dibuka oleh Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

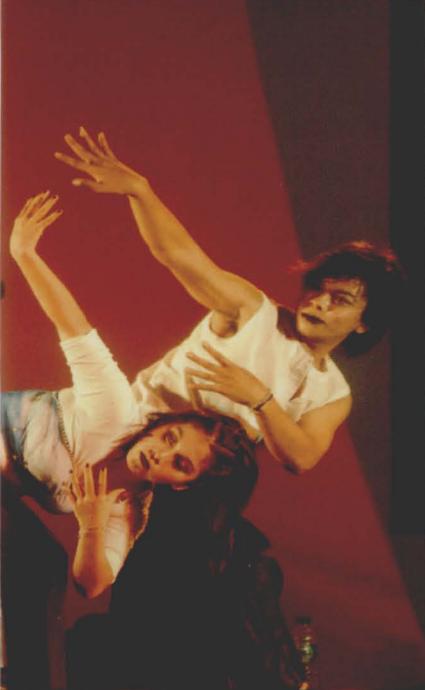
Benda-benda yang dipamerkan berupa pakaian adat, benda-benda (keris, panah, dan sebagainya), maknastana, photo, juga produk hasil kerajinan, seperti tenun, batik, anyaman, manik-manik dan sebagainya yang menunjukkan potensi budaya dari masing-masing daerah.





Hasil karya dari masing-masing daerah yang menunjukkan keunikan dan kekhasan sebagai tanda beragamnya budaya Indonesia





Pergelaran seni tradisional di open stage tugu Mandala. Kesenian yang dipertunjukkan, Sendratari Spiritual "Songkabila", Belian Bawo dan ritual (Kutai Barat, Kalimantan Timur), Tari Minang dan Serampang 12 (Kesultanan Serdang), Musik Bambu Tradisional (Kabupaten Enrekang), Ritual Penyembuhan khas Kabupaten Wajo, Bissu Pangkep (Kabupaten Pangkep), Pepeka Rimakka (Makassar), Seni Islam Jeppeng (Pare-Pare), dan Sendratari Ritual Komunitas Tionghoa. Selain pertunjukan seni juga dilakukan pemutaran film dokumenter mengenai komunitas adat di halaman tengah Monumen Mandala.



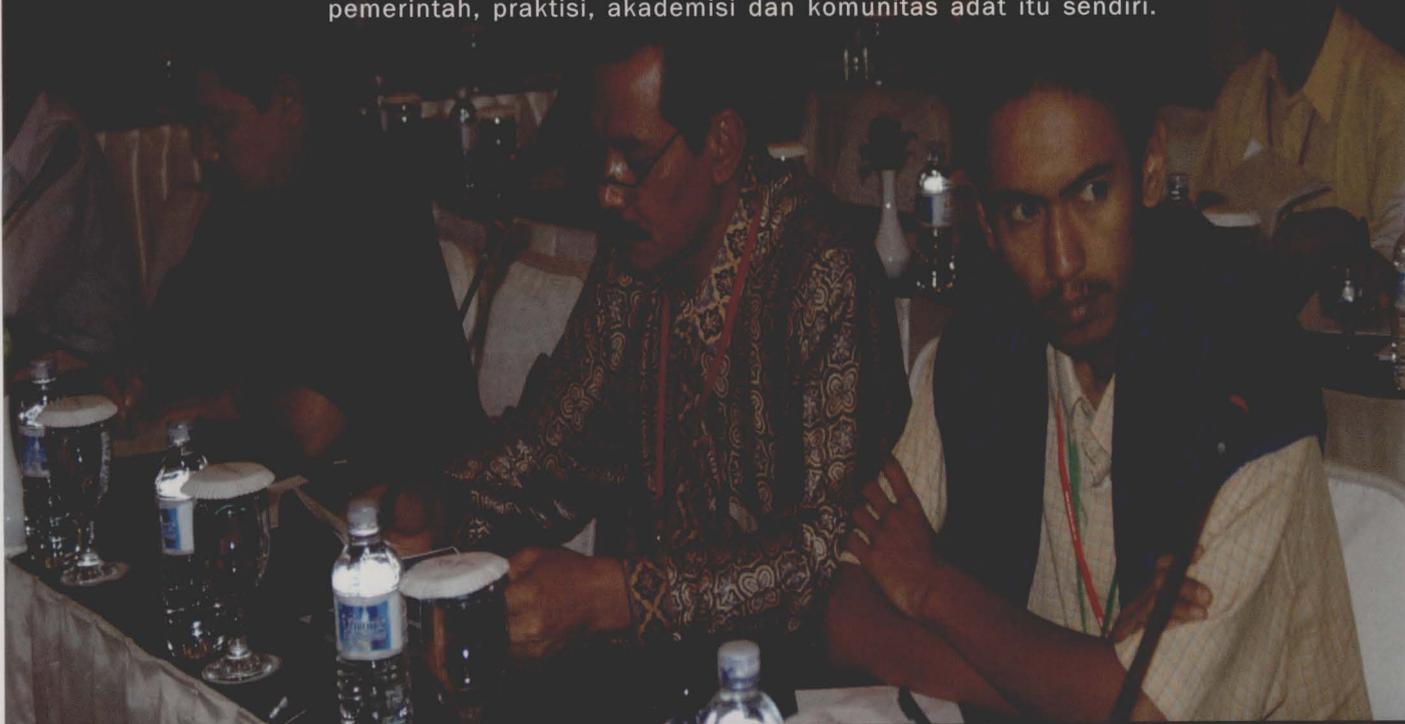
## Pergelaran Seni



Pergelaran Seni memberikan  
suguan keragaman bentuk budaya  
Indonesia sebagai warisan budaya  
yang patut di lestarikan

# Dialog Budaya

Dialog Budaya membahas mengenai komunitas adat dilihat dari berbagai segi kehidupan, yaitu dari sisi kebijakan, ekosistem, sosial, budaya dan ekonomi, religi, gender, lembaga adat, hak ulayat dan hukum adat. Kegiatan berlangsung selama dua hari dari pukul 08.00 - 17.00 WITA di Hotel Singgasana. Peserta terdiri dari 30 provinsi dengan pembicara dari berbagai kalangan, yakni pemerintah, praktisi, akademisi dan komunitas adat itu sendiri.



## SESI PERTAMA

---

Pembicara:

Dra. Elly Yuniarti  
Dr. Saafroedin Bahar  
Prof. Dr. Sri Hastanto

Moderator:

Dr. Halilintar Lathief

---

Sesi ini membahas mengenai komunitas adat dari segi kebijakan, masyarakat hukum adat dan pelestarian nilai-nilai budaya komunitas adat.

---



# KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KEBERADAAN KOMUNITAS ADAT DALAM KERANGKA NKRI

Oleh

Dr. Ir. SUDARSONO H, MA, SH

Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Depdagri

## A. LATAR BELAKANG



Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri yang diwakili oleh Ibu Dra. Ely Yuniarti.

Sepertinya tidak kita sadari bahwa tahun 2004 lalu adalah akhir dari Dasawarsa Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang berlangsung sejak tahun 1995, yang dicanangkan oleh PBB dengan tema: "Mitra Dalam Aksi" (Partnership in Action). Tujuan penyelenggaraan Dekade Internasional tersebut adalah untuk membangun kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Masyarakat Adat di bidang HAM, budaya, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Namun deklarasi itu hanya berhenti dalam retorika, kemudian tidak lagi terdengar gaungnya.

Jika kita merekonstruksi keberadaan Komunitas Adat, jauh sebelum NKRI ini berdiri, telah hidup masyarakat Adat dengan wujud kesatuan sosial khas yang terus-menerus melembaga, sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus-menerus diantara mereka membuat kelompok itu memiliki sistem politik, ekonomi dan pemerintahan sendiri (self governance). Sistem kebudayaan yang beraneka itu, ternyata belumlah tuntas dibahas dan dipahami, dimulai dari pemberian nama yang masih mencerminkan pemahaman yang berbeda-beda pula.

Sedang pada tatanan nasional, adanya kemajemukan sistem budaya di Indonesia telah diakui dari semboyan segara: Bhineka Tunggal Ika", walaupun beraneka, tetapi kita adalah satu kesatuan dalam negara Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak cerita pedih seputar keberadaan Komunitas Adat, terutama jika berbicara hak dan akses mereka terhadap sumberdaya alam. Cerita penggusuran mereka dari sumber-sumber kehidupannya menghiasi sejarah pembangunan negara ini. Misalnya suku Amungme dan Komoro di bumi Papua karena eksploitasi pertambangan di tanah mereka, Suku Sakai di Riau karena eksploitasi perminyakan, dan orang-orang Dayak di kalimantan akibat eksploitasi di sektor kehutanan dan pertambangan.

Sebaiknya semua menjadi terlambat, perhatian khusus dan penghargaan yang layak bagi Komunitas Adat harus segera dimulai. Untuk menghindari kisah sedih bangsa Indian di Amerika Utara dan suku Aborigin di Australia tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila ini, jika kita merujuk pada tatanan universal, menunjukkan betapa pentingnya masyarakat adat dalam suatu negara - bangsa (Nation State). Kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya lebih dari seribu kelompok masyarakat adat di Indonesia.

## B. EKSISTENSI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT

Perjuangan masyarakat adat menegakkan hak-haknya memiliki landasan konstitusional dan dasar hukum yang sangat kuat, khususnya setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 18B ayat (2) (amandemen) UUD 1945 pada Bab VI yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang", Bab XI yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-j ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" yang harus dilindungi oleh negara

Dengan penegasan pasal ini menjadi sangat jelas bahwa apabila komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup (*self - identification and self claming*) maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindunginya. Disamping dilindungi konstitusi negara, hak-hak masyarakat adat dan upaya-upaya penegakkannya juga diatur dalam beberapa instrumen internasional.

Dalam krisis multidimensi yang memunculkan reformasi politik hingga sekarang, menjadi sistem hukum agama dan adat mendapatkan kembali signifikasinya dalam perkembangan hukum nasional. Terbitnya keputusan seperti, ditariknya pengadilan agama dari Departemen Agama masuk ke dalam lingkungan Mahkamah Agung merupakan bukti konkret akan hal itu, ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, didorong pula oleh praktek-praktek penegakan hukum dengan menggunakan sistem hukum tertulis (barat) yang belum berhasil memberikan jaminan terhadap tercapainya atau terwujudnya tujuan nasional yang dicita-citakan.

Misalnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang tertib, aman, tenteram dalam bermasyarakat, apalagi menyangkut pelestarian alam dan lingkungan hidup. Implikasinya antara lain semangat membangun identitas kedaerahan dan semangat menjalankan hukum berdasarkan adat.

Fenomena politik dan budaya yang tengah berkembang tersebut ternyata telah diikuti dengan munculnya tuntutan menerapkan sistem hukum adat dan agama di lingkungan pemerintah baik tingkat daerah maupun nasional. Apabila dalam upaya penyelesaian kasus konflik di Ambon, Maluku, Poso, Madura dan Dayak-Melayu di Kalimantan, diselesaikan juga dengan cara adat oleh elite pemerintah tingkat nasional dan lokal. Munculnya penyelesaian konflik dengan penerapan hukum adat dan mungkin juga dengan hukum agama merupakan suatu fenomena sosial budaya dan politik hukum yang penting untuk mendapat perhatian semua pihak dan menjadi catatan penting bagi perjalanan sistem hukum nasional di Indonesia.

## C. PENTINGNYA KOMUNITAS ADAT

Pendekatan pembangunan yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi Komunitas Adat, karena umumnya disaian pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (mainstream) dalam masyarakat. Sebagai satu kesatuan sosial, komunitas adat masuk dalam kategori masyarakat yang tidak diuntungkan dalam struktur masyarakat, ketika berbeda dalam arti budaya, identitas, sistem ekonomi, bahkan sistem politik dari kelompok dominan dalam masyarakat.

Komunitas adat seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu. Padahal sebagai warga negara, komunitas adat harus pula menikmati hak dan kewajiban yang adil dan sejajar dengan komponen masyarakat lainnya. Komunitas adat mestinya punya keleluasaan untuk melindungi diri dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep penentuan nasib sendiri ini (*self determination*) telah luas diterima dalam prinsip-prinsip internasional, namun memang masih jauh dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Dalam skala nasional, eksistensi Komunitas Adat juga sangat penting untuk diakui dan dikembangkan. Karena kelompok ini dengan kekhasannya menyimpan keterampilan yang umum dikenal sebagai kearifan tradisional.

Jika dikembangkan, ini akan menyumbang – misalnya – bagi usaha pelestarian lingkungan yang modelnya sampai sekarang masih terus dicari. Mungkin citra mereka yang kosmis-magis tidak dapat dicerna dengan dunia ilmiah, namun fakta-fakta di lapangan membuktikan apa yang mereka praktikkan melahirkan perilaku religius dalam bentuk pengelolaan lingkungan yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini perilaku budaya sawah di Pulau Jawa dan Bali misalnya, merupakan kearifan lingkungan untuk memanfaatkan hujan sekaligus melindungi tanah belerang dari ancaman erosi karena curahan hujan. Teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur di Jawa Tengah/DIY disebut “*nyambuk Gunung*”, di Jawa Barat disebut “*ngais gunung*”, dan di Bali disebut “*sengkedan*”, ternyata pengetahuan yang telah lama dipraktikkan ini selaras dengan cara bertani muktahir yaitu *Contour Planing* (Zakaria: 1994). Kondisi yang sama, bisa terjadi di belahan tempat lainnya di Indonesia. Jika, kita mau mencoba memahami praktik-praktik ini lebih jauh, yang kelak pada gilirannya akan memberi sumbangan berarti bagi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam negeri ini.

#### D. PERUBAHAN HADIRKAN MASALAH BARU

Perubahan mendasar struktur politik, adalah faktor penting yang mempengaruhi gerak pemberdayaan lokal. Terbitnya kebijakan otonomi daerah, yang di dalamnya mengatur otonomi desa, tersemayem pula harapan baru bagi pengembangan komunitas lokal. Hal ini secara eksplisit dengan menegaskan desa dikembalikan asal-usulnya yakni adat. Tentu semua ini merupakan peluang bagi rehabilitasi dan kebangkitan kembali eksistensi adat sebagai pilar *civil society* di era demokrasi.

Di berbagai daerah, kendatipun dengan keadaan yang secara kualitatif beragam, proses ini kian menguat dan telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar. Pada aras negara, *political and good will* Pemerintah Daerah mulai terwujud melalui fasilitas pembentukan lembaga pembina adat tingkat kabupaten dan propinsi, kegiatan-kegiatan yang terakomodasi dalam APBD. Bahkan, prodiul hukum seperti Perda juga dihasilkan.

Di luar capaian positif penguatan adat tersebut, perlu diperhatikan pula mengenai masalah baru yang menggejala berikut ini.

Pertama, dilema etnisitas dan lokalitas. Sejak kebijakan otonomi, kesadaran etnisitas sebagai pilar institusi adat kian menguat. Melalui desentralisasi kewenangan, maka partisipasi dan kontrol warga terhadap negara menemukan ruang aktualisasinya. Segala bentuk pemangkasan potensi lokal lewat *state corporatism* dan otoritarian birokratik dapat dicegah, karena jarak yang berdekatan antara rakyat dan pengambil kebijakan.

Namun seiring dengan proses demokratisasi itu, kenyataan paradoksal juga bermunculan. Restrukturisasi adat lahir sebagai entitas nilai, ritualisme dan sistem kekuasaan, cenderung berkuat pada romantisme kultural masa lalu, yang dikhawatirkan memiliki pretensi politik di balik itu. Pengalaman selama ini menunjukkan, bersamaan menguatnya eksistensi adat ternyata disertai pula menebalnya ideologi "etnonasionalisme". Fenomena ini dianggap hal biasa pada era pancaroba, tetapi jika dalam prosesnya kemudian muncul eksklusivisme, jelas akan menjadi persoalan dikemudian hari. Karena itulah, permasalahan penting yang perlu diperhatikan adalah etnonasionalisme ini jangan sampai terperangkap pada praktik neotoriterisme.

Kedua, kesenjangan antara harapan demokrasi politik dengan penguasaan sumberdaya ekonomi. Akselerasi pemberdayaan adat masih cenderung memprioritaskan kesadaran politik dalam ranah demokrasi, yaitu: partisipasi, kemajemukan, toleransi, inklusivisme, sebagai *mainstream*. Sayangnya, secara umum tanpa dibarengi oleh penguatan struktural, seperti: perjuangan pemilikan alat-alat produksi dalam sistem ekonomi komunitas, untuk membangun kesadaran dalam sistem ekonomi adat.

Hal ini dapat dilacak dari fakta bahwa, kesadaran pentingnya prinsip-prinsip demokrasi politik yang begitu meningkat, bahkan lahir "radikalisasi adat", ternyata masih saja diwarnai oleh fakta krisis sumberdaya material, keterbatasan hak penguasaan ekonomi. Yang mengkhawatirkan, banyak sengketa antar warga, yang ternyata bersumber karena belum terjawabnya kebutuhan ekonomi adat. Oleh sebab itu, persoalan kelangkaan sumberdaya lokal menjadi sumber masalah yang harus dijawab, di luar wacana demokrasi politik.

Ketiga, menguatnya neo-liberalisme dan liberalisme pasar. Hal ini menjadi perangkap baru bagi komunitas lokal, dengan lahirnya fenomena baru "privatisasi" komunitas adat. Banyak peristiwa muncul ternyata belum mampu membangun kemandirian kekuatan lokal, ketika harus berinteraksi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi di luar dirinya. Tidak mengherankan jika dalam memahami kehadiran pasar justru sekedar dilandasi oleh hasrat pragmatis, yakni agar suatu komunitas sosial mampu *survive* secara ekonomi.

## E. PENGUATAN KOMUNITAS ADAT

Perjuangan untuk menegakkan berlakunya hak-hak Komunitas Adat tidak bisa dilepaskan dari perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip universal. Kita harus mengakui bahwa masih terlalu banyak diantara kita yang pandangan hidupnya sesungguhnya masih terpenjara pada kosmologi-kosmologi yang sempit. Padahal, bukankah hak-hak Komunitas Adat, sama pentingnya dengan keterbukaan dan demokratisasi?

Setidaknya ada dua pendekatan saling terkait yang dapat dipilih dalam rangka penguatan Komunitas Adat. Pertama, apa yang disebut pendekatan geokultural. Pendekatan ini menghendaki agar setiap kelompok budaya dari sekarang saling menyapa dan saling mengenal lebih jauh, untuk kemudian saling memberi dan menerima. Secara intuitif sekaranglah saatnya kita mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak cuma terbatas dala konteks tawar-menawar politik. Iklim politik sekarang ini, di mana pemerintah yang dipilih rakyat sangat kuat, dan vokalitas tokoh-tokoh arif yang penuh integritas tidak terhambat, sesungguhnya adalah iklim yang kondusif untuk merekatkan jalinan-jalinan nasional kita. Pembangunan sungguh memerlukan suatu kondisi kehidupan budaya yang lebih hangat diantara kita.

Dalam pidato pengukuhanannya, profesor Umar Kayam berbicara tentang "serat-serat kebudayaan" di nusantara. Kata itu mengandung konotasi pluralitas yang saling memperkuat, seperti serat-serat pada batang pohon nyiur atau benang-benang pada tenunan. Hingga kini banyak pakar masih melihat pluralitas sistem nilai etnis kita tak lebih dari "mosaik" yang indah dipandang. Terutama bagi para ahli antropologi asing, mosaik itu merupakan gudang yang tiada habis-habisnya untuk digali. Tetapi mosaik itu sedikit sekali artinya bagi diri bangsa pemiliknya sendiri.

Mochtar Pobatingi, misalnya yang berasal dari etnis Bugis-Makassar, memimpikan bagaimana kelompok etnisnya, yang menurutnya banyak tertinggal dalam perlombaan akal-budi, belajar dari kelompok etnis Jawa dan Minang. Dari sistem nilai Jawa, etnis Bugis bisa mendewasakan prinsip *siri*, agar tidak terkungkung pada masalah-masalah sempit kekeluargaan, melainkan menjangkau hal-hal yang lebih penting, lebih mulia dan lebih besar artinya bagi bangsa.

Dari etnis Minang, orang Bugis dapat belajar tentang prinsip musyawarah, karena mereka terbiasa menyelesaikan persoalan secara kaku, pantang berubah, sebab *siri*, memerlukan pemenuhan seketika. Dari sistem nilai Jawa, Orang Bugis dapat belajar tentang relativisme nilai-nilai serta internalisasi dan preservasi kekuatan di dalam kalbu.

Mungkin kelompok etnis Jawa dan Minang pun dapat belajar dari sistem nilai Bugis-Makassar. Mereka dapat belajar dalam hal penekanan kesetiaan pada kata (*kana*). Orang Bugis tidak suka melebihi-lebihkan atau memanipulasi kata. Sebagaimana telah ditulis oleh Profesor Noorduijn, ucapan *akkanaka* (saya berkata) memiliki bobot yang sangat *matter-of-fact* dalam tradisi historiografi Bugis-Makassar. Itulah sebabnya mengapa peninggalan-peninggalan tertulis mereka punya kadar historisitas yang jauh lebih kuat, khususnya dibanding dengan babad-babad dari Tanah Jawa yang lebih bersifat legenda.

Dalam proses dialog budaya itu, kearifan lokal Masyarakat Adat dapat dimanfaatkan dalam rangka pelestarian sumberdaya alam. Misalnya, banyak sekali tersebar hukum adat dalam menjaga lingkungan di Tatar Sunda. Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat Penan di Kalimantan, Masyarakat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Dani dan Masyarakat Deponoro di Papua Barat, Masyarakat Krui di Lampung dan Masyarakat Kei maupun Masyarakat Haruku di Maluku, pada umumnya mereka memiliki sistem pengelolaan sumberdaya alam luar biasa yang menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan mereka.

Di Kalimantan masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa: "Tanah adalah Hidup dan Nafas Kita" (Dr. Karel Phil Erari, 1999). Jelas di sini bahwa bagi mereka, tanah, lingkungan alam adalah sumber kehidupan dan sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai ibu mereka. Merusak alam sama dengan meyakini ibu mereka. Demikian juga mengotori bumi.

Kedua, perlu melancarkan pemulihan hak-hak dasar (*basic rights*). Pemenuhan hak-hak dasar itu harus menekankan pada hak akan perlindungan dan hak akan subsistensi. Kedua hak ini merupakan sesuatu yang mendasar dan tidak dapat ditawar-tawar, karena yang satu tidak akan berlaku tanpa ada yang lainnya. Tidak ada subsistensi jika keamanan dan jiwa terancam, dan tidak ada artinya keamanan jika orang tak memiliki sandang, pangan, dan papan. Pada model ini, hak perlindungan bukan merupakan pemberian melainkan sungguh-sungguh hak, yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai kewajiban.

## F. STRATEGI KEBUDAYAAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dalam hal ini "Bhinneka Tunggal Ika" hendaknya bukan hanya digunakan sebatas slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan, yang dituangkan ke dalam kebijakan publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat ini, maka kebijakan kebudayaan harus ditujukan agar seluruh kekayaan budaya-budaya Etnik dan Masyarakat Adat se-Nusantara dapat terjalin dalam "serat-serat kebudayaan", membentuk batang tubuh kebudayaan Indonesia Baru yang kokoh, laksana sebatang pohon kelapa yang berdiri tegak oleh serat-serat kayu, akar memikul batang, menunjang daun dan buah. Dalam upaya pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat, maka implementasi kebijakan yang diderivasikan dari filosofi "Bhinneka Tunggal Ika" itu adalah, bagaimana menjadikan ragam kekayaan tradisi dan adat-istiadat mereka sebagai sumbangan bagi jalinan "serat-serat budaya" Indonesia yang kokoh-kuat. Jika diandaikan secara fisik, pertumbuhannya pada setiap tahap akan terjadi transformasi dalam bentuk baru. Dalam transformasi fisik itu harus ditujukan untuk menumbuhkan pohon yang kokoh-kuat

Tercerabutnya akar sebatang pohon akan berdampak pada robohnya pohon, sehingga pohon tidak lagi dapat disebut sebagai pohon, melainkan hanya seonggok kayu.

Dewasa ini, globalisasi menjadi sebuah keniscayaan yang merubah gaya hidup suatu generasi bangsa. Namun dibalik itu, terjadi kecenderungan arus balik untuk menghargai budaya sendiri yang bersemi dari dalam. Globalisasi juga menyediakan sebuah tempat yang lapang bagi konstruksi identitas, pertukaran benda-benda, simbol-simbol dan pergerakan antar tempat yang semakin mudah, yang dikombinasikan dengan perkembangan teknologi komunikasi, membuat percampuran dan pertemuan budaya juga semakin mudah.

Dalam globalisasi, kebudayaan dan identitas bersifat translokal, yang tidak lagi cukup jika dipahami dalam *term* tempat, tetapi lebih tepat jika dikonsepsikan dalam *term* perjalanan. Dalam konsep ini tercakup budaya yang selalu dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, seperti halnya Clifford Geertz mempersepsi kebudayaan sebagai *sites of criss-crossing travellers* (1992). Ide tentang ketidakstabilan kebudayaan dan identitas dalam globalisasi membawa pada pemahaman, bahwa kebudayaan dan identitas selalu merupakan pertemuan dan percampuran berbagai kebudayaan dan hibriditas identitas. Batas-batas kebudayaan yang mapan dikaburkan dan dibuat tidak stabil oleh proses hibridasi.

Strategi kebudayaan sesungguhnya mengandung dua aspek penting yang bagai dua sisi mata uang. Pertama, menunjukkan pada strategi pengelolaan cara bangsa itu bereaksi, berpikir, berperilaku, bertindak dan bekerja dalam menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa. Kedua, menunjuk pada strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dalam proses membangun bangsa itu, seperti misalnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air dan lain sebagainya.

Strategi kebudayaan mensyaratkan kemampuan menghidupkan filosofi “Bhineka Tunggal Ika” itu ke dalam sistem hukum tanpa lepas dari aspek historisnya. Di sisi lain, mensyaratkan manajemen bernegara yang dijabarkan ke dalam program kerja dengan skala prioritas, agar secara sosiologis mampu hidup dan dirasakan sehari-hari manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Skala prioritas program prioritas di Amerika Serikat dalam menanggapi situasi tertentu, barangkali dapat dijadikan contoh. Ketika saat itu kemampuan membaca masyarakat Afro-Amerika dan Hispanik tercatat sangat rendah, maka strategi kebudayaan yang dilancarkan lebih menekankan strategi afirmatif aksi untuk kedua masyarakat tersebut.

Tindak lanjut dari strategi tersebut, bisa terbaca pada program Stasiun Televisi Publik seperti PBS, yang melahirkan program anak-anak bertajuk *Sesame Street*. Inilah program yang mengandung strategi kebudayaan meningkatkan tingkat melek huruf kelompok mereka.

Hal serupa, mungkin dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat, tentu saja setelah dipetakan segala permasalahan yang dihadapi mereka. Catatan pendek ini adalah refleksi dari bekerjanya kebijakan politik yang mengandung strategi kebudayaan yang komprehensif, yang mengejawantah dalam program prioritas.

## G. CATATAN AKHIR

Alangkah besarnya manfaat yang bisa diperoleh jika pluralitas budaya kita sungguh menjadi serat-serat yang saling memperkuat. Di sini kita juga bisa berbicara dalam hubungan Islam-Kristen dan Melayu-Cina, sehingga suatu resiprokalitas budaya yang sangat kaya akan tercipta. Dengan begitu kita bukan hanya akan hidup bersama secara lebih rukun dengan kepekaan akan hak/kewajiban individual-sosial yang lebih tinggi.

Lebih dari itu, kita juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan dengan sesedikit mungkin distorsi, saling curiga dan kesalahpengertian.

Pada konsolidasi dan mobilisasi nilai-nilai budaya positif kita sendirilah terdapat modal sosial (*social capital*) yang kita dayagunakan, jika kita benar-benar bertekad untuk tumbuh sebagai bangsa besar yang mandiri.

Namun bukan hanya sebatas pengakuan akan eksistensi Komunitas Adat saja, tetapi harus diikuti dengan penguatan hak-hak mereka, hak berdemokrasi, dan hak memperoleh akses pada sumberdaya alam, yang bisa dimanfaatkannya sebagai sumberdaya ekonomi guna pelestarian budaya dan mengembangkannya bagi pengkayaan budaya Indonesia Baru. Barangkali, jikalau menghitung tingkat risiko dan kemungkinan harapan ideal dalam penguatan adat, adalah menetapkan pilihan relasi antara negara (*state*) masyarakat adat (*civil society*), dan pasar (*market*) dalam konteks keseimbangan.

Prinsip demokrasi politik yang masih menyisakan pekerjaan berat untuk dibumikan dalam ranah Komunitas Adat, perlu diselaraskan dalam kaitannya dengan strategi penguatan ekonomi, dengan tetap berbasiskan pada kemandirian lokalitasa. Karenanya, dalam jangka ke depan kita perlu memastikan kebutuhan agenda pemberdayaan Komunitas Adat, sehingga dapat dirumuskan secara lebih konstruktif, visioner, antipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan.

Kita semua tentu sepakat bahwa Indonesia di masa depan adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya dari generasi ke generasi. Tentu saja semua itu harus dikembangkan dari nilai-nilai yang kita miliki yang mengalir di pembuluh darah masyarakat sendiri. Melupakan nilai-nilai budaya-budaya Etnik dan Komunitas Adat hanya akan menciptakan Indonesia tumbuh tanpa jiwa dan identitas. Yang pada akhirnya kita tidak akan memperoleh hasil pembangunan kebudayaan yang lestari berkelanjutan.

Dengan berbagai etnis di nusantara ini mau menghargai, menerapkan dan mengembangkan pencapaian budaya Masyarakat Adat, mereka akan merasa bangga memiliki negeri yang namanya Indonesia ini. Yang pada gilirannya akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

## PELESTARIAN NILAI BUDAYA KOMUNITAS ADAT

Oleh:  
Prof. Dr. Sri Hastanto, S.Kar.

Komunitas Adat di Indonesia tersebar diseluruh tanah air, data yang pasti beberapa jumlah komunitas adat masih perlu diakuratkan lagi. Karena banyaknya komunitas adat dengan corak dan kebiasaan budayanya masing-masing maka tidaklah mungkin judul diatas memasukkan substansi khas dari setiap komunitas adat itu. Oleh sebab itu, makalah ini tidak akan membahas secara mendalam bentuk atau ragaam budaya komunitas adat melainkan mengutarakan sifat umumnya yang kemudian diakitkan dengan usaha pelestariannya sesuai yang diamanatkan panitia seperti tertera pada judul makalah ini.

### Komunitas Adat:

Komunitas Adat adalah kelompok masyarakat kehidupan sehari-harinya mengacu pada tatanan adat turun temurun. Tatanan adat yang diturunkan oleh nenek moyangnya diyakini sebagai jalan hidup yang baik sehingga dengan mengikuti tatanan hidup tersebut seseorang akan menjadi manusia yang berkualitas dan akan selalu mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa. Biasanya mereka menyebut Yang Maha Kuasa dengan sebutan lokal tetapi mengandung pengertian yang sama Dat Adi Kodrati yang menguasai bumi seisinya.

Komunitas ini biasanya mempunyai wilayah atau lokus tertentu yang tidak terbatas oleh batas-batas administrasi modern seperti kelurahan, kecamatan, kabupateen, provinsi, bahkan negara. Wilayah mereka adalah wilayah budaya bukan wilayah adminstrasi modern. Jadi bisa saja wilayah sebuah komunitas sebagaian di kabupateen A dan sebagian lagi di kabupaten B atau bahkan sebagian di negara A dan sebagian lagi di negara B.

Mereka kebanyakan tidak memeluk salah satu agama modern yang diakui pemerintah republik Indonesia, tetapi secara religius mereka mempunyai kepercayaan dan sistem tersendiri bagaimana menghormati yang Maha Kuasa dalam kehidupan keseharian, dalam berbagai hal yang berhubungan dengan siklus kehidupan (lahir, baayi, anak, dewasa, kawin, mati) maupun hal-hal yang khususnya lainnya misalnya menghadapi bencana alam, penyakit, penderitaan maupun keberuntungan.

Walaupun demikian ada pula yang telah bergesekan dengan agama modern sehingga beberapa hal seperti tertera diatas dilaksanakan dengan campuran antara kepercayaan lama dan agama modern. Hal ini biasanya ditentukan oleh lokus di mana komunitas itu berada. Makin dekat dengan orang-orang yang menganut agama modern makin terasa berbagai ritualnya mengandung unsur-unsur agama modern itu, makin jauh dari lokus tersebut makin murni tatacara yang mereka lakukan. Di Talaut misalnya, tatacara komunitas adatnya diwarnai oleh Agama Kristen. Sebaliknya mereka yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti dapat diduga telah kemasukan unsur Agama Islam. Oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang antropologi, tatacara adat komunitas adat ini dekat sekali dengan faham Animisme. Itulah sekedar pengertian Komunitas Adat dilihat dari kegiatan sehari-hari.



Ada lagi komunitas adat yang akhirnya menganut salah satu agama modern. Sikap mereka dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, meninggalkan kebiasaan budaya lama bahkan membencinya dan menganggapnya haram; kedua mereka yang menggunakan kebiasaan budaya (cultural habit) lama dan diletakan di bawah agama modern yang kemudian mereka anut. Misalnya masyarakat Bandung Selatan yang kina telah masuk agama Islam masih mempertahankan menabuh gamelan Gong Renteng yang diberi nama Mbah Bandung. Gamelan itu secara musikal mirip dengan Gamelan sekaten Cirebon, dan suasananya kalau ditabuh sama seperti Tabuh Sukatian (gamelan Cenik) di Bali. Dengan demikian dapat diperkirakan gamelan tersebut telaaah ada sebelum Islam. Tetapi setelah komunitas adat Bandung Selatan ini masuk Islam mereka meyakini bahwa dahulu (entah kapan) gamelan itu sudah ada dan dipergunakan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Lain lagi dengan komunitas adat di daerah Pasuruan yang juga kini telah memeluk agama Islam. Menurut mereka sendiri mereka sengaja melebur gamelan perunggu, kuningan, maupun besi karena pemimpin mereka menganggap gamelan itu haram. Bunyi-bunyi yang tidak haram adalah rebana atau trebang. Karena masyarakat adat itu sangat cinta pada musik gamelan maka mereka melaras rebana-rebana seperti buah gamelan dan terbentuklah ensemble baru disebut Trebang Gending. Ensemble ini menyajikan gending - gending Jawa Timur termasuk Jula-Juli dengan menggunakan berbagai ukuran trebang yang dilaras (laras Slendro)

#### Nilai Budaya

Kalau kita boleh menganalogkan budaya dengan santan, maka nilai budaya adalah rasa gurih yang dapat membuat nikmat segala sesuatu yang dimasak dengan santan baik itu yang manis maupun yang asin rasa gurih santan akan tetap hadir di lidah kita. Budaya adalah sikap batin kita terhadap sesuatu, jadi bersifat *tan wadag* atau *Intangible* demikian nilai budayanya juga *Tangible*. Yang dapat kita amati lebih konkret adalah wadagnya yaitu karya budaya. Karena budaya *intangible* maka sering karya budaya yang *tangible* itulah yang dianggap sebagai budaya.

Karya budaya manusia dapat kita lihat baik berupa kegiatan maupun berupa benda-benda. Yang berupa kegiatan seperti misalnya kesenian, adat istiadat, bahasa, ritual dan lain sebagainya, dan yang berupa benda misalnya Busana, Alat pertanian, Peralatan Sehari-hari, Kuliner, dan sebagainya. Di dalam setiap karya budaya komunitas adat tentu mengandung "sesuatu" yang baik bagi kehidupan manusia dan masyarakatnya sehingga karya budaya itu dipertahankan oleh yang empunya. "Sesuatu" itulah nilai budayanya. Tugas para ahliilah yang mencari "sesuatu" itu di dalam setiap karya budaya setiap komunitas adat, dan "seuatu" itulah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat panitia yang tertera di dalam judul makalah ini.

Nilai budaya itu selalu mengacu pada tata nilai yang berlaku di dalam sebuah budaya masyarakat. Sebagai contoh: sebagian besar masyarakat kita termasuk sebagian besar komunitas adat memandang bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu syahwat hanya boleh dilihat oleh mukrimnya atau pasangan yang sah saja. Itu sebuah tata nilai. Kalau tidak maka akan menimbulkan malapetaaka karena lepas kendali. Tata nilai dijawab dengan karya budaya, misalnya busana tradisional Jawa (maaf karena saya orang Jawa sebaiknya maka contoh-contoh yang paling saya mengerti adalah karya budaya Jawa): Kain yang dikenakan priya dililitkan di badan dengan arah berlawanan dengan jarum jam dan akhirnya kain akan berada di depan pusar. Kain bagi kaum hawa dililitkan di badan searah dengan jarum jam dan juga berakhir di depan pusar. Pada akhir masing-masing kain terdapat *wiron* yaitu lipatan seperti kipas lipat. Bila dipakai berjalan *wiron* tersebut dapat mengembang dan menutup kembali. Bila mengembang, kemungkinan betis sang pemakai dapat kelihatan. Priya selalu berjalan disebelah kanan dengan wanita pasangannya, sehingga bila *wiron* si wanita menembang akan tertutup oleh *wiron* sang priya. Kalau toh sampai terlihat betisnya maka hanya proya pasangannya saja yang melihat. Itulah nilai budaya yang terkandung di dalam karya budaya busana tradisional Jawa. Tata nilai untuk tidak mengobrol pembangkit syahwat itulah yang harus dilestarikan.

Busana tradisional Jawa itu merupakan hasil penyikapan orang Jawa secara komunal terhadap pena- penampilan harus seksi, harus menarik tetapi tetap anggun dan tidak norak. Diharapkan para ahli komu- dapat mengurai nilai-nilai yang terkandung di dalam karya budaya komunitas adat itu, dan itu berkaitan atau m- apa yang dianggap dapat menuntun manusia menjadi semakin berkualitas di dalam budaya itu. Nilai-nilai yang cukup didaftar, lalu diterbutkaan. Tetapi harus dilestarikan dan diusahakan bagaimana dapat menjadi acu- )sebagai anggota komunitas adat, sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga dunia) sehari-hari.

## Pelestarian

Seperti telah dirumuskan oleh ahli budaya, pelestarian itu mengandung tiga kegiatan yang harus dil- proporsional. Pertama, perlindungan baik perlindungan hukum maupun perlindungan keberlangsungan kehidu- kedua, pengembangan agar tetap relevan dengan kebutuhan hidup manusia; dan ketiga pemanfaatan, haru- masyarakat pemiliknya ataupun masyarakat yang lebih luas.

Untuk menjadi Negara bangsa (*Nation State*) memang kita harus menelan “Multikulturalisme” artinya merasa satu walaupun budaya antara suku-suku bangsa kita harus dapat merasa satu walaupun budaya bangsa berbeda. Dalam “Multikulturalisme” perbedaan itu harus difahami sebagai ‘kekayaan’ bukan sebaga- menimbulkan perpecahan. Aneka budaya yang terdapat di bumi Nusantara ini harus difahami sebagai mosa- akhirnya menjadi serta sistem pendidikan kita belum mendukung cita-cita politik yang sedemikian luhur itu. D- demikian masyarakat mencari “homogenitas” dalam sebuah “pluralitas” budaya; mencari “ketunggalan” di dal- budaya. Homogenitas dan rasa ketunggalan inilah yang akan digunakan sebagai pengikat persatuan ban- negara Republik Indonesia.

Rasa homogenitas, rasa ketunggalan ini memang lebih mudah dicapai lewat wahana yang menga- unsur verbal dan unsur fisik yang kasat mata. Misalnya sebuah gerakan akan lebih dapat dipahami dari pa- Sebuah gerak *ukel karma* yang *luwes* akan dapat dirasakan sebagai gerakan yang indah secara universal. Gera- dirasakan sebagai gerakan kasar atau gerakan banyolan atau gerakan cabul. Lain dengan nada-nada slenc- Jawa.

Memang bagi orang ang “medhok” slendronya dirasa sangat nyaman, tetapi masyarakat lain di dal- banyak yang merasakan pelarasan itu sebagai *out of tune* blero. Hal-hal yang fisik akan lebih mudah dirasak- Bensin seharga Rp 30.000,- per liter di mana saja di Indonesia ini mesti dirasakan sebagai sesuatu yang r- hanya berkaki satu (maaf) dimanapun di Indonesia ini tentu dianggap sebagai orang penderita cacat. Itulah sebuah rasa homogenitas dalam sebuah masyarakat multikultur.

Karena referensi homogenitas di dalam masyarakat multikultur selalu hal-hal yang bersifat *tangible* juga yang verbal-verbal (seperti musik pop dsb) itulah maka kepekaan rasa di dalam kita menindonesia m- Bagaimana tanah kehilangan humus maka kadar ketandusannya menjadi semakin tinggi sehingga karya-k- dalam penghayatannya memerlukan kepekaan perasaan tidak lagi dapat bertahan hidup. Inilah salah sat- kekusutan benang yang kita hadapi dewasa ini.

Bila sinyalemen ini betul aka seperti telah saya katakan sebelumnya, tidak mungkin kita akan dapa- kehidupan nilai-nilai budaya komunitas adat seperti dahulu sehingga nantinya mempunyai posisi yang signifik- kita, kalau yang ita garap hanya komponen pertama daan kedua saja. Komponen ketiga harus mendapat porsi- walaupun kita sadari bahwa langkah ini merupakan langkah yang membutuhkan kesabaran, sebab memei- amat panjang sehubungan dengan luasnya wilayah kita dan banyaknya jumlah penduduk kita serta karena lar- kita ini tidak tersentuh pendidikan budaya.

ita untuk melestarikan karya budaya tradisi (termasuk karya budaya komunitas adat dengan demikian juga nilainya) kita rasakan seperti hanya berjalan di tempat. Karena kita belum menggarap secara serius pangkal yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM) pendukung budaya tradisi itu sendiri. Mengapa hal itu tidak tangani dengan baik? Sebab paling tidak ada 2(dua) sebab yaitu, pertama, kita salah menuding siapakah itu dan kedua, karena luasnya jaringan pendukung tradisi itu sendiri.

berpikir bahwa hanya anggota komunitas adat dan pemerintah saja yang menjadi pendukung budaya tradisi kelompok itu yang dituding sebagai pendukung budaya tradisi kita maka yang di cecar pekerjaan dan kegiatan dua kelompok itu. Yaitu kelompok komunitas adat sebagai penciptanya dan pemerintah sebagai penentu arah masih ada komponen ketiga pemilik sah budaya tradisi Indonesia yaitu masyarakat umum yang sangat rumit jaringannya. Dalam kegiatan pelestarian budaya tradisi komponen ketiga ini jarang sekali mendapat benahi. Padahal kegiatan pelestarian budaya tradisi komponen ini sangat menentukan peningkatan kualitas (mungkin juga) komoditi ekonomi.

en ketiga ini bagaikan lahan pertanian yang luas. Seunggu apapun benih yang dipersiapkan oleh masyarakat kalau benih itu ditanam di pertanian yang tandus, maka benih itu akan mati. Masyarakat penghayat dan pendukung ini sering tidak diperhitungkan dalam melestarikan budaya tradisi Indonesia. Fokus kegiatan sering budayanya saja. Manajemennya saja sering belum tersentuh apalagi masyarakat sebagai komponen ketiga upannya.

mponen itu (anggota komunitas adat, pemerintah dan masyarakat pendukung) harus mendapat perhatian khusus agar karya budaya komunitas adat dapat diterima dan berkembang serta mempunyai dampak pekeriti dan selanjutnya bermuara kepada meningkatnya kualitas. Perlakuan khusus itu akan berbeda dari ung dengan interdependensi komponen-komponen itu dengan hal-hal lain yang terjadi di dalam masyarakat n dengan lokus maupun waktu.

lahan yang kita hadapi sebenarnya bukan hanya berkisar pada pelestarian nilai budaya masyarakat adat saja dengan situasi komponen ketiga yang kait mengkait dengan masalah yang lebih luas dan jauh di luar permasalahan kerti, terutama permasalahan politik yang akan berimbas kepada masalah ekonomi dan cultural.

demikian benang kusut yang kita lihat benar-benar kusut dan sangat luas, sehingga tidak mungkin akan kita dakan pelestarian nilai budaya ansih. Tanpa menuntaskan masalah lahan-pertumbuhan nilai budaya tradisi, ita hanya akan berputar-putar atau berjalan di tempat.

masyarakat pendukung ini masih sedikit dan terlatih perasaan terhadap karya budaya sehingga mempunyai nggi. Kepekaan masyarakat akan karya budaya tradisi dapat tumbuh sedemikian rupa karena homogenitas di mpok masyarakat masih tinggi. Dengan demikian saling gesek antara anggota komunitas dapat berdampak pemahaman mereka terhadap berbagai karya budaya tradisi. Masyarakat yang demikian merupakan lahan budaya tradisi yang berkualitas sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.

asyarakat yang demikian kina tidak akan cocok lagi dengan perkembangan jaman sekarang. Mereka tidak mengindonesia (yang telah menjadi kemauan politik dari perwakilan sebagian besar suku bangsa Indonesia) di gota masyarakatnya dituntut untuk dapat memahami, atau setidaknya-tidaknya mengenal dan dapat menghargai ya dari sub kultur yang lain di seluruh Indonesia ini. Itulah tuntutan kepada bangsa ini secara politis: yaitu



Rumah Adat Sumba



Anak-anak Suku Akit Riau



Komunitas Adat Karon Papua



Pemukiman Komunitas Adat Baduy

Bila dahulu orang Jawa hanya dituntut untuk memahami budaya Jawa, kini orang Jawa bila ingin menjadi warga Negara Indonesia yang baik haruslah mengindonesia dengan memahami berbagai budaya suku-suku bangsa (setidaknya- tidaknya beberapa dari mereka) yang bermukim di Indonesia ini di samping fasih dalam memahami budaya Jawa. Bila setiap anggota masyarakat seperti itu maka cita-cita politik kita membentuk Negara bangsa (*nation state*) yang berwajah Bhineka Tunggal Ika dapat kita wujudkan.

Karena setiap anggota masyarakat memahami budayanya masing-masing maka karya budaya tradisi akan mendapat tempat dan dapat hidup subur dengan demikian nilai-nilainya pun akan lestari. Karena setiap anggota masyarakat juga mengenal dan menghargai karya budaya suku-suku bangsa lain maka perkembangan karya budaya tradisi di manapun tidak mengalami kendala. Persoalannya adalah "Bisakah kita membangun masyarakat yang demikian?" Saya akan menjawab: "Bisa"

Jawaban itu didasari kenyataan-kenyataan yang dapat kita lihat di depan hidung kita: Seorang Matsumoto laris mendalang di Jepang dengan menggunakan wayang kulit Jawa, karena masyarakat Jepang dididik menghargai budaya orang lain termasuk budaya wayang Indonesia terutama Jawa. Seorang mahasiswa Inggris peserta Dharmasiswa Indonesia, kini laris mendalang wayang kancil di Inggris karena masyarakat Inggris terutama anak-anaknya dididik pengetahuan budaya lain yang dianggapnya dapat membantu perkembangan jiwa anak, dalam hal ini Wayang Indonesia. Atas dasar itu maka saya berani menjawab pertanyaan "Bisakah kita membangun masyarakat saya berani menjawab "Bisa". Tetapi bila pertanyaannya: "Maukah kita membangun masyarakat yang demikian?" dengan jujur saya tidak tahu jawabannya yang pasti. Jawaban sementara saya "TIDAK" sebab hingga saat ini saya belum pernah melihat kekonsistenan kita dalam mendidik masyarakat untuk memahami pentingnya budaya.

"Mengapa demikian?" sebab orientasi para penentu kebijakan selalu berfokus pada masa jabatannya saja, dan kebijakan untuk membenahi masyarakat dalam hal pemahaman kebudayaan belum terumuskan dengan baik. Jadi sangatlah perlu kita merumuskan bentuk pendidikan kebudayaan untuk masyarakat yang dimulai dari pendidikan usia dini. Forum yang mungkin dapat menjadi wahana diusulkan hal ini kepada penentu kebijakan dalam bidang budaya adalah Kongres Kebudayaan Indonesia yang akan digelar tahun depan (2008).

Kiranya kita fahami sudah bahwa permasalahan pelestarian nilai-nilai budaya komunitas adat ini bukan masalah nilai-nilai itu sendiri saja tetapi seluruh kehidupan budaya tradisi pada saat sekarang, dan masalahnya bukan sekedar masalah kultural saja tetapi menyangkut permasalahan yang lebih luas terutama permasalahan politik yang pernah mencanangkan cita-cita Bhineka Tunggal Ika.

Bagaikan mendaki gunung yang terjal makalah ini hanyalah salah satu sisi yang dapat kita gunakan sebagai tapak menuju puncak. Tentu sisi-sisi lain masih banyak, hanya belum pernah diamati secara seksama. Terima kasih atas perhatiannya.



## MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh :  
Dr. Saafroedin Bahar

### Pengantar

Dari perspektif sejarah, pengakuan yuridis terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas antropologis yang secara berlanjut mendiami suatu wilayah yang sama secara turun temurun sesungguhnya merupakan suatu fenomena baru. Namun pada tataran internasional, pengakuan ini telah terdapat dalam Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples In Independent Countries*. Hal ini bertitik tolak dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan merujuk pada manusia sebagai individu secara perorangan.

Namun, bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu terkait secara melembaga dengan manusia lainnya, baik dalam hubungan paguyuban (*gemeinschaftlich*) yang lazim dalam masyarakat tradisional maupun dalam hubungan petembayan (*gesellschaftlich*) yang umumnya digunakan dalam dunia modern.

Di Indonesia, pada awal kemerdekaan pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat belum mendapat posisi yang positif karena pada saat itu difahami sebagai manifestasi dari individualisme dan liberalisme yang bersifat perseorangan. Sebagai akibat, secara berkelanjutan masyarakat hukum adat yang merupakan komunitas antropologis yang berskala kecil dan berada pada posisi lemah baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik dan hidup tersebar di seluruh pelosok tanah air telah terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak demikian dengan tataran internasional, kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat terus berlanjut sebagai bagian dari kelompok rentang (*vulnerable groups*) yang memerlukan perlindungan khusus. Dan kemajuan pada tataran internasional ini menciptakan suatu situasi yang menguntungkan bagi perlindungan hak masyarakat hukum adat pada tataran nasional.

Oleh karena itu, ketika Indonesia memasuki era reformasi maka peluang untuk memberikan perlindungan konstitusional yang lebih kuat terhadap masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya makin terbuka dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. TAP XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 41, Pasal 6 undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan dalam pasal 18 B ayat (2) serta pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua tahun 2000.

Walaupun demikian, pengakuan yuridis konstitusional terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut tidaklah serta merta dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan telah berkembangnya sistem hukum positif nasional selama lebih dari setengah abad sehingga bukan saja memberikan *legal standing* bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga telah mengeluarkan banyak kebijakan, peraturan serta keputusan yang secara efektif telah menegasikan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.

Dan sebagai akibatnya, banyak konflik terutama sekitar permasalahan pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah ataupun swasta. Oleh karena itu, Komnas HAM melalui Komisionernya berusaha untuk menangani dan menindaklanjuti tema ini.

## Pengertian

Dalam memahami masyarakat hukum adat, maka perlu dikembangkannya suatu paradigma dasar mengenai hubungan antara suku-suku bangsa di Indonesia dengan bangsa dan negara sebagai suprastrukturnya.

Masyarakat hukum adat (yang dalam bahasa asing disebut dengan berbagai istilah seperti *adat rechtsgemeenschap*, *adatrechts gemeenschap* atau *indigenous people* atau *tribal people*) sebagai komunitas antropologis yang sudah ada ratusan tahun, mungkin ribuan tahun di kepulauan Indonesia ini dan berada pada tataran yang paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunitas antropologis yang didasarkan pada pertalian darah ini bersifat otonom, mempunyai sistem hukum serta sistem pemerintahannya sendiri dan juga mempunyai wilayah sendiri. Oleh karena itu, tidaklah salah jika masyarakat hukum adat ini juga dinamakan sebagai 'republik desa' (*drops republiek*) oleh para tokoh pelopor ilmu hukum adat berkebangsaan Belanda seperti C. Van Vollenhoven atau B ter Haar Bzn.

Berada pada tataran kedua, diatas masyarakat hukum adat tersebut diatas adalah suku-suku bangsa (etnik) yang juga merupakan komunitas antropologis berdasarkan hubungan darah, tetapi lebih bersifat cultural. Biasanya beberapa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari suatu etnik yang lebih besar atau juga bisa dikatakan bahwa suatu etnik mencakup lebih dari suatu masyarakat hukum adat. Ilmuwan Belanda juga mempelajari etnik ini bersama dengan mempelajari masyarakat hukum adat dan mengembangkan ilmu *ethnologie* untuk mempelajari bangsa Indonesia yang majemuk ini.

Pada tataran ketiga, di atas etnik adalah bangsa (*nation*), sebagai suatu komunitas politik, jadi bukan lagi merupakan komunitas antropologi sebagai masyarakat hukum adat dan etnik, yang dibentuk secara sadar melalui berbagai kesepakatan diantara komponen-komponen bangsa.

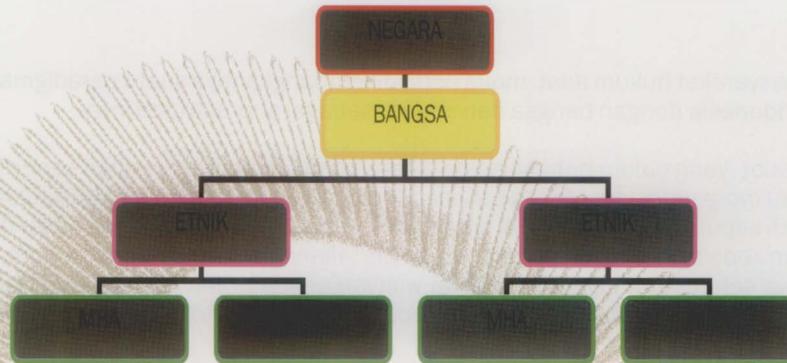
Di Indonesia momen-momen tersebut kemudian dinamakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 atau Hari Supah Pemuda 28 Oktober 1928. harus diakui bahwa berbeda dengan studi masyarakat hukum adat dan studi mengenai etnik, amat sedikit kajian mendasar yang telah dilakukan terhadap masalah bangsa dan kebangsaan ini, baik oleh pakar Belanda maupun oleh pemimpin republik sendiri karena berbagai sebab terdapat kesan bahwa eksistensi bangsa dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Sumpah Pemuda. Sikap seperti itu jelas amat keliru, seperti dingatkan oleh Ir. Soekarno - dengan mengutip Ernest Renan - bahwa sesungguhnya bangsa itu adalah hasrat untuk hidup bersama (*le desir d'etre ensemble*) yang harus dipupuk melalui plebisit (referendum) setiap hari.

Akhirnya pada tataran keempat, paling tinggi adalah Negara, yang merupakan subyek utama hukum internasional, yang selain harus mampu melaksanakan fungsinya ke dalam negeri juga harus mampu menunaikan tanggung jawab internasionalnya. Rujukan dasar dari eksistensi Negara sebagai subyek utama hukum internasional ini adalah Konvensi Montevideo tahun 1933.

Jika keseluruhan hubungan empat unsur tersebut kita visualisasikan, kita akan memperoleh gambaran sebagai berikut:

:

## HUBUNGAN STRUKTURAL ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT, ETNIK, BANGSA DAN NEGARA



### Kriteria Masyarakat Hukum Adat

1. Kriteria Obyektif
  - a. Merupakan komunitas antropologis yang sedikit banyaknya bersifat homogen
  - b. Mendiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik lahiriah maupun rohaniah, dengan suatu wilayah leluhur (*homeland*) tertentu atau sekurang-kurangnya dengan sebagian wilayah tersebut.
  - c. Adanya suatu identitas dan budaya yang khas serta sistem sosial dan hukum yang bersifat tradisional yang secara sungguh-sungguh diupayakan mereka untuk melestarikannya.
  - d. Tidak mempunyai posisi yang dominant dalam struktur dan system politik yang ada.
2. Kriteria Subyektif
  - a. Identifikasi diri (*self identification*) sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat secara aktif memelihara identitas diri mereka itu.
  - b. Dipandang oleh pihak lain diluar komunitas antropologis tersebut sebagai suatu komunitas yang terpisah.

### Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

1. Hak Perseorangan sebagai Warga Negara

Sebagai warga Negara , warga masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga Negara lainnya.

2. Hak Kolektif sebagai Masyarakat Hukum Adat

Sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights of internal self determination*).
- b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (*rights of participation*)
- c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi (*rights to food, health, habitat, and economic security*)
- d. Hak atas pendidikan (*rights to education*)
- e. Hak atas pekerjaan (*rights to work*)
- f. Hak anak (*rights of children*)
- g. Hak pekerja (*rights of workers*)
- h. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat (*rights of minorities and indigenous peoples*)
- i. Hak atas tanah (*rights to land*)
- j. Hak atas persamaan (*rights to equality*)
- k. Hak atas perlindungan lingkungan (*rights to environmental protection*)
- l. Hak atas pelayanan administrasi pemerintahan yang baik (*rights to administrative due process*)
- m. Hak atas penegakan hukum yang adil (*rights to the rule of law*)

## Latar Belakang Sejarah

### 1. Tinjauan Antropologik

Masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah amat tua, jauh lebih tua dari terbentuknya kerjaan ataupun Negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migrant dari kawasan lainnya di asia tenggara. Namun, secara kultural, mereka termasuk dalam kawasan budaya *Austronesia*, yaitu budaya petani sawah dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Pada awalnya masyarakat hukum adat mempunyai agama sukunya sendiri yang kemudian berakulturasi dengan agama-agama dunia yang datang dari luar, seperti agama Hindu, agama Budha, agama Islam dan agama Kristen. Namun, kedatangan agama-agama ini tidak menghapuskan pengaruh agama suku yang sudah ada sebelumnya.

Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional, seperti sriwijaya dan majapahit

### 1. Kontak dengan Dunia Barat: Dekrit Tordesilas 1494; doktrin *rex nullius* dan asas *regalia*

Setelah Christopher Columbus 'menemukan' benua amerika pada tahun 1492 dengan Dekrit Tordesilas tahun 1494 kerajaan Portugal dan Spanyol membagi dunia dalam dua wilayah pengaruh. Kepulauan Indonesia dinyatakan sebagai wilayah pengaruh kerajaan Portugis yang datang pada tahun 1511 dan Kepulauan Filipina dinyatakan berada di bawah pengaruh kerajaan Spanyol.

Sesuai dengan doktrin *rex nullius* dan asas *regalia* yang dianut pada saat itu, seluruh wilayah pengaruh tersebut dinyatakan secara sepihak sebagai milik raja yang bersangkutan, termasuk wilayah kerajaan-kerajaan tradisional serta tanah ulayat suku-suku bangsa Indonesia. Doktrin *rex nullius* dan asas *regalia* ini dilanjutkan oleh rangkaian kerajaan-kerajaan Eropa lainnya, yang secara beruntun menguasai kepulauan Indonesia, yaitu Kerajaan Belanda/1 (1799-1808), Kerajaan Perancis (1801-1811), Kerajaan Inggris (1811-1816), Kerajaan Belanda/ (1816-1942) dan sebagai penyela, kekaisaran Jepang (1942-1945)

## 2. Kolonialisme Belanda, asas *Divide et Impera*

Kerajaan Belanda menjabarkan asas *regalia* 1494 tersebut dengan *domein verklaring* dalam *Agrarische Wet* 1870 yang secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan adanya kepemilikan atasnya adalah milik kerajaan. Hal ini menimbulkan konflik antara kerajaan Belanda dengan kerajaan-kerajaan tradisional maupun masyarakat hukum adat yang sudah ada selama ratusan tahun. Mereka melancarkan perlawanan yang gigih yang mengharuskan kerajaan-kerajaan eropa tersebut mencari strategi yang lebih canggih dari hanya sekedar penaklukan militer.

Oleh karena itu, Kerajaan Portugal dan Kerajaan Belanda menciptakan politik kolonial yang lumayan canggih untuk menguasai kepulauan Nusantara yang berpenduduk sangat majemuk, yaitu politik *divide et impera*, pecah belah dan kuasai. Untuk maksud itu, mereka perlu memahami secara mendalam keanekaragaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Didorong oleh motivasi keilmuan dan terkait dengan urgensi kebijakan pemerintahan kolonial yang dipelopori oleh Prof. C. Van Vollenhoven dan Prof. Mr. B. Ter Haar pada zaman Hindia Belanda telah tumbuh dan berkembang studi hukum adat serta masyarakat hukum adat. Kedua pakar hukum adat ini menenggarai ada 19 buah lingkungan hukum adat (*adatrechts kringen*) di Indonesia. Desa di Jawa dan daerah-daerah setingkat seperti nagari di Minangkabau dan marga di Sumatera Selatan disebut sebagai masyarakat hukum adat (*adatrechts gemeenschappen*). Berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap keanekaragaman hukum adat Indonesia inilah maka rezim kolonial Hindia Belanda mengadakan penyesuaian kebijakannya dengan sosio cultural masyarakat Indonesia dengan membedakan antara daerah-daerah yang diperintah langsung (*directe bestuur gebied*) di pulau Jawa dan Madura, dengan daerah yang diperintah secara tidak langsung (*indirecte bestuur gebied*) melalui kepala-kepala adatnya di luar pulau Jawa.

### Dinamika Posisi Etnik dan Masyarakat Hukum Adat

Melihat perkembangan masyarakat hukum adat maka tidak akan lepas dari perkembangan masa di Indonesia yaitu dimulai dari masa kolonialisme Belanda dan masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, bersamaan dengan berkembangnya studi masyarakat hukum adat, maka pada tahun 1930 pemerintahan Hindia Belanda mengadakan sensus penduduk yang mencakup pengumpulan data mengenai suku bangsa atau etnik. Pada masa ini masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai bagian dari etnik atau suku bangsa. Sedangkan, pada masa kemerdekaan, terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Dalam merancang Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri Negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat yang bersifat asli ini termasuk hak ulayat mereka. Pendirian ini dilanjutkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dipersiapkan sejak tahun 1948.
2. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu:
  - a. Ketidaktahuan pemerintahan pusat tentang kemajemukan cultural masyarakat Indonesia serta implikasinya yang antara lain terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa.
  - b. Kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967, khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang menyebabkan Pemerintah bersama dengan DPR RI mengeluarkan serangkaian undang-undang yang secara *in concreto* malah menafikan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Baik langsung maupun secara tidak langsung, seluruh undang-undang tentang investasi sejak tahun 1967 ini bukan saja menghidupkan kembali doktrin *res nullius* dan asas *regalia* yang bersifat imperialistik dan merupakan warisan abad ke 16 tersebut, tetapi juga melaksanakan konsep neoliberalisme model *The Washington Consensus* yang hendak mencabut fungsi kesejahteraan Negara

dan menyerahkannya kepada kekuatan pasar. Sedangkan, Republik Indonesia belum mempunyai data mengenai jumlah, lokasi serta luasnya tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ini.

- c. Tumbuhnya kecenderungan sentralisasi pemerintahan yang sangat kuat dan menyebabkan kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini *inkompatibel* dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat dan masyarakat hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional.

3. Pada tahun 2000, yaitu 70 tahun setelah sensus penduduk pertama dan setelah 45 tahun Indonesia merdeka, diadakan sensus kedua mengenai masalah etnik ini. Hasil sensus kedua ini menampilkan banyak data baru yang bukan saja telah mengubah banyak asumsi yang dianut mengenai masalah etnik dan masyarakat hukum adat ini, tetapi hal ini juga mempunyai implikasi kepada kebijakan, khususnya kebijakan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok Komnas HAM. Dari sensus tahun 2000 ini dengan memakai tolok ukur *self identification*, telah dicatat adanya 1.072 etnik atau suku bangsa atau hukum adat.

Pada perkembangan dewasa ini, berbeda dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang secara otomatis memberikan pengakuan terhadap *adat rechts gemeenschap*, Pemerintah Republik Indonesia tidak secara otomatis memberikan pengakuan tersebut. Walaupun dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat klausula dan syarat-syarat yang bersifat limitatif bagi pengakuan eksistensi hukum adat, yang antara lain adalah (1) sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih ada, (2) Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) Diatur dalam Undang-Undang.

Namun, walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam Undang-Undang dasar 1945 terutama hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Dan adakalanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya ini berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik.

Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban nyawa dan harta. Selain itu, pengakuan yuridis terhadap suatu masyarakat hukum adat mempunyai arti penting, oleh karena itu, menurut pasal 51 undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara konstitusional. Sebagai konsekuensinya, suatu masyarakat hukum adat yang tidak atau belum mempunyai legalitas akan menghadapi kendala dalam membela hak-haknya yang memang sudah sering terjadi, baik oleh aparaturnya Negara maupun oleh pihak ketiga lainnya. Pada beberapa masyarakat hukum adat telah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan dari masyarakat hukum adat, baik yang dilakukan oleh umat seagama maupun oleh umat yang berlainan agama.

Melihat pada ketidakkonsistenan sistem hukum nasional Indonesia terhadap status yuridis dan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, komunitas Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat (*the indigenous peoples*) sebagai bagian dari *vulnerable groups*. Instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang melindungi masyarakat adat antara lain adalah (1) Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka. (2) *Draft Declaration on the Rights of the Indigenous People*.

Berdasarkan Bab 2 Pasal 7 dalam *Draft Declaration on the Rights of the Indigenous People*, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemusnahan etnis dan penghancuran budaya etnis tersebut adalah :

1. Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang menceraibera masyarakat hukum adat dan integritas mereka sebagai masyarakat yang khas atau dari identitas atau dari nilai-nilai budaya mereka;
2. Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang merampas tanah, wilayah atau sumber daya yang mereka kuasai;
3. Setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau akibat yang melanggar atau mengancam hak-hak mereka;
4. Setiap bentuk asimilasi atau percampuran oleh budaya atau cara hidup yang lain, yang dipaksakan atas mereka melalui mekanisme legislatif, administratif atau yang lainnya;
5. Setiap bentuk propaganda yang diarahkan terhadap masyarakat hukum adat. Hukum adat mencakup hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya.

### Komnas HAM dan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah suatu badan hukum (*legal entity*) yang memperoleh legalitas dan legitimasinya dari sejarah dan dari peraturan perundang-undangan Negara. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat itu sendiri maupun adat istiadat serta kebudayaannya yang menjadi dasar pembentukannya tumbuh dan berkembang secara dinamis dan perlu memperoleh kesempatan untuk mengambil manfaat dari perkembangan kehidupan budaya diluarnya, khususnya dalam konteks pembangunan manusia (*human development*).

Dan hal ini yang didukung oleh Komnas HAM dan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya, Komnas HAM berdasarkan pada undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Posisi Komnas HAM adalah menerima, mengakui dan menghormati eksistensi dan identitas kultural dan agama/keyakinan masyarakat hukum adat seperti yang dirumuskan sendiri oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak masyarakat hukum adat ini, Komnas HAM menanganinya melalui dua subkomisi, yaitu subkomisi hak ekonomi, sosial dan budaya dan subkomisi perlindungan kelompok khusus. Dan sasaran yang ingin dicapai adalah terlindunginya eksistensi dan terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya serta mendayagunakan konsep *the right to development* pada umumnya dan konsep *human development* pada khususnya untuk mendorong kemajuan masyarakat hukum adat.

### Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat, komnas HAM melakukan beberapa kegiatan, yang antara lain : (1) Pengkajian, (2) Pendidikan dan Penyuluhan, (3) Pemantauan, dan (4) Mediasi.

Pengkajian ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Mengkaji hubungan kultural dan struktural antara masyarakat hukum adat dengan etnik, bangsa dan negara, serta mendorong terwujudnya kepastian hukum dan status dari masyarakat adat.
2. Memprakarsai Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, sekurang-kurangnya mendorong diratifikasinya konvensi ILO Nomor 169 Tentang *Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*.

3. Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, jajaran Departemen Dalam Negeri dan kalangan perguruan tinggi untuk mengadakan inventarisasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.
4. Mengadakan pengkajian pendahuluan terhadap realitas pelaksanaan klausula syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
5. Bekerjasama dengan subkomisi hak sipil dan politik, subkomisi perlindungan kelompok khusus dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemajuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, mengkaji peraturan perundang-undangan yang telah atau berpotensi melanggar hak masyarakat hukum adat, termasuk perlindungan terhadap eksistensi agama-agama suku.
6. Bekerjasama dengan perguruan tinggi mengkaji faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat mempercepat terpenuhinya pembangunan manusia masyarakat hukum adat.
7. Bekerjasama dengan kalangan perguruan tinggi mengkaji dasar-dasar kebijakan pencegahan konflik horizontal antar warga masyarakat hukum adat; antara warga masyarakat hukum adat dengan warga pendatang.
8. Mengadakan komunikasi dan tukar menukar pengalaman dengan negara-negara lain serta dengan badan PBB yang terkait dengan masyarakat hukum adat, antara lain *The Working Group on the Indigenous People*.
9. Menerjemahkan dan mempublikasikan berbagai publikasi PBB tentang hak masyarakat hukum adat, antara lain *UN Draft Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples*.
10. Mendorong dibangun dan dikembangkannya kepustakaan masyarakat hukum adat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Komnas HAM.

Sedangkan, kegiatan Pendidikan dan penyuluhan dilakukan dengan:

1. Menyusun dan menerbitkan literatur yang terkait dengan perlindungan dan pemajuan hak masyarakat hukum adat
2. Mensosialisasikan hak konstitusional masyarakat hukum adat kepada instansi pemerintah, lembaga legislative, serta kepada organisasi masyarakat hukum adat itu sendiri.
3. Memprakarsai orientasi pengenalan sejarah, sistem nilai serta lembaga-lembaga budaya masyarakat hukum adat terpilih bagi para pejabat pemerintah yang akan bertugas ke daerah yang bersangkutan.
4. Memberikan tempat bagi bahan-bahan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan masyarakat hukum adat pada situs *website* Komnas HAM
5. Bekerjasama dengan pakar antropologi, mendorong tersusun serta tersedianya sarana multimedia yang menjelaskan aspirasi dan kepentingan masyarakat hukum adat.
6. Memfasilitasi pemanfaatan sumber daya dari PBB dan badan-badan internasional lainnya untuk menyukseskan program pembangunan manusia (*human development*) masyarakat adat.

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan cara:

1. Bekerjasama dengan pemerintah daerah tingkat dua setempat, menginventarisasi dan membangun jejaring masyarakat hukum adat.
2. Bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat hukum adat.
3. Bekerjasama dengan BPS, Bappenas dan Departemen Dalam Negeri memantau perkembangan tahunan *Human Development Index* (HDI), *Human Proverty Index* (HPI), *Genderrelated Development Index* (GDI), dan *Gender Empowerment Measures* (GEM) dari masyarakat hukum adat pada umumnya dan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan dan hak atas rasa aman pada khususnya.
4. Memfasilitasi masyarakat hukum adat yang hendak mempergunakan haknya sebagai pemohon dalam mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi berdasar Pasal 51 undang-undang no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Program mediasi dilakukan bersama dengan LSM dan instansi pemerintah untuk membantu mengatasi penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

*Catatan : Makalah telah diedit oleh tim redaksi*



Tari Serampang Duabelas dari Melayu Serdang



Perayaan pada  
Suku Melayu di Sulawesi Tengah



Tarian Penggringsingan Bali

## SESI KEDUA

Pembicara:

Dr. Suraya Afiff  
Dr. Shri Heddy Ahimsa Putra  
Dr. Zulyani Hidayah

Moderator:

Dr. Ayu Sutarto

Sesi kedua ini membahas mengenai komunitas adat dari segi pengelolaan ekosistem, religi, sosial budaya dan ekonomi.

\*\*\*\*\*



# KOMUNITAS ADAT DALAM KONTEKS PELESTARIAN ALAM DAN LINGKUNGAN<sup>1</sup>

Oleh:

Suraya A. Afiff<sup>2</sup>



Dalam tulisan ini akan dibahas secara umum praktek pengelolaan sumberdaya alam yang digunakan oleh beberapa komunitas adat di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pengamat menilai beberapa sistem pengelolaan “tradisional” yang terbukti mempunyai nilai penting dalam konteks pelestarian alam dan lingkungan termasuk juga dalam konteks sosial, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung dari hasil-hasil pertanian (de Foresta dkk, 2000; Nadapdap dkk, 1995; Wiersum, 1980; Zakaria, 1994). Namun, sejumlah faktor dalam konteks politik dan ekonomi maupun perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri dapat mengancam keberlangsungan praktek dari sistem-sistem pengelolaan ini.

Cukup banyak tulisan yang mengulas tentang praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas adat yang hidup di berbagai wilayah di Indonesia yang selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan dan alam yang lestari dan berkelanjutan. Di sejumlah tempat di Indonesia, misalnya, ditemukan perkebunan rakyat yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan atau yang secara umum dikenal sebagai kebun *agroforest* (kadang juga dikenal dengan sebutan wanatani). Ragam dari sistem kebun *agroforest* bisa dari yang paling sederhana seperti contohnya pada sistem tumpang sari, hingga ke yang sangat kompleks dimana masyarakat menanam berbagai tumbuhan yang terdiri dari tanaman keras seperti buah-buahan, kayu-kayuan, dan tanaman keras lainnya yang bercampur dengan tanaman semusim, merambat, dan tanaman perdu. Dari penampakan fisik, sistem *agroforest* yang kompleks terlihat mirip seperti layaknya hutan alam (de Foresta dkk, 2000). De Foresta dkk (2000) dalam buku yang dipublikasi oleh ICRAF (*World Agroforestry Center*) mengemukakan berbagai contoh kebun sistem *agroforest* yang kompleks yang dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Dituliskan ini hanya akan dicontohkan dua saja dari sistem *agroforest* untuk memberikan gambaran sekilas kepada pembaca.

Contoh pertama dari kebun *agroforest* ini adalah Tembawang. Kalimantan Barat adalah salah satu tempat dimana kita dapat menemukan kebun *agroforest* yang dikenal secara luas sebagai “Tembawang.” Menurut Momberg (2000), yang melakukan pengamatan di desa-desa di lembah sungai kapuas, Sangau, Kalbar, Tembawang dibangun oleh pemiliknya umumnya dilahan bekas tempat mereka berladang padi. Ketika membuka ladang, masyarakat Dayak tetap mempertahankan pohon-pohon hutan alam terutama yang bernilai penting. Setelah ladang tidak lagi digunakan, masyarakat melakukan pembudidayaan dengan berbagai jenis tanaman yang berasal dari hutan alam sekitar maupun tanaman yang bukan asli hutan, seperti contohnya karet. Tanaman pohon terpenting dalam sistem Tembawang ini adalah tengkawang (*Shorea spp*), karet, nyatuh (yang menghasilkan getah). Tanaman ini ditanam bercampur dengan berbagai pohon buah-buahan dan kayu-kayuan lainnya. Jumlah pohon buah-buahan yang ada dalam sistem tembawang di salah satu tempat pengamatan, menurut Momberg, bisa mencapai 45 jenis buah-buahan yang terdiri dari 10 jenis liar dan 35 jenis yang dibudidaya. Salah satu buah-buahan yang terpenting yang dibudidayakan di tembawang adalah berjenis-jenis Durian. Dalam sistem tembawang ini juga terdapat berbagai jenis kayu seperti Belian, Kayu Besi, dan kayu ulin. Tumbuhan penting lainnya adalah berbagai jenis rotan dari jenis yang banyak digunakan untuk membuat anyaman sampai dengan jenis rotan yang biasa digunakan untuk pembuatan mebel.

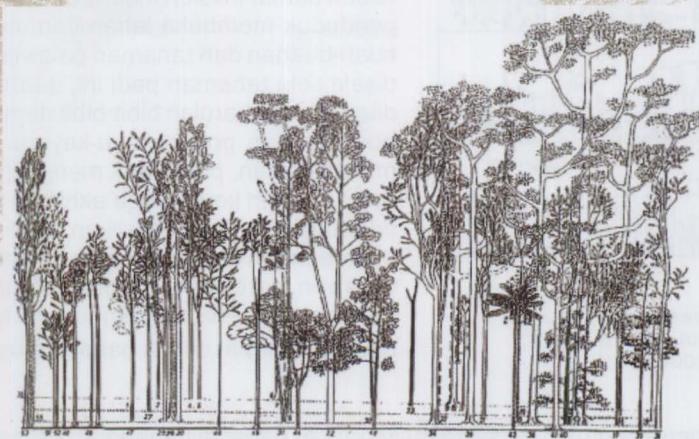
<sup>1</sup> Makalah ini dipresentasikan pada acara Gelar Budaya Komunitas Adat dengan tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Warisan Budaya dalam Rangka Pembangunan Kebudayaan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pada tanggal 25 Juli 2007 di Makassar.

<sup>2</sup> Penulis adalah ketua Pusat Kajian Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Dengan demikian Tembawang mempunyai nilai ekonomi penting bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Kepemilikan Tembawang umumnya adalah oleh seluruh anggota keluarga yang diwariskan secara turun temurun, namun ada pula Tembawang yang kepemilikannya pribadi dan ada pula yang kepemilikannya bersama oleh masyarakat desa setempat. Dari sisi ekologi, sistem ini punya nilai penting bagi pelestarian alam dan lingkungan karena Tembawang memiliki keanekaragaman species yang tinggi dan struktur vegetasinya yang berlapis-lapis sehingga menyerupai hutan alam. Pada Gambar 1 di bawah ini diperlihatkan profilutupan vegetasi salah satu Tembawang yang ditemukan di desa Gok Tanjung, di Kabupaten Sanggau, Kalbar berdasarkan pengamatan Momberg (2000). Dari pengamatan Momberg (2000: 95-96) di empat petak Tembawang yang luas totalnya 6.600 m<sup>2</sup>, peran penting Tembawang selain untuk perlindungan tanah dan air adalah juga untuk pelestarian plasma nutfah hutan baik tumbuhan maupun hewan. Momberg menemukan 126 spesies dalam ¼ ha Tembawang di salah satu petak pengamatannya. Menurutnya, keragaman spesies di kebun Tembawang ini jauh lebih tinggi dari keragaman spesies yang pernah diteliti di wilayah hutan alam di Kalimantan Timur, dimana dalam 2 ha hutan alam, hanya ditemukan 250 species.

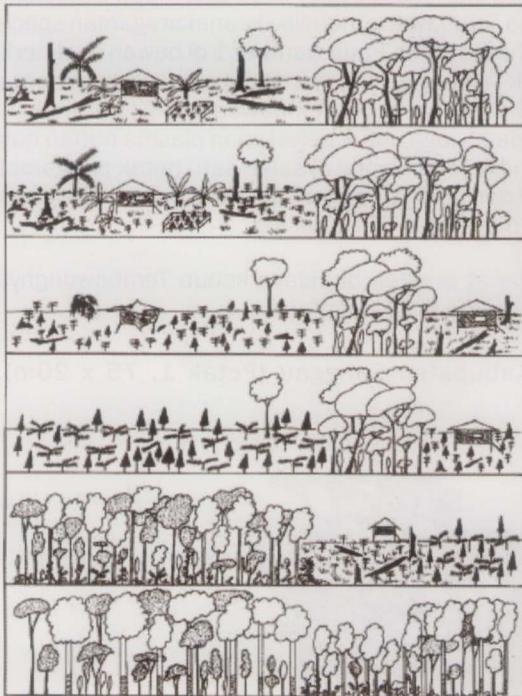
Hal ini menunjukkan bahwa komunitas adat di Kalimantan, lewat praktek budidaya kebun Tembawangnya, telah memberikan sumbangan besar bagi pelestarian keanekaragaman hayati hutan di Kalimantan.

Gambar 1. Profil arsitektur tembawang di Desa Gok Tanjung, Kabupaten Sanggau (Petak 1, 75 x 20m).



Keterangan:

Tampui 2;3;5;6;20;21;22;24;29; 46;47;49;51, Tengkawang 7;9;10;12;35;36;41, kelupai 15;19;25;53;56, Mentawa 26;30;34;38;45, Cempedak 27;50;52;54, Nyatu 8;28;55, Elaeocarpus sp. 39, Belian 40; 43, Beruas 32, Burok 12, kayu bengkel 33, kayu bulu 31, kayu dada 18, kayu monyan 48, kayu raya 16, kayu tantang 17, kayu wan 37, ketuat 1, krubung tuncong 11, pekawai 14, pintau 4, renkajau 42, simpak 44, Sumber: Momberg (2000: 95).



Gambar 2. Proses pembuatan kebun Damar di Pesisir Krui, Lampung.  
Sumber: Michon dkk (2000: 27).

Contoh ke dua dari kebun *agroforest* adalah Repong Damar. Repong Damar adalah sistem *agroforest* Damar yang dikenal oleh penduduk di wilayah Pesisir Krui, Lampung. Salah satu alasan masyarakat membudidayakan tumbuhan damar adalah karena tingginya nilai ekonomi resin damar mata kucing yang perdagangannya telah berlangsung sejak tiga ribu tahun yang lalu (Michon dkk, 2000). Menurut Michon dkk (2000), penanaman di Pesisir Krui, telah dimulai sekitar 1927. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1937, perkebunan damar meluas hingga 50.000 hektar. Penduduk melakukan pembudidayaan damar secara bertahap. Kalau hanya melihat tampilan fisik luar dari kebun damar ini, orang yang baru datang ke daerah ini sering mengira hutan damar yang lebat di sini sebagai hutan alam.

Michon dkk (2000:27) menjelaskan proses membangun kebun damar ini oleh masyarakat Pasir Krui, Lampung. Pada awalnya penduduk membuka lahan dan menanaminya dengan padi, sayur, buah-buahan dan tanaman palawija lainnya. Pada tahun berikutnya, disela-sela tanaman padi ini, ditanam juga kopi. Setelah padi tidak ditanam lagi, barulah bibit-bibit damar ditanam disela-sela kopi, buah-buahan, dan pohon kayu-kayuan lainnya. Selama damar belum menghasilkan, penduduk menggantungkan penghasilan ladangnya dari tanaman kopi hingga akhirnya hasil kopi menurun. Setelah kopi tidak lagi dapat menghasilkan, hasil ladang tergantung pada tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan. Hasil dari resin damar barulah dapat dipanen setelah usia damar mencapai 20 tahun sejak masa penanaman. Proses pembuatan kebun damar sehingga menjadi repong ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Pentingnya kebun damar bagi perekonomian masyarakat setempat dapat digambarkan sebagai berikut. Hasil resin damar dari pesisir Krui ini menyumbang sekitar 80 persen dari total produksi damar di Indonesia. Sekitar 80 persen desa dari total desa di kawasan Pesisir Krui mayoritas dari penduduknya terlibat dalam budidaya damar (Michon dkk, 2000:31). Ancaman terhadap keberlangsungan repong damar yang dibangun oleh masyarakat ini pernah sempat terjadi karena negara mengklaim wilayah ini sebagai "kawasan hutan negara" dimana pemerintah c.q. Departemen Kehutanan memasukkannya kedalam kawasan hutan produksi yang hak pemanfaatannya diserahkan ke perusahaan HPH. Berkat upaya berbagai pihak termasuk juga perjuangan masyarakat Pesisir Krui sendiri, akhirnya Menteri Kehutanan pada tahun 1998 menjadikan kawasan seluas 29.000 hektar termasuk kedalam Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KTI). Keputusan ini memberikan sedikit kepastian kepada petani untuk melanjutkan usaha budidaya damar yang selama ini merupakan sumber kehidupan mereka (Michon dkk., 2000).

Bila di Kalimantan dan Sumatra kita banyak menemukan pengembangan agroforest *Dipterocarpaceae* oleh masyarakat setempat, di kawasan dengan ekosistem kering dan tandus seperti di Nusa Tenggara dikenal juga berbagai model sistem agroforestry (atau wanatani) yang lain yang telah dipraktekkan oleh komunitas-komunitas adat setempat. Di sini di dalam suatu wilayah pertanian penanaman tahunan dan musiman dilakukan secara bergiliran. Sistem ini dianggap cocok dengan kondisi Nusa Tenggara dimana tanahnya reletif tidak subur dan tekanan pemanfaatan terhadap lahan untuk pertanian tinggi. Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan pada tahun 2002 dapat dikumpulkan sekitar duapuluh model sistem wantani yang dipraktekkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara (Roshetko dkk., 2002).

Selain di kawasan hutan, sistem pengelolaan sumberdaya alam yang penting artinya untuk pelestarian lingkungan juga dapat ditemukan di wilayah pesisir dan laut. Sebagai salah satu contoh pengelolaan perikanan yang berbasis masyarakat yang banyak mendapat perhatian para pengamat adalah sasi yang dipraktekkan berbagai komunitas adat di sejumlah wilayah di Maluku (Nikijuluw, 1995). Sasi adalah suatu bentuk aturan yang diterapkan untuk mengatur pemanfaatan suatu sumberdaya alam—baik di hutan/daratan maupun di pesisir dan laut. Sasi atau di Kei dikenal dengan sebutan *hawear* itu telah berkembang di beberapa tempat di Maluku, adalah suatu sistem yang mengatur pelarangan sementara untuk memanen suatu jenis komoditi tertentu, memotong kayu, atau mengumpulkan hasil alam tertentu baik dari pekarangan, hutan, pesisir, atau wilayah *petuanan* (atau *ulayat*) dari suatu kampung, juga termasuk pelarangan terhadap perilaku masyarakat yang mengganggu ketertiban dan tercela secara moral (Thorburn, 2003).

Pemanenan atau pemanfaatan hasil laut (atau hutan) baru boleh dilakukan setelah ketentuan pelarangan ini dicabut. Di pulau Haruku, misalnya, dikenal sistem sasi lompa, sejenis ikan yang hidup di air laut. Namun pada masa ikan akan memijah, ikan ini akan bermigrasi ke sungai-sungai air tawar dan kembali ke laut setelah masa itu selesai. Masyarakat lewat institusi adatnya menetapkan dan menegakkan aturan untuk memastikan bahwa ikan lompa dipanen setelah masanya memijah selesai. Dengan adanya pengaturan ini berarti ketersediaan stok ikan ini diperairan menjadi terjaga. Selain itu, di beberapa tempat di Maluku, sistem sasi ini juga diterapkan terhadap pemanenan *trochus*, sejenis moluska yang punya nilai komoditi penting bagi masyarakat pantai disekelompok tempat di Kepulauan Maluku. *Trochus* adalah komoditi perdagangan laut yang cukup penting dan perdagangan jenis moluska telah berlangsung lama di Maluku.

Apa yang dikemukakan penulis di atas adalah sebagian dari contoh kecil dari beragamnya praktek pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok adat yang tersebar di bumi nusantara ini. Berbagai penelitian ahli dari beragam latarbelakang keilmuan menegaskan pentingnya mempertahankan dan bahkan memperkuat keberadaan institusi masyarakat yang mendorong adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Hanya saja, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pula tantangan yang berasal baik dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri yang dapat mengancam keberlangsungan dari institusi yang sesungguhnya punya manfaat penting tidak saja dari sisi ekologi, tapi juga sosial.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dari praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang penting bagi pelestarian lingkungan oleh komunitas adat.

Harkes dan Novaczek (2003), misalnya, tertarik untuk melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya tradisi sasi laut disekelompok desa di Maluku. Dari 63 desa yang diteliti, mereka menemukan bahwa praktek sasi laut telah hilang di 19 desa. Kebanyakan hilangnya praktek sasi laut ini terjadi pada tahun 1990an. Hasil penelitian mereka mendapatkan bahwa faktor-faktor penyebab hilangnya sistem sasi dibeberapa desa ini antara lain karena masalah komersialisasi, modernisasi, dan mudurnya penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional oleh masyarakat itu sendiri (hal.: 63). Selain itu, faktor lemahnya kepemimpinan (*leadership*) setempat dan ditambah dengan munculnya sejumlah konflik di masyarakat juga termasuk faktor pemicu. Konflik-konflik ini bisa terjadi antara pemimpin desa dan petugas adat (dalam hal ini *kewang*), konflik diantara aparat pemerintahan desa sendiri, konflik diantara organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan yang punya peran penting dalam mendukung sasi, dan konflik tata batas sebagai akibat dari terjadinya perubahan adimintrasi dari kampung-kampung itu.

Sementara pengamatan Thorbourn (2003) di Kei menemukan bahwa evolusi sasi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi, perubahan nilai terhadap komoditi, dan perubahan orientasi ekonomi dari masyarakat termasuk juga para tokoh adatnya. Di Kei, menurut Thorburn, akibat dari perubahan-perubahan itu, sasi tidak mampu menghalangi penggunaan *cyanide* dalam perdagangan ikan hidup (*live fish trade*) yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bekerjasama dengan sebagian dari warga setempat. Namun yang perlu juga diingat bahwa penggunaan teknologi yang mengancam kelestarian ekosistem laut seperti pada kasus penggunaan *cyanide* seringkali pula disebabkan oleh adanya kolusi antara aparat pemerintah dengan para pengusaha yang memanfaatkan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa. Adanya pengusaha yang menyogok oknum aparat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat membuat penegakan hukum menjadi mandul dan tidak berfungsi terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua penduduk kadang setuju dengan praktek-praktek yang merusak ini. Namun mereka yang tidak setuju seringkali tidak berdaya menghadapi konstalasi kekuasaan yang korup seperti ini. Meski sesungguhnya tidak semua penduduk terlibat dalam praktek yang merusak sumberdaya yang penting untuk kehidupan mereka, namun seringkali seluruh komunitas adat menerima getahnya menghadapi pelabelan dan tuduhan orang luar sebagai perusak alam, perambah, dsb. Hal ini seperti yang dialami oleh masyarakat Sama (atau Bajau) di Kepulauan Togian yang sering menerima tuduhan sebagai pembom ikan tanpa melihat kenyataan bahwa praktek ini hanya dilakukan oleh segelintir penduduk setempat sementara kebanyakan dari para pembom ini justru bukan dari etnis Sama (Lowe, 2000).

Dalam kasus kebun *agroforest*, tidak disemua tempat pemerintah berupa melindungi kebun *agroforest* yang dibangun oleh masyarakat seperti halnya yang diperoleh oleh masyarakat di Pesisir Krui, Lampung. Banyak lahan hutan dan peladangan dari komunitas adat masuk dalam kawasan yang diklaim negara sebagai kawasan hutan, seperti contohnya yang dialami oleh komunitas adat dari Kampung Sungai Utik di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan ladang dan wilayah hutan yang mereka kelola secara lestari saat ini terancam karena pemerintah memasukkan wilayah adat masyarakat Kampung Sungai Utik kedalam klasifikasi hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan HPH, dalam hal ini PT Buana Lestari. Meskipun pada saat ini aktivitas perusahaan HPH belumlah sampai merambah ke wilayah adat masyarakat Kampung Sungai Utik, namun tidak adanya pengakuan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan atas batas-batas wilayah adat masyarakat Kampung Sungai Utik membuat masyarakat selalu resah dan merasa berada dalam ketidakpastian. Selain itu, masih banyak pejabat pemerintah yang menganggap bahwa kebun *agroforest* adalah model berkebun secara "tradisional" yang dianggap terbelakang. Banyak juga yang menganggap kebun seperti itu adalah kebun yang tidak terawat oleh karenanya tidak produktif. Kurangnya apresiasi pemerintah dapat berarti kurangnya penghargaan kepada upaya berbagai pihak termasuk masyarakat setempat untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan kebun-kebun *agroforest* yang telah dibangun masyarakat. pemerintah mengakui hak-hak masyarakat khususnya ketika mereka harus berhadapan dengan pihak perusahaan HPH itu.

Perubahan pola perkebunan kearah sistem yang monokultur juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam keberlangsungan dari kebun *agroforest* ini (Wiersum, 1982). Hal ini dapat diamati dari banyaknya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan rakyat yang lebih mendorong diterapkannya pola tanam yang monokultur karena dianggap dapat memaksimalkan hasil dan dianggap "lebih modern." Dengan pola tanam yang monokultur berarti petani tergantung hanya pada satu komoditi saja, yang juga berarti rentan terhadap adanya fluktuasi harga dari komoditi tersebut di pasar nasional maupun internasional atau faktor lainnya seperti munculnya penyakit tanaman yang dapat berdampak luas. Selain itu, konversi hutan untuk membangun perkebunan dengan skala ratusan ribu hektar adalah ancaman terbesar yang saat ini. Keberadaan berbagai sistem pengelolaan hutan yang telah turun temurun dipraktikkan oleh masyarakat setempat dapat punah akibat dari konversi lahan misalnya untuk perkebunan sawit yang saat ini banyak di dukung oleh pemerintah daerah.

Memang tidak dipungkiri bahwa telah juga terjadi perubahan nilai-nilai terhadap fungsi lahan, hutan, dan kekayaan laut dalam masyarakat akibat modernisasi. Perubahan orientasi dan kebutuhan ini sesungguhnya dapat diatasi antara lain dengan cara mengadopsi sistem yang sudah baik dan meningkatkan nilai gunanya antara lain dengan cara mengintroduksi teknik-teknik



Komunitas Adat di Laura Sumba

Foto: J. Limberg



Fenia Meroh



Madika Langa



Suku upacara Perayaan Suku Ahi

Foto: J. Limberg

baru atau bahkan spesies tumbuhan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat pada masa kini. Namun, ironisnya, tantangan terbesar seringkali lebih karena ketiadaan dukungan dari pemerintah sendiri baik di pusat maupun di daerah untuk praktek-praktek dan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh komunitas adat. Konversi hutan yang saat ini terjadi secara besar-besaran untuk perkebunan dengan sistem monokultur, misalnya, adalah kebijakan yang justru lebih didukung oleh pemerintah. Adanya sejumlah keunggulan ekologis dan sosial dari berbagai sistem pengelolaan sumberdaya alam oleh sejumlah kelompok adat setempat membuat banyak pihak mendorong pemerintah dan masyarakat sendiri untuk lebih menghargai berbagai sistem dan praktek-praktek adat yang berguna untuk mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan, tidak saja untuk kepentingan dunia internasional, namun yang terpenting sebenarnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

#### Daftar Pustaka

- De Foresta, H. D., A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.]. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat*. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation.
- Harkes, Ingviid dan Irene Novaczek. 2003. Institutional Resilience of Marine Sasi, a Traditional Fisheries Management System in Central Maluku, Indonesia. In Gerard A. Persoon, Diny M.E. van Est and Percy E. Sajjise. *Co-Management of Natural Resources in Asia: A Comparative Perspective*. Copenhagen S.: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS): 63-85.
- Lowe, Celia. 2000. Global Markets, Local Injustice in Southeast Asian Seas: The Live Fish Trade and Local Fishers in the Togeian Islands of Sulawesi. In Charles Zerner (Ed), *People, Plants, and Justice: The Politics of Nature Conservation*. New York: Columbia University Press: 234-258.
- Michon, G., H. de Foresta, P. Levang dan A. Kusworo. 2000. Repong di Pesisir Krui, Lampung, dalam H.D. De Foresta, A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.], *Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat*. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation: 19-64.
- Momberg, F. 2000. Tembawang di Kalimantan Barat, dalam H.D. De Foresta, A. Kusworo, G. Michon, dan W.A. Djatmiko [Eds.], *Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat*. Bogor: ICRAF, Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), France, dan Ford Foundation: 84-100.
- Nadapdap, Amir, Iwan Tjitradjaja, dan Mundardjito. 1995. Pengelolaan Hutan Bekelanjutan: Kasus Hutan Damar Rakyat Krui, Lampung Barat. Dalam *Ekonesia* No. 2. Maret. 80 - 112.
- Nikijulw, V.P.H. 1995. Community-based fishery management (sasi) in Central Maluku. Dalam *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*. 17 (2): 33-39.
- Rosethko, James M., Mulawarman, Wiji Johar Santoso, I Nyoman Oka [Eds.], 2002. Wanatani di Nusa Tenggara: Prosiding Lokakarya Wanatani se Nusa Tenggara, Denpasar Bali 11-14 November 2002 yang didukung ICRAF dan Winrock Internasional.
- Thorburn, Craig C. 2003. Fatal Adaptation: Cyanide Fishing in the Kei Islands, Southeast Maluku. Dalam *SPCLive Reef Fish Information Bulletin* No. 11: 5-12.

# NILAI BUDAYA DAN AKTUALISASINYA - BERMASALAH DAN TAK-BERMASALAH -

Oleh :  
Heddy Shri Ahimsa-Putra  
Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Gadjah Mada

## 1. Pengantar

Salah satu pertanyaan yang selalu muncul dalam berbagai macam kesempatan berkenaan dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia pada umumnya adalah: masihkah relevan nilai-nilai budaya tradisional, yang diwarisi dari nenek-moyang kita, yang hidup dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang, untuk kehidupan kita di masa kini? Mungkinkah kita menggunakan nilai-nilai budaya baru untuk berbagai bidang kehidupan “tradisional” yang memang masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana siasat suatu masyarakat atau komunitas ketika berhadapan dengan situasi semacam itu?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab karena nilai-nilai budaya tradisional memiliki banyak elemen, yang juga berbeda-beda, sementara situasi dan kondisi kehidupan masa kini juga tidak selalu berbeda dengan situasi-situasi dan kondisi-kondisi kehidupan di masa lampau. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan menunjukkan contoh-contoh kongkrit perwujudan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari berbagai contoh kongkrit ini kita akan dapat menarik kesimpulan tertentu, dan kemudian memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam makalah ini saya mencoba untuk menunjukkan perwujudan dari nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan tradisional maupun dalam konteks kehidupan modern, dan beberapa masalah sosial yang diakibatkannya. Sebelumnya perlu dipaparkan terlebih dulu makna beberapa istilah penting yang digunakan di sini, yakni: nilai budaya lokal, aktualisasi dan konteks kehidupan tradisional dan modern. Makna-makna istilah ini perlu diketahui serta disepakati agar pembicaraan di sini tidak simpang-siur karena adanya pemaknaan yang berbeda-beda atas konsep atau istilah yang sama.

## 2. Nilai Budaya, Aktualisasi dan Konteks Kehidupan

Nilai budaya atau *cultural values* di sini tidak berbeda maknanya dengan nilai-nilai. Tambahan istilah “budaya” di sini ditujukan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai ini ber-sifat cultural, bersifat budaya, yang berarti berada pada tataran ide atau pengetahuan. Dari sudut pandang tertentu, nilai-nilai dapat didefinisikan sebagai perangkat simbolis yang digunakan oleh manusia untuk menempatkan, menggolongkan, mengklasifikasi berbagai simbol atau aspek dari realitas ke dalam kategori-kategori tertentu, terutama kategori baik-buruk, boleh-tidak boleh, atau kategori-kategori di antaranya, seperti misalnya agak baik, kurang baik, dan seterusnya. Penempatan ke dalam kategori-kategori tertentu ini kemudian akan turut menentukan dilakukan atau dila-lankan-tidaknya suatu pola perilaku tertentu.

Apa artinya perangkat simbolis? Perangkat simbolis adalah segala sesuatu yang di-gunakan oleh manusia, oleh karena itu disebut perangkat tetapi sekaligus juga dimaknai, oleh karena itu disebut simbolis. Nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari berupa pernyataan-pernyataan yang mewujudkan ide-ide atau pandangan tertentu, sekaligus juga ide-ide dan pandangan-pandangan yang dinyatakan tersebut. Nilai-nilai ini mampu-nyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari manusia, yakni digunakan untuk menentukan baik-buruknya sesuatu yang dihadapi atau diketahui oleh manusia.

Dengan adanya nilai-nilai budaya ini orang dapat menentukan apakah tindakan berkunjung pada tetangga yang tengah memperoleh musibah adalah tindakan yang baik; apakah tindakan mengucapkan kata-kata yang kurang baik ketika seseorang marah kepada orang lain adalah tindakan yang boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan mempersilahkan seorang wanita hamil untuk duduk di tempat duduknya dalam sebuah bis kota yang penuh sesak adalah tindakan yang perlu dilakukan atau tidak; apakah sholat merupakan tindakan yang perlu dilakukan atau tidak, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya ini dapat kita temukan dalam pernyataan-pernyataan seperti misalnya, “seseorang sebaiknya meringankan beban orang lain yang tengah terkena musibah”; “seseorang sebaiknya selalu menahan diri dari tindakan yang menyakiti orang lain”; “seseorang sebaiknya menolong seseorang yang memerlukan bantuan”; “seseorang sebaiknya selalu berusaha untuk ingat akan Tuhannya”, dan seterusnya.

“Aktualisasi” berasal dari kata “*actualization*”- secara sederhana dapat diartikan sebagai “perwujudan”, bisa juga diartikan sebagai “pengaktualan”, yang kurang lebih berarti membuat sesuatu aktual, nyata, atau membuat sesuatu menjadi “nyata”, ada atau berwujud. Berkenaan dengan nilai-nilai budaya, aktualisasi ini tidak lain adalah membuat nilai-nilai yang semula tidak tampak ini menjadi sesuatu yang dapat dilihat dalam bentuk perilaku, tindakan atau benda material tertentu. Nilai “seseorang sebaiknya selalu berusaha untuk ingat akan Tuhannya” dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti beribadah atau menyembah Tuhan. Di kalangan orang Islam nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan berdzikir, tindakan berpuasa, tindakan bersedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Dalam aktualisasi yang lain nilai tersebut dapat berupa budaya material. Apakah sebuah karya kaligrafi, lukisan kaligraf, atau yang lain lagi.

Nilai “seseorang sebaiknya meringankan beban orang lain yang tengah terkena mu-sibah” dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan memberikan sedekah kepada seo-rang miskin yang mendapat kecelakaan, atau memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban gempa, atau memberikan sembako kepada masyarakat yang terkena bencana banjir, dan sebagainya. Dalam bentuk budaya material nilai budaya tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk mendirikan rumah-rumah baru untuk mereka yang rumahnya roboh terkena gempa, mendirikan rumah sakit bagi mereka yang terkena penyakit kanker, dan sebagainya.

Aktualisasi-aktualisasi tersebut di atas selalu berada dalam suatu konteks kehidupan tertentu. Konteks kehidupan di sini mempunyai dua makna, yakni: pertama, berlangsung dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya saja, aktualisasi nilai “sebaiknya orang me- ringankan beban orang lain” dilakukan dalam hidup bersama dengan tetangga di sebuah kampung; dalam bekerja bersama dengan teman sejawat di kantor; dalam bepergian bersama dengan orang lain, dan sebagainya.

Kedua, aktualisasi tersebut berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, dengan situasi dan kondisi tempat aktualisasi tersebut berlangsung. Misalnya saja, membantu mereka yang terkena musibah di suatu desa tertentu mungkin tidak tepat jika dilakukan dengan cara membagi-bagikan sembako, karena masyarakat di situ telah memperoleh bantuan banyak sembako, tetapi lebih tepat jika diwujudkan dalam bentuk bantuan ba-han-bahan untuk membuat rumah. Sementara itu di tempat lain, hal itu tidak tepat untuk dilakukan, bantuan lebih tepat diberikan dalam bentuk uang yang dibagikan secara adil, menurut tingkat musibah yang diderita. Jadi, aktualisasi berbagai nilai budaya lokal pada dasarnya perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kehidupan ini agar aktualisasi tersebut tidak menimbulkan masalah-masalah sosial.

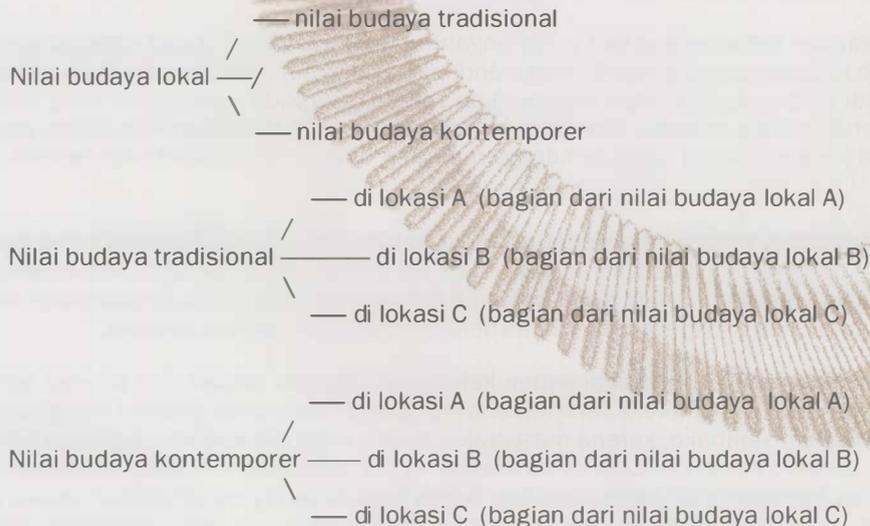
### 3. Nilai Budaya Lokal, Tradisional dan Reinterpretasi

Nilai-nilai budaya ini ada yang dikatakan sebagai “nilai budaya lokal”, ada pula yang disebut “nilai budaya tradisional”. Nilai budaya lokal adalah nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh warga masyarakat yang ada di suatu lokasi tertentu, di suatu tempat tertentu. Tempat ini bisa berupa sebuah desa, kelurahan, nagari, kecamatan, kabupaten, propinsi, pulau, atau bahkan negara. Di tempat atau lokasi ini bisa terdapat satu atau beberapa komunitas, masyarakat atau sukubangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di sebuah lokasi bisa terdapat sebuah sistem atau beberapa sistem nilai budaya. Berbeda halnya dengan nilai budaya tradisional.

Nilai budaya tradisional adalah nilai-nilai budaya yang berasal dari generasi-generasi pendahulu sebuah komunitas atau masyarakat. Nilai-nilai budaya ini dapat bertahan dalam suatu masyarakat karena selalu diwariskan, disosialisasikan, oleh setiap generasi masyarakat tersebut kepada generasi berikutnya lewat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga pewarisan ini berlangsung melalui teks-teks atau tulisan-tulisan, namun dalam masyarakat “tradisional” hal ini umumnya masih tidak begitu umum. Nilai-nilai budaya tradisional ini bisa terdapat pada satu tempat, bisa juga pada beberapa tempat. Keadaan yang kedua ini bisa terjadi bilamana sebagian warga masyarakat pendukung nilai-nilai budaya tersebut kemudian melakukan migrasi ke tempat lain.

Nilai-nilai budaya yang ada di suatu tempat tidak selalu merupakan nilai-nilai budaya tradisional. Nilai budaya lokal bisa terdiri dari sejumlah nilai budaya tradisional, bisa pula terdiri dari sejumlah nilai budaya kontemporer, dan bisa pula terdiri dari dua-duanya. Sementara itu nilai-nilai budaya tradisional tertentu bisa ada di sebuah tempat, bisa pula di beberapa tempat. Perbedaan antara dua perangkat nilai budaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

#### Skema 1. Nilai Budaya Lokal, Tradisional dan Kontemporer



Nilai budaya tradisional sebagai perangkat simbolis yang berasal dari generasi-generasi sebuah komunitas yang hidup di masa lampau seringkali dirasakan tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi nyata yang dihadapi dan dialami oleh komunitas tersebut di masa kini, karena adanya perubahan-perubahan di dalamnya. Di lain pihak warga komunitas tersebut juga tidak ingin begitu saja meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah mereka warisi dari generasi-generasi sebelumnya. Bagaimanapun juga, nilai-nilai budaya tersebut merupakan hasil dari proses adaptasi generasi-generasi komunitas tersebut terhadap situasi dan kondisi yang telah mereka hadapi dan alami di masa-masa yang lampau, sehingga nilai-nilai budaya tersebut biasanya dipandang sebagai pedoman atau pembimbing yang telah membuat warga masyarakat berhasil mengatasi atau menyelesaikan berbagai masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Meninggalkan nilai-nilai budaya yang selama ini dianut oleh generasi-generasi sebelumnya akan menimbulkan suatu rasa keterputusan dengan generasi-generasi tersebut, dan ini biasanya juga akan menimbulkan perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, atau perasaan kehilangan identitas. Di sini warga masyarakat tersebut menghadapi sebuah persoalan yang tidak mudah, yakni: (a) menggunakan nilai budaya tradisional, tetapi situasi dan kondisinya tidak lagi sesuai, (b) menggunakan nilai budaya kontemporer, tetapi menimbulkan rasa bersalah, atau kehilangan identitas. Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini?

Memilih salah satu dari dua pilihan yang ada biasanya dipandang bukan sebagai cara penyelesaian yang terbaik. Bagaimanapun manusia selalu ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ada pada masing-masing pilihan. Berkenaan dengan dua perangkat nilai budaya tersebut, manusia pada dasarnya ingin (a) tetap memiliki dan menggunakan nilai-nilai budaya tradisional yang sudah dikenal dengan baik selama ini, (b) tanpa harus merasa telah “mengkhianati”, “mengabaikan” ataupun “meremehkan nenek-moyang”, dan (c) tanpa harus merara telah kehilangan identitas. Salah satu cara yang biasa ditempuh oleh suatu komunitas atau masyarakat yang berada dalam situasi dile-matis tersebut adalah melakukan reinterpretasi atau menafsirkan kembali isi dari perangkat nilai budaya

Reinterpretasi atau menafsirkan kembali nilai-nilai budaya tertentu dari suatu masyarakat pada dasarnya adalah sebuah upaya dari warga masyarakat pemilik nilai budaya tersebut untuk memberikan makna-makna tertentu yang berbeda terhadap nilai-nilai budaya yang sebelumnya sudah ada dan telah diwariskan secara terus-menerus dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Pemberian makna-makna yang berbeda ini bisa berupa penggantian makna-makna yang lama dengan makna-makna yang baru, bisa pula berupa penambahan atas nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya. Pada kasus yang kedua nilai-nilai budaya lama dan tafsirnya tetap digunakan oleh warga masyarakat, sementara tafsir yang baru terhadap nilai-nilai budaya tersebut juga diambil atau digunakan dalam beberapa bidang kehidupan sehari-hari.

Reinterpretasi dilakukan berkenaan dengan isi dari nilai-nilai tersebut dan konteks aktualisasinya, atau hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat atau dengan unsur-unsur budaya yang lain. Reinterpretasi hanya terhadap nilai-nilai budayanya saja belum memungkinkan orang dapat mengaktualisasikannya, karena aktualisasi nilai-nilai budaya selalu berada dalam sebuah kancah kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, reinterpretasi juga harus dilakukan terhadap kancah-kancah kehidupan atau bidang-bidang kehidupan tempat diaktualisasikannya nilai-nilai budaya tersebut.

#### 4. Aktualisasi Nilai Budaya dan Konteksnya

Di sini akan dikemukakan dua variasi dari aktualisasi nilai-nilai budaya, yakni: aktualisasi nilai-nilai budaya kontemporer atau masa kini dalam konteks kehidupan “tradisional” dan aktualisasi nilai-nilai budaya tradisional dalam konteks kehidupan kontemporer atau modern. Masing-masing ditampilkan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa aktualisasi nilai-nilai budaya memerlukan di dalamnya proses reinterpretasi, penafsiran kembali, pemaknaan kembali nilai-nilai budaya tersebut beserta dengan kemungkinan-kemungkinan konteks aktualisasinya.

Aktualisasi nilai budaya lokal kontemporer dalam kancah kehidupan tradisional mempunyai dua kemungkinan. Pertama, aktualisasi tersebut berjalan dengan baik, artinya tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap individu yang mengaktualisasikan. Kita sebut ini sebagai “aktualisasi tidak bermasalah”. Yang kedua adalah aktualisasi tersebut menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan individu yang mengaktualisasikannya. Ini kita sebut “aktualisasi bermasalah”.

Pola yang sama juga dapat kita temukan pada aktualisasi nilai budaya lokal tradisional pada *setting* kehidupan kontemporer, masa kini. Aktualisasi tersebut bisa “bermasalah”, “bisa pula tidak bermasalah”. Variasi aktualisasi tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut

Skema 2. Variasi Aktualisasi Nilai Budaya Tradisional dan Kontemporer



a. Nilai Budaya Kontemporer, Konteks Tradisional : Aktualisasi Bermasalah

Sebagai contoh aktualisasi yang bermasalah adalah aktualisasi nilai budaya efisiensi dan efektivitas. Di Indonesia efisiensi dan efektivitas adalah salah satu nilai budaya kontemporer. Istilah efisien dan efektif itu sendiri sudah menunjukkan bahwa nilai budaya ini bukan merupakan bagian dari nilai budaya tradisional masyarakat Indonesia. Nilai budaya ini berasal dari Barat. Di beberapa tempat di Indonesia -seperti misalnya di kota-kota besar, di perusahaan-perusahaan asing atau dalam institusi-institusi yang ber-asal dari Barat- nilai budaya ini sudah tidak begitu asing lagi, tetapi di beberapa tempat yang lain nilai budaya ini masih asing, bahkan tidak dikenal sama sekali. Nilai budaya ini mengatakan bahwa dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau dalam upaya mencapai tujuan tertentu orang sebaiknya dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan cara yang membutuhkan waktu dan biaya sesedikit mungkin. Nilai ini semakin menguat dalam masyarakat Indonesia di masa kini. Meskipun demikian tidak mudah untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaktualisasiannya tidak jarang menimbulkan masalah sosial dan individual. Misalnya saja, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas orang sebaiknya menggunakan peralatan mesin dalam proses produksi suatu komoditas. Akan tetapi, hal ini akan terlihat kurang begitu “ramah” terhadap lingkungan sekitar, di mana terdapat banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga pemakaian mesin dalam sebuah proses produksi tidak akan memberikan manfaat sosial yang berarti, bahkan mungkin menimbulkan masalah sosial yang lain, karena penggunaan mesin mungkin akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketenangan warga masyarakat. Penggunaan mesin untuk memproduksi barang tertentu di tengah masyarakat desa akan dapat menimbulkan masalah sosial, dan jika ini dibiarkan terus berlangsung, individu yang melakukannya akan mendapat sanksi-sanksi sosial. Muncullah kemudian masalah individual. Individu pemilik mesin mungkin harus menghadapi berbagai macam bentuk boikot dari warga masyarakat di sekitarnya terhadap usahanya

Contoh lain, menerapkan jadwal kerja masuk kantor yang ketat, yang tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Aktivitas kantor adalah aktivitas masyarakat modern. Aktivitas kantor merupakan ajang aktualisasi yang bersifat kontemporer. Meskipun demikian, karena kantor ini berada di tengah kehidupan masyarakat yang masih tradisional, maka kantor ini merupakan sebuah ajang aktivitas “modern” yang berada di tengah kancan masyarakat tradisional. Aktualisasi nilai-nilai budaya efisiensi dan efektifitas dalam kantor belum tentu lancar. Penerapan aturan-aturan kantor secara ketat pasti akan menimbulkan masalah, karena hal itu belum tentu mudah dan dapat diterima oleh banyak orang.

Di Jakarta misalnya, aktualisasi nilai budaya efisien dan efektif umumnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Jika aktualisasi tersebut betul-betul akan dilakukan, sehingga pegawai yang terlambat datang mendapat hukuman-hukuman tertentu, sangat mungkin akan timbul banyak protes dan boikot dari para karyawan. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai budaya ini mau tidak mau harus dilakukan dengan memperhatikan konteks kehidupan nyata sehari-hari atau dengan melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai budaya tersebut, terhadap aktualisasinya ataupun terhadap konteks aktualisasinya. Nilai budaya “rasional”, “obyektif”, “tidak melibatkan perasaan”, merupakan nilai-nilai yang seharusnya diaktualisasikan, yang harus dianut dalam aktivitas birokrasi, dalam kegiatan pelayanan publik.

Contoh lain, saya mempunyai seorang kolega, seorang guru besar. Suatu kali dia diminta bantuan oleh besannya untuk membantu memasukkan salah satu keponakan besan tersebut ke perguruan tinggi tempat dia mengajar. Meskipun seorang guru besar, teman saya merasa tidak berhak dan tidak dapat melakukan apa yang diminta oleh besannya karena peraturan universitas tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut, terlebih lagi kedudukannya sebagai seorang guru besar, yang menuntutnya untuk menghormati peraturan-peraturan yang dibuat oleh universitas. Rupanya besannya tidak dapat menerima hal tersebut. Bagi si besan, sungguh tidak masuk akal seorang guru besar tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk membantu seorang keponakannya masuk ke perguruan tinggi tempat dia mengajar. Si besan menafsirkan “ketidakmampuan” sang guru besar dan “penghormatannya terhadap aturan-aturan” universitas sebagai “ketidaksediaan” untuk membantu. Oleh karena itu, si besan kemudian selama beberapa waktu sama sekali tidak bersedia berhubungan, tidak bersedia berkomunikasi dengan kolega saya tersebut. Contoh aktualisasi nilai budaya “kontemporer” dalam *setting* kehidupan tradisional, yang menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita sungguh sangat banyak, dan ini telah menimbulkan beban sosial-budaya tertentu pada individu-individu yang melakukannya. Hal seperti ini juga masih akan berlanjut terus saya kira, sampai waktu yang cukup lama. Masalah-masalah ini baru akan berkurang bilamana kehidupan sosial-budaya kita semakin banyak yang bersifat “modern” dengan nilai-nilai budaya “modern” sebagai landasannya. Juga bilamana warga masyarakat telah melakukan reinterpretasi-reinterpretasi terhadap nilai-nilai budaya yang mereka miliki, terhadap aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut, serta terhadap bidang-bidang kehidupan yang menjadi ajang aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut.

#### b. Nilai Budaya Kontemporer, Konteks Tradisional : Aktualisasi Tak Bermasalah

Aktualisasi nilai budaya “kontemporer” dalam ajang kehidupan yang tradisional sebenarnya juga tidak selalu menimbulkan masalah. Nilai budaya “efisiensi”, kepraktisan, bisa menjadi landasan aktivitas kehidupan “tradisional” tanpa menimbulkan banyak masalah. Contohnya adalah pesta perkawinan dengan menggunakan jasa catering. Di masa lampau, baik di kota maupun di pedesaan, sebuah pesta perkawinan akan dilakukan dengan melibatkan banyak tetangga dekat. Tetangga ini akan membantu menyiapkan per-alatan, menyiapkan tempat pesta, menyiapkan hiasan-hiasan untuk ruangan, menyiapkan makanan, dan sebagainya. Kini cara semacam ini di daerah perkotaan dianggap tidak lagi praktis, tidak lagi efisien. Para tetangga kini memiliki kegiatan-kegiatannya sendiri, sehingga kalau mereka dimintai bantuan tetangga hal itu akan menimbulkan rasa tidak enak, karena akan dianggap mengganggu keperluan pribadi mereka. Untuk mengatasi hal ini, mereka yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan kemudian lebih suka kemudian menyewa gedung dan meminta jasa usaha catering untuk menyiapkan jamuan makan bagi para tamu.

Untuk menghias tempat pernikahan penyelenggara akan membayar orang-orang khusus yang ahli dalam melakukan hal tersebut. Hal semacam ini kini merupakan hal yang sangat lazim di Indonesia. Nilai budaya “praktis”, “effisien”, dapat diaktualisasikan dalam setting “tradisional” tanpa menimbulkan masalah. Para te-tangga juga dapat menerima hal semacam ini dengan baik. Contoh lain adalah penerapan nilai budaya “praktis”, “effisien” dan “effektif” dalam ke-hidupan bergotong-royong. Tidak sedikit komunitas-komunitas di pedesaan atau di kam-pung-kampung yang kini tidak lagi menuntut warganya untuk berpartisipasi secara lang-sung dalam kegiatan komunitas. Partisipasi dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangan dalam bentuk barang atau uang. Hal seperti ini seringkali menimbulkan ke-san bahwa gotong-royong dalam masyarakat kiat telah berkurang atau menurun. Pen-dapat semacam ini tidak sepenuhnya tepat saya kira, karena “gotong-royong” kini juga telah ditafsir kembali oleh warga masyarakat sendiri.

Di sini aktualisasi nilai-nilai kontemporer dalam ajang kehidupan tradisional tidak me-nimbulkan masalah sama sekali karena warga masyarakat sebenarnya telah melakukan reinterpretasi terhadap nilai budaya tersebut, serta terhadap kehidupan mereka di masa kini. Paling tidak mereka kini berpendapat bahwa “effisiensi”, “effektivitas” adalah hal-hal yang baik, yang sebaiknya mereka usahakan untuk mencapainya, karena nilai-nilai ter-sebut lebih sesuai dengan kehidupan mereka di masa kini. Di sini warga masyarakat juga mulai menyadari, mulai menafsirkan kehidupan mereka sendiri, bahwa kehidupan mereka tidak lagi sama dengan kehidupan di masa lalu, bahwa mereka mempunyai ke-butuhan-kebutuhan yang tidak lagi dapat dipenuhi dengan menggunakan cara-cara yang lama, bahwa mereka kini mempunyai aktivitas yang berbeda-beda dan tidak ingin mengganggu aktivitas oleh tetangga yang lain.

### c. Nilai Budaya Tradisional, Konteks Kontemporer : Aktualisasi Bermasalah

Pada banyak masyarakat Indonesia nilai-nilai budaya tradisional masih sangat banyak yang bertahan atau diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam konteks kehidupan tradisional, seperti misalnya kehidupan keluarga, upacara-upacara tradisional, atau kehidupan komunitas, tetapi juga dalam ajang kehidupan yang lebih modern, seperti misalnya di kantor-kantor, di perguruan tinggi. Rekrutmen karyawan di banyak kantor pemerintahan dilakukan tidak melalui seleksi ketat yang didasarkan pa-da kemampuan atau kesesuaian ketrampilan pelamar dengan tenaga yang dibutuhkan di kantor.

Contohnya adalah proses rekrutmen pegawai di sebuah fakultas pada sebuah pergu-ruan tinggi di Indonesia yang ternyata tidak didasarkan atas kebutuhan akan tenaga pegawai dengan jenis pendidikan dan ketrampilan tertentu, tetapi didasarkan pada “pola pewarisan” dan “hubungan kekerabatan”. Yang dimaksud dengan “pola pewarisan” di sini adalah pandangan bahwa kalau seseorang pernah menduduki pekerjaan tertentu sebagai pegawai, misalnya sebagai pesuruh di kantor, sebagai penjaga di kantor, atau apa saja, dia ingin paling tidak salah seorang di antara sekian banyak anaknya ada yang dapat menduduki pekerjaan tersebut. Di sini jika si anak telah dapat menjadi pegawai, dia dianggap telah akan dapat “mewarisi” jabatan orang tuanya. Berbeda halnya dengan “hubungan kekerabatan”. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah panda-ngan bahwa kalau seseorang pernah menduduki pekerjaan tertentu sebagai pegawai, misalnya sebagai kepala kantor, sebagai pesuruh, atau yang lain, di sebuah kantor, dia ingin agar kerabat-kerabatnya juga ada yang dapat diterima menjadi pegawai di kantor tersebut.

Penerimaan pegawai dengan pola pewarisan dan hubungan kekerabatan seperti itu didasarkan pada nilai budaya tradisional bahwa jabatan tertentu sebaiknya diduduki oleh mereka yang orang tua atau kerabatnya ada yang pernah menduduki jabatan tersebut. Nilai budaya lain yang mendasari pole penerimaan semacam itu adalah seseorang se-baiknya menolong sanak-saudara atau kerabatnya, dan salah satu pertolongan yang di-pandang sangat berharga adalah pertolongan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan tersebut adalah pegawai negeri. Nilai-nilai budaya inilah yang kemudian membuat kepala kantor di fakultas pada sebuah perguruan tinggi negeri di atas mema-sukkan sanak-saudaranya untuk bekerja di fakultas tersebut.

Aktualisasi nilai budaya seperti itu telah menimbulkan masalah sosial berupa keti-dak-sesuaian antara kebutuhan tenaga di fakultas tersebut dengan tenaga pegawai yang tersedia. Ketika dibutuhkan tenaga pegawai yang bisa berbahasa Inggris, dan yang menguasai program-program komputer, tidak ada seorangpun pegawai di situ bisa memenuhi kebutuhan ini, padahal beberapa di antara mereka tidak memiliki kegiatan yang jelas di fakultas. Akibatnya, fakultas terpaksa mencari tenaga pegawai baru yang mampu berbahasa Inggris dan yang menguasai program-program komputer. Fakultas tersebut harus mengeluarkan biaya untuk melakukan tes pegawai, dan membayar honor pegawai-pegawai tersebut. Sementara itu, pegawai-pegawai yang sudah ada, yang ti-dak banyak kegiatannya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di sini terjadi pemborosan, ketidak-efisienan, karena pola penerimaan pegawai yang salah di masa-masa yang lalu.

Bukan hanya pemborosan yang terjadi, tetapi juga munculnya suasana kerja yang kurang nyaman, karena jika ada salah seorang yang berselisih dengan pegawai yang lain, kerabat-kerabat mereka yang berselisih bisa turut “ambil bagian” dalam perselisihan tersebut. Akibatnya, perselisihan bisa meluas ke kalangan pegawai-pegawai yang lain. Juga, kalau ada salah seorang di antara mereka terkena musibah, maka karyawan-karyawan yang masih memiliki hubungan kekerabatan akan meminta ijin untuk absen, se-hingga fakultas menjadi kekurangan karyawan. Hal ini kemudian juga mengganggu ki-nerja fakultas tersebut.

Di sini aktualisasi nilai-nilai budaya tradisional pada *setting* kontemporer telah menimbulkan, karena aktualisasi tersebut dilakukan tanpa dengan melakukan reinterpretasi terhadap isi nilai-nilai budaya tersebut ataupun terhadap aktualisasinya, ataupun terha-dap settingnya. Aktualisasi nilai budaya lokal tradisional di sini telah menimbulkan masa-lah institusional, walaupun pada tingkat individual aktualisasi tersebut justru dianggap mendatangkan manfaat, atau sama sekali tidak menimbulkan masalah.

#### d. Nilai Budaya Tradisional, Konteks Kontemporer : Aktualisasi Tak Bermasalah

Aktualisasi nilai budaya lokal tradisional pada *setting* kontemporer bisa juga tidak menimbulkan masalah, dan ini bisa dikarenakan oleh: (a) reinterpretasi yang telah dilaku-kan oleh masyarakat terhadap isi nilai budaya tersebut, terhadap cara-cara aktualisasi-nya, atau terhadap *setting* aktualisasinya; (b) ajang-ajang aktualisasi yang baru masih sesuai dengan nilai budaya lokal yang ada, atau ajang-ajang baru tersebut tidak banyak berbeda dengan ajang-ajang aktualisasi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh kita dapat mengambil aktualisasi nilai budaya lokal di Sulawesi Selatan dan Jawa.

Salah satu nilai budaya yang dominan, yang sangat penting di Sulawesi Selatan, terutama di kalangan orang Bugis dan Makassar adalah nilai budaya siri. Siri, yang sering diartikan sebagai “rasa malu”, “harga diri” atau “martabat”. Siri tidak hanya bersifat indivi-dual, tetapi juga bersifat kelompok (lihat Ahimsa-Putra, 1988). Di masa lalu, masalah siri biasanya merupakan sumber utama berbagai perselisihan dan pembunuhan. Seorang teman saya yang melakukan penelitian lapangan di kota Makassar di tahun 1970an me-ngatakan bahwa selama penelitiannya hampir setiap hari dia menjumpai perselisihan atau pembunuhan yang berawal dari masalah siri. Menurut penghitungannya, dalam sa-tu minggu terjadi 7-9 perselisihan, pertikaian dan pembunuhan karena masalah siri. Pa-dahal teman saya ini tidak menghitungnya secara teliti betul, karena focus penelitiannya bukan masalah siri. Oleh karena itu, frekwensi tersebut bisa lebih tinggi lagi bilamana penghitungan dilakukan dengan lebih seksama.

Kini nilai budaya belum hilang sama sekali dari kalangan orang Bugis dan Makassar. Berbagai diskusi di kalangan orang Bugis dan Makassar yang berpendidikan menunjuk-kan bahwa proses reinterpretasi terhadap nilai budaya tersebut tengah berlangsung, agar aktualisasinya lebih dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas, tidak hanya oleh orang Bugis dan Makassar. Untuk kehidupan masa kini, sebagian orang Bugis dan Makassar mencoba menerapkan siri untuk mencegah korupsi. Korupsi harus dianggap sebagai salah satu penyebab siri, rasa malu yang luar biasa, pada diri individu maupun kelompok. Dengan mengaktualisasikan nilai budaya siri di kantor misalnya, korupsi di situ akan dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Ketika saya melakukan penelitian lapangan di Bantaeng, siri mencoba diaktualisasikan dalam kegiatan pembangunan. Kepala lingkungan dan kepala desa berusaha membangkitkan emosi siri, rasa malu warga desa jika pembangunan di desa atau kampung mereka relatif tertinggal oleh pembangunan di desa atau kampung yang lain. Siri juga dicoba dibangkitkan oleh para ustadz ketika mereka mengajak warga desa membangun masjid di desa. Mereka mengatakan bahwa warga desa mestinya merasa siri, merasa malu kalau di desanya tidak ada masjid atau musholla, atau tempat beribadat tersebut jarang dikunjungi, tidak ramai, atau tidak menjadi salah satu pusat kegiatan sosial yang penting di desa atau di kampung. Siasat ini ternyata cukup berhasil. Rasa malu kelompok atau rasa malu komunitas bisa mendorong warga desa untuk kemudian lebih giat melakukan pembangunan atau menggiatkan aktivitas keagamaan di desa. Di sini aktualisasi nilai budaya tradisional siri dalam konteks kehidupan kontemporer sama sekali tidak menimbulkan masalah, bahkan malah sangat bermanfaat. Aktualisasi tersebut ternyata sangat sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di masa kini.

Hal yang sama dapat ditemui pada salah satu nilai budaya Jawa. Orang Jawa mengenal nilai budaya tradisional "aja dumeh", jangan mentang-mentang. Di masa lalu nilai budaya ini digunakan oleh orang untuk mengingatkan setiap orang, karena setiap orang dapat bersikap "dumeh...", "mentang-mentang...". Misalnya saja, mentang-mentang se-seorang kaya (*dumeh sugih*) dia lantas memandang temannya atau tetangganya sebagai orang yang lebih rendah; mentang-mentang seseorang merasa paling kuat dan paling besar badannya (*dumeh kuat*), dia kemudian berbuat seenaknya atau sewenang-wenang terhadap orang lain; mentang-mentang dia anak pejabat dia kemudian berani melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas atau bertentangan dengan hukum (*du-meh anak penggede*); mentang-mentang seseorang berwajah cantik (*dumeh ayu*) dia lantas tidak mau bergaul dengan mereka yang lebih rendah kedudukan ekonominya, dan sebagainya. Nilai budaya "aja dumeh" mengatakan bahwa setiap orang hendaknya tidak bersikap mentang-mentang. Nilai budaya ini melarang orang bersikap mentang-mentang, karena secara implisit di situ ada pandangan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Orang tidak akan selamanya berkuasa; tidak akan selamanya gagah perkasa; tidak akan selamanya cantik rupawan; tidak akan selamanya pandai tanpa tandingan; dan seterusnya, sehingga orang harus berhati-hati, "jangan mentang-mentang..", karena pada suatu saat nanti bisa saja situasi dan kondisi betul-betul berbalik. Dalam situasi dan kondisi yang terbalik, mereka yang mentang-mentang bisa saja mengalami hal-hal yang sangat buruk, sangat tidak menyenangkan, sebagai akibat dari sikap mentang-mentang sebelumnya. Nilai budaya tersebut juga merupakan sebuah peringatan agar orang tidak bertindak kelewatan dalam situasi dan kondisi tertentu, atau atas apa yang telah berhasil dicapainya. Nilai budaya ini masih tetap relevan untuk kehidupan masa kini di Indonesia. Nilai budaya "jangan mentang-mentang...", yang menilai perilaku mentang-mentang, semena-mena sebagai perilaku yang tidak baik, tidak terpuji, dapat menjadi peringatan bagi setiap orang, siapapun dia. Bagi seorang pejabat, nilai budaya tersebut dapat menjadi peringatan agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan. Jika dia seorang yang kaya-raya, nilai budaya tersebut dapat menjadi peringatan agar dia tidak menggunakan kekayaannya hanya untuk bersenang-senang, untuk foya-foya. Jika dia seorang artis yang terkenal, nilai budaya tersebut dapat menjadi peringatan agar dia tidak sombong dengan popularitasnya. Jika dia seorang guru, nilai budaya tersebut dapat menjadi peringatan agar tidak sewenang-wenang terhadap muridnya, karena bisa jadi muridnya akan menjadi orang-orang yang lebih berkuasa daripadanya, dan sebagainya. Pendeknya, nilai budaya tersebut dapat dan perlu diaktualisasikan oleh setiap individu, apapun kedudukannya dalam masyarakat. Aktualisasi nilai budaya ini dalam setiap bidang kehidupan rasanya tidak akan menimbulkan masalah sama sekali.

## 5. Penutup

Dalam makalah ini saya telah menunjukkan beberapa contoh aktualisasi nilai-nilai budaya, tradisional maupun kontemporer, dalam kancah kehidupan yang "tradisional" dan "modern". Aktualisasi ini ternyata tidak selalu berlangsung dengan mudah dan lancar dalam kehidupan sehari-hari. Kelancaran dan kemudahan aktualisasi nilai-nilai budaya selalu ditentukan oleh jenis atau isi nilai-nilai budaya yang akan diaktualisasikan serta jenis ajang (*setting*) sosio-kultural dari aktualisasi nilai-nilai budaya itu

sendiri. Paparan di atas menunjukkan empat variasi yang dapat kita temui dalam masyarakat Indonesia berkenaan dengan aktualisasi nilai-nilai budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Variasi pertama menunjukkan aktualisasi nilai-nilai budaya kontemporer dalam ajang kehidupan tradisional yang tidak menimbulkan masalah, sedang variasi kedua menunjukkan yang sebaliknya, yang bermasalah. Variasi ketiga menunjukkan aktualisasi nilai-nilai budaya tradisional dalam ajang kehidupan kontemporer yang tidak menimbulkan masalah dan variasi keempat adalah sebaliknya.

Aktualisasi nilai-nilai budaya -baik tradisional maupun kontemporer- yang menimbulkan masalah menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki atau tengah berhadapan dengan dua perangkat nilai budaya yang berbeda. Dua perangkat nilai ini bisa diaktualisasikan dengan mudah dan baik, tetapi bisa pula aktualisasinya menimbulkan masalah-masalah serius dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan individual. Tidak ada sebuah rumus atau satu pedoman umum yang dapat diberlakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pengaktualisasian nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena bidang-bidang kehidupan yang menjadi kancah aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut begitu banyak dan bervariasi. Sementara nilai-nilai budaya yang perlu diaktualisasikan juga sangat banyak macamnya. Setiap individu pada dasarnya harus memilih siasat-siasat yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang dimilikinya, jika dia tidak ingin aktualisasi nilai-nilai budaya yang dilakukannya menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadinya.

Sehubungan dengan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal tradisional maupun kontemporer dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa butir pendapat yang dapat kita lontarkan atas dasar paparan di atas. Pertama, untuk nilai-nilai budaya yang aktualisasinya tidak menimbulkan masalah, nilai-nilai budaya tersebut perlu diperluas sosialisasinya, agar kehidupan masyarakat dapat tetap terjaga ketertataannya. Kedua, untuk nilai-nilai budaya yang menimbulkan masalah, perlu dilakukan reinterpretasi-reinterpretasi yang tepat dan cerdas untuk aktualisasinya, agar tidak muncul masalah-masalah sosio-kultural yang serius dalam kehidupan masyarakat. Di sinilah diperlukan sumbangan pemikiran yang lebih banyak lagi dari para intelektual, budayawan dan pemuka agama di Indonesia, berkenaan dengan nilai-nilai budaya yang relevan beserta dengan segala reinterpretasi-reinterpretasi dalam aktualisasinya.

#### Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S.  
1988 *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- 1997a *Corak Hubungan Sosial Masyarakat Majemuk di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Makalah dalam seminar "Pembangunan Nasional Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional".
- 1999b *Memahami Keanekaragaman Budaya Untuk Persatuan Bangsa*. Makalah dalam "Bimbingan Teknis Penganalisisan dan Pembinaan Kebudayaan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- 2000 *Inisiatif Lokal dan Kearifan Lokal Untuk Rekonsiliasi: Masihkah Efektif?*. Makalah dalam seminar "Inisiatif Lokal Untuk Rekonsiliasi dan Restorasi Kebangsaan".
- 2002a *Potensi Budaya Lokal Sebagai Sumber Penataan Sosial*. Makalah dalam Temu Budaya "Budaya Lokal Dalam Era Desentralisasi". Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- 2002b "Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Makna?". *Wacana 14, Th.III*: 41-56.
- 2002c "Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa di Kalangan Generasi Muda". *Jurnal Ketahanan Nasional VII (3)*: 45-56.
- 2004 *Kearifan Tradisional dan Lingkungan Sosial*. Makalah disampaikan dalam seminar "Kearifan Lokal sebagai Salah Satu Bentuk Aspek Tradisi", diselenggarakan oleh Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Amir, H.  
1994 *Nilai-nilai Etis dalam Wayang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat  
1974 *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, F.v.  
1985 *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.

# EKSISTENSI RELIGI KOMUNITAS ADAT

Oleh :

Zulyani Hidayah, DR. Antr.<sup>1</sup>

## Pendahuluan



Topik “eksistensi kepercayaan komunitas adat di masa kini” yang diajukan panitia menyiratkan bahwa konsep yang dimaksud adalah kepercayaan religius atau pada pokoknya agama dari komunitas-komunitas adat yang ada pada masa kini. Secara epistemologis, nampaknya konsep kepercayaan yang dipakai masih kabur, tidak jelas, tidak definitif. Pada masa kini kata kepercayaan sering muncul dengan definisi yang kurang tajam, khususnya tentang apa yang dimaksud dengan kepercayaan, dan apa yang menyebabkan kepercayaan disamakan dengan sebuah sistem dalam struktur sosial dan budaya; dalam hal apa kepercayaan dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem?

Istilah kepercayaan dan sistem kepercayaan telah digunakan sejak lama secara luas dalam kajian-kajian antropologi agama dan dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya. Menurut ahli-ahli yang mendalami masalah agama dan kepercayaan, sulit sekali mengkaitkan kepercayaan yang bersifat fenomena psikologis individual dengan pemahaman kelompok atau masyarakat, Karena sebuah sistem budaya baru akan dapat diamati jika berada dalam struktur sosial budaya sebuah kelompok atau masyarakat (Seymour-Smith, 1986:23).

Kepercayaan (Ing. *believing*) atau percaya<sup>2</sup> secara umum dapat diartikan sebagai suatu penerimaan mental terhadap sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diterima dengan kesadaran yang utuh hingga ke dalam batin, jiwa dan rohani. Kepercayaan biasanya didefinisikan sebagai sebuah pendirian yang kuat atas kebenaran dari pernyataan tentang sesuatu tanpa perlu diverifikasi lagi, karena itu kepercayaan adalah sebuah interpretasi mental yang bersifat subyektif yang berasal dari persepsi-persepsi, kontemplasi atau hasil komunikasi tertentu. Karena sifatnya yang mendasar itu maka kepercayaan selalu menjadi kunci pengakuan dalam setiap proses berpikir, baik secara keagamaan (*religious*) maupun secara keilmuan (*scientific*). Kajian ini sendiri dikembangkan dalam pengertian agama, dimana kepercayaan sebagai suatu bagian penting dari dasar-dasar moral dan spiritual – biasanya disebut “keyakinan” (Ing. *faith*) – yang pada mulanya dikembangkan oleh orang-orang yang mencari dasar-dasar fungsional guna memperkuat struktur sosial (kehidupan pribadi dan kelompok) disertai dengan kemauan yang kuat untuk melestarikan keyakinan tersebut.

Umumnya sebuah kepercayaan keagamaan atau keyakinan keagamaan akan diterima semakin kuat apabila keyakinan tersebut telah mengalami berbagai tekanan, memperoleh penjelasan atau karena munculnya berbagai peristiwa yang dianggap sebagai pembenaran, kesaksian atau wahyu (nubuat).<sup>1</sup> Selanjutnya kepercayaan dalam tulisan ini disebut kepercayaan agama, agama atau religi saja. Ada beberapa pertanyaan yang menggoda dari topik kajian ini. Pertama, “Apakah religi komunitas-komunitas adat sama dengan apa yang digolongkan oleh para ahli sebagai sistem keyakinan bersahaja (*primitive religion*)? Tidakkah religi komunitas-komunitas adat di masa kini adalah bagian dari atau merupakan sinkretisasi dari ajaran religi-religi “besar”?

<sup>1</sup> Staf Departemen Kebudayaan dan Pariwisata aktif di Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

<sup>2</sup> Dari sisi pengetahuan, kepercayaan atas sebuah pernyataan tentang sesuatu yang dipahami atau diketahui dapat bersifat rasional maupun irasional. Dalam sains (ilmu pengetahuan) kepercayaan atas sebuah pernyataan tentang sesuatu itu bersifat rasional, dan harus dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan, pembuktian-pembuktian empirik, dan argumentasi-argumentasi logis. Sedangkan dalam sistem kepercayaan spiritual sebuah pernyataan mengenai sesuatu cenderung bersifat irasional karena mengacu kepada bukti-bukti tak teraba (*intangible*). Karena kepercayaan spiritual lebih banyak menggunakan bukti-bukti intangible maka lebih banyak pula menggunakan nilai-nilai budaya inti (*culture core value*) sebagai penjaga keutuhan dan kesinambungan kepercayaan itu sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan di atas patut digarisbawahi, karena komunitas-komunitas adat bukanlah unit-unit sosio-religius yang seragam, tetapi sangat beragam dan memiliki ciri-ciri keaslian dan corak kesinkretisan yang berbeda-beda. Karena itu pula tidak ada data langsung yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecuali dengan mengaitkannya dengan pemahaman ilmiah yang telah ada tentang agama-agama yang mempunyai banyak ciri sama dengan mereka, yakni agama bersahaja. Pernyataan ini perlu disampaikan, agar pembaca awam tidak beranggapan tulisan ini mereduksi agama komunitas adat, seolah-olah menjadi sistem kepercayaan yang lebih rendah dari pada sistem kepercayaan lain.

Ada pula suatu pertanyaan penting lain yang sering diabaikan orang dalam etnografi tentang suatu agama suatu masyarakat atau kepercayaan dalam sebuah budaya, yaitu: "Apakah penjelasan tentang agama atau kepercayaan komunitas adat tersebut berkenaan dengan masa sekarang atau masa lampau?" Setiap tulisan ilmiah seharusnya ditunjukkan dengan menjelaskan batas-batas keterangan tentang waktu dimana suatu perkara dibicarakan. Apakah dalam konteks kondisi masa kini (sewaktu data terakhir diperoleh oleh penulis), ataukah dalam konteks kondisi masa lampau yang mungkin telah terjadi dan yang pernah dialami oleh saksi mata, atau yang hanya didengar secara berantai dari orang ke orang?. Demikian juga halnya dengan penjelasan tentang agama dari suatu masyarakat atau komunitas adat, tidak dapat dikatakan sepenuhnya dapat mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi (kondisi aktual). Mungkin saja yang terekam adalah kondisi ideal menurut tokoh atau narasumber, yang dapat saja berbeda dengan kondisi ideal yang "diharapkan" oleh narasumber yang lain. Seorang peneliti agama sebaiknya berdiri sendiri dengan interpretasi-interpretasinya tanpa memanipulasi data, tapi dengan mengkaitkan pernyataannya dengan konsep-konsep dan teori-teori di bidang disiplinilmunya.

Agama dan komunitas adat Agama adalah seperangkat sistem kepercayaan, simbol-simbol dan upacara-upacara yang dipraktikkan oleh orang-orang dari sebuah komunitas sosio-religius yang diikat sebagai oleh sebuah pemikiran sakral<sup>1</sup>. Sebagian ahli beranggapan sakralisasi dalam agama lebih penting dari pada Tuhan atau tokoh dewa, karena ada agama-agama yang tidak mengutamakan pemujaan Tuhan atau dewa. Selain itu, berbeda dengan magic yang bersifat individualistis dan intrumentalis, agama lebih bersifat sosio-religius dan simbolis (Gordon Marshall ed. dalam Dictionary of Sociology, 1994). Konsep ini dengan sendirinya menerima eksistensi agama-agama minoritas atau agama komunitas adat yang bukan bersumber dari ajaran agama-agama besar masa kini, seperti agama-agama yang bersumber dari kepercayaan komunal setempat kepada roh-roh nenek moyang dan pahlawan-pahlawan budaya lokal (animisme) dan kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menggerakkan fenomena-fenomena alam tertentu. Pada banyak sukubangsa di Indonesia, agama-agama asli seperti ini bahkan sering menjadi salah satu identitas etnik mereka, seperti agama Sunda Wiwitan yang menjadi identitas komunitas adat Baduy, agama Langkah lama yang jadi identitas komunitas adat Talang Mamak dan agama Waktu Telu yang jadi identitas komunitas adat Sasak atau agama komunitas adat Tengger sebelum melebur diri menjadi Hindu Dharma.

Dalam ilmu antropologi agama bersahaja (*primitive religion*) adalah sebutan untuk kepercayaan-kepercayaan dan pengamalan-pengamalan keagamaan - komunitas adat masyarakat tradisional, terpencil, dan belum kenal tulis-baca yang tentu saja tidak ditemukan lagi dalam masyarakat urban dan *sophisticated*. Tapi, tidak berarti bahwa agama masyarakat sederhana itu tidak kompleks dibandingkan dengan agama masyarakat "maju". Ada bukti-bukti ilmiah, bahwa agama komunitas adat di Oseania, Amerika dan Afrika Sub-Sahara juga sangat kompleks, mencakup ditil-ditil kecil kehidupan komunitasnya. Agama-agama dari budaya lama (budaya paleolitik, mesolitik dan neolitik) juga tergolong sebagai agama bersahaja (Charles H. Long dalam Primitive Religion: General Information, 2001).

Para ahli antropologi religi sendiri sepakat, bahwa pemahaman paling awal tentang agama diperoleh manusia hasil pengalaman dan ekspresi dari pengalamannya sesuatu yang sakral. Pengalaman sakralisme inilah yang pada awalnya dipandang sebagai model bersahaja dari kesadaran keagamaan manusia, sesuatu yang dianggap yang paling mudah diamati dari agama bersahaja (*primitive religion*).

Komunitas adat<sup>1</sup> sendiri adalah kesatuan-kesatuan sosial lokal yang masih memiliki identitas kelompok yang padu, mudah dikenali, jelas batas-batasnya dan memiliki latar belakang sejarah budaya yang runtun, dapat ditelusuri melalui tradisi lisannya. Keterpaduan identitas mereka dimungkinkan karena menempati suatu wilayah komunal dan saling terikat dalam hubungan sosial primordialis tertentu, mungkin karena hubungan darah (konsanguinal) maupun karena hubungan perkawinan (affinal). Keterkaitan dengan wilayah komunal dan ikatan kekerabatan berorientasi primordialisme itu menunjukkan bahwa mereka adalah kesatuan sosial teritorial-genealogis (tidak dapat dipisahkan dari daerah dan keluarga asal). Kesatuan sosial itu juga bukan bentukan baru, tetapi merupakan sebuah struktur sosial warisan yang cenderung tertutup melalui pengaktifan (kembali) dan pemujaan terhadap sistem nilai konvensional.

Ciri-ciri agama bersahaja dan ciri-ciri komunitas adat seperti di atas memang cenderung menunjukkan ada korelasi erat antara keduanya, bahwa penjelasan tentang agama komunitas adat dapat dengan mengaitkannya dengan agama bersahaja. Studi tentang agama-agama bersahaja sendiri sebenarnya sudah ada sejak berkembangnya minat bangsa-bangsa maju mengenai asal mula budaya dan peradaban manusia. Ilmu etnografi yang kemudian berkembang menjadi antropologi yang lahir sebagai ilmu yang mempelajari asal mula manusia dan budaya bangsa-bangsa lain menggunakan data empiris tentang kepercayaan dan pengamalan agama di luar budaya Eropa untuk memahami asal mula peradaban dan untuk memupuk kebanggaan atas budayanya sendiri. Karena itu studi antropologi tentang agama-agama ikut mempengaruhi pemahaman bangsa-bangsa maju tentang asal mula cara berpikir dan pembentukan kelembagaan sosial umat manusia.

## Teori Agama Bersahaja

Kerangka uraian tentang agama bersahaja yang paling sederhana dan sering dijadikan acuan adalah tulisan Charles H. Long (Primitive Religion: General Information, 2001). Menurut Long, teori-teori tentang agama bersahaja bergerak antara dua kutub: antara pandangan intelektualistis dan rasional, dengan pandangan psikologis dan irasional.

Edward B. Tylor ("Primitive Culture", 1871) dan Sir James Frazer ("Golden Bough", 1911) memandang agama bersahaja dicirikan oleh keunggulan kepercayaan tentang sihir dan kekuatan gaib, suatu hal yang mereka anggap mewakili cara pikir intelektual dan rasional. Bedanya, menurut Tylor masyarakat bersahaja membuat kesalahan intelektual dengan mengacaukan realitas subyek dan obyek. Mereka percaya roh yang ada dalam makhluk hidup dapat lepas dan dapat berdiri sendiri dengan bentuk bebas. Menurut Tylor, mimpi adalah dasar dari kesalahpahaman antara realitas subyek dan obyek ini.

Dalam mimpi seseorang merasa sebagai subyek, pada saat yang sama juga sebagai obyek. Tylor sendiri mendefinisikan agama bersahaja sebagai animisme, suatu kepercayaan tentang keberadaan kekuatan spiritual. Definisi ini menunjukkan interpretasinya bahwa dasar dari agama bersahaja adalah kepercayaan bahwa lepas dan terlepasnya kekuatan spiritual (roh) membentuk suatu realisme suprahuman. Dalam pandangan masyarakat bersahaja keberadaan realisme suprahuman ini sama nyatanya dengan keberadaan dunia fisik. Interpretasi yang berbeda datang dari pendekatan eksperimental dan psikologikal R.H. Codrington (The Melanesians, 1891) tentang "mana" sebagai suatu kekuatan supernatural atau pengaruh pengalaman oleh masyarakat Melanesia.

<sup>1</sup> Departemen Sosial menggunakan istilah "komunitas adat terpencil" untuk mengganti istilah "masyarakat terasing" untuk kelompok masyarakat yang tidak atau sedikit sekali memiliki akses transportasi, komunikasi dan tidak ada atau sedikit sekali mendapat sentuhan pembangunan nasional. Pada masa kini, komunitas adat sendiri cenderung digunakan sebagai padanan bagi kata *indigenous people* yang dilansir oleh badan-badan dunia (UNESCO, UNICEF, ILO). Sementara itu sebagian kalangan LSM sejak dekade lalu menggunakan kata masyarakat adat sebagai padanan *indigenous people*.

Sistem kepercayaan atau keyakinan secara khusus selalu dijaga dan dipelihara karena menjadi inti dari kepercayaan atau agama itu sendiri. Di dalamnya terkandung konsep-konsep tentang baik dan buruk, sakral dan profan, pencipta dan tercipta, dunia nyata dan dunia gaib, hidup dan mati, nyawa dan roh dan sebagainya.

<sup>2</sup> Yaitu agama-agama dominan dan memiliki banyak pengikut diberbagai belahan dunia, seperti Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dll. <sup>1</sup> Dalam ilmu antropologi, setiap kepercayaan atau keyakinan yang berdasarkan suatu getaran jiwa atau emosi spiritual yang dalam terhadap sesuatu sehingga dianggap sakral disebut agama. Dalam agama, dikhotomi antara sesuatu yang tergolong sakral dan yang tergolong profan sangat ditekankan sebagai pemberi "arah", dan untuk memelihara emosi spiritual tersebut. Dengan mengadopsi penjelasan Koentjaraningrat (Pengantar Ilmu Antropologi, 1989), maka setiap aspek keagamaan atau kepercayaan spiritual selain memiliki dimensi juga memiliki paling tidak tiga unsur lain, yaitu: (1) sistem kepercayaan atau keyakinan, (2) sistem upacara dan pengamalan kepercayaan, (3) suatu umat atau kelompok yang menganut kepercayaan tersebut.

Hal ini memberi dasar bagi sarjana lain untuk menjelaskan asal-mula agama bersahaja, yang menurut mereka berakar pada pengalaman masyarakat bersahaja tentang dinamika kekuatan alam. Interpretasi paling berpengaruh adalah pendapat Rober R. Marett (*The Treshold of Religion*, 1914), variasi dari teorinya terlihat dalam karya Lucien Levy-Bruhl (*Primitive Mentality*, 1924) yang membedakan antara mentalitas logis dengan mentalitas pralogis dalam menganalisa cara berpikir tentang pengalaman; dan tulisan Rudolf Otto yang menjelaskan makna khusus keagamaan dari model kesadaran manusia. Pendekatan intelektual rasional lain ditunjukkan oleh Emile Durkheim, yang memandang agama sebagai keseluruhan perbuatan pemujaan dan strukturnya, dimana simbol-simbol agama tumbuh sebagai "representasi kolektif" (*collective representation*) dari kehidupan sosial, dalam hal ini ritus-ritus berfungsi untuk menyatukan individu dengan masyarakatnya. Claude Levi-Strauss (*The Savage Mind*, 1962) mengembangkan gagasan Durkheim lebih jauh dengan menunjukkan bahwa cara-cara berpikir dan struktur sosial yang diidealkan oleh suatu masyarakat tergambar dalam mitos-mitos dan simbol-simbol. Berangkat dari pendekatan struktural dari ilmu linguistik, dia menyatakan bahwa pemikiran logis manusia tidaklah universal, dan perbedaan cara berpikir manusia bersahaja dengan manusia moderen tidak karena perbedaan logika, tapi karena berbedanya data yang digunakan untuk berlogika.

### Pengalaman keagamaan dan ekspresinya

Kedua pendekatan – psikologis atau intelektual – dapat dipakai, dan dapat menjelaskan bahwa pengalaman masyarakat bersahaja tentang dunia berbeda dengan manusia modern. Mungkin saja ada yang beranggapan bahwa perbedaan ini terjadi karena perbedaan kemampuan intelektual. Levi-Strauss seperti digambarkan di atas, percaya bahwa kemampuan intelektual masyarakat bersahaja setara dengan budaya masyarakat lain dan perbedaan antara kedua cara berpikir ini hanya pada bagaimana memandang sesuatu. Ia beranggapan bahwa pemikiran bersahaja juga pemikiran yang konkrit, dalam arti bahwa cara pikir mereka tentang obyek diekspresikan melalui mitos-mitos<sup>1</sup>, ritus-ritus dan sistem kekerabatan yang tertata dalam keteraturan yang rasional.

Mircea Eliade (*Australian Religion*, 1973) memiliki pandangan yang sama dengan itu. Menurutnya budaya bersahaja jauh lebih terbuka kepada lingkungan alam. Keterbukaan ini memungkinkan mereka memahami alam sebagai realitas yang sakral. Bagi masyarakat bersahaja segala sesuatu dalam dunia dapat memberi pengalaman sakral. Dalam teorinya Eliade berpendapat bahwa pesan sakral adalah suatu pengalaman total yang tidak dapat direduksi secara rasional, irasional atau psikologis; pengalaman manusia tentang sesuatu yang sakral dapat terkait kepada ketiganya. Cara bagaimana pengalaman itu terintegrasi dan diperolehlah yang menjadi karakter dari kesakralan.

### Upacara

Salah satu perilaku keagamaan yang paling banyak mengekspresikan ciri-ciri agama komunitas adat adalah ritus-ritus dan tindakan-tindakan upacara. Bentuk dan fungsi upacara sangat beragam, dapat saja dilakukan untuk menunjukkan pemujaan terhadap Tuhan YME, untuk mengusir kekuatan jahat, atau untuk menandai suatu perubahan dalam status sosial budaya seseorang atau kelompok. Dalam banyak hal, tetapi tidak semua, pelaksanaan suatu upacara berasal dari atau didukung oleh mitos tertentu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mitos adalah pengintegrasian simbol-simbol keagamaan ke dalam bentuk narasi. Mitos tidak hanya mengandung pandangan komprehensif tentang dunia, tapi juga menyediakan alat untuk memahami dunia. Sungguhpun mitos sering menjadi pemberi alasan bagi ritus-ritus, akan tetapi bagi masyarakat bersahaja sebenarnya adalah model-model perwujudan cara berpikir tentang kesakralan yang berdiri sendiri.

<sup>1</sup> Sistem upacara dan pelaksanaan ajaran religi (amalan) setidaknya-tidaknyanya mencakup enam aspek yang perlu diamati, yaitu: (i) tempat, (ii) waktu, (iii) perlengkapan, (iv) orang-orang yang melakukannya, (v) prosesi dan (vi) syarat-syarat pelaksanaannya.

Umumnya upacara agama (*ritual*) mengekspresikan transisi-transisi besar dalam hidup manusia: lahir (muncul menjadi ada); akil balig (muncul kesadaran tentang seksual dan status jenis kelamin); perkawinan (diterima sebagai warga dewasa dalam masyarakat); dana mati (kembali ke alam nenek-moyang). Upacara-upacara peralihan (daur hidup) ini berbeda-beda bentuknya, nilai-nilainya dan intensitasnya antara satu budaya dengan budaya lain. Terutama dalam kaitannya dengan pengertian-pengertian dan aspek-aspek lain dalam budaya yang bersangkutan. Beberapa komunitas adat di Indonesia upacara kematian dan upacara pemakaman diselenggarakan secara besar-besaran, seperti pada komunitas adat Toraja, Sumba dan Nias. Mereka memiliki mitos-mitos yang menggambarkan tentang proses perjalanan roh si mati ke dunia atau tempat lain. Budaya seperti ini hampir tidak atau sedikit sekali mengembangkan upacara khusus untuk kelahiran.

Hampir semua komunitas adat memberi perhatian besar terhadap masa usia akil balig (pubertas) dan perkawinan, walaupun ada kecenderungan umum perhatian terhadap upacara akil balig laki-laki lebih besar dari pada masa akil balig perempuan. Semua itu karena akil balig dan perkawinan menyimbolkan beralihnya status sosial-budaya-psikologis seorang manusia dari masa anak-anak ke masa transisi dengan masa dewasa. Di masa ini posisi dan peran seseorang dalam struktur kekerabatan dan komunitasnya mulai diperhitungkan. Karena itu pula masa akil balig sering ditandai dengan upacara-upacara dan tindakan-tindakan khusus, seperti upacara sunat (*circumcision*) pada berbagai komunitas adat lama, seperti orang Talangmamak, Nias, Wana dan Asmat dengan konsep yang berbeda dengan “sunat rasul” dalam agama Islam. Upacara sunatan untuk anak perempuan jarang dilakukan, tapi memang ada pada beberapa masyarakat. Ritus akil balig bagi anak perempuan lebih banyak berhubungan dengan periode menstruasi pertamanya.

Upacara peralihan sering pula dikaitkan dengan peralihan periodik alam. Misalnya ada upacara khusus untuk pergantian tahun, pergantian musim, mengawali musim bertanam, mengakhiri musim panen pada komunitas petani. Berbagai upacara juga dikembangkan dalam kehidupan komunitas pemburu-peramu; mereka percaya bahwa upacara itu akan membuat pemburu lebih “kuat” dan perburuannya lebih berhasil.

Jenis upacara lain adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah tidak terduga, seperti perang, kekeringan, bencana alam lain dan kegiatan-kegiatan mendadak. Upacara yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi hal-hal darurat ini biasanya dimaksud untuk meredakan “kemarahan” atau hukuman dari kekuatan adikodrati (*supernatural*) atau Yang Maha Kuasa yang dipercayai sebagai hal yang menyebabkan bencana tersebut, atau untuk mencari tahu apa yang menyebabkan sang adikodrati memberi bencana. Upacara biasanya adalah kegiatan yang sangat berstruktur. Setiap penyelenggara atau pengikut atau kumpulan pengikut memiliki peran tersendiri didalamnya. Ada upacara yang melibatkan seluruh warga, ada pula yang terbatas hanya untuk kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, usia dan kedudukan. Tidak heran jika upacara inisiasi untuk laki-laki berbeda peserta dan caranya dengan untuk perempuan; upacara sebelum berburu berbeda dengan upacara sebelum bertani, membangun rumah dan sebagainya. Ada upacara yang hanya boleh diikuti oleh para prajurit, ada pula yang hanya dilakukan oleh para empu pembuat senjata, para dukun dan para pendeta.

### Kekuatan adikodrati

Kekuatan adikodrati biasanya dikenali lewat tanda-tanda keberadaannya. Sang Pencipta atau dewa-dewa penguasa sumber-sumber kekuatan alam dianggap berada di tempat-tempat dimana sumber daya alam muncul. Karena alam memiliki struktur sendiri, maka kekuatan adikodrati juga dianggap berstruktur. Ada kekuatan adikodrati yang dianggap paling tinggi dan paling berkuasa, biasanya berada di tempat yang tinggi, karena itu dewa-dewa penguasa dianggap berada di langit. Langit sebagai wujud ekspresi transenden primordial adalah salah satu contoh bentuk kekuatan dahsyat yang sakral. Dalam pandangan ini dewa-dewa penguasa langit dianggap sangat menentukan kehidupan manusia. Bukankah cahaya matahari, hujan, badai, dan kekeringan merupakan wujud kekuatan gaib yang berasal dari langit?

Kesamaan konsep kekuatan adikodrati penguasa langit pada budaya bersahaja dengan Tuhan tunggal dalam agama Yahudi, Kristen, Islam dan Zoroastrianisme menyebabkan mahasiswa-mahasiswa Barat yang mengkaji agama menyebutnya sebagai "monoteisme bersahaja". Karena itu pula, agama-agama besar mereka anggap sebagai hasil dari proses *devolution of religion* (pembalikan proses perkembangan) bukan evolusi dari politeisme menjadi monoteisme. Berbeda dengan anggapan selama ini, bahwa agama-agama besar merupakan hasil dari proses evolusi dari politeisme melalui henoteisme (pengakuan atas keberadaan sejumlah tuhan, tapi ada satu yang dominan) menjadi monoteisme. Pendukung gagasan monoteisme bersahaja yang paling gigih adalah Wilhelm Schmidt, seorang pendeta katolik Roma dari Austria yang juga seorang ahli etnologi. Dalam pandangannya bentuk sakral paling awal berasal dari langit – sang pencipta yang menguasai langit luas. Pengakuan dan pemujaan terhadap Tuhan Langit itu memudar dan akhirnya menghilang seiring dengan perhatian manusia terhadap dewa-dewa yang kurang berkuasa (tapi lebih sering tampil dalam dinamika kehidupan sehari-hari manusia). Namun kemudian, melalui sejarah budaya yang panjang Tuhan tunggal yang maha pencipta kembali diingat dan dipuja orang dalam agama-agama monoteisme. Akan tetapi, cara berpikir seperti ini ditolak oleh para sarjana masa kini, karena bercorak "evolusi unilineal".

Berkaitan dengan Tuhan Langit ada pula kepercayaan terhadap kekuatan tuhan-dewa yang diwujudkan oleh matahari dan bulan. Simbolisme matahari sebagai kekuatan transenden langit sering lebih dekat dengan kehidupan komunitas manusia yang menganggap matahari sebagai kekuatan paling rasional dalam mengatur kehidupan. Dewa-dewa matahari adalah pencipta dengan kekuatan penumbuhnya – menghasilkan kekuatan. Dewa Langit sering pula dianggap sebagai pencipta *ex nihilo* ("out of nothing"), sudah selesai; mereka tidak memerlukan manusia sebagai perantara dalam penciptaan, dan cenderung dianggap sudah mengundurkan diri dan sedikit sekali campur tangan kepada kehidupan manusia. Manifestasi dan kehadiran dewa bulan berbeda dari dewa matahari. Dewa-dewa bulan diasosiasikan dengan suatu struktur yang lebih berirama; mereka lebih lentur dan rapuh, kelihatan lebih goyah dan lebih mudah menghilang dan timbul. Dewa bulan sering kali dipersepsikan sebagai wanita dan dihubungkan dengan sifat-sifat wanita. Dewi-dewi bulan adalah turunan kehidupan yang rapuh, berbeda dengan dewa-dewa matahari, keberadaannya bukanlah keberadaan dalam sejarah kekuasaan dan kekuatan, tapi adalah simbol dari daur hidup manusia: lahir, hidup dan mati. Tempat-tempat lain dimana dewa-dewi dianggap mewujudkan diri adalah pada benda-benda alam seperti sungai, air terjun, tumbuh-tumbuhan, tanaman pokok, batu, seksualitas manusia dan sebagainya.

Pola kedewaan atau ketuhanan juga beragam sesuai dengan bentuk dan jenis masyarakat pendukungnya. Pada budaya berburu-beramu misalnya, tidak hanya ada bahasa dan upacara khusus untuk berburu dan beramu, tapi biasanya juga ada Pemilik, Penjaga, Tuan atau Induk dari hewan dan tanaman tertentu – yaitu yang menciptakan, melindungi, dan menyediakan hewan dan tanaman tersebut untuk pemburu-peramu. Agama seperti ini masih terdapat di pelosok-pelosok dunia, seperti pada, sukubangsa Siberut di Kepulauan Mentawai, Talang Mamak dan Anak Dalam di pedalaman Sumatera, beberapa sukubangsa Dayak di pedalaman Kalimantan, sukubangsa Asmat di Papua dan pada komunitas-komunitas adat terpencil lain. Agama komunitas adat yang lebih kompleks dapat ditemukan pada masyarakat petani tradisional. Sering kali dianggap bahwa budaya petani kuno berhubungan erat dengan ritus feminimisme dan pengkhususan peran perempuan. Hal ini berarti bahwa pemberian dan kekuatan pertanian menyediakan sebuah wadah dimana kesakralan dunia dapat diekspresikan dalam femininitas umat manusia. Upacara-upacara pertanian menjadi sebuah bahasa simbolik yang amat kuat menyuarakan gestasi, kelahiran, *nurture* dan kematian. Perkembangan seperti ini tidak berarti bahwa matriarkhi dan perempuan mendominasi masyarakat. Dalam masyarakat petani laki-laki mendominasi urusan-urusan secara konvensional, tetapi kekuatan perempuan selalu lebih riil dan potensial.

Dalam beberapa budaya di Afrika Barat ada tiga lapisan makna sosial budaya yang memberi bentuk. Pertama, mengacu kepada budaya pertanian kuno dimana kekuasaan dan simbolisme feminim lebih dominan. Kedua, dimana upacara-upacara dan hak-hak pertanian digambarkan dalam bahasa dan simbol-simbol maskulin. Sebaliknya, penggunaan simbol dan bahasa feminim dan maskulin digunakan secara bersama-sama pada lapisan ketiga. Pada masa kini lapisan tertua dapat diolihat pada konsep Ibu Suri (*queen Mother*) yang diyakini sebagai "pemilik tanah-air"; lapisan kedua nampak dalam sistem kerajaan; dan lapisan ketiga terlihat dalam mitos-mitos yang diasosiasikan dengan simbolisasi telur. Yang pada tingkat kosmologis berarti sebuah kecenderungan perubahan seksual secara harmonis.

## Sakralisasi personifikasi

Di dalam agama bersahaja kesakralan cenderung terbentuk secara alamiah, akan tetapi makna sakral juga dapat didefinisikan oleh segolongan orang-orang tertentu, seperti oleh pendeta atau pemimpin suatu agama. Pada sisi lain, kesakralan dapat pula dilokalisasi dan didefinisikan oleh sekumpulan orang atau sekelompok pemilik status dalam komunitas, seperti oleh pemimpin atau kaum penguasa. Warga biasanya menurut apa yang ditetapkan sebagai sesuatu yang sakral oleh syaman atau pemimpin agama. Misalnya oleh Puhun (Baduy), Sikerei (Siberut), atau Kementan (Talangmamak). Pada kasus-kasus tertentu peranan dan fungsi raja atau pemimpin dianggap sebagai penentu kesakralan karena mereka sering disamakan sebagai titisan atau tiruan dari sang pencipta. Penyamaan status sakral dengan dewa tersebut ditanamkan melalui penuturan mitos-mitos, sehingga dapat berkelanjutan secara turun temurun. Sebaliknya, ada pula bentuk sakral individual yang dianggap melekat pada pribadi-pribadi yang memiliki tanda-tanda atau "panggilan-panggilan" tertentu (Jawa: *wangsit*). Orang-orang seperti shaman termasuk ke dalam kategori ini. Shaman direkrut dari sejumlah orang muda yang dianggap memiliki tanda-tanda psikologis tertentu yang menunjukkan kesiapan mereka untuk masuk ke dalam kompleksitas dunia sakral. Begitu terpilih, shaman harus mengikuti serangkaian upacara inisiasi khusus dan diajar berbagai cara pengobatan dan perilaku sakralistik oleh shaman-shaman yang lebih tua. Karena berhubungan dengan pekerjaan sakral, maka setiap shaman harus melalui perjalanan pengalaman melatih diri yang panjang sebelum boleh melakukan praktek sendiri. Sama halnya dengan keberadaan seorang dukun atau peramal, hanya saja kedudukan ini sering diturunkan secara generatif.

## Agama Komunitas Adat dan Pengakuan Negara

Konstitusi kita mengatur pengakuan sekaligus jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan mendasar untuk memeluk agama dan kepercayaan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD.<sup>1</sup> Pasal tersebut sangat krusial, tidak heran jika dalam beberapa kali proses amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak melakukan perubahan apapun terhadap pasal tersebut. Namun demikian, prinsip kebebasan memeluk agama dan kepercayaan itu belakangan ini dibatasi hanya pada 6 (enam) agama resmi (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu) yang diakui oleh negara, seperti terlihat dalam RUU Administrasi Kependudukan. Padahal, selain agama-agama yang "diresmikan" tersebut banyak lagi agama dan aliran kepercayaan lainnya yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diundangkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005, mengatur dalam Pasal 18, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihalangi untuk menyatakan keyakinannya pada suatu agama atau kepercayaan. Dalam Laporan Tahun 2004 *United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, juga ditegaskan bahwa pencantuman agama dalam kartu identitas penduduk adalah tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan yang telah diakui dan dilindungi oleh masyarakat internasional. Sebenarnya RUU Adminduk diharapkan dapat mengakhiri problem diskriminasi agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun, substansi dari materi RUU Adminduk cenderung bertentangan dengan kaidah penyusunan peraturan perundangan, khususnya asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Dengan demikian, legislasi ini justru akan melanggengkan praktek diskriminasi. Dalam penyusunan kebijakan administrasi kependudukan, terdapat setidaknya 3 (tiga) pilihan. Pertama, sebagaimana yang terumus dalam RUU Adminduk, yaitu hanya membatasi pilihan pada 6 agama resmi. Kedua, mencatatkan apapun agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia, tanpa terkecuali. Pilihan ini adil dan mengandaikan adanya kesetaraan di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Opsi ketiga, yaitu menghapuskan kolom agama di dokumen-dokumen kependudukan. Banyak negara menghapuskan kolom agama dan kepercayaan dalam kartu identitas kependudukan. Negara-negara yang tercatat sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, bahkan beberapa negara Islam sekalipun, dalam prakteknya tidak mewajibkan adanya afiliasi pada satu agama dan kepercayaan, atau malah tidak mengharuskan pencantuman keyakinan dalam kartu tanda identitas penduduknya.

Diantara negara-negara tersebut adalah Aljazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Mauritania, Oman, Qatar, Sudan, Tunisia, Arab Emirat. Mereka tetap dapat membereskan problem administrasi kependudukan tanpa perlu mengambil resiko besar dengan mencantumkan kolom identitas agama dan kepercayaan.

Di Indonesia, pihak-pihak yang bersikeras menginginkan pencantuman identitas 6 agama resmi (minus kepercayaan) berargumen bahwa itu adalah cara yang paling efektif untuk menghindari kesalahan-kesalahan administratif. Ilustrasi yang biasa mereka kemukakan adalah: seandainya terdapat mayat yang tidak dikenal, maka identitas agama di KTP dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga ia akan dapat dimakamkan sesuai dengan agamanya. Argumen semacam ini merupakan simplifikasi dari penyelesaian masalah, tanpa memperhitungkan potensi permasalahan lain yang akan timbul karena solusi itu. Pilihan nya, menguburkan mayat secara benar berdasarkan agama dalam KTP atau membiarkan penduduk tak bersalah menjadi mayat korban konflik akibat identitas agama dalam KTP?

### Kesimpulan

Unsur pokok yang mendasari bentuk-bentuk, fungsi-fungsi, upacara-upacara, personifikasi dan simbol-simbol dalam agama komunitas adat adalah dikotomi antara sakral dan profan. Sakral menunjuk dunia realitas, sebagai basis bagi seluruh bentuk makna dan perilaku dalam masyarakat. Profan sebagai lawan dari sakral, tidak dijadikan basis bagi struktur dan perilaku warga komunitas. Sungguhpun keduanya memperlihatkan sebuah model eksistensi dan model *quasi reality* (seolah-olah ada, pura-pura), realitas tersebut tidaklah berdasarkan pada sebuah model keagamaan, tidak pula sebagai sebuah prinsip aturan bagi kegiatan-kegiatan atau makna-makna. Sebagai contoh, makna ruang pada sebuah desa bersahaja diletakkan sesuai model keagamaan yang menunjukkan realitas sakral. Sedangkan ruang di luar ruang-ruang terorganisir dalam desa dipandang sebagai ruang profan, karena tidak teratur, dan karena itu pula tidak termasuk ke dalam makna keagamaan mereka. Yang jelas, perbedaan antara sifat sakral dan profan ada pada setiap tingkat komunitas adat.

Sungguhpun struktur agama dibangun secara sakral kemasyarakatan, akan tetapi kesadaran agama sangat bersifat pribadi, terkait dengan pengalaman dan pemahaman seseorang dalam menghayati keyakinan, melaksanakan ritus-ritus (upacara-upacara) dan mengaktifkan simbol-simbol keagamaannya. Hal-hal seperti ini merupakan substansi pokok baik dalam agama-agama "besar" maupun dalam agama-agama komunitas adat atau agama bersahaja umumnya. Pada masa kini keberagaman latar belakang asal-usul, sosial-budaya, pendidikan, sejarah dan lingkungan menyebabkan agama-agama memiliki corak, tidak terkecuali agama-agama komunitas adat.

Perkembangan agama-agama besar yang cenderung lebih terstruktur, makin lama makin lebih bersifat monoteis, dan dapat melintasi berbagai ragam budaya, tidak menjadikan agama-agama komunitas adat punah. Sebaliknya, nampak ada korelasi erat antara kemampuan survival komunitas adat dengan sistem keyakinan dan perangkat keagamaan (upacara dan simbol-simbol) mereka. Sungguhpun tidak semua komunitas adat memiliki agama komunal sebagai identitas diri – banyak komunitas adat yang sudah memeluk agama resmi – namun pada sebagian dari mereka agama komunal tersebut menjadi salah satu identitas kelompok sekaligus sebagai pemberi batas lingkup sosial-budaya.

Sementara itu, ciri-ciri kebersahajaan juga tidak sepenuhnya lagi melekat pada sebagian dari komunitas adat. Identitas sebagai komunitas adat dan penganut agama komunal tidak selamanya disertai dengan ketidakmampuan literal. Banyak bukti bahwa penganut agama bersahaja juga mencakup kaum intelektual, sarjana dalam bidang ilmu moderen tertentu. Karena itu kemajemukan bangsa Indonesia bukan saja terungkap dari budaya-budaya *tangible*, tapi juga dari beragamanya budaya *intangible*, seperti sistem religi dan pengetahuan tradisional dan kearifan lingkungannya.

<sup>1</sup> "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 29 Ayat 2)

## SESI KETIGA

Pembicara:

Rukmini P Toheke  
B. Blawing Belareq  
Taufik Rahzen

Moderator

Drs. Toto Sucipto

Sesi ini membahas mengenai  
eksistensi komunitas adat kini  
dan mendatang

\*\*\*\*\*



# Perempuan dan Pengelolaan sumber daya alam

Oleh :

Rukmini. P. Toheke

Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)



Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro maupun yang dilaksanakan secara individu oleh Ibu Rukmini melakukan pendokumentasian peran perempuan pada masa lampau dalam pengelolaan sumber daya alam meliputi :

## 1. Pendokumentasian Peran perempuan yang meliputi :

### a. Status sosial

Yang dilakukan secara individu dalam mendorong peningkatan status sosial perempuan adat adalah, mendokumentasikan peran perempuan adat yang berhubungan dengan kehidupan perempuan adat dalam masyarakat, dan telah terjadi perubahan yang signifikan untuk kehidupan kaum perempuan adat yang ada di Ngata Toro, walaupun ini harus dilalui dengan tahapan proses diskusi yang panjang. Status sosial perempuan pada masa lalu yang bisa mempengaruhi kebijakan ditingkat lembaga adat yang umumnya didominasi oleh laki-laki adalah konsep *Tina ngata* (ibu kampung) yang mana konsep ini mau tidak mau lembaga adat harus mengakui dan mengangkat perempuan menjadi mitra kerjanya untuk mengurus masyarakat dan alam sekitarnya.

### b. Hak dan Wewenang

Sepanjang pengertian hak dan wewenang itu hanya rapi dalam tulisan maka sampai kapan pun perempuan adat tidak akan mencicipi kedaulatan hak dan wewenang, makanya lewat diskusi yang panjang yang dilakukan oleh Organisasi perempuan adat Ngata Toro dan memberikan pemahaman kepada lembaga adat dan pemerintah ngata maka kaum perempuan adat ada pengakuan hak dan wewenangnya untuk hidup bermasyarakat.

### c. Akses dan kontrol

Kaum perempuan adat yang ada di Ngata Toro sebelumnya hanya sebagai penonton yang abadi dalam Pengelolaan sumber Daya Alam karena yang terjadi dalam pertemuan sebelum mendapatkan pengakuan dari tingkat komunitas dan Lembaga terkait dalam Ngata, semua porsi untuk mengambil keputusan sama sekali tidak melibatkan kaum perempuan karena kelembagaan adat dominan kaum laki-laki.

Setelah deklarasi pengakuan atas organisasi perempuan adat maka perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam itu sudah menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelompok perempuan adat.

## 2. Proses pembuatan kain dari Kulit kayu,

Kegiatan ini dilakukan untuk mendokumentasikan kembali bagaimana proses pembuatan hingga menjadi sebuah kain yang dipakai dalam acara adat, dalam pembuatan kerajinan ini banyak dilakukan oleh perempuan.

Tujuan mendokumentasikan proses ini adalah untuk menjadikan bahan pembelajaran kepada generasi muda baik di Ngata toro maupun dikomunitas lain yang memiliki potensi alam yang sama untuk dikembangkan.

### 3. Pendokumentasian Obat Tradisional

Berangkat dari pengalaman yang ada dimasyarakat, ternyata alam telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita baik manusia maupun hewan. Dalam mengumpulkan data yang ada dimasyarakat sesuai hasil riset yang dilakukan ternyata yang banyak memiliki pengetahuan dalam obat tradisional adalah perempuan, dan dari hasil pendokumentasian obat dan fungsinya, berhasil didokumentasi tanaman yang bisa dijadikan obat sebanyak 103 jenis tanaman.

### 4. Pola pertanian ramah lingkungan

Kegiatan ini kami lakukan berdasarkan hasil wawancara dengan orang- tua yang masih mengetahui sistem bercocok tanam tanpa menggunakan pestisida dan herbisida, Pola bertani yang dilaksanakan oleh perempuan dalam bertani adalah menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar mereka untuk dijadikan Micro Organisme Lokal (MOL) maupun pembuatan pupuk kompos. Selain itu pengetahuan perempuan adat ngata toro terhadap ilmu perbintangan sangatlah membantu untuk keberhasilan dalam bertani Ilmu pertanian ramah lingkungan yang ditekuni oleh perempuan toro kemudian didokumentasikan oleh Organisasi perempuan adat ngata toro dan dijadikan modul pelatihan penyebaran kekomunitas lain yang ada diluar ngata toro.

### 5. Konseling

Kegiatan ini mulai berjalan sejak tahun 2001 sejak adanya pengakuan kelompok perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, peran Tina Ngata yang direvitalisasi kembali adalah dalam melayani kaum perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dan pembagiaan harta warisan yang tidak sesuai dengan haknya, maka organisasi perempuan adat menangani hingga adanya keadilan buat kaum perempuan.

Mulai tahun 2005 Organisasi perempuan adat ngata toro mulai mendokumentasikan segala proses kegiatannya dalam bentuk audio visual. (film) Tujuan dari kegiatan ini agar kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat adat ngata toro dan juga masyarakat diluar ngata toro yang membutuhkan informasi yang sama.

Dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada dingata toro, maka segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ngata maupun pemerintah kecamatan selalu melibatkan organisasi perempuan adat baik urusan dalam masyarakat mauun kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perizinan pengolahan kayu untuk bangunan rumah dingata toro ditanda tangani 3 lembaga yaitu : pemerintah ngata, lembaga adat dan organisasi perempuan adat.



# PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT DAN LEMBAGA ADAT DAN HAK ULAYAT

Oleh:

B. Blawing Belareq

## 1. Pendahuluan



Pulau Kalimantan, satu dari sejumlah pulau terbesar dunia terbagi dalam 3 wilayah negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pemerintah negara Indonesia kemudian membagi wilayahnya di pulau ini ke dalam empat wilayah yaitu Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, dan Kalimantan Barat.

Pulau Kalimantan dihuni oleh beberapa etnis bangsa yang sejak dahulu telah tinggal dan berkembang di sana. Sebelum terbentuknya NKRI, terdapat beberapa kerajaan/kesultanan, dan komunitas etnis yang dikategorikan sebagai penduduk asli pulau Kalimantan. Kerajaan/kesultanan dan komunitas tersebut antara lain: Banjar, Kutai, Bulungan, Melayu, dan Dayak dengan ratusan sub etniknya. Kemudian setelah era NKRI dengan program transmigrasi maka semakin banyak etnik yang datang dan tinggal di Kalimantan.

Dengan heterogenitas yang terjadi, maka beragam budaya pun masuk ke Kalimantan dan berinteraksi dengan kebudayaan setempat. Sebuah komunitas pada umumnya memiliki aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai tertentu, baik yang berkaitan dengan religi, sosial, dan hukum. Dan terkadang aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai tertentu berbeda dengan yang dimiliki komunitas lain, dan pertemuan keduanya dalam kehidupan berbangsa sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik. Untuk itu perlu digali kembali segala persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut.

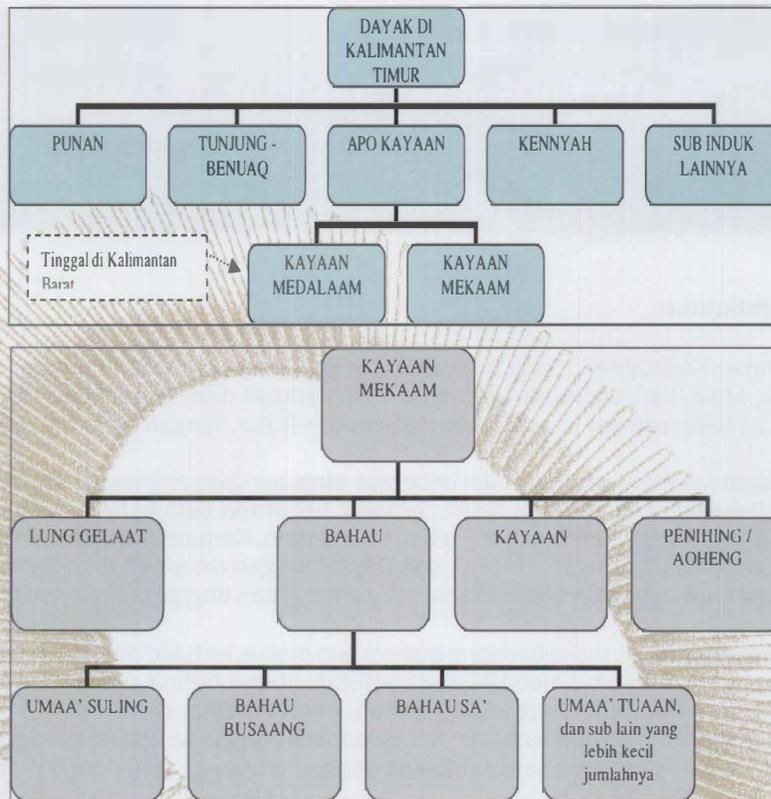
## 2. Ruang Lingkup

Saya membatasi ruang lingkup pembahasan kita pada Komunitas Adat Dayak Bahau di provinsi Kalimantan Timur.

## 3. Masyarakat Adat Dayak Bahau

### a. Sejarah Singkat

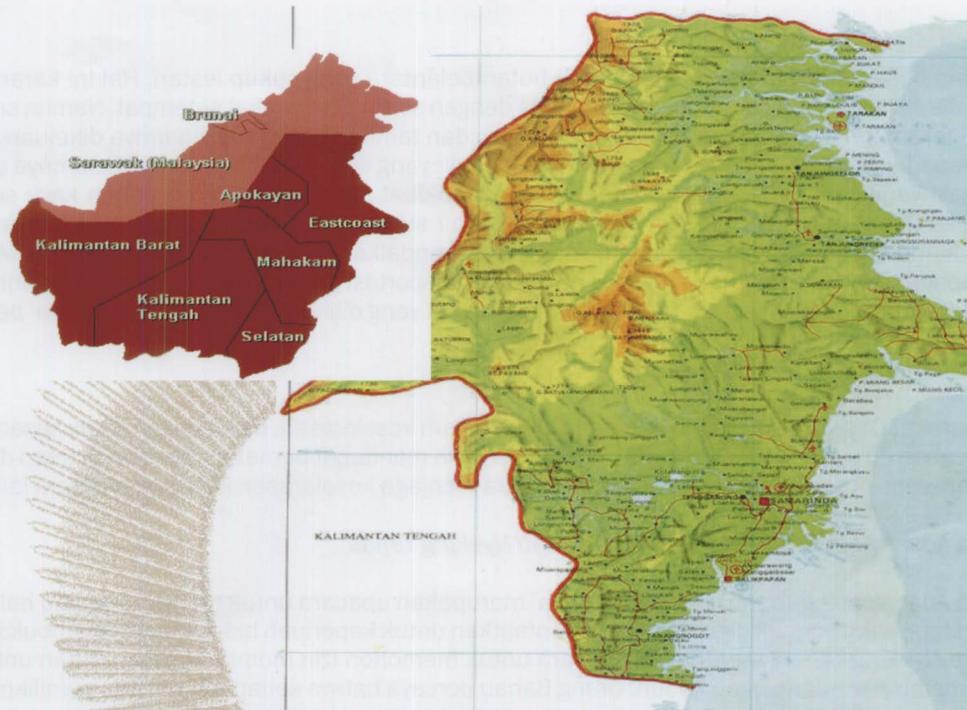
Dayak merupakan salah satu etnis mayoritas yang mendiami pulau Kalimantan. Nama "Dayak" sebenarnya adalah sebutan orang Belanda kepada suku-suku yang tinggal di pedalaman Kalimantan yang artinya "orang udik atau orang ulu". Bahau adalah satu dari banyak sub etnik Dayak yang ada di Kalimantan Timur, yang merupakan sub dari Dayak Apo Kayaan. Dayak Bahau sendiri terbagi lagi dalam sub yang lebih kecil dan memiliki dialek yang berbeda. Sebagai contoh sub Dayak Bahau yaitu Umaa' Suling, Bahau Sa', Bahau Busaang, Umaa' Tuanan dan masih ada lagi. Atau lebih jelasnya adalah seperti di gambarkan di sebelah ini.



Masyarakat Dayak Bahu ini sebagian besar tinggal di sepanjang sungai Mahakam (*Mekaam*) terutama di daerah kabupaten Kutai Barat, dan beberapa kelompok di bagian utara Kaltim.

Sebelum tinggal di daerah sungai Mahakam, suku Bahu bermukim di Apo Kayaan bersama-sama dengan kelompok suku yang lain. Apo Kayaan adalah daerah dataran tinggi yang terletak di daerah Kabupaten Malinau. Pada abad ke-17 terjadi perpindahan dalam kelompok besar ke arah Barat. Dalam perjalanan kelompok ini terbagi menjadi dua pada peristiwa Mutat Ji'tit. Akibatnya kelompok pertama meneruskan perjalanan ke Barat dan kelompok kedua mengambil jalan memutar dan akhirnya ke arah Selatan.

Kelompok yang ke arah Barat akhirnya menetap di Kapuas bagian hulu yaitu di daerah Medalaam, Kalimantan Barat; sehingga disebut Kayaan Medalaam. Sedangkan kelompok yang ke Selatan akhirnya menetap di Mahakam, yaitu mulai dari ulu sungai Mahakam sampai bagian tengah; di daerah Tering. Sekarang termasuk dalam wilayah kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sehingga disebut juga Kayaan Mekaam. Sekarang orang Bahu tinggal menetap di sepanjang sungai Mahakam dan menjadi salah satu sub Dayak terbesar di Kaltim di samping Tunjung-Benuaq, Punan, Modang



#### b. Kondisi Kehidupan Masyarakat Bahau

Orang Bahau sebagian besar tinggal di sepanjang sungai Mahakam mulai dari ulu sampai bagian tengah yang terbagi dalam 5 kecamatan dengan puluhan kampung. Masyarakat Bahau hidup dalam nuansa tradisi yang kental, meski cukup sulit dikatakan demikian pada generasi mudanya; akan tetapi budaya tradisi leluhur masih bertahan. Gotong royong dan kekeluargaan menjadi cara yang ideal dalam menghadapi permasalahan sehari-hari.

Mata pencaharian orang Bahau adalah sebagai peladang, pencari hasil hutan, pedagang, dan pegawai negeri. Dalam banyak hal, orang Bahau masih teringgal.

- i. Dari segi perekonomian masih belum maju benar akibat sulitnya akses dalam mencapai daerah tempat tinggal mereka. Jalur transportasi yang digunakan adalah jalur sungai dan udara. Sampai sekarang masih belum ada jalan darat yang mencapai daerah ini.
- ii. Dari segi kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada hanya puskesmas dan balai pengobatan dengan tenaga dokter yang sangat minim. Rumah sakit hanya terdapat di Tering, yang merupakan kampung paling hilir yang paling dekat dengan ibu kota kabupaten di mana dapat juga dicapai dengan jalan darat.
- iii. Dari segi pendidikan, sekolah yang sudah ada adalah dari tingkat Sekolah Dasar sampai SLTP. Terdapat juga SMU tetapi hanya di beberapa kampung ibukota kecamatan saja. Biasanya setelah lulus SLTP siswa melanjutkan ke SMU di ibu kota kabupaten atau provinsi. Tenaga pengajar pun masih minim, baik kuantitas mau pun kualitas.

c. Kondisi Alam

Sebagian besar alam sekitar masih berupa hutan belantara yang cukup lestari. Hal ini karena wilayah kampung merupakan wilayah adat yang pemanfaatannya harus dengan seizin masyarakat setempat. Namun sekarang sedikit demi sedikit mulai terambah akibat operasi perusahaan kayu dan tambang yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan menelan korban jiwa. Dan agaknya jika dilihat selang pandang sebagai akibat dari berkurangnya pohon kayu sebagai penahan air. Sedangkan jika tidak turun hujan dalam sepekan maka air sungai akan surut hingga sulit dilayari, sementara untuk menjangkau kampung-kampung di bagian hulu hanya mengandalkan sarana angkutan air. Sungai Mahakam juga sudah mengalami pendangkalan, sehingga sangat menyulitkan transportasi pada musim kemarau. Selebihnya masih tersimpan hutan belantara yang cukup luas yang merupakan tanah adat yang dilindungi hukum adat (*tanaa' peraa'*).

1. Ideologi dasar Masyarakat Adat Bahau

Masyarakat Dayak Bahau selalu berusaha hidup dalam keselarasan, baik dengan alam, sesama, maupun dengan Tuhan. Oleh sebab itu upacara-upacara adat kehidupan lebih mendapat perhatian dan masih tetap dilaksanakan sampai sekarang. Beberapa contoh upacara adat dalam rangka menjaga keselarasan kehidupan antara lain:

a. Upacara Adat *Ngaping Tanaa'*, *Mela Tanaa'*, dan *Nyelung Tanaa'*

Upacara Adat *Ngaping Tanaa'* dan *Mela Tanaa'* merupakan upacara untuk menyapu segala hal yang tidak baik dari tanah (lahan) yang hendak digarap atau dimanfaatkan untuk keperluan hidup seperti membuka ladang atau kebun. Upacara *Nyelung Tanaa'* merupakan upacara untuk memohon izin membuka lahan hutan untuk keperluan hidup seperti membuka ladang, atau kebun. Orang Bahau percaya bahwa setiap tempat ada pemiliknya dan setiap pohon dan hewan memiliki roh, atau ada roh yang mengatur atau memiliki mereka. Sehingga pemanfaatannya harus dengan seizin roh tersebut. Dengan *nyelung tanaa'* tanah yang tidak baik sekali pun disucikan dan menjadi berkat atas keluarga yang tinggal dan berusaha di atasnya.

b. Upacara Adat *Dangai*

Upacara Adat *Dangai* merupakan kumpulan berbagai upacara adat kehidupan seperti upacara adat untuk pemberian nama anak, upacara anak remaja yang beranjak dewasa, upacara perkawinan dan upacara bagi kampung baru. Upacara adat ini penting karena merupakan perlambang penyerahan hidup kepada kehendak *Ame Tingge* (*Ame*=Bapak; *Tingge*=Berkuasa; Bapak yang Maha Kuasa).

\* *Dangai Anaak* : adalah upacara mengukuhkan atau meresmikan nama seorang anak.

\* *Dangai Kadaan* : adalah upacara mengukuhkan atau meresmikan seseorang boleh memakai pakaian adat yang bernilai sakral.

\* *Dangai Hawa'* : adalah upacara mengukuhkan atau meresmikan adat pernikahan sebuah pasangan suami istri yang sudah menikah sebelumnya tetapi belum melalui upacara adat *Dangai*.

\* *Dangai Umaa'* : adalah upacara atas kampung baru apa bila menempati wilayah baru setelah pindah dari kampung yang lama.

a. Upacara Adat Kayo



Adat Kayo adalah upacara adat pengucapan rasa syukur atas kemenangan atau keberhasilan mengatasi tantangan hidup. Adat Kayo ini hanya khusus bagi kaum laki-laki saja dan seluruh prosesnya dilaksanakan oleh laki-laki. Dengan maksud untuk mengangkat harkat seorang laki-laki menjadi seorang ksatria dalam kehidupan.

Dalam upacara adat ini dijalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan roh-roh kebaikan, dengan tanpa mengabaikan keberadaan roh-roh ganas.

b. Upacara Adat Hudo'



*Hudo'* adalah upacara adat yang dilaksanakan pada musim tanam padi/musim menugal. *Hudo'* dipercaya sebagai utusan *Ine Aya' Apo Lagaan* (Ibu Para Dewa Apo Lagaan) untuk datang menolong manusia. Mereka datang dalam rupa *hudo'* (berarti: kedok atau topeng) agar manusia tidak *parit* (kualat) dan mati jika menyaksikan secara langsung kemuliaan dan ke-dewa-an mereka. Dengan membawa roh-roh padi, roh pepohonan, roh buah-buahan, roh kebijaksanaan, dan dengan *hudo'*-nya mengusir segala roh jahat yang menindas dan merugikan manusia.

c. Upacara Adat Pate

*Adat Pate* adalah upacara adat kematian. Melalui upacara ini roh orang yang sudah meninggal diantarkan kepada para leluhur. Orang Bahu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan berlangsung sama seperti di kehidupan fana. Hanya bedanya kehidupan baka itu abadi dan tidak berkesusahan.

d. Upacara-upacara adat lainnya.

Terdapat juga upacara-upacara lain seperti:

- Adat Abe

Adat Abe adalah upacara adat buang sial. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun. Hal-hal yang dianggap membawa sial bagi banyak orang dihapus dan dibuang dengan upacara ini. Karena masyarakat Dayak khususnya Bahau mempercayai bahwa perbuatan-perbuatan aib dan terlarang dapat membawa sial dan malapetaka bagi seisi kampung, seperti misalnya: wanita hamil tanpa suami, terjadi perkawinan antar saudara yang masih memiliki hubungan darah/saudara dekat, perselingkuhan, dan sebagainya. Segala keperluan dan biaya pelaksanaan upacara ini akan dibebankan kepada pelaku yang membuat upacara ini harus dilaksanakan.

- Adat Tutung

Upacara adat Tutung adalah adat buang *busung*. Upacara ini dilakukan apabila terjadi kejadian kematian seseorang yang tidak wajar seperti dibunuh, mengalami kecelakaan fatal, tenggelam, tersambar petir, perang, dan sebagainya. Tujuannya untuk membakar habis hal buruk tersebut hingga tidak terulang kembali.

- Adat Seluloong

Adat Seluloong adalah adat perdamaian. Upacara ini dilakukan jika terjadi pertikaian dan permusuhan atau bahkan peperangan. Kedua belah pihak akan dipertemukan dalam upacara adat ini dan dilakukan perjanjian damai.

## 2. Kepemimpinan Tradisional

Sebelum terbentuk membahas kepemimpinan tradisional, ada baiknya sedikit mengupas tentang klasifikasi sosial masyarakat adat Dayak Bahau.

Klasifikasi sosial dalam masyarakat Bahau membedakan kelas sosial, hak-hak, kewajiban, dan peranan dalam tatanan adat masyarakat. Strukturnya relatif sama dengan Dayak yang lain pada umumnya, yang berbeda hanya dari segi bahasa atau penyebutannya. Yaitu golongan *hipui* (raja), *pegawaa'* (punggawa/panglima), *panyin* (rakyat), dan *dipan* (hamba/budak).

Golongan *hipui* adalah raja dan segenap keluarga dan keturunannya, yang mana menjadi pemimpin suku secara keseluruhan. Juga berperan sebagai pemimpin dalam tatanan adat di masyarakat. Golongan *pegawaa'* adalah para punggawa dan panglima perang dengan segenap keluarga dan keturunannya. Mereka inilah yang menjadi tangan kanan para *hipui*. Dan para pria dari golongan ini biasanya merupakan petarung yang tangguh dan pemimpin pasukan yang berani.

Golongan *panyin* adalah golongan rakyat biasa. Mereka biasanya terdiri dari peladang, pemburu, pandai besi, pengrajin, penenun, nelayan, pedagang, atau pengumpul hasil hutan. Golongan *dipan* adalah golongan hamba atau budak. Mereka menempati kelas sosial paling bawah dan jumlahnya pun tidak banyak. Mereka menjadi hamba bagi *hipui* atau *pegawaa'* dan tidak digaji. Biasanya mereka berasal dari suku yang kalah berperang dan ditawan. Tak jarang mereka adalah keturunan raja-raja yang berhasil dikalahkan yang kemudian ditawan dan dijadikan hamba atau budak.



Dahulu, klasifikasi ini berlaku dengan tegas. Namun sekarang tidak begitu diperhatikan lagi, dan baru akan nampak pada saat berlangsungnya upacara-upacara adat; dan pada perkawinan.

Sekarang kepala kampung atau petinggi kampung tidak lagi harus dari golongan *hipui* tetapi melalui pemilihan umum secara demokratis. Tetapi kepala kampung ini hanya sebatas pemerintahan kampung yang bersifat birokratis. Sementara hukum tetap dipegang oleh *hipui*. *Hipui* secara kelembagaan menjabat sebagai kepala adat. Mengapa kepala adat harus dari golongan *hipui* adalah karena pemimpin dalam upacara adat harus golongan *hipui*.

## 1. Lembaga Adat

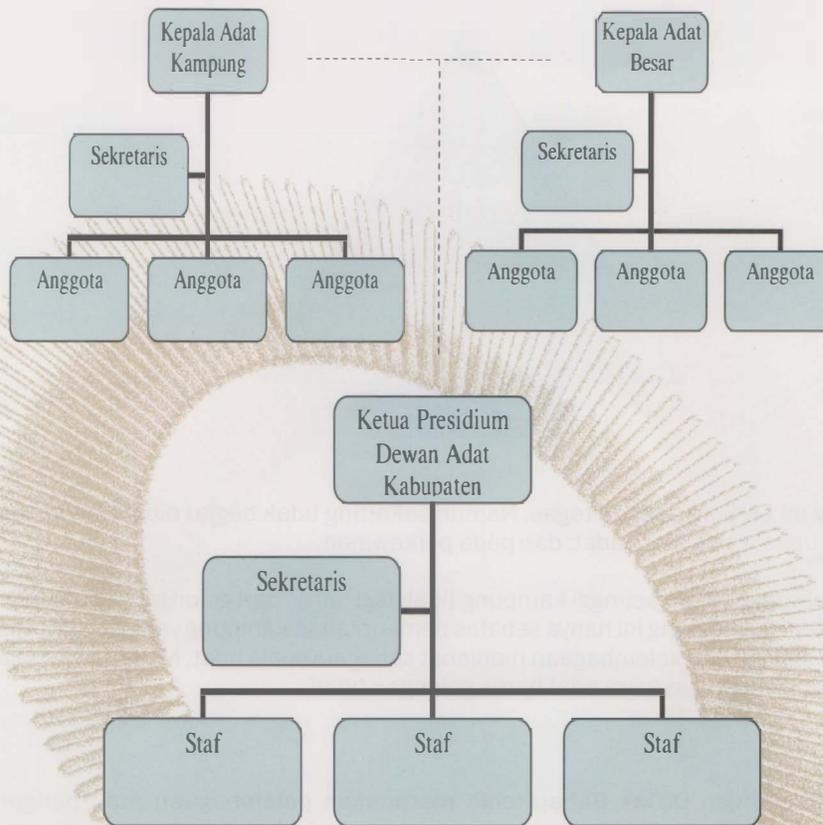
Lembaga Adat di kalangan Dayak Bahau lebih merupakan pelembagaan atau pengorganisasian tugas dalam kepemimpinan tradisional. Karena tugas yang diembannya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan adat tradisi atau upacara adat tetapi juga melingkupi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Lembaga Adat di setiap suku dan atau setiap kampung berdiri otonom dengan tidak terikat atau dibawah komando lembaga atau organisasi tertentu. Namun kendati demikian terdapat Lembaga Adat di tingkat kabupaten berbentuk Presidium Dewan Adat Kabupaten yang terdiri atas Ketua Presidium, Sekretaris, dan Staf-staf. Masa jabatannya selama 3 tahun.

Selain itu terdapat Lembaga Adat Besar yang juga bersifat lembaga presidium di mana lembaga ini berdiri otonom namun memiliki hubungan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Adat Kampung dan Presidium Dewan Adat Kabupaten.

Secara organisasi terdiri dari Kepala Adat Besar, Sekretaris, dan 3 orang staff.

Pemerintah daerah kabupaten memberikan perhatian yang cukup baik terhadap keberadaan lembaga-lembaga ini. Oleh sebab itu sudah sejak lama pemerintah memberikan tunjangan kepada siapa pun yang menjabat jabatan-jabatan tersebut di atas.



## 2. Hukum Adat

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Bahau tetap berpegang pada hukum adat warisan leluhur. Dan hukum ini diwariskan secara turun temurun secara lisan dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum adat ini antara lain mengatur masalah kriminal dan instabilitas di masyarakat, masalah perkawinan, masalah warisan, tanah/lahan, harta, wilayah, ekonomi, dan religi. Maka jenis atau bentuk hukum yang diberlakukan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi.

## 3. Hak Ulayat.

Permasalahan hak ulayat di kalangan masyarakat adat Dayak Bahau sebenarnya belum ada kesepakatan sampai sekarang. Demikian juga halnya dengan pemerintah, memiliki interpretasi berbeda dengan masyarakat. Ketidakepastian ini dapat dipahami karena istilah hak ulayat bukan berasal dari Kalimantan dan tidak pernah digunakan sebelumnya.

Masyarakat Dayak Bahau tidak pernah membuat pembagian yang mana merupakan hak ulayat dan yang mana hak negara, karena yang ada adalah hak masyarakat. Jika yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak adat, maka hak ulayat bagi orang Bahau adalah semua hak yang dimiliki dan diwarisi sejak zaman para leluhur.

Dengan asumsi bahwa hak ulayat adalah hak adat, maka mari kita bahas sedikit tentang hak ulayat dalam pandangan Dayak Bahau.

Suku Dayak Bahau membuat aturan yang berlaku sebagai hukum adat berkaitan dengan lahan dengan membaginya menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. *Tanaa Peraa'*

*Tanaa' Peraa'* adalah lahan hutan yang tidak boleh digarap untuk keperluan apa pun. Karena daerah ini adalah daerah simpanan kayu untuk kebutuhan rumah, perahu dan berbagai keperluan rumah tangga segenap masyarakat. Daerah ini juga menjadi kawasan sumber obat-obatan, daging, rotan, buah-buahan, untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya.

b. *Lep'un*

Adalah kawasan perputaran ladang. Orang Bahau membuat ladang dengan sistem rotasi, yaitu membuka ladang pada suatu kawasan kemudian berpindah ke kawasan lain dan membiarkan lahan yang lama "memulihkan diri kembali". Lalu beberapa tahun kemudian kembali lagi ke lahan semula. Demikian terus berlangsung pada tempat-tempat yang sama, tetapi tetap memberikan kesempatan bagi alam untuk memulihkan dirinya sendiri.

c. Wilayah kampung

Wilayah kampung adalah wilayah kekuasaan yang dimiliki suatu suku yang menempati wilayah tertentu. Berbeda dengan wilayah yang ditetapkan pemerintah di mana wilayah kampung adalah wilayah rencana pengembangan kampung yang melingkupi daerah sekitar kampung saja. Wilayah kampung bagi orang Bahau adalah segenap wilayah yang dimiliki seluruh isi kampung di mana termasuk wilayah *tanaa' peraa'* dan wilayah *lep'un*.

## 9. Penutup

Demikianlah uraian singkat berkaitan dengan Komunitas Adat, Hukum Adat, dan Hak Ulayat dari sudut pandang Suku Dayak Bahau. Saya mengharapkan uraian singkat ini dapat memancing rasa ingin tahu kita semua untuk dapat tertuang dalam diskusi yang hidup, baik di tempat ini mau pun dalam setiap kesempatan yang ada. Manusia ada lemahnya. Mohon maaf bila salah kata. Janganlah dipendam rasa. Kita semua bersaudara.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

## EKSISTENSI KOMUNITAS ADAT, KINI DAN MENDATANG

oleh :  
Taufik Rahzen



Tulisan ini pada dasarnya ingin merefleksikan eksistensi komunitas adat itu dalam konteks sekarang, tetapi yang akan saya bahas nantinya lebih ditekankan pada konteks masa mendatang. Saya lahir dari komunitas adat di Waingapu, Ayah saya pendakwah dimana nilai-nilai yang dimiliki harus dikonversikan. Saya dengan leluhur terikat dengan komunitas adat itu dan bagaimana saya mencernanya sampai sekarang.

Tahun 1986 ketika saya kembali dalam perkembangan trend anak muda, khususnya dalam bidang politik yang ingin mencari akarnya kembali. Saya berhubungan kembali dengan tanah leluhur saya, dimana disana ada yang disebut dengan Kampung Tarung, di Waikabubak. Ini mengkhawatirkan apakah daya hidup kampung ini masih ada. Pada tahun 1986, untuk pertama kalinya saya bersentuhan kembali dengan leluhur saya. Mereka membuat *report* Ratanan dari Tarung. *Report* itu ingin meyakinkan Depdikbud agar bisa mengakui eksistensi mereka, karena di KTP mereka selama ini, dalam kolom agama disebut 'kafir'. Dan ini tentu saja menyulitkan mereka masuk sekolah, karena di sekolah harus ada surat permandian, demikian juga di Islam. Kita membuat *play* ke DPR tahun 1986, saya berhadapan dengan orang yang sekarang kolega baik yaitu Ibu Edi Sedyawati dan Pak Sulistyو Tirtokusumo yang waktu itu mungkin masih baru menjadi PNS. Dan sekarang setelah 20 tahun, ternyata sudah ada UU yang merupakan pengakuan.

Saya akan merefleksikan bagaimana perjuangan masyarakat adat, tapi akan dilihat dengan konteks perubahan yang baru. Kalau kita melihat TV dua malam kemarin, sekarang lagi diributkan Harry Potter memecahkan rekor penjualan buku. Ada lima ribu buku laku per detik, dan beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan polling umum tentang 7 keajaiban dunia, yang berbeda dengan persepsi Yunani Kuno. Kemudian kita juga menyaksikan dalam 2 tahun terakhir, buku paling laris di dunia, *Davinci Code*, dan juga filmnya yang melakukan kritik terhadap tradisi Kristiani yang berasal dari tradisi Pagan. Demikian juga halnya dengan film *Lord of the Ring* yang mengangkat mitos-mitos kuno. Apa yang terjadi, sepertinya abad mendatang akan dikuasai tradisi pagan. Pada saat agama-agama besar sibuk mendamaikan dirinya terhadap fundamentalisme dan terorisme, maka agama tradisi 'kuno' merebut perhatian dengan model-modelnya, dan fakta ini tidak dapat dipungkiri sekarang. Ini yang sedang muncul dimanapun. Karena itu, saya ingin menyumbang atau berdiskusi bahwa mungkin sudah saatnya masyarakat adat sekarang tidak dalam posisi defensif untuk melihat perubahan itu.

Bagaimana Manchu Pichu di daerah Astek, bisa menjadi kekuatan dunia yang dianggap sebagai salah satu keajaiban, sebenarnya peristiwanya belumlah begitu lama. Pada tahun 1996 pernah saya katakan hal itu pada Festival Erau di Tenggara, tentang satu nubuat yang baru yang akan muncul, dan semua itu betul-betul dirancang, dan ternyata meningkatkan arus pariwisata ke Mancu Pichu, sehingga akhirnya dia dianggap sebagai 7 keajaiban dunia. Dan peristiwa ini berlangsung, mungkin belum sampai sepuluh tahun.

Bersama dengan ini jika kita lihat perjuangan masyarakat adat yang mencoba menjadi konvensi atau deklarasi di PBB, sekarang kita masuk pada tahap yang baru. Apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia sumbangan bagi kemungkinan-kemungkinan baru bagi masa depan akan perubahan teknologi.



Foto: J. Limbang



Komunitas Adat Marapu Prai Liu dan Bondo Kapumbu, Loura Sumba Barat Nusa Tenggara Timur

Pertama, kita lihat bagaimana Susilo Budi Dharma, salah satu sistem kepercayaan yang didirikan Pak Subud, tahun 1954 menyebar keseluruh dunia, dan di berbagai dunia memiliki cabang tidak kurang di 96 negara, dan bagi beberapa orang itu dianggap sebagai mungkin Subud adalah sebagai satu dari tiga kemungkinan agama masa depan, dianggap sebagai zen dan sufi. Karena dilihat dari perkembangan teknologi revolusi genetika, bahwa inilah nilai-nilai yang dianggap akan mampu bertahan dan atau akan memberikan alternatif pengertian baru terhadap kenyataan. Dan kita tahu Susilo Budi Dharma itu adalah sebuah sistem kepercayaan atau sistem latihan kejiwaan yang dimulai di Jawa, Indonesia dan menyebar ke internasional.

Kedua, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, misalnya komunitas bisu di Sulawesi Selatan, dipertemukan dengan berbagai seniman, para pembuat film, dan kemudian bagaimana lagaligo memberikan sumbangan penting bagi *performing art* dunia, dan itu memberikan pengertian baru terhadap realitas dalam pertarungan epistemologi. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Bali pada tahun 1930-an, ketika mereka tampil di Paris *Exhibition* tahun 1934, yang menampilkan Calon Arang, dan nilai-nilai yang ada pada calon arang tersebut diadopsi oleh para teaterwan dunia terutama Anthony Arthur, dan kemudian semenjak itu sejarah teater dunia berubah. Bahwa sebelum Anthony Arthur melihat Calon Arang di Paris tahun 1934 itu, mulai dari era pada masa Yunani sampai tahun 30-an, teater masih bersifat konvensional, kemudian berubah menjadi tatanan yang baru. Dari situlah kemudian para ahli mulai melihat alternatif-alternatif baru dalam teater Ketiga, dari sudut spiritual, atihan kejiwaan dan kepekaan realitas kenyataan merupakan akumulasi dari seluruh pengalaman batin, yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bisa menjadi tawaran dunia, dan sekarang masih mencoba bernegosiasi dengan pihak-pihak lain. Lagaligo, dan Calon arang sudah bisa membuktikannya. Dan sekarang ini dari sudut paradigma, yaitu kekuatan spiritual dari komunitas adat, sekarang ini untuk kalangan gerakan lingkungan, dimana dalam pergantian era, selalu ingin mencari cara berfikir atau paradigma baru, kartesia, cara berfikir biner, yang melihat dari dua sudut, yaitu ada dan tiada, kiri dan kanan, kenyataan dan bukan kenyataan yang mendominasi seluruh peradaban Barat sekarang ini dan masyarakat modern ini mencoba untuk mencari alternative. Salah satu yang dianggap secara epistemology memberi kesegaran baru adalah tradisi atau paradigma Batesonian. Paradigma Batesonian ini adalah satu tradisi yang dikembangkan Gregory Bateson seorang filsuf Inggris yang tinggal di Amerika. Dia dianggap sebagai nabi dari pemikir lingkungan, tetapi yang menarik, bahwa Bateson mengambil salah satu bukunya yang terkenal *Mind and Nature*, dan *State to Ecology of Mind*, yaitu satu langkah untuk ekologisadaran, tentang pikiran dan kenyataan. Demikian juga buku dengan buku yang ditulis oleh anaknya, "Menuju ke Epistemologi yang Suci".



Foto-foto Komunitas Adat Bondo Kapumbu di Loura  
Sumba Barat NTT

Apa hubungannya dengan kita, yang menarik adalah dia membangun premis-premis filsafatnya itu atas cara berfikir orang Bali. Pada tahun 1936 ia melakukan penelitian intensif di Bali, kemudian ia membandingkan penelitian lain di Papua. Dari sistem inilah ia membangun sistem filsafatnya, dan dari situlah yang kita kenal teori *artificial intelligent* atau kepandaian bayangan yang dianggap sebagai cara alternatif berfikir modern, yang sebenarnya bersandar dari masyarakat adat. Bahwa dikatakannya, masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang paling stabil. Ini dilihat dari kemampuan mereka untuk menerima perubahan yang tiba-tiba. Gemanya memang sekarang ketika dihubungkan dengan kasus terorisme, yaitu ledakan bom di Bali. Mereka mampu mengadaptasi perubahan-perubahan. Itu yang dia sebut sebagai bentuk kestabilan.

Upaya untuk mencari model-model baru dan membangun eksistensi masyarakat, sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan masyarakat Barat. Sebagai contoh masyarakat Barat mengambil contoh Athena, yang juga sebenarnya masyarakat adat, di Yunani. Kemudian diidealisir sedemikian rupa, sehingga akhirnya konsep demokrasi dibangun dari sana, konsep negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, mitos-mitos dikembangkan seluruhnya dalam kerangka itu.

Dari sudut itu mungkin kita harus melihat dari sudut lain, yaitu dari sudut masalah kita. Kita tidak semata-mata mencoba meratapi apa yang terjadi meskipun kehidupan masyarakat adat masih jauh panggang dari api untuk pengakuan eksistensinya, tetapi dengan revolusi komunikasi dan dunia informasi sekarang justru menjadi sangat memungkinkan, pada saat yang sama kita melakukan pertarungan atau pertempuran untuk merebut paradigma yang paling mungkin untuk masyarakat yang akan datang ini. Secara sistem, sekarang sudah memberikan peluang itu meskipun realisasinya masih membutuhkan waktu. Tetapi serentak pada saat itu juga kita perlu menjangkau pada persoalan yang lebih luas.

Beberapa eksperimen yang kita lakukan sekarang dengan masyarakat adat di Borneo, mendirikan televisi lokal persis bersamaan dengan tanggal 22 Maret, yaitu untuk masyarakat Pagan dimana pun, karena matahari persis di ekuator, bersamaan dengan 23 September, itu merupakan waktu suci, dimana waktu itu dimulai, kita membangun eksperimen baru melalui sistem telekomunikasi yang ada.

Kalau kita lihat kemungkinan yang terjadi pada tahun 2009, karena introduksi televisi digital, dan *broadband* dari internet akan terbuka, sehingga negara, individu, gagasan akan serentak bergerak dimanapun. Kita yang kecil bisa sama powerfulnya dengan masyarakat yang paling kontemporer sekalipun. Oleh sebab itu kita harus menyongsong ini dengan cara baru, dengan kepala tegak, sebagaimana upaya yang telah dibangun oleh leluhur kita, sekarang saatnya kita bangun dengan masa depan yang lebih baik.

Catatan : "Makalah ini ditulis berdasarkan transkripsi audio dengan sedikit editing pada sesi paparan pemakalah"

---

## SESI KEEMPAT

---

**Pembicara:**

**Tengku Mira Rozana Sinar  
G.K.R. Ayu Koes Indriyah  
Andi kumala Idjo**

**Moderator:**

**Sumintarsih**

---

Dialog dilanjutkan pada hari  
kedua dan masih membahas  
mengenai eksistensi  
komunitas adat kini dan  
mendatang

\*\*\*\*\*



# PERAN KESULTANAN SERDANG DALAM PELESTARIAN ADAT BUDAYA MELAYU SERDANG: SATU PERCONTOHAN

Oleh :  
Tengku Mira Rozana Sinar  
(Kesultanan Serdang)



## I. Pendahuluan

Didalam bahasa Indonesia istilah budaya ini dapat dianggap berasal dari dua istilah yaitu budi dan daya, budi adalah akhlak sedangkan daya adalah upaya atau usaha jadi budaya berarti upaya-upaya yang didasarkan atas budi yang luhur yang melahirkan konsep-konsep bagaimana harusnya hidup (*way of life*) sehingga melahirkan adat istiadat, hukum, adab, sopan santun, seni dan sebagainya sebagai pedoman untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu masyarakat dalam belahan dunia manapun tidak terkecuali Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam etnik masing-masing memiliki adat dan budaya (*custom and culture*) yang berperan sebagai pedoman/penuntun dalam mengisi kehidupan mereka.

Dalam hal ini permasalahan mengenai budaya difokuskan pada salah satu etnis dari delapan etnis yang ada di Sumatera Utara yaitu "Melayu". Pengertian orang mengenai nama 'Melayu' sering saja keliru dan dicampur baurkan. Hal ini disebabkan karena ada pengertian berdasarkan "Bahasa", ada pengertian "Ras", ada pengertian etnis "Sukubangsa" dan ada pula pengertian Melayu berdasarkan kepercayaan atau religi, yaitu sesama agama "Islam". Berdasarkan fenomena ini, mau tidak mau haruslah kita telusuri kembali sejauh mungkin apa yang dicatat oleh sejarah, adat resam dan rujukan-rujukan lain.

### Nama Melayu Berasal Dari Kerajaan Melayu Purba

Menurut berita yang ditulis di dalam Kronik Dinasti T'ang di Cina, sudah ada tertulis nama kerajaan di Sumatera "MO-LO-YUE", ditulis dalam aksara dan logat Cina. Penulisannya pada tahun 644 dan 645 Masehi. Hal ini sesuai dengan peristiwa perjalanan seorang pendeta Budha Cina bernama I-TSING ke India. Dinyatakan bahwa ia pernah bermukim di Sriwijaya ("She-li-fo-she") untuk belajar bahasa Sansekerta selama 6 bulan. Menurut tulisannya, ia menuju MO-LO-YUE dan tinggal selama 6 bulan pula sebelum berangkat ke Kedah dan India. Dalam perjalanan pulang ke Cina di tahun 685-M ia singgah lagi di MO-LO-YUE yang disebut ..... yang sekarang sudah menjadi She-li-fo-she. Adat Melayu yang bersendikan Islam mengutamakan Budi Yang Mulia (budi daya, budi bahasa, budi pekerti dan lain-lain) sebab ketinggian Budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu bangsa.

Pembahasan yang lebih detail pada makalah ini adalah mengenai Adat Budaya Melayu Serdang yaitu ritual adat, adat perkawinan, kesenian, bahasa dan sastra, kuliner, permainan, dsb. Saat ini di beberapa daerah berbasis etnis Melayu sudah banyak meninggalkan adat istiadat leluhur. Sudah jarang diadakan ritual-ritual adat dikarenakan tidak memahami makna dari ritual tersebut. Pada adat perkawinan banyak aturan tata cara yang ditinggalkan. Kesenian tradisionalpun sudah tersingkir, tidak terdengar lagi dialek asli Melayu, masakan khas melayu sudah tergandi apalagi permainan rakyat sangat nyata terlupakan. Walaupun kekuasaan Sultan dalam pemerintahan sudah dihapuskan, namun dengan tetap eksisnya kerapatan Adat di kesultanan Serdang maka Adat istiadat warisan leluhur tetap dipertahankan.

Dari wacana diatas jelas terlihat bahwa masalah yang dihadapi adalah:  
Bagaimana cara agar generasi muda Melayu tidak kehilangan budaya leluhur ?.  
Apa usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya Melaya ?.  
Bagaimana memperthankan budaya melayu yang masih tersisa ?.

### Sekilas Kesultanan Serdang

Nama "Serdang" diambil dari nama pohon yang kokoh dan kuat yang selalu dipergunakan untuk membangun rumah. Kesultanan Serdang berdiri pada masa Tuanku Umar Kejeruan Junjungan pada tahun 1723. setelah Revolusi pada tahun 1946, Kesultanan bergabung dengan Republik Indonesia maka kepemimpinan di Kesultanan Serdang bergelar Kepala Adat.

### Batas Wilayah Kesultanan Serdang:

Masa Pemerintahan Sultan Johan Pahlawan Alam Syah sampai masa pemerintahan Putera Sultan Thaf Sinar Basarsyah. Kecamatan : Beringin, Pantai Labu, pagar Merbau, Lubuk pakam, Galang Batang Kuis, tanjung Morawa, Patumbaak, Senembah Tanjung Muda Hilir, Senembah Tanjung Muda Hulu, percut Sei Tuan (kesemuanya di Kabupaten Deli Serdang) dan Kecamatan Perbaungan, pantai cermin, Serba Jadi, Pegajahan, Rampah, teeluk mengkuddu, Tg. Beringin, bandar Khalifaah, Sei bamban, Tebing Tinggi, Dolok Merawan, dan Dolok Masihul (Kabupateen Serdang Bedagai). Masa pemerintahan Sultaan Basyaruddin Syaiful Alamsyah ( Sultan Serdang Ke-IV) ditaklukan lagi wilayah di Hulu Serdang yang didiami oleh etnis Karo dan etnis Batak Timur. Dalam akte Van Erkeniing ( 16 Agustus 1862) wilayah Serdang meliputi : jajahan Percut Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang. Pada tahun 1886 menetapkan wilayah kerajaan Serdang sebagai batas Sei Batang Kuwis dengan Deli, sehingga wilayah Patumbak dan Sei Tuan masuk ke Deli dan ada kompensasi Denai dikembalikan ke Serdang. KERAPATAN ADAT KESULTANAN NEGERI SERDANG dalam mahkota kesultanan negeri Serdang TUANKU LUCKMAN SINAR BASARSYAH II, SH disempurnakan pada tanggal 12 Juni 2002. Jabatan ORANG BESAR diberikan kepada kepala adat di Luhak maupun Negeri serta Sibayak dan Perbapaan di Serdang Hulu.

## 2. Permasalahanan

Pada masa sekarang ini permasalahan kebudayaan menjadi sebuah polemik dan sangat jelas merupakan inti persolanan modernisasi bangsa Indonesia maka pengaruhnya cukup meluas dan cukup dapat bertahan hingga hari ini.

Masalah pokok dalam polemik budaya adalah dari manakah kita menggali kekuatan bagi kebudayaan Indonesia baru ? kelompok tradisionalis berpegang apada nilai - nilai budaya nenek moyang. Di sanalah budaya kita berakar, kata mereka, dan budaya ini masih cukup mempunyai nilai-nilai yang dapat memberikan kekuatan kebudayaan bangsa Indonesia untuk menghadapi dunia.

Sebaliknya kelompok modernis mengatakan bahwa budaya tradisioanl kita dalam sejarah telah terbukti tidak mampu menghadapi kekuatan budaya yang datang dari Barat, karena itu bangsa kita jatuh di bawah telapak kaki penjajah Belanda. Jika hendak memajukan bangsa (termasuk di dalamnya memerdekakan bangsa), maka orang Indonesia harus mau menimba segala macam nilai budaya Barat (sins, teknologi dan sebagainya) yang membuat budaya Barat itu unggul dan berhasil mengalahkan bangsa kita.

Dalam polemik ini kelihatan seakan-akan Timur dan barat dipertentangkan secara amat tajam oleh kedua belah pihak. Tetapi sementara itu polemik budaya tersebut telah melakukan perjalanan sepanjang 50 tahun Indonesia telah berubah, dunia pun telah berubah. Salah seorang pencetus polemik budaya itu masih ada relevansinya dari ini bagi kita, karena hari ini pun kebudayaan kita masih belum menentu, nilai-nilai budaya kita juga seakan-akan tidak keruan. Apa yang dikatakan oleh Takdir Alisyahbana itu cukup terasa oleh banyak orang di Indonesia sejak lama juga.

Mungkin perdebatan kita bukan lagi soal Timur dan Barat, Karena kita kini sudah cukup mendapat kesadaran, data dan informasi bahwa budaya Barat itu tidaklah seluruhnya unggul dan hebat. Malahan banyak dalam kebudayaan Barat yang telah berkembang selama ini patut kita tolak, seperti berkembangnya teknologi dan industri merekalah yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup. Banyak teknologi mereka adalah teknologi yang buas, rakus menghabiskan tenaga dan sumberdaya-sumberdaya alam. Perkembangan industri mereka yang berlandaskan produksi massal telah menimbulkan distorsi dalam hubungan antar manusia, antara manusia dengan masyarakat. Ukuran ekonomi yang mereka lekatkan pada semua kegiatan mereka menyebabkan unsur menusiawi dalam budaya mereka yang gersang.

Sebaliknya, kita juga sudah menyadari bahwa budaya tradisional kita juga memiliki unsur-unsur yang baik untuk dilestarikan tetapi juga ada yang harus kita buang saja karena hanya akan menghambat kita untuk mencapai kemajuan bangsa.

Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat dari segala budaya yang ada. Di samping ini kita juga harus mampu mencernakan apa yang kita ambil alih sehingga sungguh-sungguh menjadi milik kita.

Ada empat kerajaan Melayu yang besar di Sumatera Utara yaitu kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat, dan Kesultanan Asahan. Sudah tentu adat dan budaya mencerminkan jatidiri setiap Kesultanan.

Banyak hal yang dapat dilihat dari budaya Melayu Serdang yang masih tetap dipertahankan disaat derasnya pengaruh modernisasi, seperti ritual, adat, adat perkawinan, kesenian, bahasa dan sastra, kuliner, permianan dsb.

### 3. Pembahasan Ragam Budaya Melayu Serdang

#### 1. Adat Istiadat Atau Upacara Ritual

Masih banyak kita temui ritual-ritual adat seperti tolak bala dll. Tapi ini hanya dapat kita temui pada daerah-daerah tertentu. Di wilayah Kesultanan Serdang sendiri dapat kita temui pada wilayah yang suasana terdisinya masih kental seperti daerah Perbaungan, Pantai Cermin dan daerah pesisir lainnya. Begitu juga dengan aksen, tutur sapa, upacara-upacara adat dan lain sebagainya.

Pada zaman dimana sistem pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan semua tradisi-tradisi adat dan budaya masih berlaku, seiring dengan perkembangan zaman, dimana sistem pemerintahan berubah menjadi sitem pemerintahan demokrasi maka tradisi-tradisi adat dan budaya mulai hilang, sangat disayangkan sekali mengingat banyaknya adat-adat dan budaya yang dipakai sebagai landasan untuk sebuah sistem yang baru . Ditambah lagi dengan pertukaran budaya baik dari dalam maupun luar negeri.

Tidak sedikit kita jumpai orang yang mengaku Melayu, namun tidak mengetahui bagaimana jatidiri Melayu tersebut. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai adat dan budaya sudah mulai berkurang.

Seperti dalam ritual adat, latar belakang orang dulu melakukan ritual-ritual seperti tolak bala, jamu laut mengandung makna-makna tertentu agar masyarakat pada lingkungan tersebut seperti sebagai penambah semangat, tetap percaya akan keberadaan Tuhan, meningkatkan hasil tangkapan ikan ataupun hasil paneen dan mensyukurinya dan lain sebagainya. Sedangkan ritual-ritual tersebut sebagai jembatan penyampaian. Namun hal ini sudah jarang ditemui mengingat dari perkembangan zaman dengan perbagai fasilitas seperti sudah tersedianya tarktor, perahu-perahu bermotor yang canggih, pupuk-pupuk yang bagus, sehingga hal-hal tersebut diatas tadi sudah dirasa tidak perlu lagi dilaksanakan. Gaya hidup perkotaan yang juga sangat mempengaruhi mengingat bahwa profesi seseorang tidak lagi hanya menjadi seorang petani ataupun seorang nelayan.

Pada dasarnya istiadat ritual atau upacara-upacara ritual yang wujud di dalam masyarakat melayu serdang mengungkapkan asa perilaku, cita-cita, kepribadian dan mengungkapkan pegangan hidup masyarakatnya. Pemaknaanya melalui perlengkapan yang menyertai dan tradisi kepercayaan dalam upacara di jadikan sebagai jembatan penyampaian.

## Pengenalan

Pembicaraan istiadat ritual masyarakat melayu Serdang ini di mulai membicarakan tentang kedudukan pawang, tempat dan waktu, alat atau perlengkapan serta khalayak yang di dalam upacara. Pembicaraan hanya membicarakan ritual jamuan laut, tolak bala, tarian lukah dan mandi berminyak.

Disadari adat istiadat ritual yang lain, sama kedudukan di dalam adat, tetapi karena dianggap keempat istiadat ritual ini dapat untuk membari gambaran tentang kedudukan dan makna dari isdiadat ritual dalam masyarakat Melayu Serdang. Di dalam pembicaraan di pahami bahwa pelaksanaan istiadat ritual di tayangkan sebagai upacara yang khidmad dan bersifat keramat karena para pendukungnya mengikuti dengan khidmad dan merasa sebagai sesuatu yang bersifat magis, disertai pula dengan berbagai perasaan serta perlengkapan yang bersifat simbolis. Kemudian, ianya juga merupakan rangkaian perangkat lambang-lambang yang berupa benda atau materi, kegiatan fisik, hubungan tertentu, kejadian-kejadian, isyarat-isyarat dan berbagai situasi tertentu dalam melaksanakannya.

## Beberapa Tradisi Ritual yang Masih Ada Hingga Kini

1. Upacara Jamuan Laut  
Masyarakat Melayu Serdang mayoritas adalah nelayan yang menggantungkan hidup mereka kepada banyaknya perolehan ikan untuk itu masyarakat perlu melakukan jamuan laut dengan harapan para penguasa laut tidak berang kepada mereka dan mereka dapat memperoleh ikan yang berlimpah ATAS RIDHO ALLAH.
2. Upacara Tolak Bala  
Yaitu untuk menjemput semangat sang Dewi Padi agar kekal berdiam dan bertunas banyak sehingga panen berhasil

## 2. Adat Perkawinan

Lain halnya dengan adat-adat perkawinan. Pengaruh dari gaya hidup perkotaan dan budaya barat begitu berpengaruh seperti keterbatasan waktu, biaya dsb. Ada sebagian masyarakat Melayu menganggap adat perkawinan Melayu itu banyak menyita waktu, tenaga dan biaya, dengan kata lain perkawinan adat Melayu itu dianggap sangat mahal. Namun, apa bila kita telusuri maka tiap tahapan dalam adat perkawinan Melayu mengandung nilai-nilai tersendiri yang tak luput dari pesan-pesan untuk kehidupan selanjutnya, bukan sekedar sebuah acara perkawinan yang identik dengan pesta ataupun simbol dari kemampuan finansial seseorang untuk membuat suatu pesta adat.

Banyak yang sengaja menghilangkan setiap tahapan-tahapan adat istiadat dalam perkawinan adat melayu dengan dalih keterbatasan waktu dan biaya dengan tameng "*Dengan tidak mengurangi makna dari adat Melayu*" sehingga cukup diwakilkan dengan satu buah tahapan saja atau penggunaan budaya-budaya barat seperti penggunaan busana bergaya barat atau eropah sehingga terbentuk suatu kebiasaan adat budaya yang baru. Secara tidak langsung hal ini juga menyebabkan hilangnya suatu nilai budaya tradisi.

## Istiadat Perkawinan

Jika dalam keluarga terdapat sudah seorang anak gadis atau pemuda yang akil balik tibalah saatnya untuk mempercepat agar ia berumah tangga, apalagi telah mendekati umur 20 tahun karena umumnya gadis-gadis Melayu zaman dulu kawin sebelum berumur 20 tahun. Perkawinan bagi masyarakat Melayu Serdang bukanlah hanya sekedar kebutuhan biologi manusia, tetapi merupakan pelaksanaan Syari'ah Islam dan kegiatan sosial yang besar. Dahulu beberapa hari sebelum peristiwa besar berlangsung, semua handai tolan dan sanak keluarga telah berkumpul di tempat pesta adat akan berlangsung. Karena peristiwa-peristiwa juga merupakan bersatunya dua keluarga menjadi satu keluarga yang lebih besar dan terkadang juga perwujudan satu peristiwa politik (mengenai perkawinan putera-puteri raja-raja), maka berbagai kegiatan-kegiatan seni (seni hias, seni ukir, sulaman dan lain-lain), diperagakan di sini oleh yang orang tua-tua dan kemudian menjadi pedoman bagi generasi yang muda.

Tahapan adat-istiadat perkawinan masyarakat Melayu Serdang adalah sebagai berikut:

1. Merisik da penghulu Telangkai
2. Jamu Sukut
3. Meminang
4. Ikat Janji
5. Mengantar Bunga Sirih
6. Akad Nikah
7. Berinai:
  - a. Berinai Curi
  - b. Berinai Tengah
  - c. Berinai dan Mandi Berhias
8. Berandan dan Mandi Berhias
9. Bersanding
10. Nasi Hadap-hadapan (Astakona atau Setakona)
11. Mandi Berdimbar
12. Mandi Selamat (lepas halangan)

### 3. Kesenian

Hal tersebut juga menimpa pada kesenian tradisi Melayu seperti pada musik, tari karya-karya sastra, teater dsb. Masuknya budaya luar dan perkembangan zaman ikut mengikis keberadaan budaya tersebut, banyak generasi sekarang menganggap kesenian dan karya sastra budaya Melayu adalah aliran kuno, bukan menganggap itu sebuah warisan yang harus selalu ada keberadaannya. Generasi sekarang lebih menyukai "Eurepoan and American Style", mereka jauh mengenal dengan yang namanya Rap, Pop, Rock, Metal, Disco, dsb. Bahkan ada batasan tertentu antara penggemar aliran seperti yang tersebut diatas dengan penggemar musik dangdut yang merupakan pengembangan dari musik-musik tradisi Melayu seperti Ronggeng, Pakpung, dsb. Hal ini sangat mempengaruhi dunia seni tari yang mana dari yang kita ketahui bersama bahwa seni tari dan musik sangat berkaitan. Ada beberapa tarian dalam Budaya Melayu seperti "Serampang XII". Namun kalah bersaing dengan peradaban budaya barat tertentu seperti "Break Dance, balet, Cheerleaders" dsb.

Bahkan ada lapisan masyarakat tertentu lebih memilih mendalami seni tari dari budaya luar seperti dansa ala *Tango, Walz, Chacha*, dsb dikarenakan faktor *Prestige* atau gengsi.

## Calti Dan Pop Melayu Dangdut

Rentak Calti ini tak jauh berbeda dengan rentak lagu pop Melayu (dangdut) sekarang ini. Dizaman sebelum Perang Dunia ke-2, para penarinya adalah wanita dan partner berpakaian ala India Selatan. Alat-alat yang mengiringinya ialah sebuah harmonium, 2 buah gendang tabla dan maraca. Tarian ini tidak berapa populer dikalangan rakyat banyak dan hanya ditarikan di istana Serdang dan Deli saja, mungkin karena tariannya

agak sulit untuk dipelajari dan tidak disertai partner laki-laki maka kurang menarik pada masyarakat banyak untuk hiburan. Tetapi sebaliknya, musiknya tetap populer dan makin meningkat di dalam tahun 1970-an.

## Tari

Tari dalam kebudayaan melayu Serdang merupakan ekspresi aktivitas sosial budaya dan suatu fenomena universal yang berhubungan dengan tenaga, waktu dan ruang.

## Pengenalan

Seni tari kebudayaan Melayu Serdang mencakup ide, aktivitas, maupun artifak. Seni tari mengekspresikan kebudayaan secara umum. Seni tari juga mengikuti norma-norma yang digariskan oleh adat resam. Berbagai gerak mencerminkan halusnya budai orang-orang Melayu Serdang, yang menjadi bagian integral dari alam makrokosmos maupun mikrokosmos. Sejarah awal perkembangan tari berawal dari sejak zaman primitive atau prasejarah kita, sebagaimana unsur-unsur permainan yang lain, yang berkembang mengukti perubahan masyarakat. Perkembangan dan kontinuitas kebudayaan tari adalah suatu fenomena alamiah dari peradaban manusia. Dalam masyarakat yang struktur sosialnya relative sederhana, seperti masyarakat tribal, tari menjadi bagian dari upacara ritual dan memiliki kedudukan penting dalam sistem sosial masyarakatnya. Upacara siklus hidup, seperti beranak, sirkumsisi, menghadapi masa purbertas, berkhatam, nikah, kawin, masuk ke dalam kelompok tertentu, kematian, berbagai perayaan, selalu melibatkan kegiatan tarian. Sementara dalam masyarakat modern pula tarian selain memiliki fungsi ritual dan religi juga selalu memiliki fungsi estetis, hiburan dan mengasah intelegensia masyarakat.

## Tari dan Masyarakat

Tari dalam kebudayaan Melayu Serdang merupakan ekspresi aktivitas sosial dan budaya. Tari merupakan suatu fenomena universal dalam kebudayaan manusia yang berhubungan dengan tenaga, waktu dan ruang. Berdasarkan fungsinya, tari terdiri dari beberapa jenis, seperti : tari religius dan tari sosial. Tari religius biasanya berkaitan langsung dengan sistem religi atau agama yang dianut oleh yang mengadakan tari tersebut. Tari yang berkaitan dengan upacara magis dan keagamaan lazimnya berbentuk simbolis yang melambangkan kuasa luar biasa. Misalnya dalam agama Islam dikenal tari zapin, hadrah, rodan, yang selsu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas agama Islam. Tari sosial merupakan suatu saluran untuk penarai dan penonton untuk mendapatkan hiburan. Namun begitu tari ini mempunyai makna dan pengertian tertentu dalam sistem budaya masyarakat tertentu. Tari adalah sebagai bagian dari unsur seni dan permainan yang merupakan bagian integral pula dari sistem budaya dalam masyarakat.

Tari sosial berhubungan erat dengan pengalaman manusia dan struktur sosial seperti hubungan antara kelas sosial, sikap, dan tahapan tehnologi atau ringkasnya mencerminkan taraf kemajuan masyarakat. Tujuan utama dari sosial ialah untuk hiburan dan memenuhi masa lapang selain juga untuk tujuan manifestasi. Tarian sosial biasanya dilakukan melalui gerakan tubuh dengan mengikuti ritme tertentu. Tari adalah ekspresi semangat manusia yang berasaskan kepada gerak-gerik yang menarik (Wan Abdul Kadir 11988 : 122-123).

Bila kita melihat kebelakang pada masa kejayaan imperium Melayu, khususnya pada kerajaan Negeri serdang, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Sjariful Alamsjah (Sultan Serdang yang Ke V), beliau sangat sering menyediakan waktu untuk rakyatnya dengan mengumpulkan mereka di halaman istana, dan memberikan peluang kepada rakyatnya atas keluhan atau kendala yang terjadi pada rakyatnya secara langsung, dalam hal ini beliau juga meminta kesediaan rakyat untuk membuat suatu pegelaran seni tari dan musik melayu, bukan hanya sebuah hiburan bagi beliau sendiri tetapi bagi seluruh rakyat Serdang pada masa itu. Sementara pada saat itu banyak para bangsawan Melayu yang sedang menggandrungi pesta-pesta dansa yang selalu dibuat oleh kontelir-kontelir Belanda. Beliau lebih memilih tradisi dari negerinya sendiri yang ketimbang kebudayaan yang datang dari luar. Pada masa beliau jugalah seni drama mulai dikenal yang mana pada saat beliau berkunjung ke negeri Kedah malaysia kemudian Sultan Kedah memberikan hadiah seperangkat peralatan untuk seni drama tradisional Makyong beserta dengan pemainnya sekaligus. Akan tetapi generasi sekarang lebih menggemari media-media sinema elektronik yang lebih mengetengahkan gaya hidup perkotaan yang serba "Wah" ketimbang memahami atau minimal menyaksikan seni drama tradisi, "Hanya orang-orang tua yang suka pertunjukan seperti itu" adalah sebuah alasan menutupi ketidak ketertarikan mereka terhadap sebuah peradaban budaya yang mulai terkikis.

### Musik, Teater, Dan Tari

Dalam khasanah kesenian Melayu Serdang banyak menerima pengaruh, khususnya dari kesenian Islam. Estetikanya melahirkan jiwa pemain, pencipta, dan penikmatnya berakhlak mulia baik terhadap lingkungan, sesama masyarakat dan pemimpin ataupun kepada penciptanya. Untuk itu, saat pendiskripsian dari masing-masing bagian itu tidak terlepas dari keberadaan sifat pembaurannya itu. Pendiskripsian ini lebih banyak menekankan terhadap unsur tradisi yang ada pada masing-masing jenis kesenian, tetapi disentuh juga keadaannya pada masa kini sehingga unsur-unsur sejarah dijadikan media penjelasannya. Hal ini agar lebih mudah memahami setiap hal yang dibicarakan.

### Musik

Musik adalah ekspresi cultural yang bersifat universal seperti halnya bahasa dan humor. Satu-satunya ikatan antara musik dan kehidupan adalah emosi; musik tidak terpakai jika tiada emosi. Apakah arti musik itu buat kehidupan masyarakat pendukungnya? kalau kita mempelajari Etnomuskologi mengenai soal "folk song" dan "folk musik" (nyanyi rakyat dan musik rakyat), kelihatan bahwa selaku ekspresi cultural tadi musik itu mempunyai banyak peranan dan arti di dalam kehidupan sesuatu suku bangsa. Musik bagi masyarakat Melayu Serdang bukanlah hanya sekedar kreasi artistik, tidak juga sekedar untuk hiburan atau bersantai, tetapi musik itu bersatu dengan berbagai aspek kebudayaan. Ia bersatu juga didalam sistem kepercayaan, bersatu juga didalam struktur sosial, bahkan di dalam aktivitas perekonomian suku bangsa itu. Seperti halnya dengan bahasa, maka musik juga adalah alat komunikasi sosial dan sebagai media, ia memainkan peranan penting didalam interaksi sosial berbagai individu didalam masyarakat pendukungnya itu. Jadi seperti halnya seni ukir. Seni sastra dan lain-lain maka musik juga kaya akan bahan informasi baik mengenai nilai-nilai sosial, aspirasi dan orientasi suku bangsa itu. Dengan demikian musik dan tari merupakan unsur perkembangan masyarakat itu.

Ada yang membuat pengelompokan seperti :

- A. Musik : seperti nyanyian dan tetabuhan yang dilakukan oleh dukun atau pawang ataupun lagu-lagu tertentu di dalam musik Nobat Diraja, nyanyian Kematian.
- B. Musik tradisional : seperti yang dimainkan didalam mengiringi teater MAKYONG MENORA, BODAT, SILAT, ZAPIN
- C. Musik Modern : seperti musik yang mempergunakan alat-alat musik Barat, meskipun lagunya "melayu asli" dan beitu juga tari yang mengiringinya. Saat ini lebih dikenal dengan sebutan RONGGENG atau PAKPUNG

## Tata Susila Tari Melayu

Tari Melayu Serdang selalu dan wajib berdasarkan kepada tata susila yang telah digariskan oleh adat. Selanjutnya harus memenuhi norma-norma yang diatur oleh agama Islam atau adat Melayu. Nilai-nilai kesopanan, etika, estetika, harus merujuk kepada adat. Seorang penari wanita dan pria memiliki peran tersendiri sebagai ekspresi wanita dan pria Melayu. Wanita yang lemah gemulai dan pria yang gagah namun cakep dan handal dalam bergerak. Selain itu, alam sekitarnya menjadi objek mimesis gerak tari yang diselaraskan dengan nilai-nilai estetika.

## Musik Dan Tari Di Dalam Teater Tradisional Melayu

Lagu dan tari didalam teater tradisional Melayu kebanyakan disesuaikan dengan situasi cerita yang dimainkan. Ada pola (Pattern) tertentu misalnya ada Lagu Berjalan.

Lagu Gundah Gulana, lagu Perang, Lagu bercinta, Lagu ketika Dialog, Lagu Overture. Lagu Kencang (ragam) dan lain-lain. Selalu pada permulaan permainan ada upacara magis untuk mengusir hantu, atau jembalang tanah yang dapat mengganggu keasyikan permainan nanti. Pada permulaan cerita ada Lagu Kidung yang dinyanyikan dengan chorus oleh pemain yang mengisahkan cuplikan cerita yang akan dimainkan. Teater menjadi media penting menyalurkan nilai sosial, agama dan corak pemerintahan elite.

Teater Tradisional yang tetap dilestarikan, yaitu:

- Teater Makyong
- Teater Bangsawan

## Musik Dan Tari Melayu Untuk Hiburan

Didalam kelompok ini kita bahas mengenai musik dan tari-tarian yang termasuk kesenian rakyat (folklore) dan merupakan peralihan antara sesuatu yang tradisional dengan modern. Musik dan tari disini lebih banyak bersifat hiburan semata-mata, meskipun ada sementara jenis lagu dan gerakan tarinya yang mendapat pengaruh Islam dan terhadap Allah SWT dan nabi Besar Muhammad SAW dan biasanya dipakai untuk mengiringi ratib, seperti misalnya pada Rapa'i d.

Dikatakan kelompok ini menjadi kelompok peralihan, karena ada lagi dan alat-alat musik serta Biola, Arkodion, Harmonium, dan lain-lain. Oleh sebab itu musik dan tari didalam kelompok untuk hiburan ini lebih lemah terhadap perubahan zaman dan cepat mendapat pengaruh baru yang disesuaikan dengan kesenangan publik:

Dalam tarian Melayu haruslah kita perhatikan 4 pokok yaitu:

1. "TANDAK" yaitu gerakan-gerakan badan kaki (foot steps yang terdiri dari banyak macam langkah lonjak).
2. "IGAL" menekankan kepada gerakan-gerakan badan dan tangan Istialah "ilegal" (Mengigel, inigelaken) dipakai juga dalam Jawa Kuno untuk "tari" dan banyak didapati di dalam hasil-hasil sastra Jawa Kuno. Disamping "igel" juga digunakan istilah "panretta" atau "Manretta".
3. "LIUK" yaitu gerakan-gerakan menunduk dan mengayunkan badan (menggelai atau melayah).
4. "LENGGANG", berjalan sambil menggerakkan tangan.

Jadi “Tari” adalah mengutarakan gerakan badan, tangan dan jari dengan gerakan-gerakan serasi (gracefull movements)

- Tari Lenggong Patah sembilan
- Tari Lenggok Mak Inang
- Tari Lagu Dua
- Tari Campak Bunga
- Tari Melenggok
- Tari Anak Kalla
- Tari Mak Inang Pak Malau
- Tari Cek Minah Sayang
- Tari Serampang XII

#### 4. Sistem Sapaan

Dengan tidak berlakunya sistem pemerintahan kerajaan maka dengan sendirinya adat tradisi terlupakan, salah satunya etika bertutur kata. Meski masih dapat kita jumpai pada daerah-daerah Perbaungan, Rantau Panjang, Pantai Cermin dll, dan lapisan masyarakat yang masih menggunakan etika berbicara adalah kaum tua. Hal ini dapat kita lihat ketika Tuanku Luckman Sinar Basarsyah II, SH (Sultan Serdang sekarang) berkunjung ke daerah- daerah tersebut, telinga kita masih dapat mendengar sapaan-sapaan yang lazim dipakai pada masa Imperium Melayu. “Patik” adalah kata yang menyatakan diri apabila seorang rakyat sedang berbicara dengan Sultannya, sudah hampir tidak ada orang yang menggunakan kata-kata tersebut pada masa sekarang ini, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa generasi sekarang tidak mengetahui hal-hal tersebut. Prokem adalah sebuah aliran baru dalam seni berbicara zaman sekarang dan bahkan ada yang bersedia membuat kamus untuk seni berbicara dan bahasa yang nilai budayanya patut dipertanyakan tersebut. Sementara etika berbicara pada masa Imperium Melayu adalah suatu budaya yang penuh dengan makna seperti saling menghormati baik kepada orang yang lebih tua ataupun kepada seorang pemimpin negeri.

#### Sistem Sapaan Dan Istilah kekerabatan

Sistem sapaan dalam bahasa Melayu merupakan suatu Predikat kebangsawanan seseorang. Sistem sapaan ini mengacu pada pemakaian bahasa Istana dan bahasa kebanyakan (umum) namun keduanya mengenai dan saling mengisi untuk memperkaya budaya Melayu tersebut.

#### Pengenalan

Dalam masyarakat Melayu Sumatera Timur, ada ungkapan yang menyatakan “*Tidak ada bahasa*” bukan berarti seorang itu tidak dapat berbicara ataupun berkomunikasi kepada orang lain melainkan ungkapan tersebut mengacu kepada pengertian bahwa seseorang itu tidak mengetahui tata tertib menurut adat kesopanan dalam mesyarakat. Jelaslah bahwa tidak dapat di pisahkan dari tata kehidupan masyarakat. Dalam sistem sopan santun bahasa Melayu terdapat apa yang disebut bahasa istana (selanjutnya BI). Pengertian bangsawan adalah yang berhubungan darah langsung (ahli yang menerima pusaka), bergelar Tengku, Datuk, OK (keturunan) langsung sejak lahir, keturunan langsung atau ada yang diangkat sebagai pemimpin / pemangku adat dan bagi yang tidak mendapat jabatan BI ini juga lebih banyak digunakan di istana karena penutur bahasa ini terdiri dari keluarga Raja (Omar, 1988 : 1). Masih menurut Omar bahasa Diraja ialah bahasa yang digunakan dalam perhubungan kebahasaan di mana sekurang-kurangnya salah satu pihak itu terdiri dari keluarga Diraja. Istilah lain untuk bahasa Diraja adalah bahasa istana. BI Melayu adalah bahasa yang digunakan secara halus, dengan penuh sopan santun dan penuh tata tertib dalam situasi formal maupun tidak formal, serta teliti dalam memilih kata-kata yang halus dalam menyampaikan pesan (*message*) dan dengan penuh perasaan, Bahasa yang digunakan menandakan perbedaan dengan bahasa

kebanyakan (selanjutnya BK) terutama dari segi kosa kata, ungkapan-ungkapan tertentu, cara menyapa seseorang dan lain-lain. Menurut Kridalaksana (1983-18) BI adalah ragam bahasa Melayu yang dipakai oleh orang-orang bangsawan dalam istana. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BI adalah bahasa yang khusus di gunakan di istana / Kesultanan Melayu dan salah satu penuturnya terdiri dari keluarga raja.

*Bahasa bukan diraja* ialah bahasa yang digunakan dalam perhubungan yang tidak di harapkan kepada sekatan-sekatan atau kendala-kendala (*constraints*) diraja (Omar 1988 : 1). Dengan demikian, tidak ada pihak keluarga diraja dalam perhubungan itu. Bahasa bukan diraja juga dikenal sebagai bahasa biasa atau bahasa orang kebanyakan. BK ini pada umumnya di pakai oleh rakyat atau orang kebanyakan dalam berkomunikasi.

### Sistem Sapaan

- 1). Tengku  
Yang berhak memakai gelar 'Tengku' adalah putra-putri dari Sultan dan keturunan laki-laki yaitu apabila ayahnya memakai nama Tengku maka anak-anaknya secara langsung berhak memakai gelar tersebut.  
Gelar, derajat, atau nama Tengku itu dipandang menjadi suatu Kebangsawaanan yang mengambil nafas turunan dari ayah.
- 2). Raja  
Yang berketurunan lain yang bukan berasal keturunan Sultan tetapi pada negeri itu telah ada adatnya yang memakai nama 'Raja'. Misalnya seperti 'Raja' dari negeri lain apabila kawin dengan seorang wanita dari keturunan Tengku, maka anak dari perkawinan itu hanya berhak memakai nama raja.
- 3). Wan/Megat  
Jika seorang laki-laki dari keturunan Datuk atau Orang Kaya atau Incik ataupun Orang Kebanyakan kawin itulah yang dikatakan Wan, dan turun temurunnya mengambil nafas bapak.
- 4). Datuk  
Gelar untuk Datuk-Datuk Empat Suku yaitu Kepala –Kepala urung dan turunnya yang laki-laki. Anak-anak dari datuk atau keturunan laki-laki mempunyai hak menyandang gelar Datuk.
- 5). Aja  
Gelar bagi anak perempuan Datuk, yang mendapat titel Aja.
- 6). Orang Kaya  
Orang yang diberi gelar oleh Raja dan anak Datuk.

### Kata Ganti BI (Bahasa Istana)

Kata ganti dari BI adalah perkataan-perkataan tertentu dalam katagori ini yang dikenal sebagai lambang diri tertentu.

Kata ganti Diri BI, terdiri dari 3 bahagian :

1. Kata Ganti Diri Pertama (I) : beta dan patik
2. Kata Ganti Diri kedua (II) : tuanku

3. Kata Ganti Diri Ketiga (III) : tuanku, patik, baginda Duli Yang Maha Mulia

- Kata Beta : digunakan oleh Raja untuk menyebut dirinya Sendiri apabila ia bercakap dengan rakyat, dengan demikian gerakannya ialah dari atas ke bawah.
- Patik : digunakan oleh rakyat untuk menunjuk diri kepada diri sendiri apabila ia bercakap dengan raja/keluarga diraja dengan demikian gerakannya ialah dari bawah ke atas.
- Tuanku : digunakan oleh rakyat untuk merujuk kepada Raja baik sebagai orang kedua/ketiga.
- Baginda : digunakan oleh rakyat untuk merujuk kepada Raja/Sultan yang diperkatakan.
- Duli Yang Maha Mulia : digunakan dalam upacara adat.

5. Bahasa Dan Sastra

Gaya bahasa pada zaman Imperium mengandung nilai seni yang sangat tinggi, baik dari segi berbicara, maupun dalam penyampaian maksud, sastra-sastra Melayu seperti pantun, gurindam dan syair merupakan bentuk kebudayaan Melayu, kebudayaan ini selalu dipakai untuk penyampaian maksud, baik dalam lisan maupun tulisan, keindahan seni sastra ini selalu menghiasi dalam setiap bentuk bahasa, namun sekarang hanya dapat dijumpai pada adat perkawinan Melayu ataupun bila ada acara – acara bentuk bahasa yang indah sehingga terkesan asal jadi saja. Pada dasarnya tidak hanya etnis Melayu yang memiliki pantun, syair dan gurindam, hampir seluruh etnis memiliki seni sastra, tapi bila diperhatikan banyak generasi yang lebih menggemari karya sastra dari budaya luar, generasi sekarang lebih menganggap bahwa karya sastra “*Khalil Gibran*” atau “*Shakespeare*” lebih indah ketimbang karya sastra lokal, sehingga keindahan karya sastra lokal tersebut lambat laun kian terlupakan.

Karya-Karya Sastra Tradisi

Dalam khasanah kesusasteraan Melayu Sumatera Timur ide dan nilai karya sastra tradisi senantiasa hasil dalam karya sastra mutahirnya. Kehadiran ini sebagai realitas kesinambungan tidak berwujud berupa bentuknya, tetapi ditampilkan dunia ide dan gagasannya.

Pengenalan

Dalam pemahaman terhadap karya-karya sastra Melayu Sumatera Timur sewajarnya terlebih dahulu pemahaman terhadap kesinambungan yang wujud dalam khasanah kesusasteraannya. Yaitu diantara karya-karya tradisi dan karya yang mutahir. Bagian ini akan menyampaikan beberapa karya-karya sastra tradisi yang dikemas di dalam bentuk gurindam, syair dan pantun. Penyampaian di awali dengan menampilkan gurindam karena pemikian yang diungkapkannya bisa dikatakan sebagai dasar dari jati diri khasanah kesusasteraan Melayu.

Karya sastra yang tetap dilestarikan, yaitu:

- Gurindam Dua Belas
- Syair, contoh :  
Raja mufakat dengan menteri Emas dan Peraak kami ayunkan Seperti kebun berpagar duri Anak ditaruh di dalam ayunan Betul hati kepada raja Tali ayunan kami pegangkan Tanda jadi sebarang kerja emas dan perak kami nyanyikan

Hukum adil atas rakyat

- Pantun, contoh  
Tanda raja beroleh inayat

Apalah tanda batang tebu,  
Batang tebu halus uratnya;

Kasihkan orang yang berilmu  
Tanda rahmat atas dirimu

Apalah tanda orang berilmu,  
Orang berilmu halus sifatnya

Hormat akan orang yang pandai  
Tanda mengenal kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati  
Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata  
Kepada hati yang tidak buta

Pisau raut dua tiga  
Letak di peti dalam perahu;

Dalam laut boleh diduga'  
Dalam hati siapa tau



## 6. Permainan Rakyat

Pada masa sekarang ini budaya luar begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, Masyarakat Melayu khususnya, sehingga terjadilah perbedaa-perbedaan sosial disegala bidang, bahkan pada dunia anak-anak yang berkumpul untuk bermain gasing, alip cendong (Petak umpet), congklak, rimbang, dsb. Permainan ini sudah tenggelam dimakan zaman anak-anak sekarang lebih mengenal apa yang namanya "Playstation" ketimbang ccongklak, bukan tidak mungkin anak-anak sekarang tidak mengetahui apa itu congklak, media congklak sendiri masih banyak kita jumpai, tapi hanya sebagai hiasan pengisi meja tempat meletakkan barang-barang antik.

### Permainan Tradisi

Pada asasnya setiap jenis permainan tradisi masyarakat Melayu Sumatera Timur dapat bermanfaat untuk melatih, membina kecerdasan, kejujuran, dan kearifan khalayak . kanak-kanak dan remaja adalah menjdi khalayak utamanya.

## Pengenalan

Bagian ini membicarakan permainan tradisi yang sering juga di dalam masyarakat Melayu Sumatera Timur disebut permainan rakyat. Sebenarnya wujudnya keberagaman istilah permainan tradisi ini berlaku juga kepada nama-nama jenisnya. Banyak ditemukan di dalam penelitian bahwa masing-masing jenis permainan tradisi mempunyai nama lebih dari satu. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar karena ia merupakan tradisi lisan di dalam masyarakat. Ia senantiasa berubah baik melalui penambahan dari khalayaknya. Secara umum setiap permainan tradisi yang ada di dalam masyarakat Melayu Sumatera Timur, kanak-kanak atau remaja adalah khalayak utamanya dan bermafaat untuk melatih serta membina khalayaknya bersikap jujur, cerdas, bijak dan arif dalam beraktivitas sehari-hari. Memang, khalayaknya kerap tidak menyadari kearifan dari permainan tradisi, salah satu penyebab ketidaksadaran itu karena wujud manfaatnya itu tidak kelihatan langsung dalam perilaku dan cara-cara yang digunakan untuk penyampaian kearifannya itu pun masih dalam metode pembelajaran yang tradisional.

Permainan Tradisional yang dilestarikan, yaitu:

- Permainan Gasing
- Permainan Rimbang
- Permainan Congklakaak
- Permainan Alip Cendong
- Dll

## 7. Makanan Khas

Bukan hanya dari segi permainan rakyat yang mulai hilang, jika anda ingin menikmati makanan khas Melayu juga sekarang sudah sulit untuk dijumpai, banyak masyarakat yang mulai kesulitan hanya untuk menikmati, anyang pakis, anyang kepah dsb, akan tetapi bila kita menyusuri daerah pesisir wilayah masyarakat dominan Melayu mungkin masih bisa, akan tetapi untuk daerah perkotaan hal ini sudah sulit ditemukan, yang mungkin berkembang adalah menu-menu kuliner bernuansa Eropa seperti "Steak, Burger" dll. Anak-anak sekarang juga lebih suka memilih menu berbau Amerika seperti "Friedchicken", hal ini sangat memperhatikan karena kurang diminatinya menu-menu tradisional yang menyebabkan tenggelamnya budaya kuliner lokal.

## Jenis Masakan

Dalam bagian ini dibicarakan tentang jenis bahan-bahan masakan Melayu Serdang. Disadari bahwa setiap jenis masakan melayu mempunyai ragam yang cukup banyak. Untuk itu, tulisan ini hanya membicarakan jenis-jenisnya saja tanpa ragam dari setiap jenis masakan. Ragam masakan yang disampaikan pun dipilih yang masih cukup populer di dalam masyarakat sehari-hari. Masing-masing masakan ini pernah di sajikan di dalam pameran masakan etnik di Sumatera Utara. Jenis dan bahan-bahan masakan ini di mulai dari nama jenis, bahan-bahannya cara membuatnya, dari setiap masakan tersebut secara lengkap dapat dibaca dalam buku karya Tuanku Luckman Sinar Basarsyah-II, SH

Masakan Melayu yang dilestarikan, yaitu:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| - Anyang Pakis  | - Ayam Masak Putih  |
| - Jelatah Timun | - Bubur Pedas       |
| - Pajeri Nenas  | - Gulai Masak Ikan  |
| - Roti Jala     | - Nasi Tomat        |
| - Sembam Ikan   | - Sambal teeempoyak |
| - dll           |                     |

## Pelestarian Nilai –Nilai Budaya Istana Sultan Serdang

### Sekilas Sejarah Istana Serdang

Pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman, baginda memindahkan istana lama dari Rantau Panjang ke istana baru di Kota Galuh Perbaungan dikarenakan lokasi istana lama sering dilanda banjir (air bah), tetapi masih di dalam kawasan Kraton juga tahun 1896. Istana baru itu menurut kisah sangat indah di dalam zamannya, karena diperbuat dalam ukiran dan bentuk Melayu. Di dalamnya terdapat lebih kurang 40 kamar dan berbagai-bagai ruangan antara lain ada ruangan yang diperbuat menurut gaya Jepang. Tanah Kraton Kota Galuh bersama Kola (pekan) Perbaungan berasal dan konsensi Perkebunan tembakau *perceverance* yang dikembalikan kepada kerajaan Serdang seluas 952 HA Sejak itu Serdang bergelar Banda Setia.

Istana itu mempunyai mahligai dan semua 6 tingkat . Tingkat pertama dan kedua adalah tempat ruangan menghadap Sultan. Tingkat ketiga adalah tempat penyimpanan regaha-regaha dan berbagai senjata serta alat-alat kebesaran Kerajaan, sedangkan tingkat keempat tempat bermaian para putri dan tempat penyimpanan baju-baju kebesaran, tingkat kelima tempat peranginan dengan 'kaca Gila' dan tingkat keenam dinamakan "Pucuk". Jadi istana baru itu semua ada 6 tingkat.

Dibelakang ada lagi istana untuk Tengku Permaisuri dan bangunan-bangunan pegawai istana lainnya. Di samping istana itu ada pula terdapat taman bernama 'TAMAN SARI' dengan aneka bunga-bunga dan titi-titi ala Jepang sedangkan di antara istana dengan istana lama terdapat Kebun Binatang yang pertama dan terbesar di Sumatera waktu itu, yang menarik perhatian ribuan pengunjung masyarakat. Selain itu, setiap minggu rakyat dihibur dengan bermacam-macam permianan dan pertunjukan kesenian.

Pada tahun 1945 Sultan Serdang mengirim telegram kepada Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa Sultan beserta seluruh rakyat Kerajaan Serdang mengakui dan berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Juli 1947 dalam Agresi I tentara Belanda mendarat di Kuala Sungai Bongan menuju Perbaungan untuk menduduki jembatan Sungai Ular menghempang pasukan Indonesia yang mundur dari Front Medan Area. Sesuai perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, apabila Belanda menyerbu wilayah RI maka harus diadakan politik "Bumi Hangus" oleh sebab itu maka Kraton/Istana Serdang, toko-toko dan bangunan permanen di Kota Perbaungan dibumihanguskan.

### AKTUALISASI PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA ISTANA SULTAN SERDANG

#### A. Pelestarian Sejarah

Pada tahun 1896 dibangunnya kembali Istana Sultan Serdang untuk mengingatkan bagi generasi muda bahwa Sultan serdang tidak mau berdampingan dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang terjadi. Istana serdang yang akan dibangun direncanakan akan ditempatkan di suatu tapak dekat jalan raya Negara ± 3 Km dari tapak yang lama.

#### B. Sebagai Balairong Adat Serdang

Setelah lebih dari 60 tahun tidak mempunyai tempat berkumpul, maka masyarakat kesatuan hukum adat KESULTANAN SERDANG sangat mendambakan berdiri suatu Balairong Adat Serdang dimana upacara yang bersifat adat budaya dapat dilaksanakan.

#### C. Sebagai Pusat Seni

Istana Serdang itu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai etnis untuk kegiatan budaya (Festival Budaya; Upacara Adat – Istiadat; Upacara Perkawinan; Pusaka Kulinaire (Makanan); Pemberkahan Adat Melayu oleh Sultan Serdang untuk Upacara; Mandi Syafar; Jamu Laut dan Jamu Sawah, dll).

#### D. Museum dan Pusat Riset serta Seminar Ilmiah

Museum peninggalan Sultan Serdang seperti : Alat Kebesaran Raja (Naubat-Nafiri); Senjata-senjata pusaka; alat musik kerajaan; surat-surat dan arsip lama kerajaan serdang; foto-foto zaman kerajaan serdang; Lambang dan Bendera Kerajaan Serdang. Istana serdang itu akan dikunjungi oleh para sarjana/mahasiswa untuk riset dan istana itu dapat menampung ± 500 peserta seminar ilmiah.

#### E. Pusat Wisata dan Pemanfaatan Masyarakat Ekonomi Lemah

Istana Serdang Tempat Kunjungan Wisata Mancanegara dan domestic, dimana wisatawan asing akan disambut dengan tarian melayu dan disuguhkan minuman dan kue khas melayu. Di halaman istana itu juga akan disediakan pameran lukisan dan busana serta souvenir.

#### F. Sumber Dana untuk Pembangunan dan Pemeliharaan

- APBD dari Pemerintah Kabupaten serdang Bedagai, Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Pusat RI
- Sumbangan masyarakat serta yayasan mancanegara dan UNESCO
- Pengisian museum, alat peninggalan Kesultanan Serdang serta koleksi buku/ bahanseminar disediakan oleh pihak Kesultanan Serdang yang mengelolanya
- Sumber pemeliharaan rutin diharapkan dari karcis pengunjung dan pengutipan pajak oleh Pemerintah Kab. Serdang Bedagai dan sumber-sumber lain.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dengan demikian dapat diketahui wujud budaya yang perlu dilestarikan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kebudayaan memiliki tujuh unsur yang bersifat universal, unsur-unsur tersebut ada dan terdapat didalam semua kebudayaan dan dari semua bangsa di dunia dan ketujuh unsur tersebut adalah: Bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, system peralatan hidup dan teknologi, system pencaharian hidup, system religi dan kesenian. Dapat dilihat dengan jelas fungsi dari Kerapatan Adat di Kesultanan Serdang adalah: Membina, Bersikap positif terhadap budaya, meningkatkan mutu budaya dan mengembangkan budaya melalui penelitian demi pemanfaatannya.

Maka Kerapatan Adat harus mempunyai pengetahuan tentang penginterpretasian atau pemahaman nilai-nilai dari simbol-simbol, nilai-nilai sejarah peristiwa yang ada dalam istiadat/upacara budaya, sehingga sesuai dengan keperluan baik perilaku per-individu ataupun bermasyarakat.

#### 2. Saran

Merujuk kepada penjabaran dari pasal 32 UUD 45 tentang kebudayaan bangsa yang berkaitan dengan GBHN Tap MPR tahun 1988 yang berbunyi "*Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu di pelihara dan dibina untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa*"

Diharapkan pelestarian nilai-nilai budaya diupayakan melalui berbagai cara seperti penyuluhan budaya, penerbitan buku-buku hasil penelitian budaya atau penayangannya di media cetak dan elektronika.

Dapat juga dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke empat tahun 2002 (Perubahan keempat UUD 1945) yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, pada Pasal 33 UUD 1945 hasil Amandemen yang berbunyi:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Akan tetapi hal tersebut diatas tidak akan pernah terlaksana apabila tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan, karena masyarakat dan generasi penerus berperan penting dalam hal pemeliharaan nilai-nilai budaya tersebut. Semua in berkaitan dengan peran orang tua dalam mendidik putera puteri penerus bangsa yaitu dengan tetap mengajarkan adat istiadat budaya leluhurnya sejak dini, penggunaan bahasa daerah dalam keseharian adalah salah satu cara melestarikan nilai budaya, agar generasi penerus terbiasa dan tidak menghilangkan adat kedaerahannya yang merupakan cerminan bangsa.

Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat diharapkan dengan memasukkan materi kebudayaan daerah secara detail menjadi salah satu mata pelajaran, dapat juga dalam bentuk seminar khusus pelajar dengan materi sejarah daerah dan diadakan secara rutin sehingga pengetahuan tentang budaya daerahnya semakin melekat, sehingga nilai-nilai histories dan adat budaya tersebut tetap eksis keberadaannya.

Adalah merupakan kerjasama yang baik bila Negara memajukan, menjaga dan memelihara, serta menjamin pengembangan nilai-nilai budaya dengan masyarakat sebagai pelaku dari berlangsungnya pemeliharaan adat dan budaya tersebut. Jangan sampai terulang kembali peristiwa yang terjadi pada Istana Kesultanan Serdang yang artinya telah menghilangkan asset warisan budaya tak ternilai.



# KEBUDAYAAN KARATON SURAKARTA : EKSISTENSI KOMUNITAS ADAT KINI DAN MENDATANG

Oleh :

G.K.R. Ayu Koes Indriyah  
( Karaton Surakarta Hadiningrat )

## Pendahuluan



Dalam era modernitas sampai saat ini manusia modern ternyata tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasan dalam perjalanan kehidupannya. Kerenggangan terhadap nilai-nilai dasar ternyata hanya merupakan gejala sementara atau gejala semu dan bukan gejala permanen.

Nilai dasar dalam era modernitas ini disebut sebagai nilai-nilai tradisional, yang telah mengakar di dalam suatu lingkungan sosial-budaya. Makin tinggi bobot modernitas seseorang atau suatu masyarakat, ternyata makin membutuhkan nilai-nilai spiritual-tradisional. Pendekatan kecerdasan spiritual, yang kini terus berkembang dalam kehidupan dunia modern, diharapkan dapat turutserta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kehidupan yang diwarnai nuansa modernitas.

Karaton Surakarta menjadi salah satu sumber kebudayaan tradisional terpenting di tanah air. Dan seperti kita ketahui bersama, bahwa Karaton Surakarta, merupakan sumber Kebudayaan Jawa terpenting di tanah air, karena keberadaannya sebagai keberlanjutan langsung (bukan *sempalan*) Kerajaan Mataram (Islam) pada masa lalu.

## Arti Kebudayaan

Secara umum kebudayaan itu dapat diartikan, sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya. Kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud, adalah:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Di mulai dari mana?

Para Raya Mataram pendahulu mengalihkan kemampuannya tidak lagi ekstensif keluar, melainkan intensif ke dalam. Era perenungan ke dalam inilah kemudian yang melahirkan karya-karya seni Karaton yang sangat tinggi. Beberapa contoh dapat disebutkan :

- Keris, dari alat untuk perang, menjadi karya seni yang sangat sempurna.
- Sastra, melahirkan karya-karya besar seperti serat wedatama wulang reh, centhini dll
- Batik, dengan penciptaan motif-motif yang tak "ter-alternatifkan" lagi
- Tari, penciptaan tari Bedoyo, Serimpi, Wireng, Langendrian, Rahmen Tari, dengan gerakan mengalir, hening, halus tapi penuh energi, bak tarian sorga.
- Karawitan, penciptaan gending-gending Jawa, gamelan sekaten, gending bonang, dll, termasuk pembuatan gamelannya.
- Pedalangan, pembuatan wayang kulit dan sekolah pedalangan
- Kawruh Kalang (tata letak bangunan)
- Pawukon (astrologi Jawa).

Dan banyak lagi yang tidak mungkin tercipta tanpa landasan dasar kekaratonan.

### Belajar dari doktrin besar Sultan Agung

Sultan Agung (1631-1645), adalah seorang raja termasyhur, karena di bawah kekuasaannya Kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaan. Sultan Agung, selain terkenal sebagai raja dengan sifat kenegarawanannya, juga terkenal sebagai seorang pujangga. Salah satu ajaran Sultan Agung yang kemudian menjadi salah satu doktrin utama Dinasti Mataram, adalah *memayu hayuning bawana, mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi*. Ungkapan tersebut mempunyai makna keselarasan antara *jagad gumelar* (makrokosmos) dengan *jagad gumulung* (mikrokosmos). Doktrin tersebut dapat diterjemahkan secara bebas dan ringkas, bahwa *memayu hayuning bawana* yaitu "menjaga dan mengusahakan keselamatan dunia"; *mangasah mingising budi*, yaitu "berlatih untuk mempertajam budi atau jiwa"; dan *memasuh malaning bumi*, yaitu "membersihkan semua hal buruk yang dapat merusak bumi".

Apa yang difatwakan Sultan Agung itu semula merupakan *prasapa* (wewaler/larangan) tentang apa saja yang dapat merusak bumi, tetapi dapat ditafsirkan sebagai doktrin, karena selain terkandung aspek larangan juga kewajiban. *Jagad cilik* atau *jagad gumulung* (mikrokosmos), yaitu jiwa-raga atau lahir-batin manusia itu sendiri, sementara *jagad gede* atau *jagad gumelar* (makrokosmos) adalah alam semesta di mana manusia itu hidup dan berada serta menjadi bagiannya. Pada orang Jawa, *jagad* itu merupakan sesuatu yang besar dan utuh, di mana semua unsur ikut menyangganya. Tetapi orang Jawa membedakan dua macam *jagad*, yaitu *jagad gede* (makrokosmos) dan *jagad cilik* (mikrokosmos). *Jagad gede* mencakup semua lingkungan tempat seseorang hidup, sedangkan *jagad cilik* merupakan diri dan batin manusia itu sendiri. *Jagad cilik* sebagai *jagad* kecil merupakan *jagad* yang harus diupayakan terus keselarasannya, keselarasan hubungan antara batin dan jasmaninya. Dan *jagad cilik* sebagai bagian atau unsur dari *jagad gede* harus juga terus dijaga hubungannya dengan unsur-unsur lain dari *jagad gede*.

### Wasiat Almarhum SISKS Pakoe Boewono XII

Ayahanda Sinuhun menyatakan dengan sangat jelas bahwa kekayaan yang Karaton Surakarta miliki adalah Warisan Budaya yang bersumber pada pandangan dunia dan pandangan hidup orang Jawa, yang bertumpuk di Karatonnya : " Sebagai pewaris Tahta Mataram, amanat dari pendahulu saya yang harus saya emban adalah tugas untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi Bangsa dan Negara" .Ini tugas yang tidak ringan, mengingat Karaton sekarang hanya tidak lebih dari sebuah institusi budaya. Oleh sebab itu, kami berusaha keras untuk tetap bisa eksis di alam demokrasi ini dengan tetap terus menjalankan tata cara upacara-upacara karaton, latihan-latihan tari Bedoyo Serimpi, Wireng, dll, sekolah-sekolah pedalangan, PAMBIWORO (MC dalam bahasa Jawa), mengadakan lomba moco pat (tembang Jawa), miru kain, membaca tulisan Jawa, laku dodok (berjalan dengan bersimpuh kaki), lomba MC dalam bahasa Jawa, dll. Atas dasar hal tersebut diperlukan suatu program revitalisasi Karaton Surakarta agar keberadaan Karaton Surakarta menjadi momentum sejarah kebudayaan Indonesia.

Bahkan sebelum mangkat (meninggal), Beliau berpesan kepada penerus tahta dan semua keturunannya untuk :

1. "OJO DOLANAN ADEGING RATU"

Jangan jadikan tahta hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tapi jadikanlah kedudukan Ratu sebagai bentuk tanggung jawab kepada leluhur dalam mengemban warisan budaya yang adhi luhung, berperilakulah terpuji supaya kamu pantas jadi pengemban warisan budaya yang akan ditiru oleh sentono, abdi dalem dan masyarakat luas. Karena dalam tradisi Jawa, Ratu/Raja adalah pewaris tahta yang ditentukan oleh angger-angger (hukum) Karaton yang sudah dijalankan turun-temurun.

Di samping itu harus didukung oleh pengetahuan tentang seluruh pusaka, budaya, tata cara, adat istiadat yang meliputi antara lain Olah Rogo, Olah Budi dan Olah Roso agar tidak mempunyai sifat Adigang Adigung Adiguno (pongah, sombong dan semena-mena) dan terhindarkan dari sifat pamrih.

2. "JAGANEN ADHEGING BEDOYO KETAWANG"

Bedoyo Ketawang adalah tarian pusaka tertinggi warisan Mataram. Dibawakan oleh 9 wanita, tarian ini menempati posisi sentral dalam upacara *Jumenengan* serta pada peringatan setiap tahun kenaikan tahta raja atau *Tinggalan Jumenengan*, berdurasi 90 menit. Tarian sakral ini selain melambangkan kesuburan, juga melambangkan ajaran *sangkan paraning dumaid* (proses terciptanya manusia sampai meninggal).

Bedoyo Ketawang merupakan ekspresi dari kisah percintaan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari (Kanjeng Ratu Kidul), penguasa mistis Samudera Selatan. Senopati dan Ratu Kidul merupakan bahasa simbol bumi dan laut. Semacam konsep geopolitik, dimana kebesaran sebuah kerajaan bukan saja dilihat dari seberapa luas kekuasaannya atas wilayah daratan, tetapi ditentukan pula sampai berapa besar dia mampu mengausai samudera. Oleh sebab itu, pesan ini khusus disebutkan oleh Beliau PB XII untuk tetap dijaga kelestariannya sampai akhir zaman. Bahkan seandainya pun Raja sakit, mangkat, belum ada pengganti, tetap harus dilakukan pelaksanaan tari Bedoyo Ketawang.

### Eksistensi Aktual Keraton Surakarta Hadiningrat

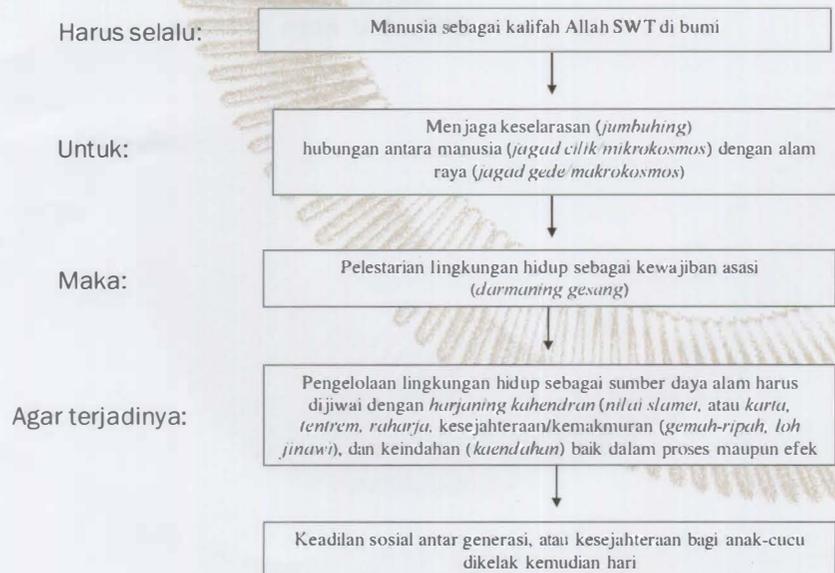
Keraton Surakarta adalah organisasi tradisi yang masih hidup dimana ada Raja ada Sentana dan Abdidalem, ada Dampar ada Bedoyo Ketawang, ada pusaka dalam berbagai bentuk, ada bangunan. Keraton Surakarta secara internal eksis secara spiritual, namun perlu adanya pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan warisan yang sudah berumur ratusan tahun. Legitimasi eksistensi Keraton secara spiritual hingga hari ini masih tetap terjaga seperti dengan adanya ritual-ritual dan acara-acara resmi yang selalu dilakukan di lingkungan Keraton. Mulai dari ritual harian-mingguan, bulanan seperti Gerebek Mulud (Maulid Nabi), Idul Fitri, Idul Adha dalam bentuk Upacara Kirab Gunung dari Karaton menuju Mesjid Agung sampai tahunan yang berpuncak di acara Kirab Pusaka pada malam 1 Sura dan juga Tinggalan Jumenengan Dalem (peringatan kenaikan tahta) yang harus selalu disertai dengan tarian Pusaka Bedoyo Ketawang.

### Revitalisasi Karaton Surakarta

Revitalisasi kawasan merupakan suatu proses pemberdayaan agar kawasan tersebut menjadi lebih vital atau berdaya guna. Revitalisasi kawasan Karaton Surakarta meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya (lingkungan simbolik). Ketiga revitalisasi tersebut dapat diurai sebagai berikut :

- Lingkungan fisik, melestarikan warisan sejarah, penataan kembali dan renovasi terhadap bangunan inti *kedhaton*, alun-alun utara, alun-alun selatan, renovasi Masjid Agung, dan keberadaan Pasar Klewer sebagai pasar tradisional. Revitalisasi lingkungan fisik ini, belum termasuk situs budaya di luar bangunan inti karaton seperti Radya Pustoko, makam-makam Raja di Kota Gede dan Imogiri, Langenhardjo, dll.
- Lingkungan sosial, dalam konteks ini adalah aspek keorganisasian atau kelembagaan Karaton Surakarta, yang menyangkut restrukturisasi dan reorganisasi karaton.
- Lingkungan budaya, dunia simbolik Karaton Surakarta cakupannya begitu luas, yang menyangkut berbagai bentuk kesenian termasuk kesusastraan, upacara dan tatacara adat, mitos, ajaran-ajaran yang bersumber dari tradisi lisan dan tradisi tulis, dan sebagainya
- Pengembangan berbagai kegiatan budaya yang kini telah berjalan secara rutin seperti tari, karawitan, pedalangan, pendidikan pambiworo sampai dengan jamu-jamuan, masih perlu upaya-upaya yang bersifat inovatif. Peran Karaton dalam kaitannya dengan dunia usaha adalah mengoptimalkan kepariwisataan. Pariwisata merupakan bidang yang potensial dalam menarik investor kemudian menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.

Revitalisasi kawasan Karaton Surakarta berarti pemberdayaan suatu Kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa yang bersifat dinamis dan elastis, karena daya tahan dan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, yang pada gilirannya akan terjadi pengayaan unsur-unsur budaya, jika Karaton Surakarta sebagai sumber Kebudayaan Jawa cukup strategis di tanah air mampu menyesuaikan diri secara kreatif dan inovatif dengan perkembangan yang ada dan berkembang dalam tatanan kehidupan sehari-hari yang dapat disederhanakan sebagai berikut:



## KESIMPULAN

1. Karaton Surakarta sampai saat ini dan masa mendatang, akan tetap eksis, sebagai sumber kebudayaan Jawa tradisional. Karena keberadaan institusi karaton tersebut akan senantiasa menyertai perkembangan masyarakat modern, suatu era yang diwarnai nuansa modernitas, pada dasarnya membutuhkan nilai-nilai spiritual tradisional, yang antara lain bersumber dari karaton.
2. Kebudayaan memiliki cakupan yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan simbolik, yang ketiganya saling terkait. Karena itu, program revitalisasi Karaton Surakarta meliputi ketiga unsur kebudayaan tersebut (Lingkungan Fisik, Lingkungan Sosial dan Lingkungan Budaya).
3. Prospek pengembangan kebudayaan Karaton Surakarta, boleh jadi juga karaton-karaton di bumi Nusantara, tergantung dari kesiapan pihak karaton sendiri, serta apresiasi masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, diperlukan berbagai pengembangan akses terhadap sumber-sumber produktif, yang memiliki potensi untuk mendukung keberadaan dan pengembangan karaton sebagai tinggalan budaya leluhur yang adiluhung.
4. Sudah saatnya daya dan upaya dikerahkan untuk segera pelan dan bertahap menginventarisasi, mengkaji, meneliti, menulis, memasyarakatkan kembali berbagai seni Karaton. Sudah saatnya pula Karaton dengan bekal "Kawruh" dan seni karatonnya memasyarakatkan dirinya.

Jakarta, 26 Juli 2007  
GKR. AYU Koes Indriyah

# REVITALISASI NILAI BUDAYA KESULTANAN/KERAJAAN GOWA – TALLO: MENEMUKAN KEMBALI JATI DIRI UNTUK MEMPERKUAT KEPASTIAN BANGSA

Oleh:

**Andi Kumala Idjo**

Pemangku Adat Astana Balla Lompoo Tamalate Gowa  
Ketua Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara Sulawesi Selatan



Amanat pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta penciptaan kesejahteraan umum hingga saat ini belum terealisasi secara utuh. Jumlah pengangguran telah mencapai sekitar 40,1 juta orang atau 37% dari 106,9 juta angkatan kerja. Fenomena tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin telah mencapai sekitar 39,05 juta jiwa versi Badan Pusat Statistik (BPS) atau lebih dari 100 juta jiwa versi Bank Dunia. Data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menunjukkan saat ini terdapat 199 kabupaten (45% dari 440 kabupaten) yang masih tergolong daerah tertinggal di seluruh Indonesia.

Indonesia dikaruniai kekayaan alam dan sumber daya sosial seperti kekayaan budaya, kearifan lokal, bahasa, adat isitiadat dan etnis tetapi justru mengalami permasalahan kemiskinan, pengangguran, busung lapar, konflik sosial dan utang luar negeri yang cukup besar. Secara eksternal kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekuatan korporasi global dengan fundamentalisme pasarnya yang menyebabkan lumpuhnya kekuasaan negara dan pemerintah. Negara berkembang termasuk Indonesia terjebak dalam kesepakatan global yang tidak adil yang melahirkan pemiskinan, ketidakadilan sosial, penyeragaman, pendangkalan makna hidup serta ancaman integritas kedaulatan negara, jebakan utang, dan pengaburan identitas kepribadian nasional. Praktek pemerintah Orde Baru yang sentralistik telah menyebabkan terkikisnya kekayaan sumber daya sosial (pranata sosial) yang sebelumnya mengikat dan mengatur masyarakat. Secara perlahan pranata sosial ambruk sehingga mematikan inisiatif dan kemandirian lokal serta terjadinya dekadensi moral pada segenap elemen masyarakat. Inisiatif pembangunan daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan sentralistik dengan pendekatan “*trickle down effect*” menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Kebijakan sentralistik mendorong penyeragaman pendekatan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal tersebut berdampak pada hancurnya kelembagaan lokal yang selama ini menjadi panutan masyarakat.

Otonomi Daerah yang semula diharapkan memberikan kemandirian pada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan juga menghadapi sejumlah permasalahan. Ketergantungan daerah khususnya daerah tertinggal pada pemerintah pusat menyebabkan spirit otonomi kehilangan makna. Desentralisasi melalui otonomi yang semula diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mensejahterakan masyarakat pada kenyataannya banyak menimbulkan sejumlah permasalahan seperti buruknya pelayanan publik sebagai akibat dari standar pelayanan yang berorientasi pada kemajuan perekonomian daerah dengan menggunakan indikator peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan keberhasilan pembangunan fisik.

Selama ini masyarakat dimandulkan oleh dominasi pemerintah. Masuknya unsur birokrasi sentralistik yang dipaksakan terutama pemerintah pusat telah menggeser semua unsur lokal termasuk nilai-nilai sosial dan budaya. Pendekatan pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi secara berlebihan dan mengabaikan perhatian pada aspek-aspek budaya kehidupan bangsa telah menimbulkan akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, erosi ikatan-ikatan kekeluargaan dan kekerabatan serta meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilihan pada pendekatan ekonometrik menyebabkan kemampuan dan kepekaan pemerintah sangat rendah untuk menanggapi kebutuhan lokal dan secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan sendiri masalah yang mereka hadapi (Korten 1988). Kebudayaan yang dipandang sebagai lokomotif pembangunan sosial, politik, dan ekonomi, selama ini baru dimanfaatkan untuk apresiasi terhadap nilai dan estetika, belum dikelola untuk penguatan etos kerja dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan, selain menata kelambagaan pemerintah juga diperlukan penataan terhadap kelembagaan lokal. Pembangunan ekonomi tidak akan mungkin memperbaiki kualitas hidup manusia kecuali jika dilakukan di dalam kerangka pembangunan kebudayaan (*cultural development*).

## 1. Jati Diri Bangsa

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti pengaruh ekonomi global, politik, dan hukum, tetapi faktor yang cukup dominan adalah faktor internal yakni manusia Indonesia sendiri. Sosok yang tidak tulus-ikhlas, korup, tidak bersungguh-sungguh, senang yang semu, senang yang basa-basi yang kesemuanya sangat merusak karakter individu dan mempunyai implikasi pada rusaknya karakter bangsa yang sesungguhnya menunjukkan bangsa Indonesia tengah kehilangan jati dirinya. Karakter bangsa Indonesia yang selama ini dikenal ramah-tamah, gotong royong, dan sopan santun berubah menjadi menakutkan, beringas, mudah marah, dan tidak peduli lagi dengan nasib bangsanya. Inilah kenyataan yang menunjukkan hilangnya jati diri individu-individu manusia Indonesia yang berakibat lunturnya dan rusaknya karakter bangsa Indonesia. Pesan orang bijak "*when character is lost, everything is lost*" (kehilangan karakter bangsa menyebabkan kita akan kehilangan segalanya). Korup di negeri ini bukan dilakukan oleh mereka yang tidak beragama atau tidak berpendidikan tetapi oleh mereka yang tidak punya karakter lagi.

Rusaknya karakter bangsa dipengaruhi oleh krisis tetapi akar masalahnya terletak pada manusia Indonesia sendiri. Selama 60 tahun terakhir, di Indonesia tidak lagi dilakukan pembangunan karakter. Sementara pembangunan karakter harus dilakukan secara berkesinambungan (*character building is a never ending process*). Koridor tata nilai ditandai dengan berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme, harga diri dan kebanggaan (*siri na pacce*) menjadi orientasi pada uang, materi, duniawi, dan hal-hal yang sifatnya hedonistik. Dalam koridor kebiasaan, masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah seperti tidak menepati waktu, ingkar janji, saling menyalahkan, dan mengelak tanggung jawab. Masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang saling tidak mempercayai, tidak saling menghargai (*low trust society*). Dalam bermasyarakat saat ini masih sangat langka kita menemukan lagi adanya sosok yang mampu memberikan teladan kebajikan.

Kemajuan bangsa Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Vietnam tidak disebabkan oleh kekayaan tetapi karena dorongan semangat dan karakter bangsanya untuk menjadi bangsa yang maju dan jaya. Hilangnya jati diri bangsa jika dibiarkan akan menyebabkan rusaknya karakter bangsa yang bukan mustahil menyebabkan sirnanya bangsa Indonesia. Menurut Diamond (2005), bahwa terdapat lima faktor penyebab ambuknya peradaban suatu bangsa yakni (1) kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia, (2) perubahan cuaca pemanasan global, (3) tetangga yang bermusuhan mengivasi suatu komunitas yang sedang lemah, (4) mengendurnya dukungan dari kelompok masyarakat, (5) buruknya penyelesaian persoalan melalui kerangka institusi politik, ekonomi, sosial, dan nilai budaya. Berdasarkan kriteria tersebut Diamond (2005) mengategorikan Indonesia sebagai Negara yang terancam menjadi gagal Negara (*collapse*) menyusul Rwanda, Somalia, dan Haiti.

Karena itu, setiap elemen bangsa harus kembali menemukan jati dirinya, membangun jati dirinya untuk kembali membangun karakternya dan secara *bottom up* membangun karakter keluarga, lingkungan, dan bermuara pada karakter bangsa. Pemerintah diharapkan mencanangkan *nation and character building* sebagai payung pembangunan nasional melalui rekonstruksi moral secara total. Karena itu beberapa ahli telah menganjurkan reorientasi pendekatan pembangunan berbasis budaya sebagai alternatif pendekatan pembangunan konvensional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan (*economic overtone*).

## 2. Nilai Budaya sebagai Aset Pembangunan

Pembangunan berbasis budaya bertempuh pada penempatan manusia sebagai tujuan dan pelaku utama pembangunan serta menempatkan nilai, norma, dan kearifan lokal sebagai pilar utama. Sebelum menguraikan adat-istiadat sebagai aset pembangunan, berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang adat-istiadat Makassar sebagai salah satu aset nasional menuju pembangunan berbasis budaya. Kata adat adalah diterjemahkan menjadi *Ada'* dalam bahasa Makassar. Kata adat diadopsi dari kata adab yang dari bahasa Arab yang bermakna kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Kata adat bermakna aturan, kebiasaan yang lazim dituruti sejak dahulu. Persoalannya kata *Ada'* menjadi kompleks ketika diterima sebagai istilah sosiologi di dalam kehidupan suku Makassar, istilah *Ada'* menjadi perangkat sosial yang sangat berperan dalam membina harmoni kehidupan. *Ada'* lalu berkembang menjadi institusi kehidupan masyarakat pada masa lalu ketika kesatuan sosial masih diatur oleh sistem kerjaan.

Dalam strata tertinggi di kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo, *ada'* adalah sebuah perangkat yang terdiri atas *sombaya, tumailalang, towa/lolo, tumakajannangngang*, sejumlah pejabat kerajaan lainnya termasuk *paccalaya, batesalampang* serta *karaeng palili*. Sistem nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan termasuk Makassar adalah *siri na pacce*. *Siri* secara harfiah berarti malu, tetapi secara hakiki merupakan suatu konsep, sebagai suatu sistem nilai budaya. *Siri na pacce* menjadi inti kebudayaan Makassar yang mendominasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap *pangngadakang* selaku wujud totalitas kebudayaan Makassar. Unsur-unsur *pangngadakang* terdiri atas:

- *Ada'* yaitu aturan perilaku dalam masyarakat berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat
- *Bicara* yaitu aturan peradilan yang menentukan suatu hal yang adil dan benar, dan sebaliknya curang atau sala
- *Warik* yaitu aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan kewajaran dalam hubungan kekerabatan dan silsilah
- *Rapang* yaitu aturan yang menempatkan kejadian atau ikhwal masa lalu sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini
- *Sara'* yaitu aturan atau Syariat Islam yang menjadi unsur *pangngadakang* sejak Islam menjadi agama resmi dan umumnya masyarakat Makassar.

Istilah adat berasal dari kosa kata bahasa Arab, seperti dalam ungkapan “al-Adatu Muhakkamun” yang bermakna adat itu mempunyai hukum. Hukum di sini bisa diartikan aturan atau peraturan. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi mengatur tata kelakuan. Adat yang diadatkan berproses dari kebiasaan, kemudian menjadi adat kebiasaan, berproses lagi ke tingkat yang lebih tinggi yang lebih mantap disebut adat-istiadat dan pada akhirnya menjadi lembaga adat.

Adat pada hakekatnya adalah berfungsi hukum untuk mengawasi dan menjaga tata tertib dan kemaslahatan masyarakat, agar warga tetap aman dan sejahtera mengayomi kehidupannya. Sopan santun dikalangan keluarga, antara kerabat dan rumpun keluarga sudah tetap aturan yang harus dilakukan setiap orang. Jaringan hubungan kerabat berlaku sopan santun tertentu antara orangtua dan anaknya, antara paman, kemenakan dan seterusnya pada generasi sepupu, melalui terminologi kekerabatan menjadi pedoman sopan santun dan penghormatan diantara mereka.

Adat dapat dilihat dalam tiga tingkatan yakni tingkatan nilai-nilai, tingkatan norma-norma, tingkatan hukum atau sanksi-sanksi, dan tingkatan khusus. Tingkatan nilai-nilai adalah adat yang berwujud idea, amat abstrak dan luas ruang lingkupnya. Masyarakat membuat konsep-konsep yang dianggap bernilai tinggi dan berakar dalam emosi dan jiwa masyarakat. Dilakukan secara tak sadar dan tanpa nalar lagi. Mungkin ini diperoleh dari warisan sosial atau bersumber dari pandangan hidup hasil kearifan budaya atas kreasi pendahulu. Tingkatan kedua, adalah nilai-nilai yang sudah terjalar ke dalam peranan-peranan sosial yang dilakukan setiap orang menurut statusnya. Peranan tersebut terkait dengan posisi seseorang menurut ruang dan waktu. Setiap orang selalu berubah peranan mengikuti posisi sosialnya. Setiap peranan membawakan norma-norma khusus yang dilakukannya menurut peranannya. Melalui norma khusus tersebut, ia memainkan peranannya yang bisa mengantarkan sukses atau gagal. Tingkatan yang ketiga, adalah tingkatan hukum baik yang tertulis maupun hukum adat. Jumlah hukum dalam masyarakat yang sudah maju, lebih banyak jumlahnya daripada masyarakat yang masih sederhana. Masyarakat sederhana masih dibimbing oleh aturan-aturan adat yang tak tertulis. Tingkatan adat yang keempat, adalah aturan yang sudah lebih jelas dan terbatas, kebanyakan sudah terkait dengan sistem hukum yang sudah berjalan.

Untuk keberlangsungan adat diperlukan lembaga adat yang bertujuan sebagai sosial kontrol, melestarikan prinsip-prinsip adat dengan mengacu pada kepentingan masyarakat sehingga berfungsi selektif terhadap difusi unsur-unsur yang merusak masyarakat. Memberdayakan adat dalam pembangunan dalam arti bahwa kegiatan pembangunan harus bersinergi dengan kebudayaan sesuai tradisi budaya (Hamid, 2007). *Ada'* dan *pangngadakang* menjadi kaidah acuan normatif dalam bertindak, bersikap, berperilaku, serta segala sesuatu yang diaturnya. Jika kesemuanya itu didorong dan didinamisasi oleh kekuatan *siri na pacce* sebagai inti kebudayaan orang Makassar, maka semuanya merupakan konkretisasi atau operasionalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. *Siri* merupakan sumber nilai-nilai yang tetuang ke dalam *pangngadakang*.

Unsur *pangngadakang* yang telah diuraikan sebelum ini, melahirkan seperangkat tata nilai sebagai salah satu unsur yang diyakini dan menjadi *frame of reference* tentang bagaimana seharusnya berbuat dan bersikap dalam kehidupan sosial. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mewujudkan *clean and good governance*. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan partisipasi segenap elemen masyarakat sehingga memungkinkan penerapan sistem *check and balance*. Menurut (Salle dan Hamdat, 2004), sumber lontara mengatakan bahwa seorang pemimpin ideal memiliki empat syarat yakni (1) *kacaraddekang* (kepintaran), (2) *kakalumanyangang* (kekayaan), (3) *kabaraniang* (keberanian), dan (4) *lambusu'* (kejujuran). *Lambusu'* mengandung empat hal utama yaitu *tutui* (berbuat cermat), *bali bicara* (berbicara yang benar), *anggau' bali* (melakukan perbuatan yang bermanfaat) dan *kuntu tojeng* (bekerja dengan penuh kesungguhan dan bertanggung jawab).

### 3. Revitalisasi Nilai Budaya Kesultanan/Kerajaan Gowa-Tallo

Kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo mengalami kemashuran pada abad ke-16 terutama pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo memperluas pengaruhnya hingga ke berbagai wilayah Indonesia dan kawasan lain di Australia Utara, Filipina Selatan, sampai ke Madagaskar. Titik awal masa surutnya pengaruh Gowa-Tallo akibat Perjanjian Bongaya yang menyebabkan beberapa daerah diserahkan kepada pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Sejak itu, peran kesultanan/kerajaan Gowa mengalami kemunduran. Beberapa tokoh penting seperti Karaeng Galesong meneruskan perjuangan menentang Belanda dengan melakukan peperangan di Jawa Timur bersama-sama dengan Pangeran Trunojoyo. Kemashuran kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo berdampak luas pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat Gowa-Tallo. Hal tersebut dibuktikan dengan berkembangnya Sombaopu menjadi salah satu dari lima kota terbesar di Asia dalam bisnis global. Pada masa tersebut telah bermukim sekitar 40 orang warga negara asing (kaum kompatriot) bahkan berbagai negara asing membuka *loji* (setara dengan kedutaan besar). Sombaopu menjadi Bandar niaga terbesar di Asia Tenggara menggantikan posisi Malaka yang jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.

Secara perlahan pengaruh kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo kehilangan pengaruhnya. Hilangnya pengaruh kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo disebabkan oleh lepasnya wilayah kekuasaan yang selama ini memberikan dukungan penuh dalam berbagai bentuk, lemahnya pengaruh dan kepemimpinan akibat dominasi pemerintahan kolonial Belanda, serta terjadinya divergensi pada tingkat masyarakat untuk tunduk pada pemerintah kolonial sebagai konsekuensi dari perjanjian Bongaya atau meneruskan perjuangan di wilayah lain. Melemahnya pengaruh kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo turut berdampak pada melemahnya pengaruh lembaga kesultanan/kerajaan yang juga berdampak pada terjadinya disorganisasi sosial. Selain itu, akumulasi kebijakan pemerintah terutama pemerintah pusat pada era Orde Baru yang cenderung memarginalkan lembaga lokal termasuk lembaga adat dengan pendekatan pembangunan yang sentralistik ikut memberikan kontribusi.

Kebesaran kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo secara simbolik digambarkan oleh Istana Balla Lompoa di Sungguminasa dengan segala atribut *kalampoang* yang dimiliki, yang setiap tahun diperingati melalui Upacara *Accera Kalampoang*. Karena itu, istana Balla Lompoa menjadi simbol sentral dari lintasan sejarah kebesaran masa lalu kesultanan/kerajaan Gowa-Tallo. Istana menjadi simbol pencerahan dan pemersatu masyarakat, memelihara harmoni dalam kehidupan masyarakat serta berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan untuk membawa kemaslahatan masyarakat Gowa-Tallo.

Perangkat kesultanan pada masa keemasan kerajaan Gowa-Tallo yang terdiri atas *sombaya*, *tumailalang*, *towa/lolo*, *tumakajannangngang*, termasuk *paccalaya*, *batesalapang* serta *karaeng palili* maupun perangkat lainnya berhasil menjalankan fungsi adaptasi, integrasi, latensi, dan pencapaian tujuan dengan sangat baik sehingga mampu mempersatukan masyarakat, membangun harmoni, membawa kemakmuran. Mundurnya pengaruh kerajaan Gowa ikut berdampak pada rusaknya tatanan yang telah mengakar sehingga fungsi adaptasi, integrasi, latensi, dan pencapaian tujuan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Hancurnya perangkat kelembagaan adat di luar istana berdampak luas pada melemahnya pengaruh kesultanan/kerajaan pada masyarakat Gowa-Tallo. Menghidupkan kembali perangkat lembaga adat *tumailalang*, *towa/lolo*, *tumakajannangngang*, termasuk *paccalaya*, *batesalapang* adalah satu alternatif revitalisasi. Untuk itu diperlukan pertimbangan dengan orientasi simbolis dan fungsional. Sebagai kelengkapan tatanan adat perangkat tersebut sangat diperlukan sebagai sebuah simbol entitas. Namun demikian, perlu dipertimbangkan apakah perangkat tersebut sangat efektif dalam merevitalisasi nilai budaya kesultanan/kerajaan Gowa. Dewasa ini terdapat kecenderungan beberapa istana dan keraton membangun lembaga penunjang.

Demikian pula pada Istana Balla Lompoa telah dibentuk Yayasan Andi Idjo Raja Gowa yang bertugas membangun interkoneksi dan kemitraan dengan berbagai pihak dan donor untuk melakukan revitalisasi. Dengan pertimbangan, keterlibatan pemangku adat secara langsung mengurus kegiatan yang berpotensi memberi keuntungan material atau kepentingan jangka pendek yang dapat mengakibatkan pemangku adat kehilangan kepercayaan dan legitimasi.

Secara operasional, berdasarkan hasil penelitian Fattah dkk (2006) revitalisasi lembaga adat dapat dilakukan melalui (1) pembuatan payung hukum (Kepres, Perda, dan Perdes) sehingga lembaga adat memiliki hak dan kewenangannya secara proporsional, (2) inventarisasi dan pelestarian aset adat seperti seni, nilai, dan norma yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, (3) pengembangan kemitraan lembaga adat dengan pemerintah dan pihak lain, (4) aktualisasi potensi adat dalam kehidupan sehari-hari (komunitas istana dan masyarakat adat menjadi teladan dan panutan dalam menyebarluaskan kebijakan), (5) restrukturisasi dan reorganisasi lembaga adat pada seluruh hirarki wilayah, (6) peningkatan fungsi dan peran lembaga adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, (7) peningkatan kinerja lembaga adat, serta (8) reorientasi pendekatan pembangunan dengan menyerap unsur-unsur paradigma pembangunan berbasis budaya.

#### 4. Memperkuat Kapasitas Bangsa

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini, kita harus fokus pada penegakan perilaku positif, menuju pembinaan masa depan yang lebih cemerlang. Pelestarian adat dapat dilakukan seperti menjaga adat karena karena pengaruh positif yang masih dimilikinya seperti menjaga keharmonisan, melstarikan bentuk-bentuk budaya yang telah berpola positif. Lembaga adat tidak diberikan makna yang sempit dalam bentuk kebutuhan kontemporer dan berkesan sekedar seremonial. Lembaga adat dapat difungsikan sebagai lembaga pelestari nilai-nilai yang mendasari *Ada'* dan *pangngadakang* yang merupakan produk budaya dalam lintas sejarah Sulawesi Selatan. Lembaga adat dapat menjadi mitra kerja pemerintah sekaligus dapat mengkaji upaya pelestarian dan pengembangan adat sebagai aset pembangunan. *Ada'* dan *pangngadakang* dilestarikan dan direinterpretasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta direvitalisasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memelihara harmoni dalam kehidupan masyarakat serta berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan bangsa dengan menggunakan produk budaya *ada'* dan *pangngadakang*.

Keterpurukan yang dialami bangsa Indonesia saat ini disebabkan karena termajinalkannya institusi lokal dan tergerusnya nilai dan norma yang selama ini dijunjung tinggi. Euforia reformasi telah memacu orang untuk bertindak mau menang sendiri, mengabaikan adat dan sopan santun. Budaya *sipakatau* dan *sipakallabirri* (budaya saling menghargai dan menghormati) telah diabaikan untuk mengejar ambisi pribadi maupun kepentingan kelompok dan golongan. Hal ini mendorong lebih dikedepankannya kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang untuk perbaikan nasib bangsa. Pada konteks yang ekstrim, hal ini memicu terjadinya gejala disintegrasi pada lingkungan kekerabatan, masyarakat, maupun konteks berbangsa. Pada kalangan orang Makassar dikenal nomenkelatur *Ada' Biasana Buttaya* yang biasa diungkapkan sebagai berikut: "*la nanigesarak Ada' biasana buttaya, tammattikno nipaya, tanai tommi jukuka, anyya' la tommi asea*" (jika adat kebiasaan negeri dilanggar (maka) nira tidak lagi menetes, ikanpun tidak lagi muncul dipermukaan air, padipun tidak lagi berbuah). Hal ini menjadi bahan perenungan, mengapa Indonesia yang dahulu dikenang sebagai "negeri untaian zamrud khatulistiwa atau *gemah ripah loh jinawi* telah berubah wajah menjadi negara yang tidak pernah sepi dari konflik dan huru-hara, terus dirundung kelaparan dan dilanda bencana alam yang tidak pernah berhenti sehingga banyak pihak telah mengkategorikan rangkaian kejadian tersebut sebagai azab dan laknat dari Allah SWT karena manusia Indonesia terlalu sering lalai dan sombong. Disadari atau tidak, negara ini telah mengalami mismanajemen (salah arus) sehingga beroperasi jauh di bawah kapasitas terpasang yang sesungguhnya. Tindak penyelewengan dan korupsi telah menggerogoti energi bangsa terutama sumberdaya alam dan sumberdaya sosial yang seharusnya dapat optimalkan untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali mengembalikan segalanya secara proporsional, sebagaimana ungkapan "*Punna pangngadakang, taena erokku, taena kulleku. Ada' kaji tojeng, iaji nanrang tatappuk, ta-larang bawang manna bosu na barak*". Segenap elemen bangsa Indonesia tidak dapat berbuat yang lain, selain mengembalikan pada nilai dan norma adat, karena hanya "adatlah yang benar", adat adalah tali (jangkar) yang tidak dapat putus meskipun turun hujan dan badai. Jati diri bangsa yang sejatinya berakar pada budaya luhur menjadi pedoman dan pegangan dalam menghadapi turbulensi perubahan global.

Nilai lambusu' atau kejujuran terus mengalami degradasi karena terjadinya dekadensi moral dan tuntunan pemenuhan hidup yang semakin sulit. Lembaga adat berperan penting dalam pelestarian dan revitalisasi nilai kejujuran. Selain itu, lembaga adat sebagai institusi yang memiliki otoritas mengayomi *frame of referance* tentang bagaimana seharusnya berbuat dan bersikap dalam kehidupan sosial dapat menjadi pengendali (*social control*) dan pencerah (*empowering society*) dalam mewujudkan *clean* dan *good governance*. Sebagaimana pernyataan *Karaengta I mangadaicing Daeng Sitaba Karaeng Pattingaloang*, lima faktor yang dapat meruntuhkan negara besar (1) raja yang memerintah tidak mau diperingati, (2) tidak ada orang pandai, (3) para hakim dan pejabat kerajaan dapat disuap, (4) terlampau banyak masalah besar dalam negara itu dan (5) raja tidak mencintai rakyatnya. Kelima faktor tersebut merupakan penyakit masyarakat atau negara yang berpangkal pada raja atau penguasa yang tidak bermoral. Dalam konteks tersebut, kualitas moral harus diperhatikan oleh seorang raja atau penguasa. Dalam hal inilah *pangngadakang* berperan dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengontrol moral raja atau penguasa.

Meskipun demikian, masalahnya apakah kita mampu mengembalikan kembali nilai dan norma adat yang telah tenggelam sekitar 32 tahun pada era Orde Baru dan apakah nilai tersebut masih relevan dengan tuntutan zaman. Disorganisasi sosial yang terjadi akibat lemahnya tata kelola kenegaraan yang disebabkan cenderung luasnya ketertiban negara dalam mengatur segenap urusan kehidupan masyarakat. Dengan lingkup intervensi yang luas tersebut pada kenyataannya belum tentu memiliki kemampuan bahkan sering tidak berdaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, peran-peran negara dapat dipangkas dengan lebih memberdayakan institusi masyarakat lokal yang selama 32 tahun telah terpinggir dan termarjinalkan.

Menghadapi kenyataan tersebut kita diperhadapkan pada dua pilihan penting yakni segera merevitalisasi lembaga adat (termasuk di dalamnya adat-istiadat) untuk meningkatkan kapasitas bangsa atau pilihan negara dan bangsa Indonesia akan menjadi gagal negara seperti yang digambarkan Diamond (2005). Kita selaku bagian dari masyarakat adat nusantara dan pewaris sah NKRI akan berupaya mempertahankan eksistensi negara dan bangsa Indonesia sebagaimana para pendahulu kita. Karena itu, pilihan yang tepat adalah merevitalisasi lembaga adat. Lembaga adat kembali difungsikan sebagai penjaga pintu sebuah sistem, adat, dan kebiasaan yang dianggap beradab.

Untuk itu peran pemerintah yang diharapkan dalam merevitalisasi nilai budaya yang sekaligus memperkuat kapasitas bangsa sebagai berikut: (1) memfasilitasi pembuatan payung hukum (Kepres, Perda, dan Perdes) yang terkait dengan lembaga dan masyarakat adat, (2) menjadikan lembaga adat sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, (3) konkretisasi revitalisasi nilai, norma, dan adat, (4) menjadikan nilai, norma, dan adat sebagai landasan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, (5) pelimpahan kewenangan urusan sosial kemasyarakatan kepada lembaga adat, serta (5) mengadopsi unsur-unsur paradigma pembangunan berbasis budaya dalam pembangunan nasional.

## Penutup

Mengembalikan penyelesaian persoalan bangsa “secara adat” adalah pilihan terakhir untuk menghindarkan negara dan bangsa Indonesia dari kehancuran (kolaps). Tanda-tanda yang menjadi indikator kehancuran kaum pada masa lalu telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pelestarian dan reinterpretasi *Ada’* dan *pangngadakang* sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman adalah jalan terbaik untuk memelihara harmoni dalam kehidupan masyarakat serta penyelesaian sejumlah permasalahan bangsa serta penyelamatan bangsa seperti pilihan yang telah ditempuh oleh para bangsawan, raja, karaeng, sultan, datu, dan puang se-nusantara sehingga menjadikan Sriwijaya, Majapahit, Solo, Mataram, Ternate, Tidore, Pagaruyung, Gowa, Luwu, Bone, dan berbagai negeri lainnya menjadi daerah yang rakyatnya makmur dan aman sentosa. Karena itu pembangunan berbasis budaya perlu menjadi arah kebijakan pembangunan nasional.

---

## Pustaka

Diamond, J. 2005. *Collapse*, New York

Fattah, M, D, Yusuf, Achdor, B. Busaeri, dan Ichsan. 2006. *Revitalisasi Fungsi dan Peran Lembaga Adat se-Sulawesi Selatan. Kerjasama Pemprov. Sulawesi Selatan dan UMI Makassar*, Makassar.

Hamid, A. 2007. *Lembaga Adat dan Hubungannya dengan Lembaga Sosial*.

Disampaikan pada Seminar Revitalisasi Fungsi dan Operan lembaga Adat se-Sulawesi Selatan, 9-10 Mei 2007 di Makassar.

Korten, D. 1986. *Community Management, Asian experience dan Perspectives*. Kumarian Press.

Sale dan Hamdat, 2004. *Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*. Pusat Studi Pariwisata UGM dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pilar Media, Yogyakarta.

*Komunitas adat merupakan  
penyangga jati diri kesatuan sosial dan  
budaya setempat serta merupakan  
pewaris aktif nilai-nilai budaya luhur  
sebagai sumber inspirasi bagi inovasi  
dan pengembangan kemajuan budaya  
nasional.*



---

## RUMUSAN DIALOG BUDAYA

---

Berdasar pengarahannya Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, pemaparan para narasumber dan diskusi dari peserta dialog yang berlangsung diperoleh rumusan sebagai berikut :

Komunitas adat merupakan penyangga jati diri kesatuan sosial dan budaya setempat serta merupakan pewaris aktif nilai-nilai budaya luhur sebagai sumber inspirasi bagi inovasi dan pengembangan kemajuan budaya nasional. Nilai-nilai budaya itu, antara lain tersembunyi dalam kegiatan ritual (religi). Sampai saat ini, masih banyak komunitas adat yang masih eksis karena adanya lembaga adat yang berfungsi sebagai sarana penguat, pewarisan dan kontrol sosial.

Keberadaan komunitas adat tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 2 dan pasal 32 UUD 1945. Akan tetapi, keberadaannya belum mendapat perhatian yang maksimal, karena beberapa hal, antara lain :

1. Keberadaan komunitas adat dapat diakui apabila telah ada "legal standing" berupa peraturan daerah tentang komunitas adat
2. UU (agraria dan kehutanan) yang ada, tidak mengakomodasi keberadaan komunitas adat (hak ulayat)
3. Dalam pelestarian kearifan lingkungan dan nilai budaya, belum ada program/strategi kebudayaan yang bisa mengakomodasi rencana jangka panjang
4. Religi komunitas adat belum mendapat pengakuan formal dari negara, walaupun demikian secara tidak langsung oleh masyarakat adat diakui secara hukum adat.

Saran dan tindak lanjut:

1. Dalam memberdayakan komunitas adat diperlukan adanya UU Perlindungan dan Peraturan Daerah mengenai keberadaan komunitas adat
2. Perlu adanya program/strategi kebudayaan dalam jangka panjang, khususnya dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya komunitas adat.
3. Pelestarian nilai-nilai budaya adalah tanggung jawab bersama, karena itu perlu dilakukan pendidikan tentang nilai budaya sejak dini, baik secara formal maupun informal.
4. Kesetaraan gender pada komunitas adat dapat ditumbuhkan apabila disepakati dan didukung oleh anggota lembaga adat.
5. Keberadaan religi komunitas adat perlu dihormati, diakui dan diapresiasi serta berhak untuk berkembang selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, tidak menimbulkan konflik atau merusak kerukunan umat beragama dan disintegrasi bangsa.
6. Pemerintah dan para pemangku adat meningkatkan perhatian terhadap eksistensi keraton yang tersebar di seluruh nusantara dan merevitalisasi fungsinya sebagai pemelihara tradisi.



## AYAHUS DOJAG NAZUMU

Pembacaan Hasil Rumusan Dialog  
Komunitas Adat oleh Bapak

DR. Zulyani Hidayah



Penyerahan Hasil Rumusan Dialog Komunitas Adat kepada Direktorat  
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di terima oleh Dra. Istiasih, M.Si



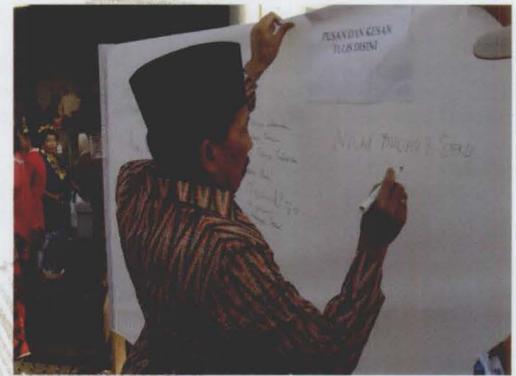
## KESAN DAN PESAN



### A. Kesan dan Pesan dari Pengunjung Gelar Budaya

Budaya untuk Harkat dan Marwah Bangsa (Bpk. Mukhlis PaEni); Tumbuhkan lagi semangat siri Na Pacce (UNHAS Community); Acaranya bagus kok mudah-mudahan tambah sukses (Ina dan lme SMK 7); Terusin trus adat-adat di Indonesia, (Cayoo !!) Trims banget saya jadi ngerti adat-adat di Indonesia (Enhy016); Proud to Government Culture & Keep the originality (PSM Unhas); Acaranya keren banget, top banget deh (Sejati Kru : Aris, mamiwati, ayub, Miita, dan Bardi); Tolong kalau tahun depan undang dong (SMKI Alumni Sotta); Acaranya diadakan lebih sering agar kita makin tahu akan kekayaan budaya Indonesia (-); Buat acara sering-sering ya !! (Ijen); Kalau bisa Monumen Mandalanya bisa dimasuki kaya Monas di Jakarta (Mona); Mana Stan Goa (-); Pesan Budaya apabila gendang sudah ditabuh lawan badai itu selagi belum merobek dada kita (Hos, Kulo); Kami di Sinjai ingin melihat kebudayaan kami di pajang di pameran ini NB : Tolong dibangun Monumen Banjir Bandan, Simpang itu 5 untuk masa depan setanai (Ongol Choy); Aku anak bangsa yang mencintai budaya dan adat (Rudi Verber); Teruskan pelestarian budaya untuk generasi selanjutnya (Rini); Jangan ada dusta diantara budaya wilayah barat dengan timur

sehingga tidak ada diskriminasi budaya nenek moyang yang selama ini kita jaga hingga akhir jaman Oke !!! (Cucunna Sombayya); Sopo bilang budaya timur itu tidak Mooi Choi .... (Cucunna Sombayya di Goa); Mari kita lestarikan budaya kita (Meri); Gono bilang adama sedenk (Rudi Sasmita, Sastro, Montoro); Tolong film Indie di Indonesia Khususnya juga dibudayakan (Sindikat bikin film 04116160489); Sukses semoga tahun depan masih ada lagi (Limbeng); Budaya itu lemah apabila dijaga dengan benar (Bance see); Peradaban mulia dengan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa bangkit dan maju bangsa Indonesia, Merdeka Abadi (Eli Yuniarti Dirjen Kesbangpol Depdagri); Kumiliki dirimu dengan kata hati yang paling dalam untuk budaya ku sendiri (-); Thanks to punk - ticy I love punk (-); Costume U"live white digital (Room Video 081332660067); Nilai Budaya dan Seni adalah pemersatu bangsa yang plural (Asisten I Pemprov Sulsel); Lestari kanku, Lestari Negeriku, lestari bunga citra (Ipho); Kearifan lokal perlu dilestarikan karena merupakan aset daerah (Kunti Nb DDN); Saya dari aceh sangat bangga dengan monumen Mandala kenapa di Aceh tidak dibangun Monumen Tsunami (-); We ..... Apaji, banyaknya daerah di Makassar, baru sedikitnya Ji ... "Stand yang terpasang" nda' sampeki ces dari sabang sampai merauke. Mahalnya lagi harganya ...!! (-); kantong mahasiswa disesuaikan ces !! (Comunitty UNM); Acaranya top banget deh, bagusnya diadakan setiap tahun, kuenya enak banget, mau lagi dong apalagi gratis (Sita, Eda, Indah); Tiga Cewek Manis dengan Rasa Coklat diakhiri gigitan Rewako, Makassar, Hidup PSM (Bajiki Nach); Salut dengan acara kedepan supaya publikasi lebih dipermantap lewat media yang menjangkau masyarakat pedesaan ( baca masyarakat adat) dan semoga ini menjadi kalender tahunan Disparbud (Aloi Teater Unhas); Wahh .. keren choi, but kurang promosinya, sering-sering ya... (Arga Gerrard); Salut Ren (-) Acara ini sangat tidak menarik (-); Budaya lainnya masih kurang !! mana yang dari Papua dan Bali ? (Shabyl Alonso, Fisip UH); Mudah-mudahan tambah sukses kedepan tapi harus lebih banyak lagi penghuninya supaya lebih ramai (Narly); Hapuskan sistem kebarat-baratan, kembalikan adat ketimuran (Boy Montolalu); Seharusnya undang cowok school lain yang acaranya meriah (Irma Lestari Sartika Candra Kirana, Wirabuana Cute selalu 04115273704-834-200); Terima kasih atas pameran, pagelaran seni di Makasar (-) Diperbanyak promosi sebelum acara (Crew); Sebaiknya dilakukan setiap tahun dan diperbanyak brandink (Spanduk) supaya masyarakat Sulsel lebih tahu adanya acara ini (Crew SHGN); Budaya daerah dapat memperkaya budaya bangsa, Korupsi dapat menambah kemiskinan (No name); Tingkatkan terus Gelar Budaya Ini semoga Gelar Budaya jangan hanya di Makassar aja tetapi di kota-kota lainnya terus berjalan setiap tahun (NHO); This is the positive party so improv this moment cost can make add our knowledge about culture in Indonesia espially in South Sulawesi (Tani); Budayakanlah dan lestarikan tempat-tempat pariwisata di Makassar (Sandra); Saya bangga diadakan pekan budaya ini karena dapat mengenal nilai-nilai budaya kami (Ratna); Cintailah budaya sendiri (Susi);





Talk, walk, Act together for art and culture (Petta Uang); Yamaha Sukseski Ki Ces Acaramu, Salam Yamaha (Fans Yamaha); Duduk Yamaha (Susi dan Novi); Gammara Mentomi ..... Salamah (-); Dengan di Gelarnya Pesta Adat Semoga Kita Tingkatkan Lagi Persaudaraan di Indonesia (Rangga); Patut diacungi jempol (L2P); Semoga Adat Istiadat di Indonesia memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang beradab (Dengyo); Agar lebih optimal supaya jumlah peserta di tambah, dan sosialisasinya ditingkatkan, pertahankan terus pameran Gelar Budaya ini setiap tahunnya (Yusuf); Acaranya Ok. !!! Bisa dijadikan program tahunan (Bravo Panitia Gutluck); Agar lebih disosialisasikan kepada masyarakat umum, Soalnya kunjungan pengunjung kurang greget terhadap budaya dan seni Indonesia, Trims. (Rizal); Bravo buat Panitia Gelar Budaya Komunitas Adat (-); Lestarikanlah budaya Indonesia. (Anggie); I Love You Indonesia (-); Bravo Panitia (-);

## B. Kesan dan Pesan dari Internet

([www.Panyingkul.com](http://www.Panyingkul.com))

Senin, 30-07-2007

Sepi Promosi tapi Ada Keragaman yang Nyaman:: Ilham Halimsyah ::

Sepi promosi. Itulah kesan yang ditangkap citizen reporter Ilham Halimsyah dari kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat yang dipusatkan di areal Monumen Mandala Makassar, 24 hingga 26 Juli pekan lalu. Ilham yang juga salah seorang fotografer berbakat di Makassar saat ini, mencoba menangkap keragaman budaya yang ditampilkan dari berbagai atraksi komunitas adat tersebut, dan membagi kesan-kesannya dalam laporan dan foto-foto berikut.(p!)

Kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat memang telah usai. Namun, sejumlah atraksi masih terekam dalam ingatan saya, misalnya pawai budaya. Pawai yang diikuti semua komunitas adat peserta gelar budaya ini, bermula dari Jalan Jenderal Sudirman di depan Monumen Mandala, memutar ke Jalan Haji Bau melewati rumah pribadi Wapres Jusuf Kalla, belok kanan ke Jalan Penghibur, dan kembali ke Monumen Mandala melalui Jalan Amannagappa.

Pawai itu digelar pada Selasa (24/7) sore dengan iringan drumband Saka Bhayangkara Makassar, Gendang Pakanjara dan Atraksi Paraga dari Makassar, Becak Pakaian Adat dari 20 daerah di nusantara, musik tradisional bambu dari Enrekang, paguyuban Jawa Barat, paguyuban Bali, paguyuban Sumatera Barat, dan Barongsai. Saya terlarut ikut dalam rombongan pawai itu, dan merasa mendapatkan hiburan yang cukup mengasyikkan

Selesai menyaksikan pawai budaya, saya lantas mengunjungi area kegiatan yang terletak di halaman monumen. Di halaman itu terdapat stan-stan pameran yang diperuntukkan bagi para komunitas adat dan daerah yang menjadi peserta untuk menyajikan kekhasan budayanya. Selesai berkeliling sebentar saya lantas menuju panggung pertunjukan dimana akan digelar pentas seni.

Malam itu, dipertunjukkan pertunjukan sendratari spiritual "Songkobala" dari Makassar yang dibawakan oleh Makassar Art dan Yayasan Angging Mammiri (Yama), tari Serampang 12 dari Kesultanan Serdang, kolaborasi musik tradisional bambu dari Pemerintah Kabupaten Enrekang dan tarian Belian Bawo dari Kutai Timur.

Dari keempat pertunjukan seni ini, tarian Belian Bawo terasa begitu memukau. Konon tarian ini merupakan salah satu ritual masyarakat suku Dayak Benuaq yang bertujuan untuk menolak penyakit, mengobati orang sakit, membayar nazar dan lain sebagainya. Setelah diubah ke dalam format tari-tarian, ritual ini pun sering disajikan pada acara-acara penerima tamu dan acara kesenian lainnya.

Sebagai orang Sulsel, saya mendapatkan tambahan pengetahuan tentang kebudayaan komunitas adat yang dimiliki bangsa kita. Makanya, kegiatan seperti ini meski kurang terpublikasi karena minimnya promosi, dapat menjadi salah satu agenda dalam upaya pelestarian budaya komunitas adat. Dalam buku panduan acara disebutkan, kegiatan ini memang bertujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap komunitas adat. Di samping itu, juga untuk memantapkan eksistensi dan peran komunitas adat sebagai pelestari budaya lokal, dan untuk pengembangan objek dan kegiatan wisata budaya. Tapi bagi saya sebagai penonton, acara ini lebih bermakna sebagai cara untuk menumbuhkembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan pemahaman keberagaman budaya Indonesia.

Sayangnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ini sepertinya kurang promosi. Hal itu terlihat dari minimnya pengunjung dan peserta. Di arena pameran, misalnya, beberapa stan terlihat kosong. Adapula stan-stan yang ada hanya dikunjungi oleh sedikit orang.

Atau siapa tahu perhatian warga Makassar memang sedang tersita oleh hal lain yang "lebih penting"?(p!)

Komentar :

02-08-2007

Dari : arif | [aco-bugis@yahoo.com](mailto:aco-bugis@yahoo.com)/[aco\\_paotere@plasa.co](mailto:aco_paotere@plasa.co)

masalah promosi mi sedeng, ahkkkkkkkkkkkk, itu cuma ngelesnya aja dari pihak pemerintah bilang aja tidak profesional gitu loh, tabe cess agak emosi nih, padahal acara ini diliput loh sama stasiun tv swasta nasional, god damn jujur nih cikali sbg anak kota makassar sy sempat malu juga krn sy liat di tv org yg nonton sedikit banget, ternyata thn sebelumnya acara seperti ini sdh digelar di 2 propinsi yaitu bali dan jogja, dan tentunya reson warga di 2 propinsi tersebut lebih meriah dibanding disini cess, klo berani dan ada kemauan kenapa (semoga birokrasi kota makassar atau pejabat tinggi sul-sel ada yg baca ini) EO tdk dikasi ke EO yg profesional, atau pan-pelnya anak mahasiswa pariwisata, seniman muda biar lebih kreatif dan dinamis, dan klo promosi jg harus habis-habisan sebagai langkah antisipatif terhadap warga makassar kurang apresiatif dgn hal2 budaya. sorry agak emosi nih komen nya, tapi mudah-mudahan jadi pengalam tuk festival budaya selanjutnya. sorry klo ada salah kata, "tabe semua di cikali"

31-07-2007

Dari : :: ihs :: | [ihsyah@gmail.com](mailto:ihsyah@gmail.com)

Saya sepekat dengan kalimat ini, "berperilaku lokal berwawasan global." Mari jadikan bahan kampanye gerakan "sadar budaya (saya)." Merdeka!

30-07-2007

Dari : Wan Ancha | [lapagalla@yahoo.co.id](mailto:lapagalla@yahoo.co.id)

Minim Penonton adalah hal yang biasa yang terjadi dalam acara-acara pagelaran budaya sekarang ini. Bukan masalah Promosi, tapi sekarang kita sekarang sudah terjebak oleh budaya-budaya luar yang semakin mendominasi bangsa ini, kita sebentar lagi akan kehilangan identitas diri kalau kita tidak melestarikannya. Coba saja kita bandingkan penonton acara konser-konser musik, klub-klub malam, sejenisnya tanpa promosi pun orang-orang akan mencari untuk menontonnya...beberapa tahun ke depan kita tidak bisa bedakan Timur dan Barat sebentar lagi akan berbaur...waspadalah !!! Jadi kawan-kawanku marilah kita menjaga budaya kita, tak ada lagi yang bisa dibanggakan kecuali budaya kita, mereka telah menguasai semuanya. Mari kita "Berperilaku lokal namun tetap berwawasan global" ...merdeka..! !

30-07-2007

Dari : BAD NAME | [lakipadada@yahoo.co.id](mailto:lakipadada@yahoo.co.id)

HARUSNYA KEGIATAN INI DIPUSATKAN DI MALL ATAU BIOSKOP YANG ADA DI MAKASSAR....

([www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id))

Empat Daerah Meriahkan Pertunjukan Tari  
(26 Jul 2007, 53 x , Komentar)  
Dari Gelar Budaya Komunitas Adat (1)

Riuh-rendah tepuk tangan penonton mengiringi suara Master of Ceremony (MC) yang berkerudung tersebut. Maklum, petang setelah pameran Gelar Budaya Komunitas Adat pada 24 Juli lalu diresmikan, malam itu juga empat tarian dari berbagai provinsi langsung ditampilkan. Laporan : Dian Muhtadiah

Antusiasme sekitar 500 penonton langsung terlihat ketika tari-tarian itu digelar pada pukul 20.25 Wita. Satu per satu penari itu keluar dari balik panggung. Berusaha mencuri perhatian penonton, mereka menonjolkan keunikan dari daerah masing-masing.

Yang pertama tampil, tari Melayu dari Kesultanan Serdang. Tari Minang dan Sarampan 12, demikian dua pertunjukan tari yang dimainkan sepasang bujang dan dara. Musik melayu mengiringi ketika para penari itu berleagak-leenggok. Simbolisasi gerak tangan, hentakan kaki, dan sapu tangan yang digenggam bersama, seolah memaknai arti dari tarian ini. Memang, tari ini berkisah dua anak muda, yang saling berkenalan, berteman, jatuh cinta, dan berikrar untuk menikah. Sebuah karya apik dari almarhum Guru Syauti, seniman dari tanah Melayu.

Disusul pentas kedua, tari Pajaga-jaga dari Enrekang. Kurang lebih dua puluh pelakon lelaki menari di atas panggung dengan kostum hitam. Keris di tangan diacung-acungkan, kemudian mereka membentuk barisan yang berjejer rapi. Saling berhadapan, sesekali saling membelakang lalu membentuk satu bujur haluan.

Tarian ini memaknai arti dari sebuah keamanan yang hanya dapat tercipta dari kebersamaan. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba seorang anak perempuan berteriak di antara penonton, "Sahuuur...sahuur...!" yang kontan langsung disambut gelak tawa penonton. Ternyata, perhatian anak ini tertuju pada adegan hentakan kaki dari penari-penari itu. Maklum, bunyinya bersamaan dengan bunyi gendang bertalu-talu dalam tarian tersebut.

Dilanjutkan pertunjukan ketiga, sebuah persembahan dari YAMA (Yayasan Anjing Mammiri) dan Makassar Art. Tari Salamaki Rilota, sebuah tari yang berkisah tentang arti keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan. Diawali dengan narasi berbahasa Makassar, narator tersebut bercerita tentang bumi yang mulai tak bersahabat dengan manusia. Kondisi tersebut ditandai dengan bencana yang terjadi di mana-mana. Visualisasi gerak yang didukung sekitar dua puluh pemain lelaki dan wanita ini juga ditunjang dengan video recorder yang terpampang dalam screen panggung. Dalam layar panggung tersebut, disajikan suatu rentetan peristiwa bencana yang pernah terjadi, mulai gempa tsunami, angin puting beliung, hingga banjir Sinjai.

Ternyata, malam tari itu juga makin dimeriahkan dengan penampilan tari Balian Bao dari Sendawar, sebuah kampung yang berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tari ritual ini berkisah tentang alternatif penyembuhan cara tradisional. Maklum, fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit di Sendawar masih terbilang jauh dari perkotaan. Tari yang tercipta di kampung yang jaraknya 300 km dari kota Samarinda ini diawali dengan empat orang lelaki yang menari sambil memegang ikatan daun. Tiba-tiba, muncul dua wanita yang memboyong seorang lelaki tua. Lelaki ini segera direbahkan. Keempat penari tadi mengitarinya dengan iringan doa-doa disertai kibasan daun tersebut. Penampilan ini makin semarak dengan dukungan alunan gendang yang bertalu-talu. Konon, gendang tersebut terbuat dari kulit binatang, yakni kulit komodo. "Saya senang, besok malam mau nonton lagi," kata Adi, salah seorang pengunjung.

Malam itu, penonton tidak saja terpuaskan dengan kehadiran para penari tersebut yang datang jauh-jauh dari berbagai pelosok negeri ini. Ternyata, tarian khas daerah tidak saja memiliki daya pikat sendiri, namun sarat makna. Bagi pengunjung yang ingin mengetahui langsung kekayaan adat-istiadat bumi Indonesia, dapat juga mengunjungi 18 stan dan satu ruangan (meeting room). Di sana, berbagai hasil kerajinan seni anak bangsa yang mewakili 604 suku di Indonesia, tersaji memikat. (bersambung)

Dialek Daerah Warnai Peserta Pameran  
(27 Jul 2007, 138 x , Komentari)  
Dari Gelar Budaya Komunitas Adat (2-Selesai)

"Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu itulah Indonesia..." Penggalan lagu Dari Sabang sampai Merauke ini cocok dengan jejeran 18 stan di arena pameran budaya di Monumen Mandala. Laporan : DIAN MUHTADIAH

Maklum, stan-stan yang berada di monumen pembebasan Irian Barat tersebut, berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Suasana siang itu masih terlihat lengang. Meski gemuruh sound vokal "Jadikan Aku yang Kedua" milik penyanyi Astrid, dinyanyikan seorang pengunjung di arena monumen itu. Beberapa peserta pameran tampak duduk santai. Di antara mereka, ada yang saling mengunjungi. Bahkan, transaksi jual beli souvenir kerap terjadi. Ternyata, sesama peserta pun saling mengagumi kekhasan daerah masing-masing.

Di sayap kanan tugu monumen Mandala, tepatnya di stan kedua, tergantung sebuah kostum ondel-ondel. Pakaian khas adat Betawi ini dilengkapi pula dengan topeng jingga dan kembang Mayung, kembang yang mencuat di kepala si ondel-ondel. Idi Kushadi, penjaga stan asli Betawi ini juga menunjukkan aneka gasing, sebuah permainan tradisional. Gasing-gasing ini terbuat dari kayu mahoni maupun pohon Sawo. "Gasing ini dipakai buat aduan, satu tim bawa lima orang, yang paling lama muternye, dia nyang menang," katanya dengan logat Betawinya yang kental.

Bentuk gasing ini juga beragam, ada yang model jantung, monos maupun si denok. Ternyata, untuk mengetahui lama tidaknya gasing itu berputar, tergantung rata tidaknya tanah di bawahnya. "Ya, paling lama bisa satu menitlah," tukas Idi.

Beralih ke stan Banten, provinsi yang terkenal dengan suku Badui-nya ini tak kalah apik dengan stan-stan di sebelahnya. Di meja yang sederhana, terpapar berbagai khas handycraft suku Badui. Semisal Lomar, ikat kepala pria warga Badui. Koja, tas yang terbuat dari anyaman kulit kayu Teureup yang berwarna cokelat. Atau celana Komprang dan baju Kampret, pakaian tradisional pria Badui. "Ini ma murah tasnya, cuman 25 ribu," terang Akang, lelaki penjaga stan ini.

Tiga baris dari stan Banten, sebuah stan yang agak menyolok juga terlihat berdiri. Di depannya, gapura yang terbuat dari kain merah itu bertuliskan 'Kalimantan Timur'. Stan ini cukup ramai pengunjung jika dibanding dengan stan lain di sekitarnya. "Tas harga ike limak puluh..." terang Kristina kepada Bonika, putrinya, ketika seorang pembeli bertanya tentang harga sebuah tas manik-manik yang terpajang. Kristina menuturkan, jika itu bahasa Tunjung, asal Kutai Barat, Kalimantan Timur. "Artinya tas ini seharga lima puluh ribu," katanya tersenyum.

Sambil mempromosikan barang bawaannya, Kristina bercerita jika perjalanannya ke kota Anging Mammiri ini menempuh waktu yang cukup lama. Bersama lima kru, mereka meninggalkan Sendawar, sejak 22 Juli lalu. Sendawar merupakan sebuah kampung di Kutai Barat, 300 km atau waktu tempuh 9 jam menuju kota Samarinda.

Di stan ini pula, terdapat berbagai perlengkapan tradisional seperti Tamen, alat perang untuk menangkis serangan musuh. Selain itu ada pula baju adat Ulap Doyo, pakaian adat untuk perkawinan. Topeng Hudog, Seraung, Topi Kenyah, bahkan Mandau, senjata tradisional suku Dayak, juga ada di sini. Aneka peralatan tradisional itu dipatok mulai Rp2 ribu hingga Rp1 juta. "Sayang, saya tak bawa banyak duit, harganya relatif murah," tutur Ika, salah seorang pengunjung.

Tak kalah uniknya, di stan Irian Jaya, terdapat Koteka yang terbuat dari buah Labu, dengan ukuran 25-30 cm. Koteka yang dalam bahasa Dani disebut 'Holim' ini berfungsi untuk menutup aurat/alat vital pria, juga untuk menyimpan benda-benda ringan berukuran paling kecil seperti jarum maupun anting-anting.

Setelah puas menjajaki berbagai stan ini, pengunjung pun masih bisa menikmati ruang pameran "Meeting Room". Ruangan ini juga menampung berbagai koleksi handycraft dari Provinsi Riau, Palembang, Yogyakarta, maupun Sulsel. Bedanya, di meeting room, koleksi ini tidak dijual. (\*)

([www.tribun-timur.com](http://www.tribun-timur.com))

Sonun 23-07-2007

#### Gelar Budaya Komunitas Adat di Monumen Mandala

Makassar, Tribun -- Sejumlah kegiatan kebudayaan dan pagelaran seni yang menampilkan keragaman adat dan etnis Nusantara akan menyemarakkan event Gelar Budaya Komunitas Adat di Monumen Mandala, Makassar, 24 Juli besok. Acara yang terbuka untuk umum tersebut rencananya dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Amin Syam, bertepatan dengan pawai budaya yang akan diikuti ratusan peserta yang merupakan utusan beberapa provinsi di Indonesia.

Kegiatan budaya yang dihelat hingga 26 Juli mendatang juga dimeriahkan dengan pameran dan bazar aneka kerajinan tangan nusantara, dengan pertunjukan panggung terbuka yang menampilkan pagelaran seni, hingga pemutaran film. Rencana kegiatan akbar tersebut dikatakan pimpinan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Depbudpar, Sulistyio Tirtokusumo, bersama Ketua panitia Isti Asih, dalam konferensi pers di Makassar, Minggu (22/7). agenda: 1 Monumen Mandala, 24 Juli: \*Pawai budaya (15.30 wita) \*Pameran dan bazar (09.00-22.00 wita) \*Pagelaran seni (20.00 wita) 2 Monumen Mandala, 24-25 Juli: Pemutaran film 3 Hotel Singgasana, 26 Juli: \*Dialog Budaya \*Pemutaran film (cr5)

Peran komunitas adat dalam pelestarian alam  
Setyo Rahardjo - 1 Aug 2007 14:56

Komunitas adat dengan sistem pengelolaan tradisional atau kearifan tradisional ternyata memiliki peranan sangat penting dalam menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan. Bahkan dalam kehidupan keseharian, sistem pengelolaan lingkungan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat terbukti mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Pusat Pengkajian Antropologi, Fisipol Universitas Indonesia, DR Suraya Afiff, dalam sebuah dialog yang diselenggarakan pada Gelar Budaya Komunitas Adat di Makassar pada Rabu (25/7). Acara Gelar Budaya Komunitas Adat sendiri berlangsung dari tanggal 24 - 26 Juli 2007. "Banyak pengamat menilai beberapa sistem pengelolaan tradisional terbukti mempunyai nilai penting dalam konteks pelestarian alam dan lingkungan, termasuk dalam konteks sosial, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada hasil-hasil pertanian," katanya. Ia juga menjelaskan bahwa praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas adat di wilayah Indonesia dinilai selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan alam yang lestari dan berkelanjutan. Apalagi hal ini didukung oleh kebijakan adat yang secara turun-temurun sudah mengatur bahwa pengelolaan dan pemanfaatan alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan. Banyak komunitas adat yang memang dalam kehidupan sehari-hari melarang anggota kelompoknya untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Ia mengambil contoh Kebun Agroforest Tembawang di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu tempat dimana kebun itu dikenal luas sebagai habitat komunitas Dayak yang tetap mempertahankan pohon-pohon hutan alam terutama yang bernilai penting. "Setelah ladang tidak lagi digunakan, masyarakat setempat melakukan pembudidayaan dengan berbagai jenis tanaman yang berasal dari hutan alam sekitar maupun tanaman yang bukan asli hutan misalnya tanaman karet," katanya. Dari kegiatan komunitas adat di sana, maka saat ini Tembawang mempunyai nilai ekonomis penting bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kepemilikan Tembawang umumnya oleh seluruh anggota keluarga yang diturunkan secara turun-temurun, maupun pribadi atau kepemilikan bersama masyarakat setempat. Melihat potensi dari komunitas adat untuk berperan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan tersebut, maka pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama agar mereka dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan kearifan yang mereka miliki. Apalagi selama ini di berbagai daerah dapat ditemukan begitu banyak kearifan tradisional yang ternyata justru mampu menjaga keberlanjutan akan kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.

Pada saat yang sama, pakar Antropologi Budaya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Heidy S Ahimsa Putra, mengakui adanya kesulitan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya, baik tradisional maupun modern ke dalam kehidupan masyarakat menurut cara yang mereka anut. "Aktualisasi nilai-nilai budaya, tradisional maupun kontemporer dalam kehidupan yang tradisional maupun modern diakui tidak selalu berlangsung dengan mudah dan lancar," ujarnya. Kesulitan itu diakuinya karena semua ditentukan oleh jenis atau isi nilai-nilai budaya yang akan diaktualisasikan itu, serta jenis ajang (*setting*) sosio-kultural dari aktualisasi nilai-nilai budaya itu sendiri. Ini juga termasuk bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai budaya itu dalam bersentuhan dengan alam, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya di luar komunitasnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar dalam upaya aktualisasi nilai-nilai budaya lokal tradisional maupun kontemporer dalam kehidupan sehari-hari harus memilih mana nilai-nilai budaya yang dapat menimbulkan masalah atau yang tidak. "Jika suatu nilai budaya yang hendak diaktualisasikan itu tidak akan menimbulkan masalah, maka bisa atau layak untuk disosialisasikan dan disebarluaskan," tegasnya. Namun jika berpotensi menimbulkan masalah, hendaklah dilakukan reinterpretasi yang tepat dan cerdas sehingga menimbulkan masalah sosio-kultural yang serius dalam kehidupan masyarakat.

### C. Kesan dan Pesan dari panitia pelaksana

Dari 31 orang yang mengisi form kesan dan pesan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Kesan

Pada umumnya kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat secara keseluruhan sangat positif dan berlangsung baik meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain : kepanitiaan secara umum kurang terkoordinasi, baik pusat maupun panitia daerah dan Event Organizer (EO) ; kurang terpublikasi sehingga gaungnya kurang terdengar khususnya pengunjung pameran; tempat pameran kurang representatif (khususnya in door terlalu sempit) dan belum tertulis " Pameran " (yang ada tertulis " Meeting Room" ). Untuk Kegiatan yang perlu dibuat dalam kegiatan Gelar Budaya berikutnya adalah kegiatan Dialog sangat positif sebagai salah satu cara mencari format aktualisasi nilai-nilai budaya komunitas adat yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Namun kegiatan Gelar kurang mendapat respon dari masyarakat maupun anak-anak sekolah, padahal moment tersebut sangat bagus untuk mengenal lebih banyak keanekaragaman budaya Indonesia dan sebagai ajang pelestarian/peningkatan nilai-nilai luhur budaya lokal yang ada pada komunitas adat, serta sebagai promosi obyek kegiatan wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Pesan

Perlu meningkatkan informasi dan publikasi kepada masyarakat umum, agar gaung dan pesannya sampai kepada masyarakat luas sebagai obyek kegiatan ini. Selain itu perlu meningkatkan koordinasi dan terus memantau perkembangan setiap bidang secara intensif untuk meminimalisasi hambatan-hambatan penyelenggaraan kegiatan, dan meningkatkan SDM baik di bidang administrasi maupun teknis. Sedangkan panitia seharusnya mengerti tugas dan fungsinya duduk dalam kepanitiaan dan melaksanakan tugas dan fungsinya itu dengan baik. Lokasi sekretariat sebaiknya ditempatkan satu area dengan penginapan peserta untuk mempermudah urusan pengadministrasian.

### D. EVALUASI

Dari 12 orang yang mengisi form evaluasi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

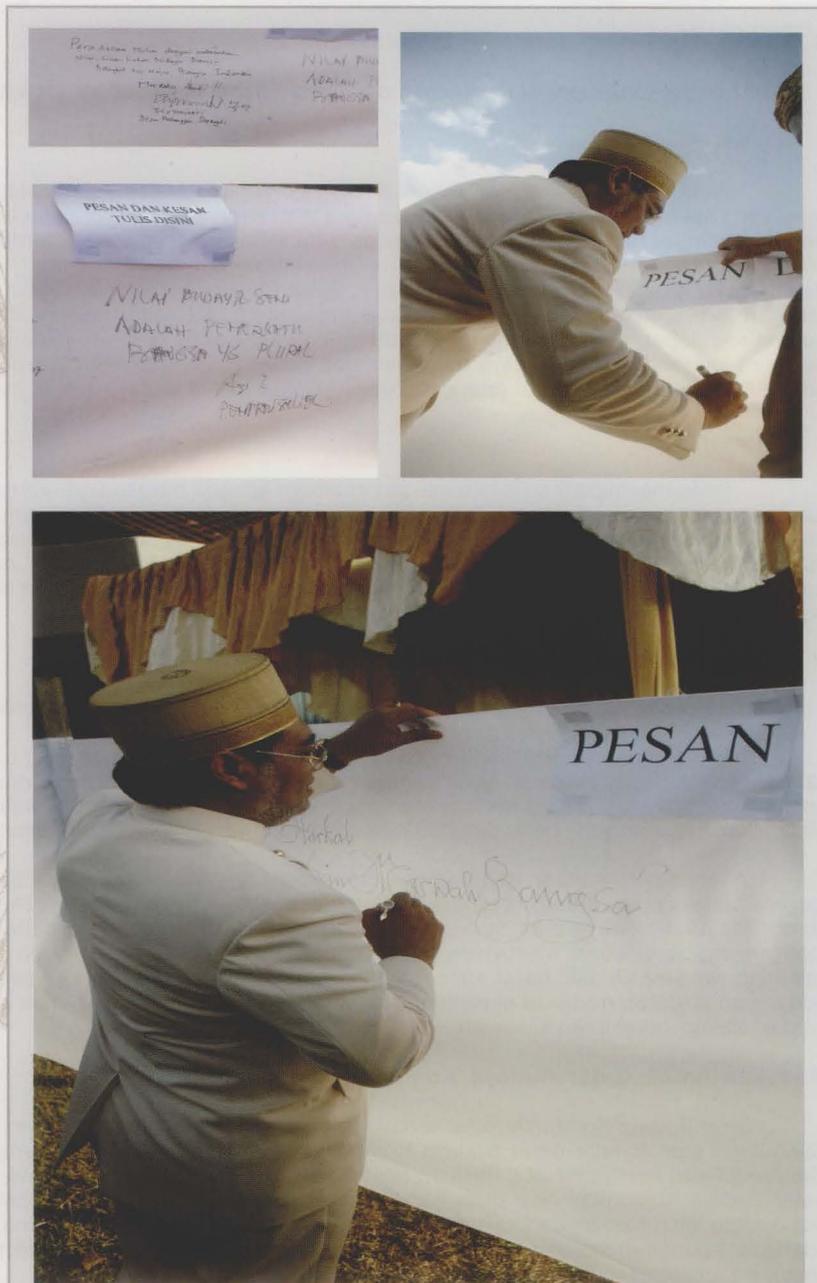
Pada umumnya pelaksanaan kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat baik, hal tersebut berkat dukungan dan kerjasama panitia yang sudah maksimal. Kegiatan Gelar Budaya Komunitas Adat masih perlu dilakukan, hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut yang menarik dan penting adalah Dialog (materinya bagus) dan Pergelaran Kesenian, sedangkan kegiatan yang perlu dipertahankan adalah Dialog, Pergelaran Kesenian dan Pameran.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pameran, Pergelaran Kesenian, Pawai Budaya baik dan kegiatan yang sangat baik adalah Dialog, parade budaya lintas etnik, kunjungan ke komunitas adat tertentu yang terdekat, lomba dengan tema kepedulian masyarakat terhadap komunitas adat ( karya tulis, surat, diskripsi singkat), festival makanan sehari-hari komunitas adat atau hasta karya khas mereka, mengunjungi obyek-obyek wisata yang produk budaya komunitas adatnya masih dijaga keasliannya, perpanjangan waktu dialog, pergelaran kesenian yang masih asli, bazar kuliner, dialog yang diperluas pesertanya, pementasan Bissu pada pergelaran kesenian tahun 2008, pergelaran kegiatan tradisi di masing-masing komunitas adat, lomba pakaian adat (generasi muda), lomba tarian tradisional (generasi muda), dialog, pergelaran kesenian.

Masukan untuk Gelar Budaya Komunitas Adat berikutnya :

Gelar Budaya Komunitas Adat sebaiknya diadakan di Ibukota Kabupaten, tidak di Ibukota Propinsi; pembawa makalah sebaiknya disebutkan oleh Panitia Gelar Budaya Komunitas Adat pada suku/etnis tertentu yang memperkenalkan budaya/adat-istiadatnya ( ditentukan oleh Panitia Pusat ); Pakaian adat masing-masing suku/etnis dibawa serta agar nampak semangat "kebhinekaan" Indonesia; Gelar Budaya Komunitas Adat diadakan pada setiap tahun agar hubungan bathin kekeluargaan tetap kokoh; pembicara pada dialog diupayakan lebih banyak dari kelompok komunitas adat; adanya pergelaran musik tradisional dari masing-masing kelompok komunitas adat; arena pameran diusahakan lebih luas dan barang-barang yang dipamerkan merupakan produk komunitas adat yang belum mendapat sentuhan teknologi modern;

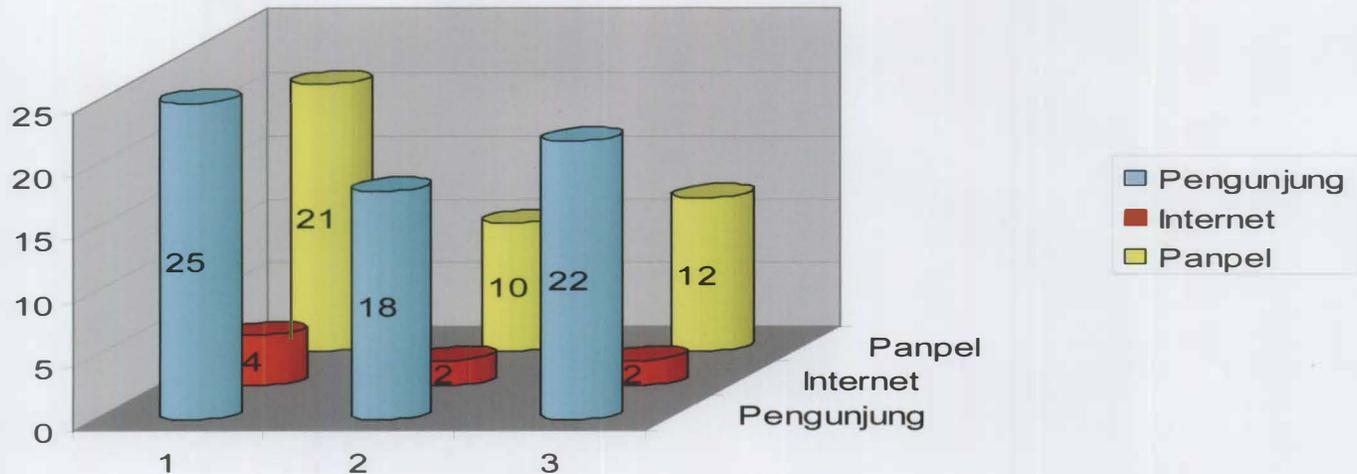
komunitas adat yang diikutsertakan, di utamakan komunitas adat yang masih tradisional dan tempat tinggalnya jauh dari pemukiman penduduk (terpencil); kalau bisa Gelar Budaya Komunitas Adat berikutnya di kawasan Kalimantan, karena letak geografis persis dititik sentral di kepulauan NKRI yang kita cintai ini; dilaksanakan di "perkampungan " komunitas adat yang bersangkutan/tuan rumah; materi dialog dirumuskan kembali dan diupayakan dapat menyentuh permasalahan yang dihadapi komunitas adapt; jenis kegiatan dipertahankan. Pameran agar dipersiapkan dengan baik, bertujuan mengenalkan komunitas adat ke khalayak : kuliner, pakaian adat, kerajinan tangan, film tentang kehidupan sehari-hari atau upacara tradisional; mengunjungi obyek-obyek wisata yang produk budaya komunitas adatnya masih dijaga keasliannya; agar materi dialog dapat difokuskan pada satu substansi permasalahan kebudayaan nasional, atau dengan kata lain penetapan tema dialog tertuju pada satu permasalahan; agar pada pelaksanaan pawai sedapat mungkin disinkronkan dengan materi pelaksanaan festival Keraton; dibutuhkan sebuah strategi agar pelibatan seluruh komunitas adat se Indonesia dapat dimaksimalkan; Untuk pameran agar ruangnya lebih besar dari yang sudah lalu; kegiatan kesenian supaya mengundang tim kesenian dari propinsi lain selain propinsi tuan rumah; peserta yang diundang pada tahun 2007 ini kembali diundang ditambah dari komunitas adat lain yang mempunyai komitmen terhadap pelestarian budaya dan kesenian tradisional; kami ( Syamsuddin dan Saidi Puang Toa) siap ikut pada Gelar Budaya Komunitas Adat tahun 2008 dan menampilkan tari Bissu jika diundang kembali; tingkat pelaksanaan acara pada tahun-tahun mendatang sebagai media pelestarian adapt; perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah terutama UPT Budpar khususnya keterpaduan program dan kegiatan yang saling menunjang antar Pusat dan Daerah, dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan Gelar Budaya Komunitas Adat; pada umumnya gelar adat yang sudah dilaksanakan cukup baik dan karena itu tetap dipertahankan pelaksanaannya, hal ini terasa dalam rangka pembinaan dan pelestarian kebudayaan daerah; sebagai saran : usahakan dalam kegiatan dapat mengakomodir daerah ( komunitas adat yang ada di Nusantara agar satu sama lain saling mengenal adat istiadat / kebudayaan yang beragam; komunitas adat Toraja, Komunitas adat Bugis Makassar; komunitas adat Bugis; dan komunitas adat mandar.



## DATA PROSENTASE JUMLAH RESPONDEN

No.	Katagori	Jumlah	Prosentase
1	Pengunjung	65	56.03%
2	Internet	8	6.90%
3	Panpel	43	37.07%
		116	100.00%

### DATA KESAN DAN PESAN GELAR BUDAYA KOMUNITAS ADAT TAHUN 2007 DI MAKASSAR



DIREKTORAT KEPERCAAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : Tribun Timur  
 2. Tgl. Bln. Terbit : Rabu, 25 Juli 2007.  
 3. Halaman/Kolom : 11/1-3  
 4. Klasifikasi :

## Komunitas Adat Berbagai Provinsi Pawai di Makassar

**MAKASSAR, TRIBUN** - Sejumlah provinsi seperti Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulsel, DKI Jakarta, Bali, dan beberapa provinsi dan daerah lainnya mengukuhkan delegasi dalam pawai budaya dalam Gelar Budaya Komunitas Adat, di Monumen Mandala, Makassar, Selasa-Kamis (24-26/7).

Tiap provinsi menampilkan baju, kendaraan, dan tarian khasnya. Kalimantan Timur (Kutai Barat), misalnya, membawakan *Tari Baneng* yang merupakan tarian yang dipakai masyarakat sekitar untuk menyembuhkan orang sakit. Toraja, Sulsel, menampilkan tarian *Pogallo*. Dirjen Nilai Seni dan Budaya,

Mukhlis Paeni, mengatakan, tahun 2008 mendatang akan dicanangkan sebagai tahun yang besar, karena merupakan tahun pembangunan dan kebangkitan budaya Indonesia yang ditandai dengan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional.

Selain itu, di tahun itu juga kebudayaan dan pariwisata tiap daerah akan dijadikan sebagai sumber ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan, para kelompok masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan dan meramaikan tempat pariwisatanya masing-masing sebagai modal masyarakat.

Namun tidak berarti menjual

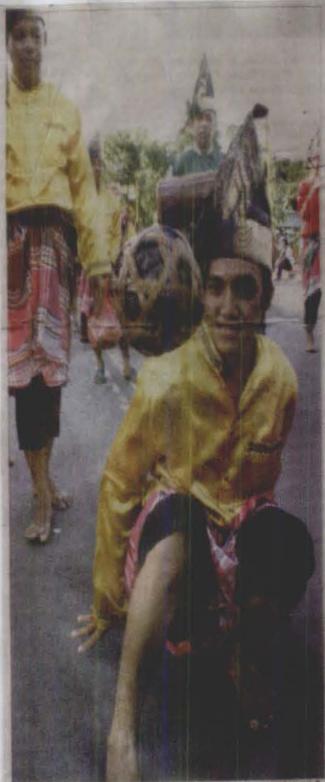
harakat dan marobot bangsa. Selain menampilkan pawai tiap provinsi dan daerah juga ada pameran khas tiap daerah.

Kegiatan yang diadakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ini turut dihadiri Dirjen Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sulistyo Tirto Kusumo, Asisten I Pemprov Sulsel Saleh Rajab, serta puluhan perwakilan provinsi, dan daerah masing-masing.

Hadir di antara kegiatan ini juga seorang *bisu* (pinang mato), Saidi, yang merupakan generasi kelima dari Kabupaten Pangkep. Saat ini jumlah *bisu* sekitar 20-an, dan tugasnya menjadi penghulu atau pelaksana upacara adat. (er7)

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : *Ujungpandang Ekspres*
2. Tgl. Bln. Terbit : *Rabu, 25 Juli 2007.*
3. Halaman/Kolom : *Hal 1/4-5, sambutan hal 7/6*
4. Klasifikasi :



KOMUNITAS ADAT Pembukaan Budaya Komunitas Adat Ke-3 di Makassar, Selasa (24/7) kemarin.

## Budaya Komunitas Adat Digelar

MAKASSAR, Upeks—Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan gelar Budaya Komunitas Adat ke-3 di Makassar. Ke-

giatan ini rencananya akan berlangsung selama Tiga hari terhitung tanggal 24 Juli hingga 26 Juli 2007. Menurut Ketua Panitia, Jetaasih kegiatan tersebut akan dihadiri ra-

tujuan komunitas adat dengan rangkaian kegiatan Pawai Budaya, Pagararan Seni, Pameran dan Dialog Budaya. Dialog Budaya itu mengangkat tema 'Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Budaya Bangsa'.

Pihaknya juga menjelaskan tujuan kegiatan ini tentu saja untuk memantapkan eksistensi dan peran komunitas adat sebagai pelestarian budaya lokal, meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan komunitas adat dan mendukung pengembangan objek kegiatan wisata budaya. (aniyok/C)

## DIREKTÓRAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : *Pajar*
2. Tgl. Blt. Terbit : *Rabu, 25 Juli 2007.*
3. Halaman/Kolom : *25/2-3, sambutan hal 35/*
4. Klasifikasi :



PERGELARAN BUDAYA. Karnaval menampilkan baju adat daerah masing-masing etnis di Pergelaran Budaya 2007, di Monumen Mandala, Selasa, 24 JULI.

## Tampilkan Baju Adat di Karnaval

### Puluhan Etnik Kumpul di Makassar

MAKASSAR — Puluhan etnik dari 33 daerah di Indonesia, yang diwakili masing-masing tokoh adat, berkumpul di Monumen Mandala, Selasa petang kemarin.

Dalam Pergelaran Budaya 2007, yang diselenggarakan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kontingan dari daerah membentuk karnaval dengan menggunakan kendaraan becak hias. Mereka melintasi sepanjang Jl Jenderal Sudirman, dan memperlihatkan kekayaan budaya masing-masing etnik, melalui atraksi menukai di hadapan undangan dan penonton.

Peserta menggunakan baju adat daerahnya, dan diarak sepanjang depan Monumen Mandala. Tak kalah juga Makassar, kontingan Sulsel itu, memperkenalkan tari pa'raga, baju-baju adat serta seni etnik Tionghoa yakni, Barongsai dari Vinara Girinaga. Bahkan lebih kaya dengan pentas atraksi perkusi (gendang).

Setiap pemertanian yang berdurasi lama hingga 10 menit kemarin, dipandu kelompok Sandiwara Perti Puang, dengan

pyakkecalanyangkhas. Selain Makassar, kontingan Sulsel dilengkapi atraksi tari perang dan pentas suling bambu, asal Enrekang. Ada juga Tana Toraja, serta suku Kajang. Hadir juga menjadi penyemarak, atraksi Ogoh-Ogoh dari Betawi, tari-tarian Kutai, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali.

Atraksi masing-masing etnik, pada pergelaran budaya 2007 kemarin, memukau pengunjung dengan keunikan daerahnya. Turut hadir menyaksikan Wakil Walikota Makassar, A Herry

Iskandar, Kadis kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Syaiban Solihan, dan Gubernur Sulsel diwakili Asisten I Saleh Radjah

Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Dr Mukhlis Paeni, mengatakan keanekaragaman etnik itu bisa menjadi perekat, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Masyarakat bisa menikmati kekayaan etnik di Indonesia. Keragaman itu akan mempererat seluruh masyarakat, dan bisa saling mengenali kebudayaan masing-masing," ujar Mukhlis. (hap)

## DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : **PAJAR**
2. Tgl. Bln. Terbit : **Juni, 27 Juli 2007.**
3. Halaman/Kolom : **Hal 29 kol 2-4, tambahan hal 35 kol. 3-7.**
4. Klasifikasi :

Dari Gelar Budaya Komunitas Adat (2-Selesai)

# Dialek Daerah Warnai Peserta Pameran



TAMPILKAN KERAJINAN. Peserta salah satu daerah menampilkan industri kerajinan tangan yang dipamerkan pada gelar budaya komunitas adat, kemarin.

"Dari Sebang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu leluah Indonesia..."

### LAPORAN ► DIAN MUHTADIAN

PENGALAMAN lagu Dari Sebang sampai Merauke ini cocok dengan jejeran 18 stan di arena pameran budaya di Monumen Mandala. Maklum, stan-stan yang beranda di kawasan pemukiman Irian Barat tersebut, berasal dari berbagai provinsi di Kalimantan. Suasana siang itu masih terlihat legam. Meski gemuruh suara vokal "Jadikan Alas yang Kedua" milik penyanyi Astrid, dinyanyikan oleh pengunjung di arena monumen itu. Beberapa peserta pameran tampak duduk santai. Di antara mereka, ada yang saling mengobrol. Bahkan, omongannya belah sepuasnya kerap terjadi. Ternyata, sesama peserta pun saling mengagumi

kekhasan daerah masing-masing.

Di sayap kanan juga munculan Mandala, tepanya di stan kedua, tergantung sebuah kostum ondel-ondel. Pakain khas adat Betawi ini dilengkapi pita dengan tepung jingga dan kembang Mayang, kembang yang mencuat di kepala si ondel-ondel. Idi Kusabadi, penaja stan asli Betawi ini juga menunjukkan aneka gasing, sebuah permainan tradisional. Gasing-gasing ini terbuat dari kayu mahoni maupun pohon Sawo.

Gasing ini dipakai buat aduan, satu tim bawa lima orang, yang paling lama mainnya, dia menang. kataannya dengan logat Betawinya yang kentel. Bentuk gasing ini juga beragam, ada yang model jantung, motos maupun si bebek. Ternyata, untuk mengetahui lama tidaknya gasing itu berputar, tergantung rata tidaknya tanah di bawahnya. "Ya, paling lama bisa satu menitlah," tukas Idi.

## Koteka dari Buah Labu

### ► DIALEK ...

Beralih ke stan Banten, provinsi yang terkenal dengan suku Badui-nya ini tak kalah apik dengan stan-stan di sebelahnya. Di meja yang sederhana, terpapar berbagai khas handycraft suku Badui. Semisal Lomar, ikat kepala pria warna Badui. Kaja, tas yang terbuat dari anyaman kulit kayu Tureup yang berwarna cokelat. Atas celana Komprang dan baju Kampret, pakaian tradisional pria Badui. "Ini murah tasnya, cuma 25 ribu," terang Akang, lelaki penjaja stan ini.

Tiga baris dari stan Banten, sebuah stan yang agak menyolok juga terlihat berdiri. Di depannya, gapura yang terbuat dari kain merah itu bertuliskan 'Kalimantan Timur'. Stan ini cukup ramai pengunjung jika dibandingkan dengan stan lain di sekitarnya. "Tas harga ike lima

puluh..." terang Kristina kepada Donika, putrinya, ketika seorang pembeli bertanya tentang harga sebuah tas manik-manik yang terpajang. Kristina memutarakan, jika itu bahasa Tanjung, asal Kutai Barat, Kalimantan Timur. "Artinya tas ini seharga lima puluh ribu," katanya tersenyum. Saphil mempromosikan barang bawanya, Kristina berverta jika perjalanannya ke kota Anging Mamairi ini menempuh waktu yang cukup lama. Bersama lima kru, mereka meninggalkan Sendawar, sejak 22 Juli lalu.

Sendawar merupakan sebuah kampung di Kutai Barat, 300 km atau waktu tempuh 9 jam menuju kota Samarinda. Di stan ini pula, terdapat berbagai perlengkapan tradisional seperti Tamen, alat perang untuk menangkis serangan musuh. Selain itu ada pula baju adat Ulap Doyo, pakaian adat untuk

perkawinan. Topeng Hadog, Semang, Topi Kanyah, bahkan Mandau, senjata tradisional suku Dayak juga ada di sini. Aneka peralatan tradisional itu dipatok mulai Rp1 ribu hingga Rp1 juta. "Sayang, saya tak bawa banyak diah, harganya relatif murah," tutur Ika, salah seorang pengunjung.

Tak kalah unik-nya, di stan Irian Jaya, terdapat Koteka yang terbuat dari buah Labu, dengan ukuran 25-30 cm. Koteka yang dalam bahasa Dani disebut 'Holim' ini berfungsi untuk memuat surat-alat vital pria, juga untuk menyimpan benda-benda ringan berukuran paling kecil seperti jarum maupun anting-anting.

Setelah puas menjajaki berbagai stan ini, pengunjung pun masih bisa menikmati ruang pameran "Meeting Room". Ruang ini juga menampung berbagai koleksi handycraft dari

Provinsi Riau, Palembang, Yogyakarta, maupun Sulsel. Bedanya, di meeting room, koleksi ini tidak dijual. (\*)

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : PAJAH  
2. Tgl. Bln. Terbit : Minggu, 29 Juli 2007.  
3. Halaman/Kolom : 10/1-7.  
4. Klasifikasi :

## Merajut Keragaman Budaya

**B**agai untai manik yang terangkai dalam belahan nusantara, itulah Indonesia. Keekaragaman budaya yang tersebar, mampu mempersatukan nusantara yang memiliki karakter beraneka ragam. Penyatuan wilayah nusantara dengan aneka ragam budayanya, sejak dulu dirintis nenek moyang Indonesia. Sebagai pewaris, sudah sepatutnya generasi sekarang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memang patut disebut bangsa berbudaya yang mampu hidup rukun.

Salah satu elemen budaya yang diharapkan mampu menjadi tali pengikat adalah Seni. Peran seni ini, dapat digunakan sebagai sarana berekspresi untuk menjalin kebersamaan. Pekan Budaya Tradisi Nusantara di Monumen Mandala adalah bukti bahwa tradisi ini dapat mempersatukan bangsa melalui budaya.

Berbagai daerah pun terpinggil ikut andil dalam even ini. Masing-masing menampilkan seni, budaya dan keterampilan. Dari Kalimantan Selatan tampil dengan tradisi pengobatan suku Dayak, Jawa Barat dengan Calung, Bali dengan Gamelan. Begitu juga Padang, Toraja, Sulsel yang tampil dengan budaya dan kesenian khas daerahnya.

Bahkan, seni tari Barongsai juga ikut memeriahkan tradisi nusantara di kota Makassar. Mereka bersatu dan berbau dalam kebersamaan. Ini merupakan momentum yang jarang kita jumpai. Tak berlebihan bila banyak pihak yang berharap pekan budaya nusantara ini, dapat menjadi perenungan dan introspeksi diri, untuk tetap mempertahankan kesenian tradisi sebagai pemersatu dan tidak punah ditelan zaman. (twk)

Foto dan Teks : TAWAKKAL FAJAR



**MERAH PUTIH.**  
Seorang peserta karnaval dengan bendera merah putih yang dilakikan pada penutup kepala berusaha memperbaiki keah bajunya saat karnaval berlangsung.



MEMUKAU. Salah satu tarian yang dipertontonkan dalam Gelar Budaya Komunitas Adat, di Monumen Mandala.





**TERIAK.** Seorang anak berteriak dari pagar pembatas menyaksikan Atraksi masing-masing etnik yang memukau



**BECAK HIAS.** kontingan dari daerah membentuk karnaval dengan menggunakan kendaraan becak hias.



**GENDANG.** Berbagai macam gendang dari berbagai bentuk menjadi daya tarik bagi pengunjung pekan budaya tradisi nusantara.



**BATIK.** Pembuatan kain batik dapat dilihat langsung di pekan budaya tradisi nusantara.

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Nama Koran : PIAJAB
2. Tgl. Bln. Terbit : Kamis, 2 Agustus 2007.
3. Halaman/Kolom : 23/Kol. 1-3.
4. Klasifikasi :

## Spektakuler Atraksi Tari YAMA

**SPEKTAKULER.** Begitu pendapat sebagian besar pengunjung Pagelaran Seni dan Gelar Budaya Komunitas Adat 2007 yang dilaksanakan Direktorat Nilai Budaya Seni dan Film Departeman Kebudayaan dan Pariwisata RI di Monumen Mandala, 25 Juli lalu. Sejumlah tari-tarian budaya ditampilkan dalam acara itu. Di antaranya Tari Jeppeng, dari Parepare, Tari Sarampang Dua Belas dari Kesultanan Serdang, Tari Salamu Ki Rihota, dan Keseman dari Kutai Kartanegara.

Tari-tarian tersebut, ada di antaranya dipersembahkan Yayasan Anging Mamutti (YAMA) Makassar, asuhan Im Joeseef Madjed, (ki)



Pemampilan Kesenian dari Kutai Kartanegara.



Tari Sarampang Dua Belas oleh Ibu Mira dar Kesultanan Serdang, Sumatera Utara.



Tari Jeppeng dari Kota Parepare. Itu meriahkan pagelaran seni.

## PENUTUP

Kegiatan ditutup pada tanggal 26 Juli 2007 di hotel singgasana oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakilkan kepada Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan didahului oleh laporan ketua penyelenggara dan pembacaan rumusan dilaog budaya.

